Dr. Maksudin, M.Ag.

PENGEMBANGAN METODOLOGI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PENDEKATAN DIALEKTIK

PUSTAKA PELAJAR

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUNAN KALIJOGO

YOGYAKARTA – INDONESIA

PENGEMBANGAN METODOLOGI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

PENDEKATAN DIALEKTIK

Dr. Maksudin, M.Ag.

PENGEMBANGAN METODOLOGI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PENDEKATAN DIALEKTIK

PUSTAKA PELAJAR

PENGEMBANGAN METODOLOGI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PENDEKATAN DIALEKTIK

Penulis
Dr. Maksudin, M.Ag.

Editor:
Dra. Sudiati, M.Hum.

Tata Letak
Abi Fairuz

Desain Cover
Haetamy el Jaid

Cetakan I, **Mei 2015**

Penerbit
PUSTAKA PELAJAR
Celeban Timur UH III/548 Yogyakarta 55167
Telp. 0274 381542, Faks. 0274 383083
E-mail: pustakapelajar@yahoo.com
website: pustakapelajar.co.id

ISBN: 978-602-229-491-7

KATA PENGANTAR

Dalam perspektif historis pendidikan agama Islam (PAI) di Indonesia telah berlangsung sejak Islam masuk ke Indonesia, yaitu sejak pembawa ajaran Islam menyampaikan atau mendakwahkan agama Islam ke masyarakat secara umum di dalamnya telah melakukan pendidikan agama Islam, meskipun dalam bentuk yang sangat sederhana.

Lembaga pendidikan Islam pertama di Indonesia adalah pesantren (Jawa) yang dikenal juga dengan dayak/rangkang (Aceh) atau surau (Minangkabau). Pesantren di Jawa sejak awal pembentukannya telah merupakan suatu kombinasi antara madrasah dan pusat kegiatan tarikat. Seandainya proses perkembangan lembaga pendidikan pesantren tidak terpotong oleh kedatangan kolonialisme, mungkin yang mengalami peristiwa seperti yang terjadi di Amerika dan Eropa. Universitas-universitas besar yang melahirkan tokoh nasional adalah Universitas Tebuireng, Universitas Gontor, dan universitas-universitas yang lain, bukan UI, UGM, ITB, dan sejenisnya yang merupakan lembaga baru dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

Menurut catatan sejarah pendidikan agama Islam secara formal diajarkan di lembaga pendidikan sekolah secara formal sejak tanggal 1 Januari 1946. Dengan demikian PAI hinggi saat ini telah mencapai usia 59 tahun. Namun demikian, pada usia itu permasalahan yang dihadapi tidak kunjung selesai bahkan semakin banyak dan kompleks. Permasalahan itu terutama berkaitan dengan operasional pendidikan *(operational problem of education)* terutama masalah pengembangan metodologi pendidikan agama Islam. Hal ini terjadi karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat dan adanya problem-problem sosial keagamaan, serta problem-problem sosial kemasyarakatan.

Upaya-upaya untuk mengatasi beberapa problem pendidikan agama Islam dalam jenjang pendidikan formal telah banyak dilakukan baik oleh pemerintah c.q. Kementrian Agama, Kementerian Pendidikan Nasional, melalui kajian/penelitian, seminar, FGD, *workshop*, pelatihan-pelatihan, pembenahan, penyempurnaan kurikulum maupun upaya yang lain. Di samping itu, para ahli pendidikan, para pemerhati pendidikan, serta para praktisi pendidikan agama Islam juga telah banyak menyumbangkan pemikiran guna meminimalisir permasalahan yang dialami dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Banyak buku yang membahas pendidikan agama Islam dengan judul "Metodologi Pendidikan Agama Islam", namun buku-buku tersebut masih dijumpai beberapa kekurangan dan kelemahan, terutama bila dikaitkan dengan perubahan dan penyempurnaan pendidikan agama Islam yang diberlakukan saat ini yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), dan Kurikulum 2013.

Buku yang ada di hadapan pembaca, menurut hemat penulis merupakan salah satu solusi alternatif dan *sharing* yang dapat dipergunakan untuk mengatasi permasalahan pembelajaran pendidikan agama Islam. Buku ini berjudul *"Pengembangan Metodologi Pendidikan Agama Islam Pendekatan Dialektik"*, dapat dijadikan referensi bagi semua pihak yang berkepentingan.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian buku ini, baik secara langsung maupun tidak langsung kami penulis sampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, utamanya kepada penerbit yang bersedia menerbitkan buku ini, khususnya kepada Istriku Dra. Hj. Sudiati, M.Hum, dan anak-anakku tercinta, Miftahus Sa'adah, S. Fam,. Apt., Ahmad Munawwar Shiddieqi, dan Mufidus Sani, yang telah memberikan kesempatan, dorongan, dan semangat untuk senatiasa menulis kepada kami.

Besar harapan penulis semoga buku ini sesuai dengan tujuan, di antaranya untuk memberikan pencerahan dan masukan yang berharga tentang pengembangan metodologi PAI pendekatan dialektik. Buku ini terdiri atas 7 bab. *Pertama*, problematika pendi-

dikan agama Islam dan solusi alternatif pemecahan. *Kedua,* sejarah pendidikan agama Islam di Indonesia. *Ketiga*, kurikulum pendidikan agama Islam. *Keempat*, strategi pendidikan agama Islam. *Kelima,* desaian pengembangan pendidikan agama Islam. *Keenam* pengembangan metodologi pendidikan agama Islam, dan Bab *Ketujuh,* implementasi pengembangan metodologi pendidikan agama Islam pendekatan dialektik.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam kajian buku ini. Oleh karenaitu, penulis sangat mengharapkan masukan, saran, dan kritik yang konstruktif dari para pembaca guna melengkapi dan menyempurnakan kajian ini. Atas masukan, saran dan kritik para pembaca diucapkan terima kasih. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT kita menyembah dan mohon pertolongan, serta hanya kepada-Nya kita berserah diri. *Wallahu A'lam bish-Shawab*.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR • v
DAFTAR ISI • ix

BAB I
PROBLEMATIKA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
DAN SOLUSI ALTERNATIF PEMECAHAN • 1
A. Problematika Pendidikan Agama Islam • 1
B. Posisi dan Hubungan Agama dan
Sains Nondikotomis/Integratif • 4
C. Solusi Alternatif Pemecahan
Pendidikan Agama Islam • 10
Catatan • 23

BAB II
SEJARAH PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI INDONESIA • 25
A. Periode Sebelum Merdeka • 26
B. Periode Setelah Merdeka • 31
Catatan • 47

BAB III
KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM • 49
A. Hakikat Kurikulum • 49
B. Kurikulum Nasional • 51
C. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan • 52
D. Implementasi Mata pelajaran PAI
Jenjang SD/MI; SMP/MTs; SMA/MA/SMK/MAK • 55
E. Standar Kompetensi (SK) dan
Kompetensi Dasar (KD) SD/MI • 58

F. Standar Kompetensi (SK) dan
Kompetensi Dasar (KD) SMP/MTs • 71
G. Standar Kompetensi (SK) dan
Kompetensi Dasar (KD) SMA/MA/SMK/MAK • 81

BAB IV
STRATEGI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
DI SEKOLAH DAN MADRASAH • 95
A. Pengertian Strategi Pembelajaran • 95
B. Menetapkan Spesifikasi dan Identifikasi
Peserta Didik • 97
C. Memilih Pendekatan pembelajaran
Pendidikan Agama Islam • 105
D. Memilih Model Pembelajaran
Pendidikan Agama Islam • 106
E. MenetapkanProsedur, Metode,
dan Teknik Pembelajaran PAI • 108
F. Menetapkan Evaluasi Pembelajaran
Pendidikan Agama Islam • 111
Catatan • 120

BAB V
DESAIN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM • 123
A. Asumsi dan Urgensi Desain Pengembangan
Pembelajaran Pendidikan Agama Islam • 123
B. Landasan Desain Pengembangan Pembelajaran
Pendidikan Agama Islam • 128
C. Desain Pengembangan Pembelajaran
Model Kemp, Dick-Carey, dan Degeng • 144
D. Desain Pengembangan Pembelajaran PAI
di Sekolah dan Madrasah • 147
Catatan • 157

BAB VI
PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN
AGAMA ISLAM DI SEKOLAH DAN MADRASAH • 159
A. Prinsip-prinsip Pembelajaran
Pendidikan Agama Islam • 159
B. Prinsip Dasar Agama Islam dan Karakteristiknya • 169
C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi
Pembelajaran Pendidikan Agama Islam • 171
D. Pola Pengembangan Pembelajaran Pendidikan
Agama Islam • 176
E. Pendekatan Sistem dalam Pengembangan
Pembelajaraan Pendidikan Agama Islam • 179
F. Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam
yang Berorientasi pada Pendidikan Nilai Afektif • 189

BAB VII
IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN METODOLOGI
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PENDEKATAN DIALEKTIS • 205
A. Konsep Pengembangan Metodologi • 205
B. Tingkat Pikiran Manusia dengan Pola Pikir
dan Peta Konsep • 207
C. Konsep Pendidikan Agama Islam • 212
D. Konsep Berpikir Pendekatan Dialektis • 216
E. Contoh Implementasi Berpikir Pendekatan Dialektis • 232
Catatan • 245

DAFTAR PUSTAKA • 247
BIODATA PENULIS • 255
INDEX • 259

Bab I

PROBLEMATIKA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN SOLUSI ALTERNATIF PEMECAHAN

A. Problematika Pendidikan Agama Islam (PAI)

Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan bagian dari pendidikan Islam[1]. Pendidikan Islam itu merupakan subsistem pendidikan nasional (UU No. 20, Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional). Dengan ungkapan lain, bahwa pendidikan Islam merupakan salah satu subsistem pendidikan nasional, sedangkan pendidikan agama Islam merupakan subpendidikan Islam itu sendiri. Oleh karena itu, pendidikan Islam dan pendidikan agama Islam dalam operasional pendidikan masing-masing tidak dibenarkan menyalahi atau bahkan bertentangan dengan sistem pendidikan nasional yang telah ditetapkan dalam UU No. 20 Tahun 2003.

Perlu diketahui bahwa secara garis besar problematika pendidikan secara umum terangkum dalam tiga masalah, yaitu (1) masalah fundasional pendidikan *(foundational problem of education),* (2) masalah struktur lembaga pendidikan *(structure problem of education),* (3) masalah operasional pendidikan *(operational problem of education)*.[2] Ketiga persoalan itu juga terjadi dan dialami oleh pendi-

dikan Islam. Hal itu terjadi karena memang pendidikan pada prinsipnya mencakup tiga persoalan tersebut. Hanya saja persoalan yang dihadapi dalam pendidikan itu volumenya tidak sama, akan tetapi bila dikaji lebih jauh dan lebih mendalam, persoalan yang paling menonjol adalah persoalan operasional pendidikan, yakni persoalan yang berkaitan dengan metodologi pendidikan agama Islam karena persoalan fundasional dan persoalan struktur kelembagaan pendidikan agama Islam telah ditetapkan dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional dan penjelasannya.

Di satu sisi kedudukan pendidikan agama Islam sangat urgen dalam pendidikan nasional karena tujuan utama pendidikan tersebut di antaranya untuk membina dan mendasari kehidupan anak didik dengan nilai-nilai agama dan sekaligus mengajarkan ilmu agama Islam, sehingga siswa mampu mengamalkan syariat Islam secara benar sesuai dengan pengetahuan agama. Hal ini sesuai dengan UU Sisdiknas, Bab I Pasal 1 ayat (2) Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Bahwa pendidikan nasional berakar nilai-nilai agama...[3]

Namun demikian, di sisi lain, pendidikan agama Islam itu sendiri lebih dihadapkan pada banyak tantangan, rintangan, dan hambatan, baik secara internal maupun eksternal. Faktor internal yang menjadi penyebab adanya kendala atau hambatan itu antara lain: faktor guru, pendekatan metodologis pembelajaran, alokasi waktu pembelajaran, serta solidaritas antarguru agama atau antara guru agama dan guru umum. Faktor eksternal yang menjadi penyebab terjadinya kendala atau hambatan pendidikan agama Islam di antaranya adalah: sikap orang tua atau masyarakat yang kurang positif terhadap pendidikan agama Islam, situasi dan kondisi serta lingkungan sosial yang berdampak negatif, dan kurang tersedianya lapangan kerja[4]. Pada era modern kendala eksternal yang dahsyat pengaruhnya adalah media massa, dan produk teknologi canggih.

Media massa dan produk teknologi semestinya dikontrol dan dikonsultasikan kepada syariah (aturan/hukum) dari segi kemanfaatan dan kemadlaratannya. Oleh karena itu, pengguna *(stakeholders)* media massa dan produk teknologi berhati-hati dalam memilih, memanfaatkan, dan menggunakannya.

Pendidikan agama Islam, jika dipahami, dirasakan, dan dihayati secara utuh, komprehensif, dan integratif maka problematika PAI dari berbagai problem yang ada, sesungguhnya yang paling krusial secara esensial (hakiki), dan substansial (isi/materi/bahan/sumber) adalah terletak pada posisi agama dan sains-teknologi hingga saat ini tidak jelas dan tegas, sehingga hubungan antar keduanya tidak jelas dan tegas. Oleh karena itu, tetap dan permanen dualisme dan dikotomi agama dan sains-teknologi.

Dengan pertimbangan mendasar dan prinsipil penulis melakukan penulisan beberapa buku terkait dengan upaya menjembatani problematika tentang posisi dan hubungan agama dan sains-teknologi dengan buku-buku berjudul: "Paradigma Agama dan Sains Nondikotomik" (2013), "Pendidikan Karakter Non Dikotomik" (2013), dan "Desain Pengembangan Berpikir Integratif Interkonektif Pendekatan Dialektik" (2015).

Pendidikan agama Islam yang dikotomis akan melahirkan moralitas dikotomis pula dan begitu juga berpengaruh pada peri kehidupan manusia dengan sistem dikotomis. Keprihatinan dan kegelisahan akademis ini mendorong penulis untuk berusaha keras dan bersungguh-sungguh dengan memohon taufiq, hidayah, ma-'unah, dan ridla Allah SWT, penulis melakukan apa yang hemat penulis perlu dan penting untuk *sharing* dan mencari kesamaan persepsi *(kalimatun sawa)* kepada semua pembaca dengan karya-karya tulis ini yang jauh dari kesempurnaan. Terutama dalam memosisikan agama dan sains-teknologi secara tegas dan jelas, sehingga hubungan keduanya menjadi jelas dan tegas juga. Khusus yang membahas agama dan sains nondikotomis dapat dibaca dalam buku penulis sebelumnya dengan judul sebagaimana tersebut di atas.

B. Posisi dan Hubungan Agama dan Sains Nondikotomis/Integratif.[5]

Untuk memudahkan pemahaman tentang posisi dan hubungan agama dan sains nondikotomis/integratif dapat diperiksa pada peta konsep sebagai berikut.

PETA KONSEP 1

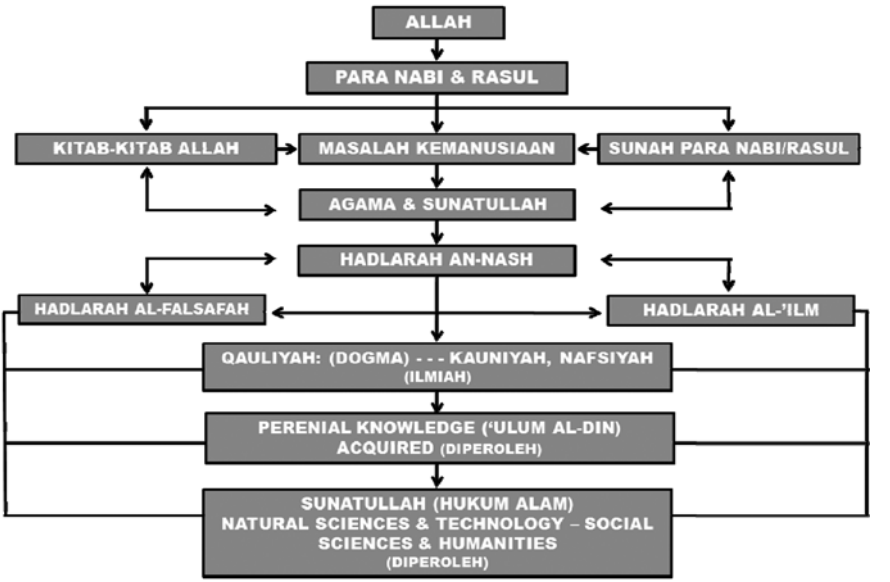

Penjelasan Peta Konsep:

1. Allah SWT, adalah As-Syari' pembuat dan penentu segala syariah dan ciptaan-Nya.
2. Para Nabi/Rasul, adalah pembawa risalah dan mubayyin (penjelas) risalah
3. Pertemuan al-Kutub, masalah kemanusiaan dan As-sunnah Nabi/Rasul secara tauqifi adalah Agama.
4. Agama dan Sunatullah (hukum alam) adalah dua hal secara garis besar ditentukan dan ditetapkan oleh Allah SWT.
5. *Hadlarah al-Falsafah - Hadlarah al-Falsafah - Hadlarah al-'Ilm*; Qauliah-Kauniah-Nafsiah; *Perennial Knowledge (al-'Ulum al-*

Din) Acquired; Sunnatullah (Hukum Alam), pembuktiannya dengan *Natural Sciences & Technology-Humanities & Social Sciences* secara Metodologi/Waqi'i adalah Sains Nondikotomik.

6. *Hadlarah an-Nash;* ilmu-ilmu yang berkaitan dengan teks keagamaan
7. *Hadlarah al-Falsafah;* ilmu-ilmu etis-filosofis
8. *Hadlarah al-'Ilm;* ilmu-ilmu kealaman atau kemasyarakatan
9. Kajian Agama tidak berhenti dan fokus pada *teologis-dogmatis* yang tidak mudah diterima secara *filosofis-metodologis* (saintifik) karena keimanan lebih mendasarkan pada dogmatis dan seharusnya kajian agama mencapai *filosofis-metodologis,* sehingga menjadi *teologis-dogmatis* dan *filosofis-metodologis* (saintifik).
10. Kajian sains nondikotomis seharusnya tidak terbatas pada *filosofis-metodologis* akan tetapi sampai dengan *teologis-dogmatis*, sehingga menjadi *filosofis-metodologis-teologis-dogmatis.*
11. *Pemahaman pertama*: Allah SWT kepada para Nabi/Rasul menurunkan al-Kutub, dan as-Sunnah Nabi/Rasul, sebagai *Hadlarah an-Nash*. Secara vertikal *Hadlarah an-Nash* dapat digolongkan *Qauliah* (ada dogma)—Kauniah, dan Nafsiah (ilmiah); kemudian digolongkan *Perennial Knowledge* (al-'Ulum al-Din) *Acquired* (diperoleh); *Sunnatullah* (Hukum Alam), pembuktiannya dengan *Natural Sciences & Technology/Humanities & Social Sciences* (diperoleh).
12. *Pemahaman kedua*: Allah SWT kepada para Nabi/Rasul menurunkan al-Kutub, dan as-Sunnah Nabi/Rasul, sebagai *Hadlarah an-Nash* terintegrasi dengan *Hadlarah al-Falsafah* dan *Hadlarah al-'Ilm*; kemudian ketiga hadlarah ini secara horizontal dapat dikolaborasikan dengan *Qauliah* (ada dogma)— *Kauniah*, dan *Nafsiah* (ilmiah); kemudian digolongkan *Perennial Knowledge* (al-'Ulum al-Din) *Acquired* (diperoleh); *Sunnatullah* (Hukum Alam), pembuktiannya dengan *Natural Sciences & Technology/ Humanities & Social Sciences* (diperoleh).

Berdasarkan peta konsep di atas menjelaskan tentang posisi agama, sunatullah dan sains secara jelas dan tegas, sehingga hu-

bungan antar keduanya juga menjadi jelas dan tegas. Hubungan agama dan sains (ilmu pengetahuan) ibarat dua sisi mata uang tidak bisa berdiri sendiri dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Hal ini diperkuat pernyataan Albert Einstein dalam Ken Wilber (2012:125) berbunyi "ilmu pengetahuan tanpa agama akan pincang, agama tanpa ilmu pengetahuan akan buta". Sebagai tantangan di era global, bagaimana mengintegrasikan agama dan sains dan memosisikannya bagi umat manusia sehingga terwujud hubungan agama dan sains sinergis, sistematis, dan fungsional bagi hidup dan sistem kehidupan manusia. Agama tidak menjadikan pemeluknya menjauhi sains dan demikian juga sains bagi saintis tidak meninggalkan agama, akan tetapi agamawan "spiritualis" dan ilmuwan "saintis" saling memperkuat, memperkokoh, dan saling mengisi kekurangan dan kelemahan sehingga yang ada saling *"fastabiqul khairat"* (berlomba dalam kebaikan).

Berbagai kendala dan hambatan dalam pendidikan agama Islam, baik yang datang dari dalam (*internal*) maupun dari luar (*eksternal*), menjadi suatu pemikiran yang perlu mendapatkan alternatif pemecahan; bahkan perlu segera diprogramkan untuk mengantisipasinya. Di antara usaha-usaha pemerintah dalam rangka menanggulangi persoalan itu ialah dilaksanakannya program peningkatan mutu pendidikan agama Islam bagi guru-guru agama Islam melalui berbagai program penyetaraan yang dilaksanakan sejak tahun 1993/1994 hingga tahun 2000. Di samping itu, juga dilaksanakan melalui berbagai bentuk pendidikan, penataran dan pelatihan. Di antaranya, pada 1996, yaitu pada masa liburan sekolah, pemerintah mencanangkan program pesantren kilat secara nasional. Program itu dibuka untuk sekolah-sekolah di lingkungan Departemen Agama maupun sekolah-sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud), dengan tujuan untuk menambah ilmu keislaman, mengisi waktu liburan, dan menanamkan rasa keagamaan bagi siswa dan siswi. Usaha-usaha itu perlu dan penting untuk ditindaklanjuti dan bahkan perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan program-programnya. Di samping

upaya perbaikan tersebut di atas, dilakukan pula perubahan dan penyempurnaan kurikulum pendidikan nasional. Secara historis perjalanan kurikulum sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah banyak mengalami perubahan dan penyempurnaan, yaitu kurikulum tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan sekarang kurikulum 2013.[6]

Pendidikan agama Islam (PAI), bila ditilik dari segi historisnya, dilaksanakan dalam pendidikan umum secara formal sejak tanggal 1 Januari 1946[7]. Oleh karena itu, pendidikan agama Islam hingga saat ini telah memasuki usia lebih kurang 59 tahun. Dalam usia itu pendidikan agama Islam di lembaga-lembaga pendidikan formal justru masih mencari bentuk dan format metodologi yang tepat dan sesuai dengan maraknya perubahan sosial dan budaya di segala bidang. Untuk itu, akhir-akhir ini para ahli dan pemerhati bidang pendidikan banyak melakukan diskusi, seminar, dan *workshop* pendidikan Islam. Kiranya kegiatan semacam itu cukup dijadikan sebagai bukti adanya upaya-upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan pendidikan agama Islam agar lebih efektif dan efisien; agar penyajian materi menjadi lebih menarik, relevan, aktual serta sesuai dengan objek sasaran pendidikan agama Islam itu sendiri.

Menurut Driyarkara, pendidikan adalah suatu pengembangan dan perkembangan yang aktif[8]. Kiranya tepat apa yang diungkapkan M. Amin Abdullah bahwa metodologi pendidikan agama Islam itu lebih penting daripada materi agama Islam. Metodologi yang bersifat statis-indoktrinatif-doktriner tidak lagi menarik bagi anak didik dan tidak mampu mengantar anak didik sampai pada tahapan afeksi dan bahkan pada tahapan psikomotorik. Lebih lanjut dikatakan bahwa pelajaran dan kuliah agama Islam amatlah tidak menarik. Kekuatan pendidikan agama Islam tinggal bertumpu pada formalitas kekuatan undang-undang pendidikan nasional yang mencantumkan "agama" sebagai mata pelajaran wajib atau mata kuliah dasar umum (MKDU)[9].

Pendidikan Agama Islam pada pendidikan umum hasilnya kurang memuaskan karena Pendidikan Agama Islam belum dapat

menunjukkan fungsi agama sebagai sumber kehidupan, tuntunan dalam hidup, dan tuntunan dalam kebudayaan.[10]

Lebih-lebih pada akhir-akhir ini dirasakan sekali merosot moralitas/akhlak umat manusia yang perlu dan penting mendapatkan perhatian serius semua pihak terutama para pendidik, orang tua, dan para tokoh. Di lingkungan pendidikan, bagaimana solusi yang musti dilakukan melalui pendidikan agama Islam. Di antara upaya mengatasi masalah ini di antaranya melakukan perbaikan, penyempurnaan, dan pengembangan aspek metodologi pendidikan.

Untuk mengungkap persoalan-persoalan metodologi Pendidikan Agama Islam tersebut di atas perlu dilakukan penelitian di berbagai jenjang dan aspek pendidikan, tidak hanya terbatas pada jenjang pendidikan dasar, tetapi juga pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi. Aspek kurikulum, pengembangan materi, metodologi pembelajaran, dan sistem evaluasi juga sangat membutuhkan perhatian melalui berbagai bentuk penelitian.

Sebagai contoh, Zuhairini[11] memfokuskan bukunya pada pembahasan tentang metode pengajaran agama, prinsip-prinsip metode dan faktor-faktor yang diperhatikan dalam memilih metode dan penggunaan dalam pendidikan agama. Zuhri dan Syamsuddin Yahya[12] memusatkan tulisannya pada pendekatan keberagaman dalam memilih metode pengajaran pendidikan agama Islam; yaitu pada kerancuan konsep, fungsi pengajaran, sosok manusia sebagai tujuan, materi pengajaran PAI yang dilengkapi dengan pengajaran al-Quran, al-Hadis, Aqidah, Akhlak, Syariah, Ibadah, Muamalah, Sejarah Islam, dan pengajaran kebudayaan Islam. Yusuf dan Saiful Anwar[13] cenderung pada pembahasan tentang hubungan metodologi dengan didaktik, faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya jenis metode pembelajaran. Di samping itu ia juga menyampaikan materi tentang bagaimana memilih metode, tujuan pendidikan agama Islam, pola jam kerja guru yang baik, dan berbagai metode pengajaran lengkap dengan kelemahan dan kelebihannya. Sehubungan dengan hal itu, Tafsir lebih tertarik pada prinsip-prinsip pembuatan *Lesson Plan*, sedangkan Namsa lebih pada dasar-dasar metodologi pengajaran agama Islam.

Pada umumnya metodologi pendidikan/pengajaran agama Islam hampir sama, baik dari aspek isi maupun pembahasannya. Sebagian besar buku-buku metodologi pengajaran pendidikan agama Islam lebih terfokuskan pada berbagai metode pendidikan. Pengajaran agama Islam, belum secara komprehensif dan belum mengarah pada tataran filosofis, metodologis yang dilandasi pada teori-teori belajar dan mengajar, tetapi masih pada tataran praktis-metodis terbatas. Demikian pula belum dilandaskan pada ilmu psikologi agama, psikologi umum dan belum menampakkan konsep-konsep yang secara konkret mengaplikasikannya pada pembelajaran PAI. Konsep-konsep masih bersifat umum dan belum terfokus pada suatu jenjang pendidikan tertentu, misalnya pendidikan di SD/MI, SLTP/MTs dan SMAN/MA/SMK/MAK. Di samping itu, buku-buku metodologi pendidikan agama Islam disusun atas dasar hasil pemikiran bukan atas dasar sebuah penelitian di lapangan. Buku-buku yang ada masih belum menampakkan adanya konsep pengembangan metodologi pendidikan agama Islam.

Sehubungan dengan berbagai fenomena di atas, kehadiran buku ini lebih diposisikan pada posisi tengah, artinya di satu sisi mempelajari konsep-konsep metodologi pendidikan/pengajaran agama Islam yang ada dan di sisi lain melakukan kajian secara konseptual dari buku-buku lain yang ada, terutama yang berkenaan dengan konsep-konsep metodologi pendidikan/pengajaran agama Islam. Hasil kajian itu dideskripsikan sebagai tawaran baru dalam metodologi pendidikan agama Islam. Di samping itu, penulis mengajukan konsep pengembangan metodologi pendidikan agama Islam yang terfokus pada sejarah pendidikan agama, kurikulum pendidikan agama, strategi pembelajaran PAI, desain pengembangan pembelajaran PAI, dan pengembangan pembelajaran PAI serta pengembangan metodologi PAI pendekatan dialektik.

C. Solusi Alternatif Pemecahan Pendidikan Agama Islam (PAI)

Pendidikan agama Islam merupakan bagian wajib isi kurikulum setiap jenjang pendidikan[14]. Demikian pula PAI merupakan bagian wajib isi kurikulum yang harus dilakukan sesuai dengan jenjangnya. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia bertujuan: membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Tujuan tersebut dicapai melalui muatan dan/atau kegiatan agama, kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olahraga, dan kesehatan.[15]

Kurikulum PAI dimaksudkan untuk meningkatkan potensi spiritual dan membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti, dan moral. Peningkatan potensi spiritual mencakup pengenalan, pemahaman, dan penanaman nilai-nilai keagamaan, serta pengamalan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan individual ataupun kolektif kemasyarakatan. Peningkatan potensi spiritual tersebut pada akhirnya bertujuan pada optimalisasi berbagai potensi yang dimiliki manusia yang aktualisasinya mencerminkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Berfungsinya kurikulum PAI terletak pada bagaimana pelaksanaannya di sekolah khususnya di kelas dalam proses belajar-mengajar. Dalam proses belajar mengajar inilah kunci keberhasilan tercapainya kurikulum.

Pendidikan agama Islam (PAI) adalah suatu usaha bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar nantinya setelah selesai dari pendidikan dapat memahami apa yang terkandung dalam Islam secara keseluruhan, menghayati makna dan maksud serta tujuannya, dan pada akhirnya dapat mengamalkannya serta menjadikam ajaran-ajaran agama Islam, yang telah dianutnya sebagai pandangan hidup (*way of life*), sehingga dapat mendatangkan keselamatan dunia dan akhirat[16].

Uraian di atas dapat dipahami bahwa pendidikan agama Islam meliputi adanya: (1) usaha bimbingan dan asuhan, (2) anak didik sebagai yang dibimbing, (3) tujuan bimbingan, (4) pembimbing/pengasuh, dan (5) lembaga yang melakukan bimbingan dan asuhan, serta (6) sarana dan prasarana dalam bimbingan dan asuhan. Tujuan yang hendak dicapai meliputi: (1) anak didik mampu memahami apa yang terkandung di dalam Islam, (2) anak didik menghayati makna dan maksud tujuan ajaran Islam, dan (4) anak didik menjalankan ajaran agama Islam yang dianutnya sebagai pandangan hidupnya, sehingga dapat mendatangkan keselamatan dunia dan akhirat.

Dalam Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada penjelasan pasal 37 ayat (1) dinyatakan: "Pendidikan Agama untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia".[17] Oleh karena itu pendidikan agama dimaksudkan untuk membentuk peserta didik beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Ketiga kata kunci rumusan pendidikan agama bagi peserta didik tersebut menjadi fokus dan perhatian secara khusus bahwa pendidikan agama sasaran utama dan pertama adalah membentuk manusia beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, iman, takwa, dan akhlak pada hakikatnya menjadi satu kesatuan utuh/integral/tauhid capaian pendidikan agama. Jika capaian ini terwujud berarti tercapai pula tujuan pendidikan nasional.

Achmadi[18] membedakan pengertian pendidikan Islam dengan pendidikan agama Islam. Pendidikan Islam ialah: segala usaha untuk memelihara dan mengembangkan fitrah manusia serta sumber daya insani yang ada padanya menuju terbentuknya (insan kamil) sesuai dengan norma Islam", sedangkan pendidikan agama Islam (PAI) ialah: "usaha yang lebih khusus ditekankan untuk mengembangkan fitrah keberagamaan subjek didik agar lebih mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam". Pendapat Achmadi di atas dapat dipahami tidak adanya perbedaan

prinsipil antara pendidikan Islam (PI) dengan pendidikan agama Islam (PAI) karena sama-sama berupaya memelihara dan mengembangkan fitrah. Perbedaannya hanya pada penekanan, yaitu pendidikan Islam (PI) mengembangkan fitrah dan sumber daya insani untuk mencapai "insan kamil" berdasar norma Islam, sedangkan pendidikan Agama Islam (PAI) di samping mengembangkan fitrah manusia juga meningkatkan keberagamaan anak didik sehingga diharapkan anak didik mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam.

Pendapat Achmadi, pendidikan agama Islam (PAI) bila dibandingkan dengan pengertian PAI dalam rumusan kurikulum dan GBPP PAI maka pengertian keduanya saling melengkapi, karena rumusan PAI dalam kurikulum PAI sudah mengintegrasikan dengan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, sedangkan rumusan Achmadi menekankan pemilihan pengembangan fitrah anak didik serta keberagamaannya dan belum mengungkap keterkaitan PAI dengan pesan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional secara eksplisit, akan tetapi secara implisit terdapat dalam pengertian PAI. Oleh karena itu, kedua pengertian PAI di atas dapat digunakan sebagai definisi operasional pelaksanaan PAI di sekolah-sekolah.

Tujuan pendidikan agama Islam merupakan komponen utama dalam proses belajar mengajar PAI. Tujuan kurikuler PAI adalah memberikan kemampuan dasar kepada siswa tentang agama Islam untuk mengembangkan kehidupan beragama sehingga menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT serta berakhlak mulia sebagai pribadi, anggota masyarakat dan warga negara serta untuk melanjutkan pada jenjang yang lebih tinggi[19].

Tujuan kurikuler ini mengandung beberapa unsur: (1) pemberian kemampuan dasar (2) materi PAI, (3) siswa, (4) pendidik (guru), dan (5) sasaran pokok PAI, yaitu menjadikan manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia baik dalam hidup pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk mencapai tujuan kurikuler PAI tersebut di atas diperlukan strategi pembelajaran PAI, pengembangan PAI, dan desain pengembangan PAI.

Strategi pembelajaran PAI di dalam tesis ini adalah suatu pola umum kegiatan pembelajaran guru dan peserta didik yang didasarkan pada empat unsur dasar strategi pembelajaran agar mata pelajaran PAI dapat tercapai secara optimal. Keempat unsur dasar strategi pembelajaran adalah: (a) menetapkan spesifikasi dan identifikasi peserta didik, (b) memilih pendekatan pembelajaran yang sesuai, (c)memilih model, prosedur, metode, dan teknik pembelajaran PAI, dan (d) menetapkan evaluasi pembelajaran.

Strategi pembelajaran PAI agar dapat diterapkan secara operasional hendaknya pelaksanaan PAI dapat ditempuh dengan cara-cara berikut.

a. Membina manusia yang mampu melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam dengan baik dan sempurna sehingga mencerminkan sikap dan tindakan dalam seluruh kehidupannya.
b. Mendorong manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.
c. Mendidik ahli-ahli agama yang cukup terampil[20].

Di samping itu, menurut Yusuf Amir Feisal, untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan nasional, pelaksanaan pendidikan agama memerlukan hal-hal berikut ini.

a. Paket-paket dasar materi pendidikan agama yang dapat menjadi pegangan hidup, dengan mempertimbangkan perkembangan jiwa, jenjang, jalur sekolah dan perkembangan kebudayaan bangsa.
b. Guru agama yang memenuhi syarat.
c. Prasarana dan sarana pendidikan agama yang cukup memenuhi syarat sesuai dengan keperluan secara proporsional.
d. Lingkungan dan suasana yang mendorong tercapainya tujuan pendidikan agama, seperti antara lain: situasi sekolah, masyarakat, dan peraturan perundang-undangan[21].

Oleh karena itu, bila ditinjau dari prinsip-prinsip pendidikan agama dan pendidikan nasional, masing-masing mencakup gambaran sebagai berikut.

a. Pendidikan, baik Islam maupun nasional, meliputi seluruh aspek kehidupan, jasmani rohani, secara serasi, dengan iman dan taqwa sebagai landasannya,
b. Untuk mencapai sasaran itu diperlukan adanya bimbingan pengajaran dan latihan[22].

Uraian di atas menjadi isyarat bahwa pendidikan agama Islam mempunyai makna strategis dalam pendidikan Islam pada khususnya dan pendidikan pada umumnya. Makna strategis pendidikan agama Islam secara yuridis jelas telah ditetapkan dalam UU Sisdiknas sebagai program wajib pada setiap jenjang pendidikan jalur sekolah, baik pendidikan dasar, pendidikan menengah, maupun pendidikan tinggi. Di samping itu, pembinaan dan pengembangan pendidikan agama Islam diserahkan kepada Depag RI. Dengan demikian, ada relevansinya dengan salah satu bidang tugas Departemen Agama RI. Pendidikan agama selain menjadi program wajib pada setiap jenjang pendidikan sekolah mempunyai peluang yang besar dalam memberikan sumbangan dalam pembentukan watak dan kepribadian bangsa Indonesia[23]. Oleh karena itu, pendidikan agama Islam harusnya berorientasi pada situasi dan kondisi konkret yang terjadi di masyarakat agar pendidikan agama Islam mempunyai watak yang dicerminkan oleh keadaan dan sifat masyarakat itu sendiri. Hal itu sesuai dengan pendapat I.L. Pasaribu dan B. Simandjuntak bahwa makna pendidikan tidak terlepas dari situasi dan kondisi konkret dalam masyarakat karena pendidikan selalu mempunyai watak yang dicerminkan oleh keadaan dan sifat masyarakatnya[24].

Vygotsky[25] menyatakan bahwa intelektual berkembang pada saat individu menghadapi ide-ide baru dan sulit serta mengaitkan ide-ide tersebut dengan apa yang mereka ketahui, bahwa interaksi dengan orang lain memperkaya perkembangan intelektual dan bahwa peran utama guru adalah bertindak sebagai seorang pembantu dan mediator pembelajaran siswa. Demikian pula, psikologi kognitif memberikan sumbangan terhadap pemilihan strategi pembelajaran tarmasuk pembelajaran agama Islam bagi peserta di-

dik. Menurut teori psikologi kognitif bahwa otak bekerja dan bagaimana individu memperoleh dan memproses informasi. Vygostsky dan para ahli psikologi kognitif menawarkan dalam memahami penggunaan strategi belajar ada tiga alasan, yaitu (1) mereka menggarisbawahi peran penting bahwa pengetahuan awal berperan dalam proses belajar, (2) mereka membantu kita memahami apakah pengetahuan itu dan perbedaan di antara berbagai jenis pengetahuan, dan (3) pembelajaran mereka membantu menjelaskan bagaimana pengetahuan diperoleh oleh manusia di dalam sistem memori otak.

Untuk pembelajaran pendidikan agama di samping menekankan aspek intelektualitas peserta didik juga sekaligus menekankan aspek spiritualitas. Menurut Komaruddin Hidayat[26], ada dua pendekatan dalam mempelajari Islam, yaitu untuk kepentingan bagaimana beragama secara benar dan mempelajari Islam sebagai ilmu. Ini berarti mempelajari ilmu-ilmu Islam dan sekaligus aksi (pengamalannya), bukan mempelajari Islam sebagai ilmu belaka. Oleh karena itu, pendidikan agama Islam pada berorientasi pada pengembangan aspek intelektualitas dan spiritualitas peserta didik secara holistik "*kaffah*".

Keberagamaan pada masa remaja sangat dipengaruhi oleh tumbuhnya hati nurani keagamaan, baik kualitasnya pada masa anak-anak maupun perkembangan rasa keagamaan pada masa remaja itu sendiri. Hati nurani keagamaan yang sudah tumbuh kuat pada akhir masa anak-anak memudahkan perkembangan rasa keagamaan pada masa remaja. Selanjutnya, perkembangan rasa keagamaan pada masa remaja dipengaruhi oleh perkembangan aspek-aspek jiwa yang lain serta keadaan lingkungan pergaulan remaja. Di sinilah pembelajaran pendidikan agama Islam sangat memerlukan pengembangan-pengembangan baik segi materi pembelajaran, strategi pembelajaran yang tepat dan cocok untuk remaja serta memerlukan desain pengembangan pembelajaran pendidikan agama Islam yang relevan dengan tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam.

Dengan berbagai macam permasalahan di atas PAI menuntut adanya pengembangan pembelajaran PAI yang didasarkan pada prinsip-prinsip pembelajaran PAI, prinsip dasar agama Islam dan karakteristiknya dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhi pembelajaran dengan pola pengembangan dan pendekatan sistem serta berorientasi pada pendidikan nilai afektif.

Menurut Mastuhu, pengembangan pendidikan agama memerlukan adanya tujuan yang jelas, sesuai dengan perkembangan religiusitas anak, lingkungan sosio-kultural, tenaga guru yang *qualified*, serta metodologi yang tepat. Lebih lanjut dikatakan bahwa metodologi pendidikan agama hendaknya bersifat terbuka, kritis, kreatif dengan mempertimbangkan metode kebiasaan dan memori terutama untuk permulaan[27]. Hal ini senada dengan pendapat M. Amin Abdullah, ilmu pendidikan Islam tidak boleh hanya bersikukuh pada metodologi ajar-mengajar agama dengan pola konvensional-tradisional dan perlu terobosan baru sehingga isi dan metodologi pendidikan agama terasa aktual-kontekstual dan juga bergerak sesuai dengan gerak perubahan dan tuntutan zaman[28].

Solusi yang ditawarkan oleh M. Amin Abdullah adalah bahwa pendidikan agama hendaknya diangkat dari topik-topik, isu-isu, tema-tema dan problem-problem sosial keagamaan dan problem-problem sosial kemasyarakatan yang konkret dan relevan sehingga problem-problem tersebut dapat berbicara dengan sendirinya, tanpa berpretensi untuk menggurui[29].

Berdasarkan gagasan di atas, bila dikaji dari aspek metodologinya, pelaksanaan pendidikan agama Islam hingga saat ini menampakkan beberapa kelemahan. Di antaranya ialah:

1. Tujuan pendidikan agama Islam ideal dan filosofis, sehingga untuk mengukur keberhasilan pendidikan agama Islam tidak mudah.
2. Materi-materi pendidikan agama Islam muluk-muluk, sedang waktu yang tersedia hanya 2 atau 3 jam pelajaran dalam satu minggu.

3. Adanya heterogenitas pengetahuan dasar agama, penghayatan, dan pengamalan agama bagi anak didik membutuhkan metode dan teknik yang tepat dalam Proses Belajar Mengajar (PBM) Pendidikan Agama Islam (PAI).
4. Tiga lingkungan pendidikan (lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat) belum terintegrasikan dalam pendidikan agama Islam.
5. Metodologi pengajaran pendidikan agama Islam bersifat tradisional sehingga kurang menarik perhatian siswa.
6. Pendidikan agama Islam dalam pelaksanaannya berdiri sendiri sebagai bidang studi, sehingga memberikan kesan dikotomi dengan bidang-bidang studi yang lain.
7. Profesionalisme guru-guru agama masih perlu ditingkatkan, baik segi didaktif, metodik kode etik, dan kemampuan di bidang tugasnya.
8. Muatan materi pendidikan agama Islam belum menampakkan keseimbangan antara materi kognitif, afektif, psikomotorik, dan bahkan lebih menonjolkan aspek kognitif.
9. Materi-materi pendidikan agama Islam banyak mengutip sumber aslinya (al-Qur'an dan al Hadis) yang berbahasa Arab, sementara para siswa belum banyak yang mampu membaca al-Qur'an dan al-Hadis yang berbahasa Arab.
10. Hubungan guru-guru agama dengan guru-guru umum dan para siswa tampak bersifat formal, kurang familiar dan fleksibel serta kekeluargaan, sehinga kurang terjadi hubungan yang bersifat interaksi edukasi (hubungan pendidikan).
11. Rasio antara jumlah guru agama dan jumlah siswa tidak seimbang. Lebih-lebih bila mengingat tanggung jawab dan tugas guru yang begitu besar.

Untuk mengatasi beberapa kelemahan pendidikan agama Islam tersebut di atas, ada beberapa upaya alternatif pemecahan masalah. Upaya-upaya yang dimaksud antara lain dengan pengembangan metodologi pendidikan agama Islam (PAI). Menurut M. Arifin[30], inovasi pendidikan agama Islam pada semua jenjang di lingkungan sekolah adalah mutlak diperlukan.

Pendidikan agama Islam di sekolah menengah umum secara metodologis memerlukan pengembangan sebagai suatu langkah untuk mengatasi kekurangan dan kelemahan yang sementara ini diakui oleh berbagai pihak. Langkah-langkah yang ditempuh antara lain sebagai berikut.

1. Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai sistem terpadu. Oleh karena itu pendidikan agama Islam memerlukan pendekatan integral/menyeluruh dengan mencari hubungan fungsional maupun komplementer dari semua komponen yang terlibat dalam suatu proses.[31]
2. Mengingat begitu besar relevansi antara pendidikan agama Islam (PAI) dan perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, pendidikan agama Islam harus berjalan bersama dan bekerja sama dengan program-program pendidikan non-agama.[32]
3. Tujuan dan sasaran pendidikan agama Islam perlu diperjelas.
4. Pendidikan agama Islam berorientasi pada anak didik; bukan pada materi-materi pendidikan anak.
5. Ada integrasi antara guru agama dan guru umum. Demikian pula pendapat Muchtar Buchori[33] bahwa para guru agama menjadi suatu keharusan dan tidak dapat ditawar-tawar lagi mulai bekerja sama dengan guru-guru non-agama.
6. Metode pendidikan agama tidak otoriter dan indoktriner, tetapi melalui metode yang memungkinkan penghayatan kebenaran dan keadilan agama secara otonom, rasional, kritis objektif, dan kreatif.[34]
7. Perlu desain pengembangan pembelajaran PAI secara konkret, dan
8. Pengembangan metodologi PAI dengan pendekatan dialektik.

Dengan beberapa langkah di atas, diharapkan kelemahan pendidikan agama Islam (PAI) yang selama ini diresahkan bahkan dinilai negatif karena dinilai belum fungsional dapat diatasi. Menurut Soedjatmoko[35], pendidikan agama di Indonesia dapat memenuhi suatu fungsi yang sangat penting dalam perkembangan sosial yang

akan datang, apabila: (1) berusaha memupuk beberapa sifat tertentu di antaranya keberanian hidup, kesanggupan untuk berdiri sendiri di atas kaki sendiri, dan untuk berinisiatif, peka terhadap hak dan keperluan sesama manusia, dan sanggup bekerja sama untuk kepentingan umum di dalam suatu proses perubahan sosial yang terus-menerus tanpa ketakutan akan perubahan itu, (2) berusaha untuk memupuk motivasi yang kuat pada para anak didik untuk mempelajari dan memahami kenyataan sosial yang terdapat di masyarakat kita, (3) berusaha untuk merangsang para anak didik untuk mengamalkan iman mereka, dan (4) berusaha untuk berintegrasi dan sinkronisasi dengan pendidikan non-agama. Keberhasilan pendidikan agama harus tecermin pada tindakan individu dan tindakan sosial yang konkret dalam kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat[36]. Lebih lanjut dikatakan bahwa terjadinya proses transformasi dalam kehidupan seseorang adalah tujuan utama pendidikan agama.[37]

Permasalahan serius yang dihadapi dunia pendidikan sekarang ini adalah rendahnya kualitas pembelajaran, termasuk pembelajaran PAI. Proses pembelajaran PAI seringkali bersifat seadanya, rutinitas formalitas, kering dan kurang bermakna. Oleh karena itu, mutu PAI relatif rendah.

Untuk perbaikan kualitas pembelajaran PAI harus diawali dari desain pembelajaran yang baik. Dengan kata lain, perancangan pembelajaran PAI sebagai langkah awal upaya perbaikan kualitas pembelajaran PAI. Hal ini didukung hasil penelitian[38], bahwa kegiatan pembelajaran yang diawali dengan melakukan kegiatan penyusunan perencanaan pembelajaran meningkatkan hasil belajar. Dengan demikian, pembelajaran PAI memerlukan desain pengembangan pembelajaran PAI yang profesional serta implementasi pengembangan metodologi PAI dengan pendekatan dialektik. Pada bagian akhir Bab I dipandang perlu dan penting untuk disampaikan pula hasil kesepakatan pertemuan Cipete sebagai berikut.

Berdasarkan hasil kesepakatan pertemuan Cipete Jakarta tanggal 10-12 Juni 2011 Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Direktorat PAIS terus melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Sekolah, dan mengembangkan Standar Nasional PAI pada Sekolah dan menyosialisasikannya.[38]

Upaya-upaya yang dilakukan berupa Pengembangan Standar Nasional (SN) PAI. Untuk pengembangan didasarkan kondisi riil di lapangan bahwa adanya beberapa kelemahan PAI selama ini sebagai berikut.

1. 50% lulusan SD tidak bisa baca al-Qur'an
2. Ibadah siswa terutama shalat wajib masih lemah
3. Aspek akhlak, adanya perilaku menyimpang, misal perkelaian, perilaku nyontek, tidak jujur, rokok, narkoba, pergaulan bebas, mabuk, dsb.

Aspek kurikulum PAI SD kurang fokus, waktu belajar al-Qur'an sangat sedikit. Oleh karena itu, PAI SD lebih difokuskan pada 3 aspek, yaitu:

1. Al-Qur'an (membaca dan menulis) 50%
2. Akhlak dan Keimanan 30%
3. Fikih/Ibadah 20%

Dipandang perlu ditambahkan standar pengamalan pada Standar Isi (SI) pada PAI SD-SMP-SMA/K, dan bagi siswa SMP perlu ditambahkan kemampuan menerjemahkan al-Qur'an.

Disepakati pula bahwa perlu dilakukan beberapa hal berikut ini.

1. Perubahan yg bersifat mendasar misalnya perubahan struktur, PAI SD menekankan pada kemampuan (1) membaca, menulis, menghafal dan memahami surat-surat pendek pilihan dari al-Qur'an, (2) memperbaiki kepribadian subjek didik melalui aspek Akhlak dan keimanan, dan (3) meningkatkan penghambaan subjek didik melalui aspek Ibadah.
2. BSNP melakukan perbaikan atau penyempurnaan Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi (SK-KD) pada semua mata pelajaran di Sekolah

3. Usaha itu dimulai dengan melakukan pemantauan dan evaluasi pendidikan di Sekolah.
4. Hasil dari pemantauan itu dijadikan bahan untuk melakukan penyempurnaan SKL dan SI
5. Jika dikaitkan dengan perbaikan SKL dan SI di BSNP ada perbedaan pendekatan atau cara kerjanya. Cara kerja di BSNP dengan memperbaiki SKL dulu sampai final. Kemudian SKL yang sudah final itu dipedomani dalam memperbaiki SI (SK-KD)

Untuk lebih konkret perubahan itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Struktur dan Aspek Standar Isi (SI) pada (Standar Kompetensi-Kompetensi Dasar) mengikuti Standar Kelulusan (SKL) berikut:

N0	REDAKSI SKL	ASPEK
1	Menunjukkan kemampuan membaca kitab suci agama yang dianut	Al-Qur'an Hadis
2	Mengetahui dan menunjukkan kebiasaan mengamalkan keimanan serta ibadah sesuai dengan ajaran agama yang dianut	Keimanan Ibadah
3	Menunjukkan kebiasaan berperilaku akhlak mulia kepada Tuhan, sesama manusia, dan ciptaan lainnya	Akhlak
4	Menunjukkan kebiasaan hidup dan damai *intra*-umat dan antarumat beragama selaras dengan wawasan NKRI	Kerukunan beragama

Dengan demikian Struktur/aspek PAI di Sekolah meliputi:

A. PAI SD/MI:

Struktur/aspek PAI SD/MI adalah:

1. Al-Qur'an-Hadis
2. Keimanan-Ibadah
3. Akhlak
4. Kerukunan Hidup Umat Beragama

B. PAI SMP/MTs dan SMA/K/MA

Struktur/aspek PAI SD/MI adalah:

1. Al-Qur'an-Hadis
2. Keiman
3. Ibadah
4. Akhlak
5. Tarikh/SKI
6. Keruknan Hidup Umat Beragama

C. Kisi-Kisi UASBN PAI

Kisi-Kisi UASBN PAI sebagai berikut.

1. Dasar UASBN PAI Permenag RI no 16 th 2010
2. UASBN PAI tidak hanya kognitif, tetapi juga ujian praktek baca al-Qur'an dan shalat dengan SI lama (Permendiknas no 22 th 2006)
3. Masih terus mencari format untuk UASBN PAI kepribadian.
4. Pada SN PAI ditemukan perubahan paradigma PAI yang tidak berhenti pada ranah kognitif, tetapi lebih fokus pada afektif dan kepribadian dengan menambah standar pengamalan.

CATATAN

[1]Muzayin Arifin, *Pendidikan Islam dalam Arus Dinamika Masyarakat: Suatu Pendekatan Filosofis, Pedagogis, Psikososial, dan Kultural* (Jakarta: Golden Terayon Press, 1988), hlm. 8

[2]Muchtar Buchori, *Penelitian Pendidikan dan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: IKIP Muhammadiyah Press, 1994), hlm. 18

[3]Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, (Bandung : Gitra Umbara, 2014), hlm. 2-3.

[4]Muzayin Arifin, *Ibid*., hlm 90-93

[5]Maksudin, *Desain Pengembangan Berpikir Integratif Interkonektif Pendekatan Dialektik,* (Yogykarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 103-104.

[6]Mukh Nursikin, Model Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di MAN Yogyakarta 3 dan SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta,"*Ringkasan Disertasi"* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), hlm. 17.

[7]Zakiah Darajat, dkk, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1972), hlm 91

[8]Driyarkara, *Driyarkara Tentang Pendidikan* (Yogyakarta: Kanisius, 1991), cet. 3, hlm 90

[9]M. Amin Abdullah, Dimensi Epistimologis-Metodologis Pendidikan Islam, dalam *Jurnal Filsafat*, Universitas Gadjah Mada, seri 21, Mei 1995," hlm 16

[10]Engkoswara. *Kecenderungan Kehidupan di Indonesia Menjelang Tahun 2000 dan Implikasinya terhadap Sistem Pendidikan.* (Jakarta: Intermedia, 1986), hlm 61.

[11]Zuhairini, dkk. *Metodologi Pendidikan Agama Islam.* (Solo: Ramadhani, 1993).

[12]Saifuddin Zuhri dan Syamsuddin Yahya. *Metodologi Pengajaran Agama*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999). Lihat pula Muhammad Abdul Qodir Ahmad. *Metodologi Pengajaran Pendidikan Agama Islam.* Jakarta: Binbaga Depag Islam, 1985).

[13]Tayar Yusuf dan Saiful Anwar. *Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab.* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).

[14] UU No.20 Tahun 2003, (Bandung: Citra Umbara, 2014), hlm.19-20.

[15]Permendiknas No 23 Tahun 2006 Tanggal 23 Mei 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL).

[16] Ditbinperta, "Pengertian Pendidikan Agama Islam, " dalam Zakiah Darajat, dkk. *Ibid*., hlm 88

[17]UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 (Bandung: Citra Umbara, 2014), hlm. 50.

[18]Achmadi, *Islam sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan,* (Yogyakarta: Aditya Media, 1992), hlm. 20.

[19] Departemen Agama R.I., *Kurikulum/GBPP PAI SMU*, Tahun 1994, hlm. 1

[20] Ditbinperta, "Pengertian Pendidikan Agama Islam, " dalam Zakiah Daradjat, dkk. *Ibid*., hlm 88-89

[21] Jusuf Amir Feisal, *Reorientasi Pendidikan Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1955), hlm 27-28

[22] Ahmad Ludjito, *Ibid*., hlm 299

[23] Chabib Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm 9.

[24] I.L. Pasaribu dan B. Simandjuntak, *Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Tarsito, 1983), hlm 1

[25] Vygotsky melalui Mohammad Nuh, *Strategi-Strategi Belajar,* (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya Press, 2000), hlm. 10.

[26] Komaruddin Hidayat, *Dinamika Pemikiran Islam di Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1999), hlm.xiv.

[27]Mastuhu, "Metodik Pendidikan Agama pada Perguruan Umum", dalam *Pengembangan Hasil-hasil Penelitian Pendidikan Agama* (Jakarta: Depag RI, 1976), hlm 58.

[28]M. Amin Abdullah, *Ibid*., hlm 11.

[26] *Ibid*., hlm. 16

[29]Muzayyin Arifin. "Beberapa Masalah yang Perlu Dipikirkan tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Agama di Sekolah Umum". Bahan Seminar Pengembangan Pendidikan Agama. (Jakarta: Depag RI, 1976), hlm. 8.

[30]Ahmad Ludjito, *Ibid*., hlm 310.

[31]Soedjatmoko. *Etika Pembebasan.* (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 6.

[32]Muchtar Buchori. *Ibid.* hlm. 83

[33]Moh. Said Reksohadiprodjo. Laporan YTKI Seminar tentang Pendidikan Agama dan Sistem Pendidikan Bangsa. (Jakarta: YTKI, 1972), hlm. 8.

[34]Soedjatmoko. *Ibid..* hlm. 274-275.

[35]M. Amin Abdullah. *Ibid*. hlm. 13.

[36]*Ibid*.

[37]Chair, 1988, dalam Muhaimin et.al, *Ibid.,* hlm. 190

[38]Hasil Kesepakatan Pertemuan Cipete Jakarta tanggal 10-12 Juni 2011 BSNP (Dokumentasi dan Bahan PPL Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 2015).

Bab 2

SEJARAH PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI INDONESIA

Pendidikan agama Islam (PAI) di Indonesia dalam perspektif historis telah berlangsung sejak Islam masuk ke Indonesia. Sejak pembawa ajaran Islam menyampaikan atau mendakwahkan agama Islam di dalamnya telah tercakup pendidikan agama Islam dalam pengertian umum, meskipun dalam bentuk yang sangat sederhana. Hal ini sesuai dengan pendapat Mahmud Yunus[1] bahwa sejarah pendidikan Islam dimulai sejak agama Islam masuk ke Indonesia, yaitu kira-kira pada abad XII Masehi. Menurut ahli sejarah, agama Islam mula-mula masuk ke Pulau Sumatera bagian utara, tepatnya di Aceh.

Lembaga pendidikan Islam pertama di Indonesia adalah pesantren (Jawa) yang dikenal juga dengan dayak/rangkang (Aceh) atau surau (Minangkabau)[2]. Lembaga ini berbeda dengan pola madrasah yang ada di luar Indonesia. Pesantren di Jawa sejak awal pembentukannya telah merupakan suatu kombinasi antara madrasah dan pusat kegiatan tarikat[3]. Bahkan menurut analogi Nurcholis Madjid[4], seandainya proses perkembangan lembaga pendidikan pesantren tidak terpotong oleh kedatangan kolonialisme, mungkin akan mengalami peristiwa seperti yang terjadi di Amerika dan Eropa. Universitas-universitas besar yang melahirkan tokoh nasional adalah Universitas Tebuireng, Universitas Gontor, dan universitas-universitas

yang lain, bukan UI, UGM, ITB, dan sejenisnya yang merupakan lembaga baru dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

Tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan sejarah PAI dibahas secara singkat dalam tulisan ini, terutama PAI di perguruan umum yang tentunya tidak lepas dari sejarah PAI di perguruan agama (seperti pesantren) yang sudah ada sebelumnya. Penyebutan sejarah pendidikan Islam (PI) secara otomatis juga berkenaan dengan sejarah pendidikan agama Islam (PAI) itu sendiri, karena memang pemahaman secara umum tidak dibedakan antara PI dan PAI, kecuali setelah disyahkannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) hal itu secara formal baru dibedakan.

Menurut UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Bab IX Pasal 37 Ayat (1) bahwa pendidikan agama wajib dimasukkan ke dalam kurikulum semua jenjang pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, sedangkan pendidikan keagamaan sesuai Pasal 30 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.[5] Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah-sekolah dalam perkembangannya secara garis besar dapat dibagi menjadi dua periode, yaitu (1) periode sebelum merdeka, dan (2) periode setelah merdeka.

A. Periode Sebelum Merdeka

Perkembangan PAI periode ini secara singkat dapat diuraikan pada tiga masa, yaitu masa penjajahan Belanda, masa kebangkitan nasional dan masa penjajahan Jepang.

1. Masa Penjajahan Belanda

Sebelum orang-orang Barat datang ke Indonesia dan membawakan sistem pendidikannya, di Indonesia telah ada pondok pesantren yang memberikan pendidikan agama Islam di berbagai tempat. Bangsa Spanyol dan Portugis memperkenalkan pendidikan agama Katholik dan pendidikan agama Kristen Protestan[6]. Selain itu, sebelumnya bangsa Indonesia telah memeluk agama Hindu dan Buddha. Oleh karena itu, agama Katholik dan agama Kristen

Protestan dapat dikatakan merupakan adopsi dari kaum kolonial orang-orang Barat.

Sikap Pemerintah Hindia Belanda menghadapi pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah umum dinyatakan dalam pasal 179 (2) I.S. (*Indische Saatsregeling*) dan dalam beberapa ordonansi, yang secara singkat dapat dikemukakan bahwa, "Pengajaran umum adalah netral, artinya bahwa pengajaran itu diberikan dengan menghormati keyakinan agama masing-masing. Pengajaran agama hanya boleh berlaku di luar jam sekolah."[7]

Pada masa penjajahan Belanda telah beberapa kali diusulkan dalam *Volksraad* agar pelajaran agama Islam dimasukkan sebagai mata pelajaran di perguruan-perguruan umum, tetapi usul demikian itu selalu ditolak oleh Pemerintah Hindia Belanda. Oleh karena itu, meskipun ada kehendak untuk memasukkan apa yang waktu itu disebut sebagai *godsdienst onderwijs* (pengajaran agama) pada *openbaar onderwijs* (sekolah-sekolah umum) sampai pemerintahan Hindia Belanda berakhir tidak pernah menjadi suatu kenyataan[8]. Pemerintah Belanda bersedia "mengizinkan adanya pendidikan agama pada sekolah-sekolah desa apabila dikehendaki rakyat"[9].

Pada sekolah-sekolah *partikelir* ada juga yang memberikan pelajaran agama Islam sebagai tambahan, misalnya pada sekolah *partikelir* yang waktu itu lazim disebut sebagai *H.I.S. met de Quran*, *MULO met de Quran*, dan sebagainya. Murid bebas untuk tidak mengikuti pelajaran agama jika orang tuanya menyatakan keberatan. Belajar agama Islam sukarela, tidak wajib. Pelajaran agama biasanya diberikan petang hari sehingga benar-benar pelajar yang merasa haus agama saja yang datang, apalagi kalau diingat jam pelajaran biasa berakhir pada pukul satu siang. Mereka yang berminat tadi dikumpulkan di satu ruangan besar sehingga suasana yang diciptakan semacam rapat umum atau tablig, bukan belajar berkelas[10].

Di sekolah-sekolah umum secara resmi belum diberikan pendidikan agama Islam. Hanya di Fakultas-fakultas Hukum telah ada mata kuliah Islamologi, yang dimaksudkan agar mahasiswa dapat

mengetahui hukum-hukum dalam Islam; sedangkan dosen-dosen yang memberikan kuliah Islamologi tersebut pada umumnya bukan orang Islam. Buku-buku yang dijadikan referensi atau literatur adalah karya-karya orientalis[11].

Pendidikan agama Islam yang tidak resmi itu kadang-kadang mendapatkan reaksi dari guru-guru yang tidak senang pada Islam, tetapi meskipun demikian perhatian murid-murid sangat besar, karena mereka membutuhkan santapan rohani. Walaupun timbul berbagai reaksi dari kalangan tertentu dan tidak diakui secara resmi oleh Pemerintah Hindia Belanda, PAI tetap dilaksanakan.

2. Pendidikan Agama Masa Kebangkitan Nasional

Pendidikan agama pada masa ini selain ditandai oleh adanya lembaga-lembaga pendidikan klasik terdapat juga lembaga-lembaga pendidikan modern dalam bentuk sekolah-sekolah seperti sekolah-sekolah Belanda. Akan tetapi terdapat perbedaan antara sekolah-sekolah Belanda dengan sekolah-sekolah agama. Dalam sekolah agama diberikan pelajaran agama Islam di samping pelajaran-pelajaran umum, sedangkan pada sekolah-sekolah Belanda pelajaran agama Islam tidak diajarkan. Oleh sebab itu, anak-anak sekolah negeri umumnya pergi mengaji ke pesantren atau surau pada sore hari.

Semangat kebangkitan nasional bagi bangsa Indonesia pada saat itu tidak semata-mata disebabkan oleh Politik Etis Belanda, tetapi lebih dominan disebabkan oleh berbagai peristiwa dunia yang terjadi, seperti kemenangan Jepang atas Rusia pada 1905 dan timbulnya Gerakan Pembaharuan Islam di negara-negara Timur Tengah dan di anak benua India[12].

Dilihat dari segi pendidikan terbukti bahwa timbulnya lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia yang didirikan oleh berbagai organisasi secara implisit merupakan jawaban terhadap pelaksanaan pendidikan Belanda yang mengarah pada *westernisasi* dan *kristenisasi*. Ki Hajar Dewantara memelopori kelahiran Perguruan Taman Siswa, dengan menekankan pemupukan dan pengembang-

an kebudayaan nasional yang berarti bangsa Indonesia tidak mau *westernisasi*. Disusul tumbuhnya perguruan-perguruan Islam yang didirikan oleh Muhammadiyah, al-Irsyad, al-Tawalib, Persatuan Umat Islam dan sebagainya. Kebangkitan ini secara konkret sebagai bukti autentik bahwa umat Islam tidak mau dimurtadkan dan dikristenkan.

Menurut M. Said[13] adanya tantangan rakyat terhadap pendidikan kolonial Belanda dan dalam perkembangannya pendidikan kolonial itu tidak dapat diterima oleh bangsa Indonesia, disebabkan oleh beberapa alasan. *Pertama*, tidak puas dengan sekolah-sekolah negeri, karena tidak memberikan pelajaran agama (Islam). Hal ini disebabkan bahwa di negeri Belanda sendiri terjadi pertentangan lama soal agama di sekolah-sekolah, sehingga Undang-Undang Tahun 1857 menghapuskan semua pelajaran agama di sekolah. Dengan sendirinya sikap netral terhadap agama tersebut dibawa juga ke Indonesia. Kemudian tahun 1871 dijadikan ketetapan raja, yaitu dilarang memberikan pelajaran agama di sekolah. Hal inilah salah satu penyebab yang mendorong K.H.A. Dahlan untuk mendirikan gerakan "Muhammadiyah" yang di antaranya berupa upaya untuk mendirikan sekolah-sekolah berdasarkan agama.

Kedua, tidak puas karena di HIS bukan saja diajarkan bahasa Belanda sejak kelas satu, tetapi juga diajarkan sejarah raja dan ningrat Belanda, serta nyanyian-nyanyian Belanda. Bahkan bagi anak-anak kelas tinggi HIS diwajibkan menggunakan bahasa Belanda di sekolah. Oleh karena itu, anak-anak Indonesia kurang mengetahui kebudayaan sendiri. Keadaan yang tidak memuaskan inilah yang mendorong Ki Hajar Dewantara untuk mendirikan sekolah-sekolah Taman Siswa berdasarkan kebudayaan sendiri.

Ketiga, tidak puas karena sekolah-sekolah pemerintah kolonial akhirnya hanya untuk menghasilkan tenaga pegawai atau tenaga buruh untuk kepentingan pemerintah kolonial atau perusahaan swasta mereka. Hal inilah yang mendorong Tengku Moh. Syafei untuk mendirikan sekolah yang berlandaskan pendidikan nasional yakni *Indonesia Nederlandse School* (INS) di Kayu Tanam.

Ketiga alasan tersebut yang mendasari tidak dapat diterimanya pendidikan kolonial oleh bangsa Indonesia. Sebagai reaksi dan sekaligus solusinya, sebagian tokoh pendidikan mendirikan sekolah-sekolah yang relevan untuk bangsa Indonesia, yaitu K.H.A. Dahlan dengan sekolah-sekolah Muhammadiyah yang berdasarkan agama Islam, Ki Hajar Dewantara dengan sekolah-sekolah Taman Siswa yang berdasarkan kebudayaan Indonesia, dan Tengku Moh. Syafei dengan sekolah-sekolah yang berdasarkan pendidikan nasional.

3. Masa Penjajahan Jepang

Pada masa pendudukan Jepang pendidikan agama Islam tidak banyak mengalami perubahan yang mencolok jika dibandingkan dengan pendidikan agama Islam pada masa kolonial Belanda dan masa kebangkitan nasional. Walaupun demikian, dalam banyak hal mulai diberikan bimbingan atau pedoman oleh pejabat-pejabat kantor agama yang biasanya terdiri dari kalangan ulama atau mereka yang aktif dalam gerakan agama pada masa penjajahan Belanda

Pada masa penjajahan Jepang pelajaran agama di sekolah-sekolah menengah diberikan pagi hari dan merupakan pelajaran yang diberi nilai dengan angka, sedangkan pendidikan agama Islam pada masa penjajahan Belanda tidak diberi nilai angka seperti itu, melainkan hanya diberi predikat baik, kurang baik, atau buruk. Materi pelajaran masih seluruhnya bergantung pada guru yang bersangkutan, dan tidak ada koordinasi antar guru-guru agama. Di sekolah-sekolah rendah pada masa pemerintahan Jepang pelajaran agama tidak diberikan, walaupun anak-anak sekolah rendah bisa juga mempelajari agama secara khusus pada petang hari di madrasah atau di tempat-tempat pengajian[14].

Pembahasan tentang pendidikan pada masa pendudukan Jepang berguna sekali untuk menelusuri pendidikan pada zaman sebelum merdeka. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa di Indonesia dikenal dua jenis pendidikan, yaitu pendidikan yang bersifat agama yang dilaksanakan secara informal oleh umat Islam sendiri, dan pendidikan umum yang bersifat netral terhadap agama.

Dengan kata lain, dua sistem pendidikan itu dapat dibedakan menjadi sistem pendidikan Barat yang berciri sekuler, dan sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh umat Islam.

Sekolah-sekolah yang didirikan oleh organisasi-organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan Persatuan Islam, meskipun mengikuti model pendidikan Barat, sekolah-sekolah tersebut tetap berdasarkan agama dan menekankan pelajaran umum. Dalam rangka menanamkan iman dan ideologi kepada siswa, sekolah-sekolah tersebut tidak berbeda dengan madrasah dan pesantren.

Perbedaan antara sekolah-sekolah umum yang didirikan oleh organisasi Islam dengan sekolah lain ialah bahwa sekolah-sekolah organisasi Islam itu berharap dapat menghasilkan lulusan yang sadar agama, sedangkan di sekolah-sekolah umum permasalahan itu tidak mendapat penekanan. Oleh karena itu, menurut kalangan Islam, para lulusan sekolah-sekolah umum (bukan Islam) pada umumnya kurang menghayati dan meyakini agama mereka (Islam), sekurang-kurangnya tidak peduli terhadap Islam jika tidak dapat dikatakan memusuhinya[15].

B. Periode Setelah Merdeka

Pendidikan agama setelah merdeka, dalam tulisan ini, dibatasi pada empat periode, yaitu (1) setelah proklamasi kemerdekaan RI, (2) pendidikan agama menurut UU No. 4/50 dan RUU Pengganti No. 4/50, (3) pendidikan agama di sekolah negeri, dan (4) pendidikan agama menurut UU No. 2/89. Pembagian sejarah PAI secara kronologis ini didasarkan pada kejadian objektif. Menurut Sartono Kartodirdjo[16] sejarah dalam arti objektif menunjuk pada kejadian atau peristiwa itu sendiri, ialah proses sejarah dalam aktualitasnya. Kejadian itu sekali terjadi tidak dapat diulang atau terulang lagi.

1. Masa Setelah Proklamasi Kemerdekaan R.I

Setelah diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, persoalan pendidikan yang menjadi pemikiran bagi umat Islam ialah bagaimana menghasilkan para lulusan yang

mampu menghadapi zaman dan sesuai dengan zaman, tetapi masih tetap taat dan tekun beragama. Umat Islam ingin mengisi jurang yang dijumpai antara sistem pendidikan Islam di satu sisi dan sistem pendidikan Barat di sisi lain. Untuk keperluan itu banyak kalangan umat Islam mengharapkan Departemen Agama dan Departemen Pendidikan dan Pengajaran berperan utama dalam pendidikan agama (Islam).

Ki Hadjar Dewantara selaku Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan (PP&K) pada kabinet pertama, di Yogyakarta, menyatakan dengan tegas bahwa pendidikan agama perlu dijalankan di sekolah-sekolah negeri. Dalam rapatnya pada 27 Desember 1945, Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) mengusulkan kepada Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (PP&K) supaya mengusahakan pembaruan pendidikan dan pengajaran di Indonesia sesuai dengan rencana pokok usaha pendidikan dan pengajaran baru yang meliputi sepuluh persoalan, termasuk di dalamnya masalah pengajaran agama, madrasah dan pondok pesantren. Mengenai masalah ini Badan Pekerja menyarankan bahwa:

Pengajaran agama hendaklah dapat tempat yang teratur saksama, hingga cukup mendapat perhatian yang semestinya dengan tidak mengurangi kemerdekaan golongan-golongan yang berkehendak mengikuti kepercayaan yang dipeluknya. Tentang cara melakukan ini sebaiknya Kementerian mengadakan perundingan dengan Badan Pekerja.

Madrasah dan pesantren-pesantren yang pada hakikatnya adalah satu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat berakar dalam masyarakat Indonesia umumnya hendaklah pula mendapat perhatian dan bantuan yang nyata dengan berupa tuntunan dan bantuan materiil dari Pemerintah[17].

Sebagai negara yang baru merdeka sudah barang tentu banyak masalah yang dihadapi. Pergantian kabinet yang sering terjadi menyebabkan program kerja pemerintah tidak dapat berjalan lancar. Saran Badan Pekerja KNIP barulah mulai dapat dilaksanakan se-

masa Menteri PP&K dipegang oleh Mr. Suwandi (2 Oktober 1946-27 Juni 1947), dengan jalan membentuk Panitia Penyelidik Pengajaran di bawah pimpinan Ki Hadjar Dewantara dengan para anggota yang mewakili berbagai aliran lapisan masyarakat waktu itu.

Panitia yang dibentuk dengan Surat Keputusan Menteri PP&K No.104.Bhg.0 tanggal 1 Maret 1946 itu bertugas (a) merencanakan susunan baru tiap-tiap macam sekolah, (b) menetapkan bahan-bahan pengajaran yang sifatnya praktis dan tidak terlalu berat, dan (c) menyiapkan rencana pelajaran untuk tiap-tiap kelas, termasuk fakultas. Dalam rapat-rapatnya panitia tidak hanya meninjau dan membahas pendidikan dan pengajaran dari tingkat Sekolah Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi, tetapi juga soal pendidikan agama (Islam), budi pekerti, kewajiban belajar, dan bahasa.

Hasil kerja Panitia Penyelidik Pengajaran yang menyangkut soal pendidikan agama (Islam) adalah: (1) Hendaknya pelajaran agama diberikan pada semua sekolah dalam jam pelajaran dan di S.R (Sekolah Rakyat, sekarang S.D atau Sekolah Dasar) diajarkan mulai kelas IV, (2) Guru agama disediakan oleh Kementerian Agama dan dibayar oleh Pemerintah, (3) Guru agama harus mempunyai pengetahuan umum dan untuk maksud itu harus ada pendidikan guru agama, (4) Pesantren dan madrasah harus dipertinggi mutunya, (5) Tidak perlu bahasa Arab[18].

Pendidikan agama (Islam) sebagai salah satu mata pelajaran pendidikan agama di sekolah mengalami proses yang panjang, meskipun secara informal, nonformal dan formal telah dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pendidikan yang ada sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, pendidikan pesantren misalnya atau sekolah-sekolah yang berdasarkan agama.

Eksistensi pendidikan agama setelah kemerdekaan RI semakin jelas posisinya, karena lembaga-lembaga pendidikan agama Islam diakui bahkan dilindungi dan dikembangkan oleh pemerintah. Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) dalam rapatnya tanggal 22 Desember 1945 di antaranya menyatakan bahwa dalam rangka memajukan pendidikan dan pengajaran di

negeri ini, pendidikan di langgar-langgar dan madrasah-madrasah dianjurkan agar berjalan terus dan diperpesat. Pernyataan BPKNIP diikuti dengan keluarnya Keputusan BPKNIP tanggal 27 Desember 1945 yang menyatakan agar madrasah-madrasah itu mendapatkan perhatian dan bantuan dari pemerintah[19].

Pendidikan agama Islam waktu itu masih dipahami juga sebagai pendidikan Islam artinya kedua istilah tersebut belum dibedakan secara spesifik, bahkan pemahaman seperti itu berlangsung hingga ditetapkannya Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Padahal tampak jelas adanya perbedaan antara pendidikan agama Islam dengan pendidikan Islam. Pendidikan agama Islam (PAI) dalam UUSPN disebutnya mata pelajaran/bidang studi pandidikan agama Islam untuk semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sekolah, sedangkan pendidikan Islam merupakan bagian dari lembaga pendidikan yang merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional.

Berdasar uraian di atas pembahasan dalam tulisan ini lebih menitikberatkan PAI sebagai pelajaran pendidikan agama Islam dalam sekolah umum, di samping pelajaran pendidikan agama pada sekolah agama.

Menurut data sejarah, sejak setelah merdeka sekolah umum dan sekolah agama sama-sama dikembangkan oleh pemerintah dan masyarakat. Hal ini terbukti hingga sekarang keberadaan dua macam sekolah tersebut sama-sama masih diakui. Sekolah umum, di antaranya SD, SLTP, SLTA, dan Perguruan Tinggi, sedangkan sekolah agama, di antaranya: MI, MTs.,MA, dan Perguruan Tinggi Agama. Di samping kedua jenis sekolah tersebut, ada pula pendidikan pesantren dan pendidikan sejenis yang lain. Masing-masing sekolah mempunyai penekanan program pendidikan yang berbeda satu dengan lainnya. Sekolah umum lebih menekankan bidang ilmu yang berkategori umum, sedangkan sekolah agama lebih menitikberatkan pada bidang ilmu agama sehingga kurang penekanan pada bidang keilmuan yang bersifat umum. Sebaliknya, sekolah umum kurang perhatiannya pada bidang keilmuan agama.

Dua macam sekolah tersebut pada masa setelah merdeka tetap dipertahankan eksistensinya, bahkan BPKNIP, pemerintah, bersama masyarakat berupaya memasukkan pendidikan agama pada sekolah umum. Bagi sekolah yang berdasar keagamaan memang tidak ada masalah karena pendidikan agama dijadikan program dalam pelaksanaan pendidikan sekolah, tetapi bagi sekolah umum negeri/swasta pendidikan agama memerlukan perjuangan keras sejak sebelum dan setelah merdeka. Oleh karena itu, pendidikan agama dalam sekolah umum negeri/swasta dalam tulisan ini dikaji proses pertumbuhan dan perkembangannya berikut tata aturan perundang-undangannya bagi pendidikan agama pada sekolah umum negeri/swasta.

Berdasarkan Penetapan Pemerintah No.1/SD tanggal 1 Januari 1946 dibentuklah sebuah lembaga yang disebut Kementerian Agama berikut Menteri Agama sebagai pimpinan lembaga tersebut. Kemudian disusul keputusan No. 1185/K.J tanggal 20 Nopember 1946 yang menetapkan bahwa Bagian C melaksanakan kewajiban-kewajiban antara lain: (a) urusan pelajaran dan pendidikan agama Islam dan Kristen, (b) urusan pengangkatan guru-guru agama, dan (c) urusan pengawasan pelajaran agama[20]. Dilihat dari data yang ada pendidikan agama Islam lebih semakin kokoh dan kuat setelah lahirnya Kementerian Agama dan Menteri Agama karena secara struktural merupakan tanggung jawab Kementerian Agama dan Menteri Agama.

Langkah pertama untuk melaksanakan hasil keputusan Badan Penyelidik Pengajaran, khususnya mengenai agama, Menteri P.P. & K dan Menteri Agama mengeluarkan peraturan bersama dengan nomor keputusan 1142/Bhg.A. (Pengajaran) tanggal 2-12-1946 dan nomor 1285/K.J. (Agama) tanggal 12-12-1946, yang menentukan adanya pengajaran agama di sekolah-sekolah rendah sejak kelas IV dan berlaku mulai tanggal 1 Januari 1947. Peraturan bersama ini dijadikan landasan pertama untuk menyelenggarakan pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri dan selanjutnya pendidikan agama dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

di Republik Indonesia. Di antaranya peraturan perundangan itu ialah:

1. Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1949 Pasal 1;
2. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1950 Pasal 8;
3. Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat) Pasal 39;
4. UUDS (Undang-undang Dasar Sementara) Pasal 41;
5. UU No. 12 tahun 1954 jo. UU No. 4 tahun 1950 Pasal 20;
6. Peraturan bersama Menteri PP&K dan Menteri Agama Nomor 17678/Kab. tanggal 16 Juli 1951 (Pendidikan) dan Nomor K/I/9180 tanggal 16 Juli 1951 (Agama);
7. Ketetapan MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) No. XXVII/MPRS/1966, Pasal 1, tanggal 5 Juli 1966; dan
8. Ketetapan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) No. IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Agama bidang Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

2. Pendidikan Agama Islam Menurut UU No. 4/50 dan RUU No.4/50

Undang-Undang No. 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah mengenal tiga macam pendidikan, yaitu pendidikan dan pengajaran di sekolah, pendidikan dan pengajaran di sekolah agama, dan pendidikan masyarakat. Akan tetapi undang-undang tersebut hanya mengatur pendidikan dan pengajaran di sekolah, sedangkan dua macam lainnya ditetapkan dalam undang-undang lain (lihat pasal 2(1) dan (2))[21]. Yang dimaksud pendidikan sekolah dalam UU No. 4/1950 pasal 1 ayat (2) adalah pendidikan dan pengajaran yang diberikan bersama-sama kepada murid-murid yang berjumlah sepuluh orang atau lebih.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa UU No.4/50 semata-mata mementingkan pendidikan dan pengajaran di sekolah bukan pendidikan dan pengajaran di sekolah agama dan pendidikan di masyarakat. Padahal dua macam pendidikan ini sudah diakui keberadaannya di kalangan bangsa Indonesia saat itu, bahkan menurut Mukti Ali[22] dan Deliar Noer[23] undang-undang yang meng-

atur pendidikan dan pengajaran di sekolah agama hingga kini belum ada. Namun demikian, undang-undang tersebut mengisyaratkan bahwa menteri agama dapat memberikan pengakuan terhadap sekolah-sekolah agama yang telah ada. Selama ini untuk mengatur sekolah-sekolah agama menteri agama mengeluarkan Surat-surat Keputusan Menteri Agama selama belum ada undang-undang yang mengaturnya. Sedangkan pengakuan ijazahnya ada yang diatur dengan Keputusan Menteri Agama (misalnya No. 2/1963 dan No. 107/1964) dan ada pula yang diatur dengan Keputusan Menteri PP&K. Untuk yang kedua ini dapat dikemukakan sebagai contoh Keputusan Menteri PP&K No. 17737/C.V. tanggal 17 Juli 1951 tentang Pengakuan Ijazah Sekolah-sekolah Agama yang meliputi: Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Seminari dan berbagai macam namanya, Mu'allimin, Rodhotul Islamiyah, Walfajri School dan sebagainya.[24]

Pada UU No.4/50 yang pada intinya merupakan dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah, termasuk juga dasar-dasar pendidikan agama (Islam) di sekolah, ternyata banyak permasalahan, di antaranya disebutkan pada rumusan pasal 20 UU No.4/50 "dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama, orang tua menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut". Oleh karena itu dapat dipahami bahwa pendidikan agama (Islam) di sekolah bersifat "elektif" (pilihan)[25].

Jika ditelaah lebih lanjut rumusan-rumusan yang terdapat dalam RUU Pengganti UU No. 4/50 ternyata bahwa kedua RUU itu tidak memberikan jalan keluar untuk mengatasi kesulitan penyelenggaraan sekolah-sekolah agama, bahkan terkesan bahwa sekolah agama berada di luar Sistem Pendidikan Nasional. Di samping itu, keberadaan pendidikan agama (Islam) di sekolah tetap sebagai pelajaran "elektif" (pilihan) sehingga pelajaran agama (Islam) boleh diikuti dan boleh tidak diikuti.

Pendidikan dan pengajaran sekolah agama dianaktirikan atau jika tidak boleh dikatakan diabaikan, karena tidak adanya undang-undang yang mengatur tentang pendidikan dan pengajaran sekolah

agama sebagaimana pendidikan dan pengajaran sekolah pada umumnya. Di samping itu, nasib pelajaran agama (Islam) di sekolah-sekolah juga tidak jauh berbeda dengan nasib sekolah agama karena pelajaran agama tetap sebagai pelajaran pilihan bersifat manasuka, padahal pelajaran agama (Islam) di sekolah negeri telah diatur jauh sebelum keluarnya UU No.4 Tahun 1950.

Biarpun penyelenggaraan pendidikan agama telah diatur dengan berbagai peraturan perundangan, harus diakui bahwa dalam kenyataannya masih banyak masalah dan kekurangan yang perlu diatasi. Kekurangan dan kelemahan pendidikan agama itu terjadi baik pada Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah maupun Perguruan Tinggi. Hal ini seirama dengan situasi dan kondisi sosial politik di Indonesia, bahkan menurut Muljanto Sumardi[26] tidak terlalu meleset kalau dikatakan bahwa rumusan-rumusan produk hukum yang menyangkut pendidikan agama di sekolah umum merupakan hasil kompromi antara kelompok yang menghendaki mata pelajaran pendidikan agama sebagai mata pelajaran wajib di sekolah dan kelompok yang berpendirian bahwa mewajibkan mata pelajaran pendidikan agama di sekolah-sekolah bertentangan dengan kebebasan seseorang untuk memeluk agamanya.

3. Pendidikan Agama Islam di Sekolah Negeri

Secara fundamental pendidikan agama di sekolah negeri pada dasarnya sudah cukup kuat baik secara yuridis maupun berdasarkan dukungan dan dorongan masyarakat "muslim" karena memang pendidikan agama itu sendiri merupakan bagian dari sistem nilai yang mereka yakini. Oleh karena itu, pendidikan agama di sekolah negeri justru sangat perlu diperjuangkan.

Dengan merujuk peraturan perundangan Republik Indonesia yang menjadi landasan pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri, yang meliputi:

(1) Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1949 pasal 1;
(2) Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1950 pasal 6;

(3) Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat) pasal 39;
(4) UUDS (Undang-Undang Dasar Sementara) pasal 41; dan
(5) Peraturan Bersama Menteri PP&K dan Menteri Agama No. 17678/Kab tanggal 16 Juli 1951 (Pendidikan) dan No. K/I/9180 tanggal 16 Juli 1951 (Agama), pendidikan agama mutlak menjadi bagian integral pendidikan dan pengajaran di sekolah negeri. Sehubungan dengan hal itu, dalam UU No. 4 tahun 1950 pasal 20 disebutkan bahwa:

Dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama; orang tua murid menetapkan apakah anaknya mengikuti pelajaran tersebut.

Cara menyelenggarakannya pengajaran agama di sekolah negeri diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan bersama-sama Menteri Agama[27].

Demikian pula, dalam pasal 20 terdapat penjelasan sebagai berikut:

(a) Apakah suatu jenis sekolah memberi pelajaran agama adalah tergantung pada umur dan kecerdasan murid-muridnya;
(b) Murid-murid yang sudah dewasa boleh menetapkan ikut atau tidaknya ia dalam pelajaran agama;
(c) Sifat pengajaran agama dan jumlah jam pelajaran ditetapkan dalam undang-undang tentang jenis sekolahnya;
(d) Pelajaran agama tidak memengaruhi kenaikan kelas anak[28].

Perkembangan berikutnya, setelah UU No.4/50 disahkan, untuk menyesuaikan dengan keadaan pada waktu itu Peraturan Bersama tahun 1946 antara Menteri PP&K dan Menteri Agama kemudian disusuli dengan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dan Menteri Agama No. 17678/Kab. tanggal 16 Juli 1951 (Pendidikan) dan No. K. J. /9180 tanggal 16 Juli 1951 (Agama)

Peraturan Bersama yang merupakan penyempurnaan Peraturan Bersama tahun 1946 itu berisi ketentuan-ketentuan tentang lamanya pendidikan agama dalam seminggu, pengangkatan dan

pembiayaan guru agama, kewajiban guru agama, rencana pelajaran agama, petunjuk bagi guru agama, dan pendidikan agama di sekolah *partikelir*.

Peraturan Bersama ini dibandingkan dengan Peraturan Bersama tahun 1946 lebih maju dalam tiga hal, yaitu: (1) peraturan bersama ini mengatur penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah-sekolah lanjutan ¾ yang dalam kenyataannya memang sudah berjalan, sementara menunggu undang-undang khusus tentang jenis pendidikan dan pengajaran sebagai tersebut dalam pasal 8 Undang-undang No. 4 tahun 1950; (2) untuk lingkungan-lingkungan yang istimewa, dalam peraturan yang baru ini diberi kesempatan untuk melaksanakan pendidikan agama mulai kelas I, asalkan mutu pengetahuan umum bagi sekolah-sekolah rendah itu tidak kurang jika dibandingkan dengan lain-lain daerah. Yang dimaksud lingkungan istimewa adalah lingkungan yang mempunyai penduduk yang sangat kuat agamanya. Adapun yang berhak menyatakan bahwa suatu lingkungan itu istimewa ialah walikota dalam wilayah kotapraja waktu itu dan bupati yang bersangkutan di wilayah lain atas permintaan penduduk dalam wilayah itu. Jika dianggap perlu walikota atau bupati dapat meminta pertimbangan gubernur lebih dahulu sebelum menetapkan pendiriannya; dan (3) peraturan yang lama tidak berlaku untuk sekolah-sekolah *partikelir*[29].

Pengadaan guru agama diangkat oleh Menteri Agama atas usul Kantor Pendidikan Agama Kabupaten, dengan cara sebelum menyampaikan usulan pengangkatan guru-guru agama Islam, Kantor Pendidikan Agama setempat diwajibkan mengadakan konsultasi dengan organisasi-organisasi Islam yang mempunyai kegiatan dalam lapangan pendidikan di daerah-daerah yang bersangkutan. Dengan cara ini, kedaulatan gereja maupun masyarakat Islam setempat tidak tersinggung.

Menurut Peraturan Bersama jumlah jam pelajaran pendidikan agama 2 jam setiap minggu, sedangkan untuk lingkungan yang istimewa jam pendidikan agama dapat ditambah menurut kebu-

tuhan, asal tidak melebihi 4 jam seminggu dan tidak mengurangi jam pelajaran pengetahuan umum. Di sekolah-sekolah lanjutan tingkat pertama dan tingkat atas baik sekolah-sekolah umum maupun sekolah vak (sekarang disebut sekolah kejuruan) diberi pendidikan agama 2 jam pelajaran dalam tiap minggu.

Di samping hal-hal tersebut di atas, hasil belajar mata pelajaran pendidikan agama tidak dinilai dalam bentuk angka, tetapi dinyatakan dengan kata *baik, sedang*, atau *kurang* yang dimasukkan juga dalam rapor tetapi tidak memengaruhi kenaikan kelas.

Rencana pelajaran agama sebelum disetujui dan ditetapkan perlu dibicarakan lebih dahulu dengan Kementerian PP&K yang pada saat itu mempunyai cukup tenaga yang dapat memberi nasihat mengenai segi-segi pedagogisnya. Hal ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengurangi wewenang dan kedaulatan Kementerian Agama, tetapi justru untuk memperlancar penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah-sekolah.

Dalam Ketetapan MPRS No. XXVII /MPRS /1960 tanggal 5 Juli 1966 pasal 1 menyatakan mengubah diktum TAP No. II/MPRS/ 1960 BAB II pasal 2 ayat 3 dengan menghapus kata-kata dengan pengertian bahwa murid-murid dengan menyatakan keberatannya sehingga berbunyi sebagai berikut: "Menetapkan pendidikan agama menjadi pelajaran di sekolah, mulai dari SD sampai dengan Universitas-Universitas Negeri". Selanjutnya menyatakan bahwa pendidikan di negeri kita bertugas antara lain untuk mempertinggi moral budi pekerti dan memperkuat keyakinan agama dan sebagainya. Dalam TAP MPR No. IV/MPR/1973 dan TAP/MPR/1978 (GBHN) ditetapkan bahwa pendidikan agama dimasukkan dalam kurikulum sekolah mulai dari SD sampai dengan Universitas-Universitas Negeri. Dalam pelaksanaan lebih lanjut Menteri P dan K mengeluarkan keputusan tentang pembakuan kurikulum SD sampai dengan SMA dimana pendidikan agama menjadi salah satu bidang studi yang diajarkan dalam tiap minggu 2 jam untuk kelas I, II, dan III SD, dan 3 jam untuk kelas IV, V, dan VI SD, dan 2 jam untuk kelas I, II, dan III SMP dan SMA. Dengan demikian, bidang

studi pendidikan agama merupakan mata pelajaran wajib bagi semua murid/siswa sekolah-sekolah tersebut dan nilainya menentukan kelulusan mereka.

Setelah dikeluarkannya Kepres No. 34 tahun 1972 dan Inpres No. 15 tahun 1974 serta pedoman pelaksanaannya ditetapkan tentang fungsionalisasi tugas pendidikan dan latihan, yaitu Departemen P dan K untuk pendidikan, Depnaker Transkop untuk pendidikan dan latihan tenaga kerja bukan pegawai negeri, sedang LAN bertugas pendidikan dan latihan pegawai negeri. Sedangkan Departemen Agama sesuai dengan pedoman pelaksanaan Kepres 34 tahun 1974 dan Kepres 15/74 di bidang pembinaan pendidikan umum dan keguruan, bertugas untuk menyusun pedoman/bahan pelajaran agama bagi lembaga pendidikan dasar, menengah pertama dan/atau tinggi, baik negeri maupun swasta.

Dalam rangka pelaksanaan Kepres dan Inpres tersebut telah ditetapkan SKB 3 Menteri No. 6/1975 (Agama) No. 037/U/1975 (PDK) Bapak Presiden dalam rapat Kabinet Terbatas bidang Kesra tanggal 20 Nopember 1975 yang antara lain dinyatakan bahwa madrasah perlu ditingkatkan mutunya, dan seterusnya. Dengan SKB 3 Menteri itulah maka Departemen Agama telah memperoleh landasan hukum yang baru bagi penyelenggaraan pembinaan madrasah. Selanjutnya landasan hukum itu diperkuat pula dengan adanya Kepres No. 44 tahun 1974 tentang tugas dan fungsi Departemen yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Menteri Agama No. 18 tahun 1975 (yang telah disempurnakan).

4. Pendidikan Agama Menurut UU No. 2/89

Pendidikan agama Islam dalam perjalanan sejarahnya dari waktu ke waktu mengalami pasang surut seirama dengan situasi dan kondisi sosial politik Indonesia. Baik pendidikan agama pada pendidikan dan pengajaran sekolah umum maupun keberadaan pendidikan dan pengajaran pada sekolah agama, dilihat dari segi perkembangannya semakin menggembirakan. Pendidikan agama sebagai bidang pelajaran pendidikan sekolah ternyata kondisinya semakin

mantap karena pada akhirnya pendidikan agama itu ditetapkan sebagai program wajib kurikulum semua jenis dan jenjang pendidikan jalur sekolah dari pendidikan dasar (SD dan SLTP), SMU/ SMK dan sederajat, sampai pendidikan tinggi. Demikian juga pendidikan agama pada sekolah-sekolah agama diajarkan dari MI, MTs., MA hingga perguruan tinggi agama.

Keadaan pendidikan agama sebagaimana tersebut di atas, dapat dibuktikan dengan dimasukkannya pendidikan agama ke dalam GBHN, mulai GBHN tahun 1973 sampai dengan GBHN 1993 dan bahkan kemungkinan besar GBHN 1998 yang akan datang, yang pada pokoknya dinyatakan bahwa pelaksanaan pendidikan agama secara langsung dimasukkan ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar sampai dengan universitas (perguruan tinggi) dan dikuatkan lagi dengan Undang-Undang No. 2 tahun 1989 yaitu tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada Bab IV pasal 11 ayat (6) yang berbunyi: "Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan". Begitu pula pada Bab IX pasal 29 ayat (2) dalam UUSPN disebutkan: "Isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat: pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan".

Tenaga pengajar (guru) pendidikan agama di sekolah-sekolah disebutkan dalam penjelasan UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 ayat (1 dan 2) bahwa: " (1) Kewenangan mengajar diberikan melalui surat pengangkatan seseorang sebagai tenaga pengajar pada satuan pendidikan tertentu oleh pejabat yang berwenang dengan memperhatikan persyaratan-persyaratan yang berlaku; (2) Tenaga pengajar pendidikan agama harus baragama sesuai dengan agama yang diajarkan dan agama peserta didik yang bersangkutan"[30]. Dengan ketentuan tersebut, guru pendidikan agama Islam harus memeluk agama Islam, dan begitu pula peserta didik yang menerima pendidikan agama Islam harus beragama Islam.

Menurut peraturan perundangan nomor 2 tahun 1989 yang merupakan undang-undang yang mengatur penyelenggaraan suatu sistem pendidikan nasional sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar 1945, pendidikan agama merupakan mata pelajaran wajib untuk setiap jenjang pendidikan. Melalui perjalanan waktu yang cukup panjang proses penyusunannya, sejak tahun 1945 sampai dengan tahun 1989, tampaknya undang-undang tersebut juga merupakan puncak dari usaha mengintegrasikan pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional, sebagai usaha untuk menghilangkan dualisme sistem pendidikan yang selama ini masih berjalan. Oleh karena itu, masalah-masalah pendidikan terutama yang menyangkut kurikulum pendidikan semuanya di bawah koordinasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud). Dengan demikian berarti UU Nomor 2 tahun 1989 tersebut merupakan wadah formal terintegrasinya pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional, sehingga dengan adanya wadah tersebut, pendidikan Islam mendapatkan peluang serta kesempatan untuk terus berkembang[31]. Menurut UU Nomor 2 Tahun 1989 tersebut, pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan[32].

5. Pendidikan Agama Menurut UU Sisdiknas No. 20/2003

Pendidikan agama menurut UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 merupakan bagian integral dan merupakan subsistem pendidikan nasional. Disebutkan dalam Bab I Pasal 1 ayat (2) Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Bab I Pasal 1 ayat (3) Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pen-

didikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.[33]

Pendidikan agama memiliki posisi sangat urgen sebagai salah satu subsistem pendidikan nasional dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. UU Sisdiknas Bab II Pasal (3) Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Berdasarkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, kiranya tepat dan cocok bahwa pendidikan agama sebagai pondasi dan pilar penting dalam membentuk manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Oleh karen itu, tepat sekali bahwa pendidikan agama merupakan salah satu isi kurikulum wajib semua jenjang pendidikan.

UU Sisdiknas Bab X Pasal 36 ayat (1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 36 ayat (2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diverifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Pasal 36 ayat (3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:

a. Peningkatan iman dan takwa;
b. Peningkatan akhlak mulia;
c. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
d. Keragaman potensi daerah dan lingkungan;
e. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
f. Tuntutan dunia kerja;
g. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
h. Agama;
i. Dinamika perkembangan global; dan

j. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

Konten kurikulum yang wajib di antaranya adalah pendidikan agama untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah serta kurikulum pendidikan tinggi. Hal ini sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:

a. Pendidikan agama;
b. Pendidikan kewarganegaraan;
c. Bahasa;
d. Matematika;
e. Ilmu pengetahuan alam
f. Ilmu pengetahuan sosial;
g. Seni dan budaya;
h. Pendidikan jasmani dan olah raga;
i. Keterampilan/kejuruan; dan
j. Muatan lokal.

Pasal 37 ayat (2) Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat: (a) Pendidikan agama; (b) Pendidikan kewarganegaraan; dan (c) Bahasa

Dengan berlakunya Undang-Undang Sisdiknas no. 20 tahun 2003 serta peraturan-peraturan pelaksanaannya, maka penyelenggaraan pendidikan di Indonesia dari tingkat prasekolah sampai dengan Perguruan Tinggi harus mengacu dan berpedoman kepadanya.

CATATAN

[1]Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Mutiara, 1979), hlm. 10
[2]I. Djumhur, *Sejarah Pendidikan* (Bandung: C.V. Ilmu, 1976), hlm. 88
[3]Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai (*Jakarta: LP3ES,
1994), hlm. 34
[4]Nurcholis Madjid, "Merumuskan Kembali Pendidikan Pesantren", dalam M. Dawam Rahardjo, *Pergulatan Dunia Pesantren: Membangun dari Bawah* (Jakarta: P3M, 1985), hlm. 3-4
[5]Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 (Bandung: Citra Umbara, 2014), hlm. 16.
[6]M. Said, *Pendidikan Abad Kedua puluh dengan Latar Belakang Kebudayaannya* (Jakarta: Mutiara, Ed. I.P. Simanjuntak, 1981), hlm. 42
[7]Depag RI, *Laporan Survey dan Seminar Pendidikan Agama pada Perguruan Umum* (Jakarta: Proyek Peningkatan Penelitian Keagamaan, 1969), hlm. 4
[8]Muljanto Sumardi, *Sejarah Singkat Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: LPIAK, Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Depag, 1977), hlm. 5
[9]Deliar Noer, *Administrasi Islam di Indonesia* (Jakarta: C.V. Rajawali, 1983), hlm. 47
[10]*Ibid*, hlm. 51
[11]Zuhairini, dkk, *Metodik Khusus Pendidikan Agama* (Surabaya: Usaha Nasional, 1983), hlm.16
[12]Machnun Husein, *Pendidikan Islam dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1981) hlm. 9
[13]M. Said, *Ibid.,* hlm. 49
[14]Deliar Noer, *Ibid.,* hlm. 51-52
[15]*Ibid*, hlm. 53
[16]Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm. 15
[17]Soegarda Poerbakawatja, *Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka* (Jakarta: Gunung Agung, 1970), hlm. 38
[18]Muljanto Sumardi, *Ibid.,* hlm. 7
[19]Machnun Husein, *Ibid.,* hlm. 13
[20]Muljanto Sumardi, *Ibid.*, hlm. 17
[21]Machnun Hesein, *Ibid.*, hlm. 15
[22]Dalam Machnun Hesein, *Ibid.*, hlm. 16
[23]Deliar Noer, *Ibid.*, hlm. 47
[24]Machnun Husein, *Ibid.*, hlm. 16
[25]*Ibid.*, hlm. 19
[26]Muljanto Sumardi, *Ibid.*, hlm. 18
[27]*Ibid.*, hlm. 8

[28]*Ibid*.
[29]*Ibid*., hlm. 9
[30]Penjelasan Undang-undang RI No. 2 Tahun 1989, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 38
[31]Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan* (Jakarta: LKIS, 1995), hlm. 86
[32]UU Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Jakarta: PT Armas Duta Jaya), hlm. 4
[33]UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 (Bandung: Citra Umbara, 2014), hlm. 3.

Bab 3
KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

A. Hakikat Kurikulum

Pengertian kurikulum secara etimologi (bahasa), kurikulum berasal dari bahasa Yunani *curir* yang artinya pelajari dan *curere* yang berarti tempat berpacu. Istilah kurikulum berasal dari dunia olah raga pada zaman Romawi Kuno di Yunani yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis *start* sampai garis *finish*.[1] Kurikulum dalam bahasa Arab *manhaj* yang artinya jalan terang yang dilalui manusia di berbagai kehidupan. Kurikulum pendidikan *manhaj ad-dirasah* dalam kamus tarbiyah adalah seperangkat perencanaan dan media yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan.[2]

Kurikulum secara etimologis adalah sesuatu jarak atau jalan yang harus dipelajari dan ditempuh oleh manusia yang direncanakan lembaga pendidikan sebagai media dan acuan untuk mencapai tujuan pendidikan. Ada beberapa pendapat kurikulum secara terminologi antara lain sebagai berikut.

Kurikulum adalah rancangan pengajaran atau sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu program untuk memperoleh ijazah.[3] Pandangan lama kurikulum merupakan kumpulan mata pelajaran yang harus disampaikan guru atau dipelajari oleh siswa. Pendapat ini sejak zaman Yunani Kuno

dalam lingkungan atau hubungan tertentu pendangan ini dan masih dipakai sampai sekarang.[4] Kurikulum meliputi empat kategori, yaitu: (1) *curriculum as product, (2) curriculum as a program, (3) curriculum as intended learnings, (4) curriculum as the experiences pf the leaner.*[5] Hilda Taba mendefinisikan kurikulum sebagai rencana mengajar atau sesuatu yang direncanakan untuk dipelajari anak-anak (*a plan for learning*).[6]

Menurut Zakiah Daradjat, dkk. kurikulum sebagai suatu program yang direncanakan dalam bidang pendidikan dan dilaksanakan untuk mencapai sejumlah tujuan tertentu.[7]Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pasal 1 ayat (19) bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.[8]

Berdasarkan uraian di atas bahwa yang dimaksud kurikulum secara terminologis adalah rancangan program pembelajaran yang direncanakan lembaga pendidikan yang mencakup sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematis, disampaikan guru dalam pembelajaran dan dipelajari oleh siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran dan menyelesaikan suatu program pendidikan untuk memperoleh ijazah.

Menurut Al-Syaibani bahwa penetapan dasar pokok kurikulum didasarkan pada dasar agama, dasar falsafah, psikologis, dan sosiologis. Artinya dalam menyusun kurikulum harus berdasarkan dan mempertimbangkan nilai-nilai keagamaan yang tercantum dalam al-Quran dan Sunah Rasulullah, nilai ini merupakan kebenaran yang universal, abadi, dan bersifat futuristik.[9] Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UU RI No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Pendidikan nasional berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Ini dapat dijadikan prinsip dasar bahwa esensi akar pendidikan nasional adalah nilai agama, budaya nasional, dan bersifat adaptif terhadap perubahan zaman. Sistem penyelenggaraan pendidikan nasional diatur oleh negara. Disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Demikian pula fungsi dan tujuan pendidikan nasional diatur dalam Undang-Undang Sisdiknas sebagai berikut.

Pada Bab II Pasal 3 UU RI No 20 tahun 2003 bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

B. Kurikulum Nasional

Disebutkan dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, Bab I Pasal 1 ayat (19) bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.[10] Kurikulum nasional mencakup perencanaan, pengaturan, tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara pelaksanaan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Pasal 1 ayat (20) Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pasal 1 ayat (21) Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 36 ayat (1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 36 ayat (2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diverifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Pasal 36 ayat (3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: (a) Peningkatan iman dan takwa; (b) Peningkatan akhlak mulia; (c) Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; (d) Keragaman potensi daerah dan lingkungan; (e) Tuntutan pembangunan daerah dan nasional; (f) Tuntutan dunia kerja; (g) Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; (h) Agama; (i) Dinamika perkembangan global; dan (j) Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

Konten kurikulum nasional sesuai Pasal 37 ayat (1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: (a) Pendidikan agama; (b) Pendidikan kewarganegaraan; (c) Bahasa; (d) Matematika; (e) Ilmu pengetahuan alam; (f) Ilmu pengetahuan sosial; (g) Seni dan budaya; (h) Pendidikan jasmani dan olah raga; (i) Keterampilan/kejuruan; dan (j) Muatan lokal.

Pasal 37 ayat (2) Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat: (a) Pendidikan agama; (b) Pendidikan kewarganegaraan; dan (c) Bahasa.

C. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

UU Sisdiknas Bab I Pasal 1 ayat (7) Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujutan pendidikan. Pasal 1 ayat (8) Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Pasal 1 ayat (9) Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.

Pasal 1 ayat (10) Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pasal 1 ayat (16) Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Pasal 1 ayat (17) Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

Permendiknas No 23 Tahun 2006 Tanggal 23 Mei 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Standar Kompetensi Kelompok Mata Pelajaran (SK-KMP) terdiri dari kelompok mata pelajaran: (a) Agama dan Akhlak Mulia; (b) Kewarganegaraan dan Kepribadian; (c) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan (d) Estetika; jasmani, Olahraga, dan Kesehatan.

Standar Kompetensi Kelompok Mata Pelajaran (SK-KMP) dikembangkan berdasarkan tujuan dan cakupan muatan dan/atau kegiatan setiap kelompok mata pelajaran, yakni:

1. Kelompok mata pelajaran Agama dan Akhlak Mulia bertujuan: membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Tujuan tersebut dicapai melalui muatan dan/atau kegiatan agama, kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olahraga, dan kesehatan.
2. Kelompok mata pelajaran Kewarganegaraan dan Kepribadian bertujuan: membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Tujuan ini dicapai melalui muatan dan/atau kegiatan agama, akhlak mulia, kewarganegaraan, bahasa, seni dan budaya, dan pendidikan jasmani.[11]

Berikut ini Permendiknas No 23 Tahun 2006 Tanggal 23 Mei 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Mata Pelajaran sebagai berikut.

a. Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), bidang Pendidikan Agama Islam SD/MI meliputi:
    1. Menyebutkan, menghafal, membaca, dan mengartikan surat-surat pendek dalam al-Qur'an, mulai surat al-Fatihah sampai surat al-'Alaq
    2. Mengenal dan meyakini aspek-aspek rukun iman dari iman kepada Allah sampai iman kepada Qadha dan Qadar
    3. Berperilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari serta menghindari perilaku tercela
    4. Mengenal dan melaksanakan rukun Islam mulai dari bersyahadat sampai zakat serta mengetahui tata cara pelaksanaan ibadah haji
    5. Menceritakan kisah nabi-nabi serta mengambil teladan dari kisah tersebut dan menceritakan kisah tokoh orang-orang tercela dalam kehidupan nabi.[12]
b. Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs), bidang Pendidikan Agama Islam SMP/MTs, meliputi:
    1. Menerapkan tata cara membaca al-Qur'an menurut tajwid, mulai dari cara membaca "Al" Syamsiyah dan "Al" Qomariyah sampai pada menerapkan hukum bacaan mad dan waqaf
    2. Meningkatkan pengenalan dan keyakinan terhadap aspek-aspek rukun iman mulai dari iman kepada Allah sampai kepada iman kepada Qadha dan Qadar serta Asmaul Husna
    3. Menjelaskan dan membiasakan perilaku terpuji seperti qanaah dan tasamuh, menjauhkan diri dari perilaku tercela seperti ananiah, hasad, ghadab dan namimah
    4. Menjelaskan tata cara mandi wajib dan shalat-shalat munfarid dan jamaah baik shalat wajib maupun shalat sunat
    5. Memahami dan meneladani sejarah Nabi Muhammad dan para sahabat serta menceritakan sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara.[13]
c. Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA), bidang Pendidikan Agama Islam SMA/MA/SMK/MAK/MAK, meliputi:

1. Memahami ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan fungsi manusia sebagai khalifah, demokrasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
2. Meningkatkan keimanan kepada Allah sampai Qadha dan Qadar melalui pemahaman terhadap sifat dan Asmaul Husna
3. Berperilaku terpuji seperti husnuzzan, taubat dan raja dan meninggalkan perilaku tercela seperti isyrof, tabzir, dan fitnah
4. Memahami sumber hukum Islam dan hukum taklifi serta menjelaskan hukum muamalah dan hukum keluarga dalam Islam
5. Memahami sejarah Nabi Muhammad pada periode Mekkah dan periode Madinah serta perkembangan Islam di Indonesia dan di dunia.[14]

D. Implementasi Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI); SMP/MTs, dan SMA/ MA/SMK/MAK.

1. Rasionalitas

Pendidikan Agama dimaksudkan untuk meningkatkan potensi spiritual dan membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti, dan moral. Peningkatan potensi spiritual mencakup pengenalan, pemahaman, dan penanaman nilai-nilai keagamaan, serta pengamalan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan individual ataupun kolektif kemasyarakatan. Peningkatan potensi spiritual tersebut pada akhirnya bertujuan pada optimalisasi berbagai potensi yang dimiliki manusia yang aktualisasinya mencerminkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan.

Pendidikan Agama Islam diberikan dengan mengikuti tuntunan bahwa agama diajarkan kepada manusia dengan visi untuk me-

wujudkan manusia yang bertakwa kepada Allah SWT dan berakhlak mulia, serta bertujuan untuk menghasilkan manusia yang jujur, adil, berbudi pekerti, etis, saling menghargai, disiplin, santun, harmonis dan produktif, baik personal maupun sosial. Tuntutan visi ini mendorong dikembangkannya standar kompetensi sesuai dengan jenjang persekolahan yang secara nasional ditandai dengan ciri-ciri:

1. lebih menitikberatkan pencapaian kompetensi secara utuh selain penguasaan materi,
2. mengakomodasikan keragaman kebutuhan dan sumber daya pendidikan yang tersedia, dan
3. memberikan kebebasan yang lebih luas kepada pendidik di lapangan untuk mengembangkan strategi dan program pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya pendidikan.

Pendidikan Agama Islam diharapkan menghasilkan manusia yang selalu berupaya menyempurnakan iman, takwa, dan akhlak, serta aktif membangun peradaban dan keharmonisan kehidupan, khususnya dalam memajukan peradaban bangsa yang bermartabat. Manusia seperti itu diharapkan tangguh dalam menghadapi tantangan, hambatan, dan perubahan yang muncul dalam pergaulan masyarakat baik dalam lingkup lokal, nasional, regional maupun global.

Pendidik diharapkan dapat mengembangkan metode pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Peran semua unsur sekolah, orang tua siswa dan masyarakat sangat penting dalam mendukung keberhasilan pencapaian tujuan Pendidikan Agama Islam.

Terkait dengan hal-hal tersebut, perlu disusun Kompetensi Mata Pelajaran (KMP) Pendidikan Agama Islam (PAI) yang harus dikuasai oleh lulusan SD/MI. KMP ini selanjutnya dijadikan dasar penyusunan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) mata pelajaran PAI di Sekolah/Madrasah tersebut.

2. TujuanPendidikan Agama Islam di SD/MI; SMP/MTs; dan SMA/MA/SMK/MAK

Pendidikan Agama Islam di SD/MI,SMP/MTs; dan SMA/MA/SMK/MAK bertujuan untuk:

a. menumbuhkembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah SWT;
b. mewujudkan manusia Indonesia yang taat beragama dan berakhlak mulia yaitu manusia yang berpengetahuan, rajin beribadah, cerdas, produktif, jujur, adil, etis, santun, berdisiplin, bertoleransi (*tasamuh*), menjaga keharmonisan secara personal dan sosial serta mengembangkan budaya Islami dalam komunitas sekolah.

3. Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam di SD/MI, SMP/MTs; dan SMA/MA/SMK

Ruang lingkup Pendidikan Agama Islam meliputi aspek-aspek sebagai berikut.

a. Al-Qur'an
b. Aqidah
c. Akhlak
d. Fiqih
e. Tarikh Islam

Pendidikan Agama Islam menekankan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan diri sendiri, dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya.

4. Kompetensi Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam

Kompetensi mata pelajaran ini meliputi:

a. Mampu melafalkan, membaca, menghafal, dan menyalin surat-surat pendek dalam Al-Qur'an.

b. Mampu memahami dan menunjukkan kebiasaan mengamalkan keimanan serta ibadah sesuai dengan ajaran agama Islam.
c. Mampu membiasakan perilaku akhlak mulia kepada Allah SWT, sesama manusia, dan makhluk lainnya.
d. Mampu membiasakan hidup rukun dan damai *intra*-umat dan antarumat beragama selaras dengan wawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
e. Memahami *Sirah Nabawiyah* Nabi Muhammad SAW dan mengambil pelajaran serta meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari.

E. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar SD/MI

Kelas I Semester I

STANDAR KOMPETENSI	KOMPETENSI DASAR
Al-Qur'an 1. Membaca dan menghafal Al-Qur'an surat pendek pilihan.	1.1 Melafalkan 29 huruf hijaiyah sesuai makharijul huruf. 1.2 Melafalkan Al Qur'an Surat Al-Fatihah 1.3 Menghafal Al Qur'an Surat Al-Fatihah
Aqidah 2. Mengenal Rukun Iman	2.1. Menyebutkan enam Rukun Iman 2.2. Menghafal enam Rukun Iman

Akhlak 3. Membiasakan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari	3.1. Menirukan doa sebelum dan sesudah belajar 3.2. Menghafal doa sebelum dan sesudah belajar 3.3. Membiasakan doa sebelum dan sesudah belajar
Fiqih 4. Mengenal Rukun Islam	4.1. Menyebutkan 5 Rukun Islam 4.2. Menghafal 5 Rukun Islam 4.3. Menyebutkan arti 5 Rukun Islam

Kelas I Semester 2

STANDAR KOMPETENSI	KOMPETENSI DASAR
Al-Qur'an 5. Membaca dan menghafal Al-Qur'an surat pendek pilihan.	5.1. Membaca29 huruf hijaiyah sesuai makharijul huruf. 5.2. Melafalkan Al Qur'an SuratAn-Naas 5.3. Menghafal Al Qur'an Surat An-Naas
Aqidah 6. Mengenal dua kalimat syahadat	6.1 Melafalkan syahadat tauhid dan syahadat rasul 6.2 Menghafal dua kalimat syahadat 6.3 Menyebutkan arti dua kalimat syahadat

Akhlak 7. Membiasakan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari	7.1. Menampilkan perilaku patuh kepada orangtua. 7.2. Menampilkan perilaku patuh kepada guru.
Fiqih 8. Mengenal tata cara bersuci (*thaharah*)	8.1 Menyebutkan arti bersuci 8.2 Menyebutkan macam-macam bersuci. 8.3 Mempraktikkan tata cara bersuci.

Kelas II Semester 1

STANDAR KOMPETENSI	KOMPETENSI DASAR
Al-Qur'an 1. Membaca dan menghafal Al-Qur'an surat pendek pilihan.	1.1 Membaca huruf hijaiyah bersambung dalam Al-Qur'an dengan tepat dan benar 1.2 Melafalkan Al Qur'an Surat Al-Falaq dengan benar. 1.3 Menghafal Al Qur'an Surat Al-Falaq dengan lancar.
Aqidah 2. Mengenal asmaul husna	2.1. Melafalkan Asmaul Husna Ar-Rahman dan Ar-Rahim 2.2. Menyebutkan arti Asmaul Husna Ar-Rahman dan Ar-Rahim 2.3. Menunjukkan Allah Maha Ar-Rahman dan Ar-Rahim

Akhlak 3. Membiasakan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari	3.1. Menyebutkan contoh perilaku kasih sayang sesama teman 3.2. Menampilkan perilaku kasih sayang sesama teman 3.3. Membiasakan perilaku kasih sayang sesama teman dalam kehidupan sehari-hari.
Fiqih 4. Melakukan wudlu' secara tertib	4.1 Menyebutkan tata cara berwudlu 4.2 Mempraktikkan tata cara berwudlu 4.3 Membiasakan wudlu secara tertib dan benar

Kelas II Semester 2

STANDAR KOMPETENSI	KOMPETENSI DASAR
Alqur'an 5. Membaca dan menghafal Al-Qur'an surat pendek pilihan	5.1 Membaca huruf hijaiyah bersambung dalam Al Qur'an dengan baik dan benar 5.2 Melafalkan Al Qur'an Surat Al-Ikhlas dan Al-Lahab dengan benar 5.3 Menghafal Al Qur'an Surat Al-Ikhlas dan Al-Lahab dengan benar
Aqidah 6. Mengenal Asmaul Husna	6.1 Melafalkan Asmaul *Husnaal-Quddus* (Maha Suci) 6.2 Menyebutkan arti Asmaul

	Husna *al-Quddus* 6.3 Menunjukkan contoh Allah Maha *al-Quddus*
Akhlak 7. Membiasakan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari	7.1 Menyebutkan contoh perilaku hidup bersih 7.2 Membiasakan perilaku bersih dalam kehidupan sehari-hari.
Fiqih 8. Menghafal bacaan shalat	8.1 Melafalkan bacaan shalat 8.2 Menghafal bacaan shalat

Kelas III Semester 1

STANDAR KOMPETENSI	KOMPETENSI DASAR
Al-Qur'an 1. Membaca dan menghafal Al Qur'an surat pendek pilihan	1.1 Mengenal tanda baca (harakat) 1.2 Membaca kalimat-kalimat dalam Al-Qur'an dengan baik dan benar 1.3 Melafalkan Al Qur'an Surat An-Nashr dengan benar 1.4 Menghafal Al Qur'an Surat An-Nashr dengan lancar.
Aqidah 2. Mengenal sifat wajib Allah	2.1 Menyebutkan sifat Allah *qiyamuhu binafsihi dan wahdaniyat* 2.2 Menjelaskan sifat Allah *qiyamuhu binafsihi dan wahdaniyat*
Akhlak 3. Membiasakan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari	3.1. Menampilkan perilaku mandiri dalam kehidupan sehari-hari 3.2 Menampilkan perilaku percaya diri dalam kehidupan sehari-hari

Fiqih **4.** Mempraktikkan shalat dengan tertib	4.1 Memperagakan shalat secara tertib 4.2 Mempraktikkan shalat secara benar

Kelas III Semester 2

STANDAR KOMPETENSI	KOMPETENSI DASAR
Al-Qur'an **5.** Membaca dan menghafal Al-Qur'an surat pendek pilihan	5.1 Membaca kalimat bersambung dalam Al-Qur'an dengan baik dan benar 5.2 Melafalkan Al Qur'an Surat Al-Kafirun dengan benar 5.3 Menghafal Al Qur'an Surat Al-Kafirun dengan lancar
Aqidah 6. Mengenal sifat mustahil Allah	6.1. Menyebutkan sifat mustahil Allah; *ihtiyaju li ghoirihi* dan *ta'addud* 6.2. Mengartikan sifat mustahil Allah;*ihtiyaju li ghoirihi* dan *ta'addud*
Akhlak 7. Membiasakan perilaku terpuji dalam sehari-hari	7.1 Menampilkan perilaku rajin dalam belajar dan beribadah dalam kehidupan sehari-hari 7.2 Menampilkan perilaku disiplin dalam belajar dan beribadah dalam kehidupan sehari-hari

Fiqih 8. Melaksanakan shalat wajib	8.1 Mempraktikkan shalat wajib dengan tertib dan benar. 8.2 Membiasakan shalat wajib tepat waktu. 8.3 Mempraktikkan dzikir dan doa setelah shalat

Kelas IV Semester 1

STANDAR KOMPETENSI	KOMPETENSI DASAR
Al-Qur'an 1. Membaca dan menghafal Al-Qur'an surat pendek pilihan	1.1 Membaca potongan ayat-ayat Al-Qur'an surat Al-Kautsar dan Al-Ma'un sesuai kaidah tajwid; 1.2 MelafalkanAl-Qur'an surat Al-Kautsar dan Al-Ma'un sesuai kaidah tajwid. 1.3 Menghafal Al-Qur'an surat Al-Kautsar dan Al-Ma'un dengan lancar.
Aqidah 2. Mengenal sifat wajib Rasul	2.1 Menyebutkan sifat wajib Rasul 2.2 Menjelaskan arti sifat wajib Rasul
Akhlak 3. Membiasakan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari	3.1 Menyebutkan contoh perilaku *shidiq, amanah, tabligh* dan *fathonah* 3.2 Menunjukkan perilaku *shidiq, amanah, tabligh* dan *fathonah*

	3.3 Membiasakan perilaku *shidiq, amanah, tabligh* dan *fathonah* dalam kehidupan sehari-hari.
Fiqih 4. Melaksanakan adzan dan iqamah	4.1 Melafalkan bacaan adzan dan iqamah dengan baik dan benar 4.2 Menghafal lafal adzan dan iqamah 4.3 Mempraktikkan adzan dan iqamah

Kelas IV Semester 2

STANDAR KOMPETENSI	KOMPETENSI DASAR
Al-Qur'an 5. Membaca dan menghafal Al-Qur'an surat pendek pilihan	1.1 Membaca potongan ayat-ayat Al-Qur'an surat Al-Quraisy sesuai kaidah tajwid 1.2 Membaca Al-Qur'an surat Al-Quraisy sesuai kaidah tajwid 1.3 Menghafal Al-Qur'an surat Al-Quraisy dengan lancar.
Aqidah 6. Mengenal malaikat dan tugasnya	6.1 Menjelaskan pengertian malaikat 6.2 Menyebutkan nama-nama malaikat 6.3 Menyebutkan tugas-tugas malaikat

Akhlak 7. Menghindari perilaku tercela dalam kehidupan sehari-hari	7.1 Menghindari perilaku mengejek teman 7.2 Menghindari perilaku menghina teman 7.3 Menunjukkan akibat perilaku mengejek dan menghina teman
Fiqih 8. Mengenal ketentuan-ketentuan shalat	8.1. Menyebutkan syarat sah dan syarat wajib shalat 8.2. Menyebutkan rukun shalat 8.3. Menyebutkan sunnah shalat 8.4. Menyebutkan hal-hal yang membatalkan shalat

Kelas V Semester 1

STANDAR KOMPETENSI	KOMPETENSI DASAR
Al-Qur'an 5. Membaca dan menghafal Al-Qur'an surat pendek pilihan	1.1 Membaca potongan ayat-ayat Al-Qur'an surat Al-Quraisy sesuai kaidah tajwid 1.2 Membaca Al-Qur'an surat Al-Quraisy sesuai kaidah tajwid 1.3 Menghafal Al-Qur'an surat Al-Quraisy dengan lancar.
Aqidah 6. Mengenal malaikat dan tugasnya	6.1 Menjelaskan pengertian malaikat 6.2 Menyebutkan nama-nama malaikat

	6.3 Menyebutkan tugas-tugas malaikat
Akhlak 7. Menghindari perilaku tercela dalam kehidupan sehari-hari	7.1 Menghindari perilaku mengejek teman 7.2 Menghindari perilaku menghina teman 7.3 Menunjukkan akibat perilaku mengejek dan menghina teman
Fiqih 8. Mengenal ketentuan-ketentuan shalat	8.1. Menyebutkan syarat sah dan syarat wajib shalat 8.2. Menyebutkan rukun shalat 8.3. Menyebutkan sunnah shalat 8.4. Menyebutkan hal-hal yang membatalkan shalat

Kelas V Semester 2

STANDAR KOMPETENSI	KOMPETENSI DASAR
Al-Qur'an 6. Membaca, menghafal dan menyalin ayat-ayat Al-Qur'an pilihan	6.1 Membaca Al-Qur'an surat Al-Humazah sesuai kaidah tajwid 6.2 Menghafal Al-Qur'an surat Al-Humazah dengan lancar. 6.3 Menyalin Al-Qur'an suratAl-Humazah dengan benar
Aqidah 7. Mengenal Rasul-Rasul Allah	7.1 Menyebutkan nama-nama Rasul Allah SWT

	7.2 Menyebutkan nama-nama Rasul Ulul Azmi dari para rasul 7.3 Membedakan Nabi dan Rasul
Akhlak 8. Membiasakan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari	8.1 Menjelaskan makna rela berkorban 8.2 Meneladani perilaku rela berkorban Nabi Ibrahim As. dan Nabi Ismail As. dalam kehidupan sehari-hari
Fiqih 9. Melaksanakan amalan-amalan Ramadhan	9.1. Menyebutkan amalan-amalan di bulan Ramadhan 9.2. Melaksanakan shalat tarawih dan witir di bulan Ramadhan 9.3. Melaksanakan tadarus Al-Qur'an
Tarikh Islam 10. Memahami *Sirah Nabawiyah*	10.1 Menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul 10.2 Menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW dari hijrah ke Madinah sampai akhir hayat 10.3 Meneladani sifat-sifat terpuji Nabi Muhammad SAW

Kelas VI Semester 1

STANDAR KOMPETENSI	KOMPETENSI DASAR
Al-Qur'an 1. Mengartikan ayat Al-Qur'an pilihan	1.1 Membaca Al-Qur'an Surat Al-Ma'idah (5): 3 dengan tajwid yang benar 1.2 Menyalin Al-Qur'an Surat Al-Ma'idah (5): 3 dengan benar 1.3 Menyebutkan arti Al-Qur'an Surat Al-Ma'idah (5): 3 dengan benar
Aqidah 2. Meyakini adanya Hari Akhir	2.1. Menyebutkan nama-nama Hari Akhir 2.2. Menjelaskan tanda-tanda Hari Akhir 2.3. Menjelaskan hikmah beriman kepada Hari Akhir
Akhlak 3. Membiasakan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari	3.1 Menjelaskan makna toleransi dalam kehidupan 3.2 Menunjukkan contoh perilaku toleran dalam kehidupan 3.3 Membiasakan perilaku toleran dalam kehidupan sehari-hari
Fiqih 4. Melaksanakan zakat, infaq, dan shadaqah	4.1 Menyebutkan pengertian zakat, infaq, dan shadaqah

	4.2 Menjelaskan hikmah zakat, infaq, dan shadaqah 4.3 Mempraktikkan zakat, infaq, dan shadaqah

Kelas VI Semester 2

STANDAR KOMPETENSI	KOMPETENSI DASAR
Al-Qur'an 5. Mengartikan ayat al-Qur'an pilihan	5.1 Membaca Al-Qur'an Surat Al-Hujurat (49): 13 dengan tajwid yang benar 5.2 Menyalin Al-Qur'an Surat Al-Hujurat (49): 13 dengan benar 5.3 Menyebutkan arti Al-Qur'an Surat Al-Hujurat (49): 13 dengan benar
Aqidah 6. Meyakini adanya Qadha dan Qadar	6.1 Menunjukkan contoh Qadha dan Qadar dalam kehidupan sehari-hari 6.2 Menampilkan perilaku yang mencerminkan keyakinan terhadap Qadha dan Qadar
Akhlak 7. Membiasakan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari	7.1 Menjelaskan arti sikap simpati terhadap teman 7.2 Menunjukkan contoh perilaku simpati terhadap teman

	7.3 Membiasakan perilaku simpati terhadap teman dalam kehidupan sehari-hari
Fiqih 8. Memahami ibadah haji dan umrah	8.1 Menjelaskan ketentuan ibadah haji dan umrah 8.2 Memperagakan ibadah haji dan umrah

F. Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) SMP/MTs.

Kelas VII Semester I

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
Al-Qur'an dan Hadits 1. Memahami ayat Al-Qur'an dan Hadits tentang menuntut ilmu	1.1. Membaca sesuai kaidah tajwid QS.Al Mujadilah (58): 11 dan QS. Ar Rahman (55):33. 1.2. Menyalin QS.Al Mujadilah (58): 11 dan QS. Ar Rahman (55): 33 1.3. Menyebutkan arti QS. Al Mujadilah (58): 11 dan QS. Ar Rahman (55): 33. 1.4. Menjelaskan kandungan QS. Al Mujadilah (58): 11 dan QS. Ar Rahman (55): 33 dan Hadits tentang menuntut ilmu.

Aqidah 2. Meningkatkan keimanan kepada Allah SWT melalui pemahaman sifat-sifatNya	2.1. Menjelaskan iman kepada Allah SWT melalui sifat-sifat-Nya 2.2. Menghayati iman kepada Allah melalui Asmaul Husna (*As Salam, Al Ghaffar, Al Wahhab, Al Hadi, dan As Sabur*) 2.3. Menampilkan perilaku yang mencerminkan keyakinan terhadap sifat-sifat Allah SWT.
Akhlak 3. Membiasakan perilaku semangat menuntut ilmu dalam kehidupan sehari-hari.	3.1. Menjelaskan perilaku semangat menuntut ilmu dalam kehidupan. 3.2. Menunjukkan perilaku semangat menuntut ilmu dalam kehidupan sehari-hari.
Fiqih 4. Memahami ketentuan-ketentuan *thaharah* (bersuci)	4.1. Menjelaskan ketentuan, macam dan tata cara *thaharah* 4.2. Menjelaskan perbedaan hadas dan najis 4.3. Mempraktikkan tayamum dan mandi wajib
5. Memahami tata cara shalat	5.1. Menjelaskan ketentuan-ketentuan dan tata cara shalat 5.2. Menjelaskan hikmah shalat wajib 5.3. Mempraktikkan shalat jenazah
Tarikh dan Kebudayaan Islam 6. Memahami sejarah Nabi Muhammad SAW	6.1. Menjelaskan sejarah Nabi Muhammad SAW dari masa kanak-kanak sampai masa remaja 6.2. Menunjukkan sikap meneladani kehidupan Nabi dari masa kanak-kanak sampai masa remaja dalam kehidupan sehari-hari

Kelas VII Semester 2

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
Al-Qur'an dan Hadits 7. Memahami ayat Al-Qur'an dan Hadits tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf.	7.1. Membaca sesuai kaidah tajwid QS. An Nisa (4): 146, QS. Al Baqarah (2): 153, dan QS. Ali Imran (3): 134 7.2. Menyalin QS. An Nisa (4): 146, QS. Al Baqarah (2): 153, dan QS. Ali Imran (3): 134 7.3. Menyebutkan arti QS. An Nisa (4): 146, QS. Al Baqarah (2): 153, dan QS. Ali Imran (3): 134. 7.4. Menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf.
Aqidah 8. Meningkatkan keimanan kepada Malaikat	8.1. Menjelaskan iman kepada malaikat dan tugas-tugasnya 8.2. Menunjukkan perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap malaikat.
Akhlak 9. Membiasakan perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf dalam kehidupan sehari-hari.	9.1. Menjelaskan perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf dalam kehidupan. 9.2. Menampilkan perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf dalam kehidupan sehari-hari.
Fiqih 10. Memahami tata cara shalat berjamaah	10.1. Menjelaskan ketentuan-ketentuan dan tata cara shalat berjamaah 10.2. Melaksanakan shalat wajib berjamaah

11. Memahami tata cara shalat Jum'at	11.1. Menjelaskan ketentuan dan tata cara shalat jum'at 11.2. Melaksanakan shalat Jum'at
12. Memahami tata cara shalat jama' dan qashar	12.1. Menjelaskan ketentuan-ketentuan dan tata cara shalat jama' dan qashar 12.2. Mempraktikkan shalat jama' dan qashar
Tarikh dan Kebudayaan Islam 13. Memahami sejarah Nabi Muhammad SAW periode Makkah	13.1. Menjelaskan misi Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan aqidah periode Makkah 13.2. Meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Makkah

Kelas VIII Semester I

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
Al-Qur'an dan Hadits 1. Memahami ayat Al-Qur'an dan Hadits tentang perilaku rendah hati, hemat dan hidup sederhana.	1.1. Membaca dengan kaidah tajwid QS. Al Furqan (25): 63, QS. Al Isra'(17): 27. 1.2. Menulis QS. Al Furqan (25): 63, QS. Al Isra'(17): 27. 1.3. Mengartikan QS. Al Furqan (25): 63, QS. Al Isra'(17): 27. 1.4. Menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits tentang perilaku rendah hati, hemat dan hidup sederhana.

Aqidah 2. Meningkatkan keimanan kepada Kitab-kitab Allah	2.1. Menjelaskan nama Kitab-kitab Allah SWT yang di turunkan kepada para Rasul dan ajaran yang terkandung di dalamnya. 2.2. Menunjukkan sikap mencintai Al-Qur'an 2.3. Menunjukkan perilaku yang mencerminkan iman kepada Al-Qur'an
Akhlak 3. Membiasakan perilaku rendah hati, hidup sederhana dan hemat dalam kehidupan sehari-hari.	3.1. Menjelaskan perilaku rendah hati, hidup sederhana dan hemat. 3.2. Menunjukkanperilaku rendah hati,hidup sederhana dan hemat dalam kehidupan sehari-hari.
4. Menghindari perilaku *ghibah* dan *namimah*.	4.1. Menjelaskan perilaku *ghibah* dan *namimah* 4.2. Menghindari perilaku *ghibah* dan *namimah*.
Fiqih 5. Memahami shalat sunnah	5.1. Menjelaskan ketentuan dan tata cara shalat sunnah berjamaah dan *munfarid* 5.2. Mempraktikkan shalat sunnah berjamaah dan *munfarid* dalam kehidupan sehari-hari.
6. Memahami macam-macam sujud	6.1. Menjelaskan ketentuan dan tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah 6.2. Memperaktikkan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah

Tarikh dan Kebudayaan Islam 7. Memahami Sejarah Nabi Muhammad SAW di Madinah	7.1. Menjelaskan situasi dan kondisi kota Madinah. 7.2. Menjelaskan peristiwa hijrah dan perjuangan Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat di Madinah. 7.3. Meneladani perjuangan Nabi dan para Sahabat di Madinah.

Kelas VIII Semester 2

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
Al-Qur'an dan Hadits 8. Memahami ayat Al-Qur'an dan Hadits tentang larangan bertengkar.	8.1. Membaca dengan kaidah tajwid QS. An Nisa' (4): 92 dan QS. Al Maidah (5): 32. 8.2. Menulis QS. An Nisa' (4): 92 dan QS. Al Maidah (5): 32. 8.3. Mengartikan QS. An Nisa' (4): 92 dan QS. Al Maidah (5): 32 tentang larangan bertengkar. 8.4. Menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits tentang larangan bertengkar
Aqidah 9. Meningkatkan keimanan kepada Rasul Allah	9.1. Menjelaskan iman kepada Rasul 9.2. Menunjukkan perilaku yang mencerminkan iman kepada Rasul.

Akhlak **10.** Menghindari bertengkar dalam kehidupan sehari-hari.	10.1. Menjelaskan bahaya dan akibat bertengkar 10.2. Menunjukkanperilaku menghindari bertengkar dalam kehidupan sehari-hari.
11. Menghindari marah dan dendam dalam kehidupan sehari-hari.	11.1. Menjelaskan bahaya danakibat marah dan dendam 11.2. Menunjukkanperilaku menghindari marah dan dendam dalam kehidupan sehari-hari.
Fiqih 12. Memahami tata cara puasa	12.1. Menjelaskan ketentuan berbagai macam puasa wajib dan sunnah 12.2. Menjelasakan hikmah puasa 12.3. Melaksanakan puasa Ramadhan dan puasa sunnah
13. Memahami hukum Islam tentang makanan dan minuman yang halal dan haram	13.1. Menjelaskan ketentuan makanan dan minuman halal dan haram berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits 13.2. Menjelaskan kriteria hewan yang halal dan haram berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits 13.3. Membiasakan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal.
Tarikh dan Kebudayaan Islam 14. Memahami sejarah dakwah Islam	14.1. Menceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan sampai masa Abbasiyah

	14.2. Menyebutkan ilmuwan muslim dan perannya sampai masa Abbasiyah. 14.3. Meneladani semangat ilmuwan muslim dalam menumbuhkembangkan ilmu pengetahuan.

Kelas IX Semester I

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
Al-Qur'an dan Hadits 1. Memahami ayat Al-Qur'an dan Hadits tentang optimis, ikhtiar, dan tawakkal.	1.1. Membaca dengan kaidah tajwid QS. Az Zumar (39): 53, QS. An Najm (53): 39-42, dan QS. Ali Imran (3): 159. 1.2. Menulis dengan benar QS.Az Zumar (39): 53, QS. An Najm (53): 39-42, dan QS. Ali Imran (3): 159 1.3. Mengartikan QS. Az Zumar (39): 53, QS. An Najm (53): 39-42, dan QS. Ali Imran (3): 159 1.4. Menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits tentang optimis, ikhtiar, dan tawakkal.
Aqidah 2. Meningkatkan keimanan kepada hari akhir	2.1. Menjelaskan iman kepada hari akhir 2.2. Mendeskripsikan proses kejadian kiamat sughro dan kiamat kubro 2.3. Menunjukkan perilaku positif yang mencerminkan keimanan kepada hari akhir

Akhlak 3. Membiasakan perilaku optimis, ikhtiar, dan tawakkaldalam kehidupan sehari-hari.	3.1. Menjelaskan perilaku optimis, ikhtiar, dan tawakkalbeserta contoh-contohnya. 3.2. Menampilkan perilakuoptimis, ikhtiar, dan tawakkal dalam kehidupan sehari-hari.
4. Menghindari perilaku munafik dan korupsi	4.1. Menjelaskan bahaya perilaku munafik dan korupsi. 4.2. Menjauhi perilaku munafik dan korupsi dalam kehidupan sehari-hari.
Fiqih 5. Memahami hukum Islam tentang penyembelihan hewan	5.1. Menjelaskan ketentuan dan tata cara penyembelihan hewan dalam Islam 5.2. Menjelaskan ketentuan dan hikmah aqiqah dan qurban 5.3. Memperagakan tata cara penyembelihan hewan
6. Memahami zakat	6.1. Menjelaskan ketentuan dan tata cara zakat fitrah dan zakat mal 6.2. Mempraktikkan pelaksanaan zakat fitrah dan zakat mal 6.3. Menjelaskan hikmah zakat
Tarikh dan Kebudayaan Islam 7. Memahami sejarah perkembangan Islam di Nusantara	7.1. Menceritakan sejarah perkembangan Islam di Nusantara 7.2. Menceritakan sejarah kerajaan Islam di Nusantara 7.3. Mengambil pelajaran dari sejarah perkembanganIslam di Nusantara

Kelas IX Semester 2

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
Al-Qur'an dan Hadits 8. Memahami ayat Al-Qur'an dan Hadits tentang toleransi dan menghargai perbedaan.	8.1. Membaca dengan kaidah tajwid QS. Al Kafirun (109): 1-6 dan QS. Al Hujurat (49): 13. 8.2. Menulis dengan benar QS. Al Kafirun (109): 1-6 dan QS. Al Hujurat (49): 13. 8.3. Mengartikan QS. Al Kafirun (109): 1-6 dan QS. Al Hujurat (49): 13. 8.4. Menjelaskan kandungan QS. Al Kafirun (109): 1-6, dan QS. Al Hujurat (49): 13, serta hadits tentang toleransi dan menghargai perbedaan.
Aqidah 9. Meningkatkan keimanan kepada Qadha dan Qadar	9.1. Menjelaskan pengertian beriman kepada qadha dan qadar 9.2. Menjelaskan hikmah beriman kepada qadha dan qadar 9.3. Menampilkan perilaku yang mencerminkan beriman kepada qadha dan qadar dalam kehidupan sehari-hari
Akhlak 10. Membiasakan perilaku toleran dan menghargai perbedaan dalam kehidupan sehari-hari	10.1 Menjelaskan perilaku toleran dan menghargai perbedaan dalam kehidupan. 10.2 Menampilkan perilaku toleran dan menghargai perbedaan dalam kehidupan sehari-hari.

Fiqih 11. Memahami hukum Islam tentang Haji dan Umrah	11.1 Menjelaskan ketentuan dan tata cara ibadah haji dan umrah. 11.2 Memperagakan pelaksanaan ibadah haji dan umrah
Tarikh dan Kebudayaan Islam 12. Memahami sejarah tradisi Islam Nusantara	12.1 Menjelaskan tradisi Nusantara sebelum Islam 12.2 Menjelaskan tradisi Nusantara yang Islami 12.3 Memberikan apresiasi terhadap tradisi Nusantara yang Islami

G. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar SMA/MA/SMK

Kelas X Semester I

SK	KD
Al-Qur'an dan Hadits 1. Memahami ayat-ayat Al Qur'an dan Hadits tentang kontrol diri (*mujahadah an nafs),* prasangka baik (*husnuzhon)*, dan persaudaraan (*ukhuwah*)	1.1 Membaca berdasarkan kaidah tajwid QS. Al Anfal (8): 72); QS. Al Hujurat (49): 12; dan QS Al Hujurat (49): 10. 1.2 Menulis dengan baik dan benar QS. Al Anfal (8): 72); QS. Al Hujurat (49): 12; dan QS Al Hujurat (49): 10. 1.3 Menerjemahkan dengan tepat QS. Al Anfal (8): 72); QS. Al Hujurat (49): 12; dan QS Al Hujurat (49): 10.

	1.4 Menjelaskan kandungan QS. Al Anfal (8): 72); QS. Al Hujurat (49): 12; dan QS Al Hujurat (49): 10, serta Hadits yang terkait.
Aqidah 2. Meningkatkan keimanan kepada Allah SWT melalui sifat-sifat-Nya	2.1 Menjelaskan pengertian iman pada sifat-sifat Allah *al-kariim, al-mu'min, al-wakiil, al-matiin, al-jaami', al-adl, al-aakhir, as-samii'*, dan *al-bashiir* 2.2 Meneladani sifat-sifat Allah *al-kariim, al-mu'min, al-wakiil, al-matiin, al-jaami', al-adl, al-aakhir, as-samii'*, dan *al-bashiir*
Akhlak 3. Membiasakan perilaku kontrol diri (*mujahadah an nafs),* prasangka baik (*husnuzhon)*, dan persaudaraan (*ukhuwah*) dalam kehidupan sehari-hari.	3.1 Menjelaskan makna kontrol diri (*mujahadah an nafs),* prasangka baik (*husnuzhon)*, dan persaudaraan (*ukhuwah*) dalam kehidupan. 3.2 Menjelaskan manfaat dan hikmah kontrol diri (*mujahadah an nafs),* prasangka baik (*husnuzhon),* dan persaudaraan (*ukhuwah*) dalam kehidupan. 3.3 Mengamalkan sikap dan perilaku kontrol diri (*mujahadah an nafs),* prasangka baik (*husnuzhon),* danpersaudaraan (*ukhuwah*) dalam kehidupan sehari-hari.
Fiqh 4. Memahami sumber hukum Islam dan hukum *taklifi.*	4.1 Menjelaskan Al Qur'an, Hadits, dan Ijtihad sebagai sumber hukum Islam

	4.2 Menjelaskan kedudukan, fungsi, dan hikmah hukum *taklifi* dalam hukum Islam 4.3 Berperilaku sesuai denganhukum Islam
Tarikh dan Peradaban Islam 5. Memahami keteladanan Rasulullah SAW dalam membina umat di Makkah.	5.1 Mendeskripsikan substansi dan strategi dakwah Rasullullah SAW di Makkah 5.2 Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dakwah Nabi di Makkah 5.3 Meneladani strategi dakwah Nabi di Makkah dalam konteks Indonesia dan global

Kelas X Semester II

SK	KD
Al-Qur'an dan Hadits 6. Memahami ayat-ayat Al Qur'an dan Hadits tentang larangan *khamr*/narkoba, judi, dan zina.	6.1 Membaca berdasarkan kaidah tajwid QS. Al Maidah (5): 90; QS. Al Isra' (17): 32, dan QS. An Nur (24): 2. 6.2 Menulis dengan benar QS. Al Maidah (5): 90; QS. Al Isra' (17): 32, dan QS. An Nur (24): 2. 6.3 Menerjemahkan dengan tepat QS. Al Maidah (5): 90; QS. Al Isra' (17): 32, dan QS. An Nur (24): 2. 6.3Menjelaskan kandungan QS. Al Maidah (5): 90; QS. Al Isra' (17): 32, dan QS. An Nur (24): 2. serta Hadits yang terkait.

Aqidah 7 Meningkatkan keimanan kepada malaikat.	7.1 Menjelaskan tanda-tanda beriman kepada malaikat 7.2 Menjelaskan hikmah beriman kepada malaikat 7.3 Menampilkan perilaku dengan penuh kesadaran bahwa malaikat selalu menyertai dalam kehidupan sehari-hari
Akhlak 8 Menghindari *khamr*/narkoba, judi, dan zina dalam kehidupan.	8.1 Menjelaskan dosa dan bahaya *khamr*/narkoba, judi dan zina. 8.2 Menghindari *khamr*/narkoba, judi dan zina dalam kehidupan sehari-hari.
9 Membiasakan berpakaian dan berhias secara Islami dalam kehidupan sehari-hari.	9.1 Menjelaskan adab berpakaian dan berhias secara Islami. 9.2 Menjelaskan manfaat dan hikmah adab berpakaian dan berhias secara Islami. 9.3 Berpakaian dan berhias secara Islami dalam kehidupan sehari-hari.
Fiqh 10 Memahami hukum Islam tentang wakaf.	10.1 Menjelaskan pengertian dan jenis-jenis wakaf 10.2 Menunjukkan manfaat wakaf 10.3 Menjelaskan pengelolaan wakaf
Tarikh dan Peradaban Islam 11 Meneladani Rasulullah SAW dalam membina umat di Madinah.	11.1 Menganalisis faktor-faktor keberhasilan dakwah Nabi SAW di Madinah. 11.2 Meneladani strategi dakwah Nabi di Madinah dalam konteks Indonesia dan global.

Kelas XI Semester I

SK	KD
Al Qur'an dan Hadits 1. Memahami ayat-ayat Al Qur'an dan Hadits tentang taat, kompetisi dalam kebaikan (*sabiq al khairat*), dan etos kerja.	1.1 Membaca sesuai kaidah tajwid QS. Ali Imran (3): 32; QS. Al Baqarah (2): 148; dan QS. At Taubah (9): 105. 1.2 Menulis dengan benar QS. Ali Imran (3): 32; QS. Al Baqarah (2): 148; dan QS. At Taubah (9): 105. 1.3 Menerjemahkan dengan tepat QS. Ali Imran (3): 32; QS. Al Baqarah (2): 148; dan QS. At Taubah (9): 105. 1.4 Menjelaskan kandungan QS. Ali Imran (3): 32; QS. Al Baqarah (2): 148; dan QS. At Taubah (9): 105, serta Hadits yang terkait.
Aqidah 2. Meningkatkan keimanan kepada Kitab-kitab Allah SWT	2.1 Menjelaskan pengertian, kedudukan dan fungsi Al Qur'an dan Kitab-Kitab Allah SWT. 2.2 Menjelaskan hikmah dan manfaat iman pada Kitab-kitab Allah SWT. 2.3 Menampilkan perilaku yang mencerminkan iman kepada Kitab-kitab Allah SWT.
Akhlak 3 Membiasakan perilakutaat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan bekerja keras dalam kehidupan sehari-hari.	3.1 Menjelaskan manfaat dan hikmah taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan bekerja keras dalam kehidupan. 3.2 Menampilkanperilakutaat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan bekerja keras dalam kehidupan sehari-hari.

Fiqh 4. Memahami hukum Islam tentang *mu'amalah*	4.1 Menjelaskan prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam. 4.2 Menjelaskan praktik-praktik ekonomi Islam. 4.3 Menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari.
Tarikh dan Peradaban Islam 5. Memahami perkembangan Islam pada masa kejayaan	5.1 Menjelaskan kemajuanperadaban Islam 5.2 Menjelaskan kontribusi Islam dalam perkembangan peradaban dunia 5.3 Mengambil pelajaran dari masa kejayaan Islam

Kelas XI Semester II

SK	KD
Al Qur'an dan Hadits 6. Memahami ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits tentang toleransi dan larangan bersikap radikal.	6.1 Membaca berdasarkan kaidah tajwid QS.Yunus (10): 40-41 dan QS. An Nisa' (4): 92-93. 6.2 Menulis dengan baik dan benar QS.Yunus (10): 40-41) dan QS. An Nisa'(4): 92-93. 6.3 Menerjemahkan dengan tepat QS.Yunus(10): 40-41 dan QS. An Nisa'(4): 92-93. 6.4 Menjelaskan kandungan QS.Yunus (10): 40-41 dan QS An Nisa'(4): 92-93,serta Hadits yang terkait.

Aqidah 7. Meningkatkan keimanan kepada Rasul-rasul Allah SWT	7.1 Menjelaskan tanda-tanda beriman kepada Rasul-rasul Allah SWT 7.2 Menjelaskan titik temu ajaran para Rasul Allah SWT 7.3 Menampilkan sikap dan perilaku yang mencerminkan iman kepada Rasul-rasul Allah SWT
Akhlak 8. Membiasakan perilaku toleran dan bersatu dalam kehidupan sehari-hari.	8.1 Menjelaskan manfaat dan hikmah toleransi dan persatuan dalam kehidupan. 8.2 Berperilaku toleran dan bersatu dalam kehidupan sehari-hari.
8. Menghindari perilaku kekerasan dalam kehidupan sehari-hari.	9.1 Menjelaskan bahaya dan madharat perilaku kekerasan dalam kehidupan. 9.2 Menghindari perilaku kekerasan dalam kehidupan sehari-hari
Fiqh 10. Memahami ketentuan hukum Islam tentang pengurusan jenazah	10.1. Menjelaskan tatacara pengurusan jenazah 10.2. Memperagakan tatacara pengurusan jenazah
11. Memahami khotbah, tabligh dan dakwah	11.1 Menjelaskan pengertian khotbah, tabligh, dan dakwah

	11.2 Menjelaskan tata cara khotbah, tabligh dan dakwah; 11.3 Mempraktikkan khotbah, tabligh dan dakwah
Tarikh dan Peradaban Islam 12. Memahami perkembangan Islam pada masa modern (1800-sekarang)	12.1 Menjelaskan perkembangan Islam pada masa modern 12.2 Menjelaskan faktor-faktor kemunduran peradaban Islam 12.3 Mendeskripsikan upaya-upaya mencapai kebangkitan Islam di era modern 12.4 Mengambil pelajaran dari sejarah peradaban Islam di era modern.

Kelas XII Semester I

SK	KD
Al-Qur'an dan Hadits 1. Memahami ayat-ayat Al Qur'an dan Hadits tentang konsentrasi (*khusyu'*), berpikir kritis, dan demokratis.	1.1 Membaca sesuai kaidah tajwid QS. Al Baqarah (2): 45-46, QS. Ar Ruum (30): 8-9, dan QS. Ali Imran (3): 159. 1.2 Menulis dengan baik dan benar QS. Al Baqarah (2): 45-46, QS. Ar Ruum (30): 8-9, dan QS. Ali Imran (3): 159. 1.3 Menerjemahkan dengan tepat QS. Al Baqarah (2): 45-46,QS. Ar Ruum (30): 8-9, dan QS. Ali Imran (3): 159.

	1.4 Menjelaskan kandungan QS. Al Baqarah (2): 45-46, QS. Ar Ruum (30): 8-9, dan QS. Ali Imran (3): 159, serta Hadits yang terkait.
Aqidah 2. Meningkatkan keimanan kepada Hari Akhir	2.1 Menjelaskan konsep hari akhir berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, dan Ilmu Pengetahun 2.2 Menjelaskan hikmah dan manfaat keimanan terhadap hari akhir 2.3 Menampilkan perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir
Akhlak 3. Membiasakan konsentrasi, kritis, dan demokratis dalam kehidupan sehari-hari.	3.1 Menjelaskan manfaat konsentrasi, kritis, dan demokratis dalam kehidupan. 3.2 Membiasakan diri konsentrasi, kritis, dan demokratis dalam kehidupan sehari-hari.
Fiqh 4. Memahami Hukum Keluarga dalam Islam	4.1 Menjelaskan ketentuan hukum perkawinan dalam Islam 4.2 Menjelaskan ketentuan perkawinan menurut perundang-undangan di Indonesia 4.3. menjelaskan hikmah perkawinan dalam Islam

Tarikh dan Peradaban Islam 5. Memahami perkembangan Islam di Indonesia	5.1 Menjelaskan perkembangan Islam di Indonesia. 5.2 Menjelaskan strategi Islamisasi budaya di Indonesia 5.3 Mengambil pelajaran dari perkembangan Islam di Indonesia

Kelas XII Semester II

SK	KD
Al-Qur'an dan Hadits 6. Memahami ayat-ayat Al Qur'an dan Hadits tentang kesetaraan, saling menasihati, dan berbuat baik (*ihsan*).	6.1 Membaca berdasarkan kaidah tajwid QS. Ali Imran (3): 64, QS. Luqman (31): 13-14, dan QS. Al Baqarah (2): 83. 6.2 Menulis dengan baik dan benar QS. Ali Imran (3): 64, QS. Luqman (31): 13-14, dan QS. Al Baqarah (2): 83. 6.3. Menerjemahkan dengan tepat QS. Ali Imran (3): 64, QS. Luqman (31): 13-14, dan QS. Al Baqarah (2): 83. 6.3 Menjelaskan kandungan QS. Ali Imran (3): 64, QS. Luqman (31): 13-14, dan QS. Al Baqarah (2): 83, serta Hadits yang terkait.

Aqidah 7. Meningkatkan keimanan kepada Qadha dan Qadar	7.1 Menjelaskan manifestasi Qadha dan Qadar dalam kehidupan pribadi, sosial, berbangsa, dan bernegara 7.2 Menjelaskan taqdirAllah dan ikhtiar manusia dalam kehidupan 7.3 Menampilkan perilaku yang mencerminkan iman kepada Qadha dan Qadar
Akhlak 8. Membiasakan perilaku saling menasihati dan berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari.	8.1 Menjelaskan hikmah dan manfaat saling menasihati dan berbuat baik dalam kehidupan. 8.2 Menampilkan perilaku saling menasihati dan berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari.
Fiqh 9. Memahami Hukum Warisdalam Islam	9.1 Menjelaskan ketentuan hukum Waris dalam Islam 9.2 Mempraktikkan penghitungan dan pembagian Waris dalam Islam
Tarikh dan Peradaban Islam 10. Memahami perkembangan Islam di dunia	10.1 Menjelaskan faktor kemajuan dan kemunduran peradaban Islam di dunia 10.2 Menjelaskan strategi untuk membangun kembali peradaban Islam di dunia 10.3 Mengambil pelajaran dari perkembangan Islam di dunia

Disebutkan dalam PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada Bab II Pasal 2 ayat (1) lingkup standar nasional pendidikan meliputi: (a) standar isi; (b) standar proses; (c) standar kompetensi lulusan; (d) standar pendidik dan tenaga kependidikan; (e) standar sarana dan prasarana; (f) standar pengelolaan; (g) standar pembiayaan; dan (h) standar penilaian pendidikan.[15]

5. Isi (Materi) Pendidikan Agama Islam

Komponen isi (materi) PAI memiliki empat dimensi, yaitu: cakupan, urutan, kesinambungan, dan keterpaduan[16]. Secara garis besar cakupan materi PAI, urutan, kesinambungan, dan keterpaduan dapat dijelaskan berikut ini. Materi PAI berikut ini berkisar pada hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan dirinya, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manuusia dengan makhluk lain, dan manusia dengan lingkungan alamnya[17].

6. Komponen Kegiatan Belajar

Komponen kegiatan belajar artinya aktivitas yang harus dilaksanakan dalam implementasi kurikulum. Pada umumnya, kegiatan belajar terdiri dari empat langkah: (1) orientasi, yakni pemahaman materi yang diajarkan, (20 latihan, yakni upaya untuk melaksanakan apa yang telah dipahami, (3) umpan balik, artinya masukan perolehan dari belajar, (4) tindak lanjut, yang berupa koreksi, perbaikan, dan pelanjutan apa yang dipelajari[18]. Komponen kegiatan belajar yang menonjol dalam kurikulum PAI adalah langkah orientasi. Keberhasilan kegiatan belajar dapat diukur dengan sembilan indikator pemahaman materi. Kesembilan indikator itu ialah: (1) siswa memiliki pengetahuan fungsional tentang agama Islam dan pengamalannya, (2) siswa meyakini kebenaran ajaran agama Islam dan menghormati orang lain yang meyakini agamanya, (3) siswa bergairah dalam beribadah, (4) siswa mampu membaca, menyalin, dan memahami kitab suci Alquran, (5) siswa memiliki sifat kepri-

badian muslim (berakhlak mulia), (6) siswa rajin belajar, siswa giat bekerja dan gemar berbuat baik, (7) siswa mampu mensyukuri nikmat Allah SWT, (8) siswa memahami dan menghayati serta mengambil manfaat tarikh Islam, dan (9) siswa mampu menciptakan suasana rukun hidup beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara[19]. Sedangkan langkah latihan, umpan balik, dan tindak lanjut tertera pada pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar. Kegiatan-kegiatan itu meliputi: kegiatan pendahuluan, kegiatan pelajaran inti, dan kegiatan penutup.

6. Komponen Evaluasi

Evaluasi sebagai komponen keempat kurikulum berupa evaluasi atas proses yang telah berlangsung. Evaluasi harus didasarkan pada tujuan yang dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti suatu satuan pelajaran. Evaluasi atau penilaian pada kurikulum PAI 1994 mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Evaluasi aspek kognitif mencakup semua materi unsur pokok PAI, sedangkan aspek afektif lebih ditekankan pada unsur pokok akhlak. Penilaian aspek psikomotor terutama ditekankan unsur pokok ibadah[20]. Dengan adanya berbagai perubahan yang sangat cepat pada hampir semua aspek dan perkembangan paradigama baru dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, di awal milenium ketiga ini telah dikembangkan kurikulum PAI secara nasional, yaitu kurikulum KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) atau K 2006/K 2013.

CATATAN

[1]Hasan Langgulung, *Manusia dan Pendidikan: Suatu analisa Psikologi Pendidikan* (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1986), hlm. 176.
[2]*Ibid.,* hlm. 165.
[3]Crow and Crow dalam Oemar Hamalik. *Pembinaan Pengembangan Kurikulum* (Bandung: Pustaka Martina, 1987), hlm. 2
[4]Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik, cet. Ke 7* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 4.
[5]James A. Beane, dkk. *Curriculum Planning and Development* (Boston: Allyn and Bacon, 1986), hlm 29.
[6]Hilda Taba, *Curriculum Development: Theory and Practice*) (New York: Harcourt, Brace and World, 1962), hlm. 12.
[7]Zakiah Daradjat, dkk. *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 121.
[8]UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas (Bandung: Citra Umbara, 2014), hlm. 4.
[9]Al-Syaibani, *Falsafah Pendidikan Islam* (Bandung: Bulan Bintang, 2004), hlm. 56.
[10]UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 (Bandung: Citra Umbara, 2014), hlm. 4.
[11]Permendiknas No. 23 tahun 2006 tentang SKL untuk SKPDM, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 52.
[12]*Ibid.,* hlm. 63.
[13]*Ibid.,* hlm. 71.
[14]*Ibid.,* hlm. 81.
[15]PP RI No 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, (Jakarta: Kemenag, 2005), hlm. 13-14.
[16]Zamroni, "Pengembangan Kurikulum dan Silabi", Makalah Lokakarya, (Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah, IAIN Sunan Kalijaga, 22 Februari 1993), hlm. 2.
[17]Departemen Agama RI, *Ibid*., hlm. 2.
[18]Zamroni. *Ibid.,* hlm.2.
[19]Depag RI, *Ibid.,* hlm. 4-7.
[20]*Ibid,* hlm. 117.

Bab 4

STRATEGI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH DAN MADRASAH

A. Pengertian Strategi Pembelajaran

Strategi dalam artian umum adalah suatu penataan potensi dan sumber daya agar dapat efisien memperoleh hasil sesuai rancangan.[1] Oleh karena itu, strategi dapat dikatakan juga sebagai suatu garis besar haluan bertindak untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan[2]. Menurut Newman dan Logan, dalam bukunya *Strategy, Policy and Central Management*[3], strategi dasar dari setiap usaha (termasuk belajar mengajar) akan mencakup empat hal, yaitu (l) mengidentifikasi, menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil (*out put*) yang harus dicapai dan menjadi sasaran usaha, (2) mempertimbangkan dan memilih jalan pendekatan utama, (3) mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah yang akan ditempuh, dan (4) mempertimbangkan dan menetapkan tolok ukur dan patokan ukuran dengan mengadakan evaluasi hasil usaha. Kata strategi dihubungkan dengan belajar-mengajar dimaksudkan di sini adalah strategi belajar dan strategi mengajar dengan meletakkan ke dua aktivitas subjek

didik dan pendidik dalam suatu konteks di mana tekanan lebih ditekankan pada aktivitas belajar subjek-didik.

Strategi belajar mengajar yang menekankan pada subjek-didik kiranya tepat didasarkan pada keempat unsur strategi dasar itu, yaitu (l) menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan profil perilaku dan pribadi subjek didik, dengan mengidentifikasi *entering behavior*, (2) memilih sistem pendekatan belajar-mengajar atau pengalaman belajar subjek didik, (3) memilih dan menetapkan prosedur, metode dan teknik belajar-mengajar, dan (4) menetapkan norma-norma dan batas minimum ukuran keberhasilan atau kriteria dan ukuran baku keberhasilan belajar mengajar[4]. Pendapat di atas dikuatkan oleh pendapat T. Rakajoni bahwa strategi belajar mengajar adalah pola umum perbuatan guru dan murid di dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar.[5] Pengertian strategi dalam hal ini menunjuk kepada karakteristik abstrak dari rentetan perbuatan guru-murid dalam suatu peristiwa belajar mengajar, sedangkan rentetan perbuatan guru-murid dalam suatu peristiwa belajar mengajar aktual tertentu dinamakan prosedur instruksional. Strategi belajar mengajar diibaratkan melacaki berbagai kemungkinan macam rumah apa yang akan dibangun misalnya bentuk joglo, balai, dan lain sebagainya, sedangkan untuk menentukan cetak biru rumah yang akan dibangun, menentukan bahan-bahan material, langkah konstruksi, dan kriteria penyelesaian bangunan rumah itu ditentukan dalam desain instruksional.[6]

Strategi belajar mengajar merupakan sarana atau alat untuk mencapai tujuan belajar. Tujuan belajar yang pencapaiannya diusahakan secara eksplisit dengan tindakan instruksional tertentu disebut *instructional effect*, biasanya berbentuk pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan tujuan yang merupakan hasil pengiring yang tercapainya karena siswa terlibat aktif dalam sistem lingkungan belajar tertentu, misalnya kemampuan berpikir kritis dan kreatif, sikap terbuka menerima pendapat teman-teman disebutnya *nurturant effect.* Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan belajar guru biasanya memilih beberapa strategi belajar mengajar[7].

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud strategi belajar mengajar adalah suatu pola umum kegiatan belajar mengajar guru dan murid yang didasarkan pada empar unsur dasar strategi belajar mengajar agar mata pelajaran dapat tercapai secara optimal.

B. Menetapkan Spesifikasi dan Identifikasi Peserta Didik

Setelah pengertian strategi pembelajaran dan kurikulum pendidikan agama Islam diuraikan di atas, langkah penetapan spesifikasi dan identifikasi peserta didik perlu diuraikan sebagai berikut.

1. Tujuan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Tujuan pendidikan agama Islam merupakan komponen utama dalam proses belajar mengajar PAI. Tujuan PAI sesuai dengan tujuan pendidikan nasional membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.[8] Di samping itu, PAI bertujuan untuk menghasilkan manusia yang jujur, adil, berbudi pekerti, etis, saling menghargai, disiplin, santun, harmonis dan produktif, baik personal maupun sosial.[9] Tujuan tersebut dicapai melalui muatan dan/atau kegiatan agama, kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olahraga, dan kesehatan.

Tuntutan visi ini mendorong dikembangkannya standar kompetensi sesuai dengan jenjang persekolahan yang secara nasional ditandai dengan ciri-ciri:

1. lebih menitik beratkan pencapaian kompetensi secara utuh selain penguasaan materi,
2. mengakomodasikan keragaman kebutuhan dan sumber daya pendidikan yang tersedia, dan
3. memberikan kebebasan yang lebih luas kepada pendidik di lapangan untuk mengembangkan strategi dan program pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya pendidikan.

Menurut Imam Barnadib[10] tujuan pendidikan di Indonesia mempunyai dua butir utama, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya. Lebih lanjut Imam Barnadib mensarikan hubungan antar butir-butir tujuan pendidikan diikhtisarkan bahwa masing-masing butir tujuan baik tujuan mencerdaskan maupun mengembangkan manusia seutuhnya saling terkait dan inhern sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan butir satu dengan butir yang lain. Dengan kata lain, membentuk manusia cerdas yang mampu mengembangkan dirinya secara utuh ketaqwaan, keimanan, budipekerti, pengetahuan, keterampilan, sehat, kepribadian, dan kemandiriannya[11]. Oleh karena itu, tujuan kurikuler pendidikan agama Islam harus sinkron dan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan butir-butirnya.

Tujuan di atas mengandung beberapa unsur:(1) pemberian kompetensi dasar (2) materi PAI, (3) siswa, (4) pendidik (guru), dan (5) sasaran pokok PAI, yaitu menjadikan manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia baik dalam hidup pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Rumusan tujuan PAI itu bersifat normatif. Tujuan normatif hendaknya bukan dimaksudkan agar siswa mengarah ke nilai-nilai saja, melainkan dimaksudkan agar semua aktivitas ataupun upaya terprogram bila dikenai kriteria nilai secara normatif tetap dapat diterima[12]

Normativitas tujuan PAI di atas tampak pada sasarannya yaitu menjadikan manusia beriman, bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia. Manusia beriman, bertakwa kepada Allah SWT dan berakhlak mulia memerlukan rumusan atau karakteristik yang lebih operasional sehingga tujuan PAI lebih mudah dijabarkan dalam tujuan yang lebih spesifik pula. Untuk merumuskan karakteristik manusia beriman, bertakwa kepada Allah SWT serta berakhlak mulia diperlukan terlebih dahulu pengertian mengenai beberapa pengertian antara lain: agama Islam, tujuan, dan fungsi agama Islam bagi pemeluknya.

Menurut sebagian ulama, agama yang dalam bahasa Arab disebut *din* adalah sikap "tunduk dan pasrah". Objek ketundukan dan

kepasrahan haruslah merupakan Dzat yang menjadi tujuan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Di samping itu Dzat yang menjadi tujuan ketundukan yang menjadi sumber makna hidup manusia, dan dunia itulah Tuhan Yang Maha Esa SWT. Sikap tunduk kepada-Nya disebutnya Islam, sehingga *din* atau agama yang benar adalah Islam dan Islam itulah *din* yang sebenarnya yang menuntut perilaku tertentu dan tidak cukup hanya pengakuan semata[13].

Dengan ungkapan lain, Islam atau sikap pasrah dan tunduk kepada Allah mempunyai indikator-indikator antara lain: menjalankan segala perintahnya, dan menjauhi segala larangannya. Yang demikian itulah *din* atau agama yang benar sehingga tujuan beragama ialah untuk memperoleh perkenan atau ridha Allah SWT. Keinginan untuk mencari ridha Allah inilah yang menjadi pangkal tumbuhnya budi pekerti luhur, yaitu perilaku lahir dan batin yang bersih, sejalan dengan hati nurani dan merupakan kelanjutan dari kejadian asal suci atau fitrah manusia.

Tujuan beragama secara pribadi dan sosial adalah bertakwa dan berakhlak, takwa sebagai kelanjutan iman, dan akhlak sebagai kelanjutan amal saleh. Takwa sebagai penghayatan ketuhanan (robaniah) sedangkan akhlak sebagai penghayatan kemanusiaan (insaniah). Kedua nilai takwa dan akhlak menyatu dalam kesatuan dualitas antara iman dan amal. Hal ini sebagaimana difirmankan Allah SWT[14] bahwa ucapan tanpa perbuatan itu dosa besar, karena itulah dapat dipahami bahwa tujuan agama ialah membentuk manusia bertakwa.

Mengenai ciri-ciri orang bertakwa diantaranya disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 1-5, yaitu: (1) percaya kepada yang ghaib, (2) menegakkan shalat, (3) mendermakan sebagaian dari harta, (4) percaya kepada ajaran yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW, (5) percaya kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad, (6) yakin akan adanya hari kemudian. Orang-orang yang bertakwa disebut golongan yang mendapat petunjuk dari Tuhan dan merupakan orang-orang yang bahagia.

Lebih lanjut dapat dicontohkan seorang bertakwa menegakkan shalat. Shalat yang ia lakukan dapat membentuk kebiasaan hidup secara individual dalam kehidupannya senantiasa: (1) bersih, (2) tertib teratur, (3) menjaga waktu, (4) berilmu, beramal dan berbudi, (5) sosial dan ekonomis, (6) berani karena benar dan suci dari berbuat maksiat dan kejahatan[15].

Menurut Tyler[16] model pilihan tujuan sumber utamanya ada tiga macam yaitu: siswa, masyarakat, dan bidang studi. Ketiga sumber pilihan tujuan itu saling berhubungan erat dan saling melengkapi. Dari pilihan tujuan yang ditentukan disaring dengan cara filosofis dan psikologi belajar.

Model Tyler ini dapat digunakan untuk setiap jenis tujuan secara hierarkis yaitu:

Tujuan institusional, tujuan kurikuler, tujuan instruksional umum, dan tujuan instruksional khusus. Pemilihan tujuan yang didasarkan pada siswa dapat digali melalui kemampuan, minat, dan kebutuhan. Cara memperoleh data yang bersumber pada siswa guru bisa melalui wawancara secara langsung dengan menanyakan kepada siswa, bisa melalui kuesioner (siswa diminta mengisi daftar pertanyaan), dan bisa mengambil dari tulisan para ahli psikologi pendidikan yang merupakan hasil penelitian mereka. Sedangkan pemilihan tujuan yang bersumber dari masyarakat tentunya berangkat dari harapan masyarakat terhadap pendidikan, misalnya pendidikan diharapkan membentuk "warga negara yang baik", sehingga dapat dirumuskan tujuannya adalah: menolong siswa belajar menghadapi perubahan yaitu supaya dapat bereaksi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya.

Untuk mengetahui keberhasilan pendidikan yang bersumber dari masyarakat dapat diukur dengan tes-tes situasional (tugas-tugas yang dapat menyelesaikan problem yang berbeda-beda), dan bisa diukur juga ketaatan siswa terhadap tata tertib sekolah, kesediaan menolong teman-teman secara sukarela dan sebagainya.

Pemilihan tujuan yang bersumber pada bidang studi dengan cara pendekatan melalui mengenali konsep-konsep pokok bidang

studi, kemudian dicoba dirumuskan. Dalam bidang ilmiah ciri yang menonjol adalah observasi dan objektivitas. Selanjutnya Tyler menyarankan penggunaan dua saringan (filosofis dan psikologi belajar) terhadap pemilihan tujuan yang sumbernya (siswa, masyarakat, dan bidang studi) untuk dapat membuat tujuan yang lebih sahih (tepat).

Filsafat pendidikan "seharusnya" menolong untuk memutuskan tujuan yang "seharusnya" dicapai. Misalnya, fungsi sekolah mencoba berusaha mengembangkan kemampuan khusus setiap individu, maka banyak tujuan yang berdasarkan data tentang masyarakat dan siswa dipertahankan. Maksud utama saringan filosofis terhadap tujuan adalah mengurangi kemungkinan adanya pertentangan tujuan satu sama lain. Oleh karena secara eksplisit filsafat pendidikan sebagai pengecek mutu dan konsistensi tujuan.

Peran psikologi belajar sebagai penyaring pemilihan tujuan pendidikan adalah untuk melihat tujuan tertentu "dapat" dicapai dengan psikologi belajar, misalnya tujuan sekolah menengah adalah: (a) meningkatkan pengetahuan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan untuk mengabdikan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian, (b) meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitarnya; dan (2) untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penyelenggaraan pendidikan menengah yang berpedoman pada tujuan pendidikan nasional[17].

Psikologi belajar tertentu kadang-kadang sudah termasuk pula pemilihan teknis mengajar, misalnya teknik reinformen dapat memperbesar tercapainya tujuan tertentu. Tawaran Tyler tentang model pilihan tujuan tersebut di atas dan penyaringan tujuan merupakan tawaran yang bersifat komprehensif, karena dapat digunakan pada pemilihan tujuan pendidikan secara hierarkis, baik tujuan umum pendidikan, tujuan institusional, tujuan kurikuler maupun tujuan instruksional.

Menurut Nana Sudjana [18] untuk merumuskan tujuan instruksional khusus harus memenuhi tiga persyaratan, yaitu: (1) rumusan tujuan harus berpusat pada perubahan tingkah laku sasaran didik/siswa, (2) rumusan tujuan pengajaran khusus harus berisikan tingkah laku operasional, (3) rumusan tujuan berisikan makna dari pokok bahasan yang diajarkan pada saat itu. Ketiga syarat di atas, mutlak diperlukan bagi tujuan pengajaran khusus. Jika salah satu syarat tidak dipenuhi maka rumusan tujuan tidak sempurna. Di samping tiga syarat tersebut, dapat juga dilengkapi dengan syarat-syarat lain misalnya kondisi pada saat pengajaran berlangsung dan standar minimal.

2. *Entering Behavior* Peserta Didik

Yang dimaksud *entering behavior* adalah keberadaan tingkat dan jenis karakteristik perilaku peserta didik yang telah dimiliki pada saat akan memasuki kegiatan belajar mengajar. Secara umum peserta didik sebelum memasuki kegiatan belajar mengajar paling tidak sudah membawa potensi-potensi, di antaranya berupa "badan wadak", akal budi (yang menjadi kognisi dan afek), makhluk sosial[19], bahkan menurutnya peserta didik di samping membawa potensi tersebut juga sejak dilahirkan ke dunia ini telah membawa fitrah[20]. Lebih lanjut ia katakan beberapa potensi yang dimiliki peserta didik mengalami proses perkembangan yang multifaset, yaitu (l) faset biologis-fisiologis, (2) faset psikologis, (3) faset sosiologis-psikologis-sosial-ekonomis, dan (4) faset kemanusiaan secara utuh[21].

Potensi-potensi peserta didik seharusnya terlebih dahulu dipahami dan disadari oleh guru sebelum berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Di samping itu pula, setiap potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik masing-masing mempunyai karakteristik sendiri-sendiri sehingga memungkinkan sekali potensi yang dimiliki masing-masing peserta didik tidak sama. Hal inilah yang juga seharusnya dipahami dan disadari oleh guru bahwa potensi-potensi yang ada pada peserta didik berbeda sehingga proses pengembangannya pun berbeda pula dari masing-masing peserta didik.

Dengan ungkapan lain guru dalam kegiatan belajar mengajar memerlukan beberapa strategi belajar mengajar sehingga perbedaan potensi peserta didik dengan segala variasinya dapat tersalurkan sehingga tujuan pengajaran dapat tercapai.

Secara spesifik guru dituntut untuk mengetahui tingkat dan jenis karakteristik perilaku peserta didik yang dimilikinya sebelum kegiatan belajar mengajar dilakukan. Ada beberapa langkah untuk mengidentifikasi *entering behavior* peserta didik, guru dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini, sebelum ia merencanakan dan melaksanakan kegiatan mengajar, di samping itu, guru memperhatikan tingkatan kelas dan sekolah, jenis bidang studi, usia peserta didik, dan waktu yang tersedia dan direncanakan. Pertanyaan dimaksud adalah: (l) sejauh mana batas-batas (jenis dan ruang lingkup) materi pengetahuan yang telah diketahui dan dikuasai peserta didik yang akan diajarkan, (2) tingkat dan tahap serta jenis kemampuan (kognitif, afektif dan psikomotorik) manakah yang telah dicapai dan dikuasai peserta didik yang akan diajar, dan (3) apakah peserta didik sudah cukup siap dan matang (secara intelektual, emosional, dan psikiologis) untuk menerima bahan dan pola-pola perilaku yang akan diajarkan[22].

Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk mengidentifikasikan *entering behavior* peserta didik, antara lain secara tradisional dan secara inovatif.

l) Secara Tradisional

Yang dimaksud cara tradisional adalah guru menanyakan kepada peserta didik bahan (pelajaran) apa saja yang pernah dipelajari sebelum guru menyajikan bahan pelajaran baru, biasanya dikenal dengan apersepsi material.

2) Secara Inovatif

Yang dimaksud inovatif yaitu guru yang telah memiliki kemampuan untuk mengembangkan instrumen pengukuran prestasi belajar yang memenuhi syarat (validitas, reliabilitas, dan lain-lain),

ia melakukan *pre-test* sebelum memulai program kegiatan belajar-mengajarnya. Pada gilirannya instrumen *pre-test* yang sama digunakan juga sebagai bahan *post-test* bagi peserta didik yang telah menjalani kegiatan belajar mengajar.

Guru yang mengetahui *entering behavior* peserta didiknya, banyak dibantu segi kelancaran dan keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Ada beberapa manfaat mengetahui *entering behavior*, yaitu (l) guru dapat mengetahui seberapa jauh terdapat kesamaan individual antarsiswa dalam taraf kesiapan (*readiness*), kematangan (*maturation*), tingkat penguasaan (*mastery*) dari pengetahuan dan keterampilan dasar (*fundamental skills and knowledge*) sebagai landasan *(pre-requisite*) bagi penyajian (*presentation*) bahan baru (*new material*), (2) guru mempertimbangkan dan memilih bahan, prosedur, metode, teknik dan alat bantu belajar mengajar (*teaching aids*) yang sesuai (*appropriate*), semua itu didasarkan pada disposisi perilaku peserta didik, dan (3) guru membandingkan nilai *(score*) dari *pre-test* dengan nilai hasil (*post-test*), guru akan memperoleh indikator (mengenai seberapa jauh perubahan perilaku telah terjadi pada peserta didik. Perbedaan nilai *post-test* dengan *pre-test* baik secara rata-rata kelompok maupun nilai individual yang merupakan indikator prestasi, atau hasil pencapaian yang nyata sebagai pengaruh dari proses belajar mengajar yang bersangkutan.

Pada hakikatnya perubahan perilaku dalam belajar dapat merupakan penambahan (pengayaan), peningkatan (pendalaman) hal-hal baru berupa pengetahuan, keterampilan, sikap dan sebagainya) terhadap yang lama yang telah dimiliki oleh peserta didik, di samping penciptaan (pengadaan) hal-hal yang baru sama sekali atau bahkan pengurangan terhadap pola-pola perilaku (kebiasaan, sikap) lama yang tidak diinginkan misalnya merokok, menyontek, dan lain sebagainya, maka sekurang-kurangnya ada atau tidak dimensi *entering behavior* guru perlu mengetahuinya, di antarnya (l) batas-batas cakupan ruang lingkup materi pengetahuan yang telah dimiliki dan dikuasai peserta didik, (2) tingkatan dan urutan tahapan materi pengetahuan dan terutama mengenai ranah kognitif, afektif

dan psikomotorik yang telah dicapai oleh peserta didik, (3) kesiapan dan kematangan fungsi-fungsi psikomotorik, proses kognitif, pengalaman, mengingat, berpikir, afektif, emosional, motivasi dan kebiasaan.

C. Memilih Pendekatan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Berpijak pada kompleksitas yang bersifat koheren corak tantangan manusia beragama memengaruhi aspek pendekatan dalam pendidikan agama bagi manusia itu sendiri. Dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran agama di lingkungan lembaga pendidikan tampaknya menggunakan pendekatan doktriner sehingga cepat membosankan dan tidak menarik bagi peserta didik dan generasi muda pada umumnya yang telah mengenal berbagai cabang keilmuan empiris baik *natural sciences* maupun *social sciences*. Oleh karena itu, pendidikan agama dengan pendekatan *scientific* mungkin lebih menarik bagi pendidik

Dalam kaitan ini M. Amin Abdullah[23] menawarkan model pendekatan kefilsafatan yang pertama, yakni yang bersifat "keilmuan", "terbuka", dan "inklusif" yang tepat dan cocok untuk diangkat ke permukaan dan diapresiasi kembali untuk membantu memecahkan persoalan keagamaan kontemporer, bahkan ditegaskan dalam makalahnya bahwa filsafat merupakan "paham", "ideologi", "aliran-aliran" tertentu yang bersifat tertutup, atau eksklusif.

Pendekatan filsafat di sini semata-mata ditujukan untuk mencari klasifikasi keilmuan hubungan antara "ide-ide" yang didasarkan pada religiusitas dan "kenyataan" konkret pengalaman dan pengamalan religiusitas manusia pada wilayah kultural historis. Dengan demikian, keilmuan pendidikan agama terbangun dengan ide-ide religiusitas, kenyataan konkret pengalaman dan pengamalan religiusitas manusia pada wilayah kultural historis. Ketiga hal ini menjadi satu ikatan padu yang dijadikan sebagai pendekatan pendidikan agama yaitu pendekatan kefilsafatan.

M. Amin Abdullah[24] masing-masing pendekatan itu pada hakikatnya saling berkait dan tidak berdiri sendiri. Pendekatan kefilsafatan ini sebenarnya yang mempertanyakan apakah keberagamaan yang sesungguhnya, sehingga menuntut jawaban berdasar pengenalan dan pendalaman persoalan-persoalan serta isu-isu fundamental dalam bentuk cara berpikir yang bersifat kritis (*critical thought*). Berpikir kritis secara otomatis membentuk mentalitas; yaitu cara berpikir dan kepribadian yang mengutamakan kebebasan intelektual (*intellectual freedom*), sekaligus mempunyai sikap toleran terhadap berbagai pandangan dan kepercayaan yang berbeda serta terbebas dari dogmatisme dan fanatisme.

Dengan pendekatan kefilsafatan keberhasilan PAI harus tecermin pada tindakan individu dan tindakan sosial yang konkret dalam kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat. Terjadinya proses "transformasi" dalam kehidupan seseorang adalah tujuan utama pendidikan agama.

D. Memilih Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Yang dimaksud "model" dalam buku ini adalah "kerangka konseptual" yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan, sedangkan istilah model dihubungkan dengan belajar mengajar atau yang kini dikenal dengan "model pembelajaran" adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dan mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar[25].

Belajar dan mengajar adalah dua konsep yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Belajar menunjuk pada apa yang harus dilakukan peserta didik yang menerima pelajaran, sedangkan mengajar menunjuk pada apa yang harus dilakukan oleh guru sebagai pengajar.

Model belajar mengajar dibangun menurut teori belajar dan teori mengajar, kemudian dari kedua teori dipadukan menjadi satu belajar-mengajar. Belajar mengajar menurut beberapa ahli memiliki model-model belajar mengajar. Teori belajar dapat dikelompokkan menjadi empat aliran, yaitu aliran tingkah laku, kognitif, humanistik, dan sibernetik[26]. Keempat aliran belajar itu masing-masing mempunyai penekanan. Aliran tingkah laku menekankan pada "hasil" daripada proses belajar. Aliran kognitif menekankan pada "proses" belajar. Aliran humanis menekankan pada "isi" atau apa yang dipelajari, sedangkan aliran sibernetik menekankan pada "sistem informasi" yang dipelajari[27].

Menurut Bruner[28] mengajar adalah menyajikan konsep dan masalah secara bertahap, yaitu enaktif, ekonik, sampai ke simbolik. Sedangkan Ausubel[29] menyatakan bahwa mengajar adalah upaya menstrukturkan apa yang dipelajari agar mudah dipahami. Mengajar menurut Gagne adalah penataan situasi belajar. Penataan situasi belajar dapat dipilih antara pengelolaan belajar (instruksional) dengan pengelolaan kondisi belajar (noninstruksional)[30].

Kedua teori belajar dan teori mengajar tersebut merupakan sesuatu yang seharusnya dimengerti oleh setiap guru, karena teori-teori tersebut dapat dijadikan konsep umum dalam merencanakan tugas mengajar. Di samping itu, mengajar ada beberapa model yang secara garis besar model-model mengajar dapat dikelompokkan menjadi empat macam dan setiap kelompok mempunyai macam-macam model mengajar yang lain.

Keempat kelompok model mengajar tersebut adalah: (1) model pengolahan informasi, (2) model interaksi sosial, (3) model modifikasi perilaku, dan (4) model personal humanistik[31]. Model-model belajar mengajar pengolahan informasi meliputi: (1) pencapaian konsep, (2) berpikir induktif, (3) latihan penelitian, (4) pemandu awal, (5) memorisasi, (6) pengembangan intelek, (7) penelitian ilmiah.

Model-model belajar mengajar personal humanistik meliputi: (1) pengajaran tanpa arahan, (2) sinektik, (3) latihan kesadaran, (4) pertemuan kelas.

Model-model interaksi sosial meliputi: (1) investigasi kelompok, (2) bermain peran, (3) penelitian yurisprudensial, (4) latihan laboratoris, dan (5) penelitian ilmu sosial. Model-model sistem perilaku meliputi: (1) belajar tuntas, (2) pembelajaran langsung, (3) belajar kontrol diri, (4) latihan pengembangan keterampilan dan konsep, (5) latihan asertif. Pola pengajaran langsung dan pola pengajaran terbuka tersebut dapat dijadikan dasar klasifikasi strategi belajar mengajar. Secara umum klasifikasi strategi belajar mengajar terbagi menjadi dua, yaitu: (1) klasifikasi berdasarkan proses belajar mengajar, dan (2) klasifikasi berdasarkan model-model belajar mengajar.

E. Menetapkan Prosedur, Metode, dan Teknik Pembelajaran PAI

1. Prosedur

Prosedur atau langkah-langkah penyelenggaraan pembelajaran PAI bersifat ekspositoris yaitu meliputi preparasi, introduksi, presentasi, konklusi dan evaluasi.

a. Preparasi

Guru memilih topik (pokok bahasan) yang diperinci ke dalam beberapa subtopik. Bahan-bahan dipersiapkan secara ekspositoris. Karakteristik siswa diidentifikasi dan diperhitungkan segi usia, pendidikan, jenis, latar belakang pengalaman, minat dan sebagainya. Waktu yang tersedia diperhitungkan juga. Memilih dan menetapkan teknik presentasi dan media komunikasi dan evaluasinya. Guru yang baik senantiasa membuat persiapan ini baik tertulis maupun telah dihafal di luar kepala terutama bagi guru yang telah berpengalaman.

b. Introduksi

Guru menciptakan situasi dengan gerak-gerik, mimik, pertanyaan, cerita singkat dalam tempo sekitar lima menit, sehingga siswa memiliki kesiapan dan kesediaan. Dengan langkah ini perhatian, minat dan persepsi siswa diharapkan terarah dan tercurah pada

pokok persoalan yang dibahas. Guru yang baik biasanya menunjukkan kerangka pembahasannya baik secara skematis maupun secara garis besar.

c. Presentasi

Presentasi adalah bagian dari metode, sedangkan introduksi merupakan bagian hulunya. Pada taraf ini guru hendaknya bertahap sesuai dengan sub-sub topik dikemukakan sebagai kalimat berita atau deklaratif, sedangkan pada cara tanya jawab, topik dikemukakan sebagai jawabannya. Bila waktu masih ada mungkin jawaban dapat dimintakan dari siswa.

d. Konklusi

Bagian ini merupakan ujung dari metode. Pada taraf ini guru mengemukakan resume, atau pokok bahasan secara konklusif. Dengan cara demikian diharapkan siswa memperoleh gambaran yang lengkap, bulat dan menyeluruh dari materi yang disampaikan.

e. Evaluasi

Untuk mendapatkan umpan balik dari siswa guru biasanya dapat menggunakan beberapa teknik antara lain: dengan jalan bertanya kepada siswa dan menunjuk beberapa dari mereka secara acak untuk menjawabnya; atau memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan diminta kepada siswa yang lain untuk menjawabnya atau guru sendiri yang menjawabnya. Teknik lain dapat berupa penugasan kepada siswa untuk membuat laporan, observasi, membaca bacaan dan lain sebagainya.

2. Metode dalam Proses PAI

Metode dalam proses PAI mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam upaya pencapaian tujuan karena metode menjadi sarana yang bermaknakan materi pelajaran yang tersusun dalam kurikulum. Tanpa metode materi pelajaran tidak berproses secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan pendidikan agama Islam. Sebaliknya, metode pendidikan yang tidak/ kurang tepat men-

jadi penghalang kelancaran jalannya proses belajar-mengajar. Oleh karena itu, metode dapat dikatakan bertepat guna dan berhasil guna jika metode itu mampu dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan[32].

Untuk menentukan metode PAI ada beberapa pertimbangan yang harus dilakukan oleh guru agama. Pertimbangan ini dijadikan landasan oleh guru untuk menentukan metode. Metode dipilih sebagai langkah berikutnya setelah ditentukan pendekatan (*approach*) yang masih bersifat filosofis, metode merupakan penjabaran dari *approach* dan metode merupakan implikasi dari *approach*, sedangkan teknik merupakan implementasi dari metode. Dengan kata lain bahwa hubungan antara pendekatan (*approach*), metode dan teknik adalah hubungan yang bersifat hierarkis.

Disebutkan di atas pendekatan dalam PAI digunakan pendekatan filosofis artinya pendekatan lebih menitikberatkan aspek-aspek filsafat dari ilmu-ilmu agama, terutama ilmu-ilmu agama yang dijadikan sebagai bahan (materi) PAI karena pendekatan filosofis yang digunakan dalam PAI berpengaruh pada metode dan teknik dalam proses pendidikannya. Pendekatan filsafat di sini semata-mata ditujukan untuk mencari klasifikasi keilmuan hubungan antara "ide-ide" yang mendasarkan pada religiusitas dan "kenyataan" konkret pengalaman dan pengamalan religiusitas manusia pada wilayah kultural historis.

Untuk menjabarkan pendekatan tersebut membutuhkan bentuk-bentuk metode pendidikan yang relevan dan efektif dalam PAI, di antaranya: metode diakronis, metode sinkronik-analitis, metode *problem solving*, metode empiris, metode induktif, dan metode deduktif[33].

3. Teknik Penyajian PAI

Untuk mewujudkan metode-metode PAI di atas dibutuhkan teknik-teknik pendidikan agama Islam yang sesuai yaitu: (1) teknik dialog yang meliputi: (a) teknik tanya jawab, (b) teknik diskusi, dan (c) teknik bantah-membantah (*al-mujadalah*); (2) teknik per-

iklanan dan pertemuan yang meliputi: (a) teknik ceramah dan (b) teknik tulisan (*al-kitabah*); (3) teknik bercerita, misalnya teknik kisah; (4) metafora (*al-amtsal*) yang meliputi: (a) simbolisme verbal dan (b) teknik karya wisata; (5) teknik imitasi (*al-qudwah*) yang meliputi: (a) teknik *uswatun hasanah* dan (b) teknik demonstrasi dan dramatisasi; (6) teknik *drill* yang meliputi: (a) teknik *inquiry* (kerja kelompok), (b) teknik *discovery* (penemuan), (c) teknik *mikro teaching*, (d) teknik modul belajar, dan (e) teknik belajar mandiri; (7) teknik *ibrah* yang meliputi: (a) teknik eksperimen, (b) teknik penyajian kerja lapangan, (c) teknik penyajian secara khusus, dan (d) teknik penyajian *non-directive*; (8) teknik pemberian janji dan ancaman (*targhib wa tarhib*) yang meliputi: (a) teknik pemberian bimbingan dan ampunan, (b) teknik pemberian motivasi, serta (c) teknik anugerah dan hukuman; (9) teknik koreksi dan kritik; dan (10) teknik perlombaan yang meliputi: (a) teknik *muthalaah/qiraah* (membaca), (b) teknik *imla* (dikte), (c) teknik *muhadatsah* (dialog), (d) teknik insya' tahriri (mengarang), (e) teknik *mahfudzat* (hafalan), dan (f) teknik *kawa'id* (kaidah-kaidah)[34].

Dalam hubungannya dengan media PAI yang terdiri dari bermacam-macam jenis dan bentuk, bermacam-macam metode dan teknik pendidikan, dan dalam melaksanakan fungsinya, guru dituntut untuk mengetahui dan dapat merealisasikannya sesuai dengan tujuan PAI yang telah ditentukan. Pada hakikatnya, media pendidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan fungsi guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pendidikan.

F. Menetapkan Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Evaluasi merupakan bagian integral dari sistematisasi pendidikan agama karena setiap proses pendidikan agama di dalamnya terkandung unsur evaluasi, dan evaluasi ini merupakan sentral pengukuran dan penilaian dari proses pendidikan. Mengajar dan mengevaluasi adalah dwi tunggal yang mesti berjalan bergandengan

atau beriringan; salah satunya tidak dapat ditinggalkan karena akan menyebabkan hal yang kurang bermakna atau kurang bermanfaat.

Menurut Suharsimi Arikunto[35], evaluasi berarti mengukur dan menilai. Mengukur berarti membandingkan sesuatu dengan suatu ukuran yang bersifat kuantitatif, sedangkan menilai berarti mengambil sesuatu dengan ukuran baik-buruk, tinggi-rendah yang bersifat kualitatif, dan evaluasi berarti mengikuti kedua langkah tersebut. Dengan kata lain, penilaian dan pengukuran itu adalah unsur evaluasi pendidikan agama karena evaluasi itu merupakan kegiatan untuk menentukan taraf kemajuan dalam pendidikan agama dengan alat ukur sampai di mana penguasaan peserta didik terhadap pendidikan yang telah diberikan oleh guru agama. Bahkan menurut Anas Sudijono[36] evaluasi merupakan bagian penting dari proses belajar-mengajar karena sangat tinggi nilainya bagi guru terutama dapat membantu dalam menjawab masalah-masalah penting baik yang berkaitan dengan peserta didik maupun yang berkaitan dengan prosedur pengajaran.

Uraian di atas menunjukkan bahwa evaluasi pendidikan agama mutlak diperlukan dalam rangkaian pelaksanaan pendidikan agama. Evaluasi merupakan kesatuan dalam sistemisasi pendidikan. Evaluasi dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan pendidikan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Agar evaluasi pendidikan agama dapat mengenai sasaran, yaitu bagi guru dan peserta didik, perlu dirumuskan tujuan, fungsi, prinsip dan macam atau jenis evaluasi pendidikan agama.

Oleh karena evaluasi pendidikan agama dapat meliputi evaluasi pendidikan agama baik dalam keluarga, masyarakat, maupun sekolah, pembahasan evaluasi pendidikan agama dalam tesis ini lebih dibatasi pada evaluasi pendidikan agama pada pendidikan sekolah, meskipun secara umum evaluasi pada pendidikan keluarga dan pendidikan di masyarakat secara singkat dibahas pula.

1. Tujuan Evaluasi Pendidikan Agama

Tujuan evaluasi pendidikan agama adalah untuk mengetahui atau mengumpulkan informasi taraf perkembangan dan kemajuan yang diperoleh oleh peserta didik dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum. Di samping itu, guru dapat menilai daya guna pengalaman dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mempertimbangkan antara hasil pendidikan agama, pendekatan, metode dan teknik yang dipergunakan oleh guru, apakah relevan dengan kurikulum yang ada.

2. Fungsi Evaluasi Pendidikan Agama

Menurut S. Nasution[37] evaluasi pendidikan berfungsi antara lain: (1) mengetahui kesanggupan peserta didik, (2) mengetahui penguasaan anak dalam mencapai tujuan pelajaran dan pendidikan, (3) menunjukkan kelebihan dan kelemahan peserta didik, (4) memberi pemahaman yang lebih khusus, (5) memberi petunjuk lebih konkret tujuan pelajaran yang akan dicapai, (6) memberi motivasi kepada peserta didik agar lebih giat.

Uraian di atas dapat dipahami bahwa evaluasi pendidikan ini berlaku pula pada evaluasi pendidikan agama Islam. Oleh karena itu, dapat dikatakan fungsi evaluasi hasil belajar dalam proses belajar mengajar pendidikan antara lain: (1) penentuan kekuatan atau kelemahan serta kesanggupan peserta didik menguasai materi pendidikan agama, (2) penentuan unsur tujuan, materi, alat, dan metode dan sebagainya untuk direvisi, (3) penentuan kekuatan atau kelemahan guru agama dalam melaksanakan proses belajar mengajar, dan (4) menentukan bimbingan sesuai pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara individual atau kelompok[38].

Dengan perkataan lain evaluasi pendidikan agama Islam berfungsi: (1) memberikan umpan balik (*feed back*), (2) menentukan hasil kemajuan belajar siswa (pelaporan), (3) menempatkan siswa dalam situasi belajar yang tepat (penempatan), dan (4) mengenal latar belakang psikologis, fisik dan lingkungan siswa, terutama yang mengalami kesulitan belajar (diagnosis).

3. Prinsip-Prinsip Dasar Evaluasi

Menurut Suharsimi Arikunto[39] paling tidak ada tiga prinsip evaluasi (termasuk evaluasi PAI) yang harus dilalui secara hierarkis, yaitu: (1) prinsip yang berkaitan dengan persiapan evaluasi, (2) prinsip yang berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi, dan (3) prinsip yang berkaitan dengan tindak lanjut hasil evaluasi. Ketiga prinsip evaluasi tersebut lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Prinsip Dasar dalam Menyiapkan Evaluasi

Menyiapkan evaluasi PAI bukan hanya berpikir tentang membuat soal, tetapi juga mempertimbangkan waktu (kapan dan berapa lama), di mana dilaksanakan (dengan situasi dan kondisi yang bagaimana), dan apa saja yang diperlukan (sarana pendukung). Dalam persiapan inilah guru PAI sebagai evaluator harus memikirkan prinsip validitas, praktikabilitas, dan objektivitas.

Guru PAI sejak awal membuat rencana penyusunan alat evaluasi harus menerapkan prinsip validitas, objektivitas, dan demi kepraktisan pelaksanaan evaluasi PAI dibutuhkan prinsip praktikabilitas. Prinsip validitas menyangkut ketepatan evaluasi, meliputi validitas isi, aspek, dan proses. Beberapa hal yang berkenaan dengan validitas tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut.

1) Untuk memperoleh validitas isi yang tinggi, guru sebagai penyusun alat evaluasi dapat mengacu pada prinsip: tidak menilai materi yang tidak diajarkan, semua materi yang diajarkan dinilai, dan ada keseimbangan dalam menilai semua materi.
2) Untuk memperoleh validitas aspek yang tinggi, guru sebagai evaluator penyusun alat evaluasi seharusnya menguasai materi, menggunakan kisi-kisi, tabel spesifikasi (atau *blue print*).
3) Untuk memperoleh validitas proses yang tinggi guru sebagai penyusun alat evaluasi harus mengingat jenis kegiatan dan hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik. Oleh karena itu, tes tertulis dan tes lisan tidak mampu menampung daya ungkap aspek afektif (khususnya yang berlangsung dalam proses belajar-mengajar multi sumber dan multi metode). De-

ngan demikian, penyusun alat evaluasi yang cermat harus dapat mengungkap tambahan kemampuan yang diperoleh peserta didik.

Prinsip "praktikabilitas" dalam menyiapkan evaluasi dipertimbangkan dalam rangka kemudahan pelaksanaan, sedangkan prinsip "objektivitas" digunakan sebagai upaya untuk mengerem subjektivitas penyusun terhadap produk alat evaluasinya. Prinsip reliabilitas digunakan oleh peneliti untuk menjaga kestabilan hasil evaluasi. Prinsip ini dapat diketahui setelah evaluasi selesai dilaksanakan, dan dianalisis hasilnya.

b. Prinsip Dasar dalam Melaksanakan Evaluasi

Kemurnian hasil evaluasi banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor di dalam pelaksanaan. Agar evaluator (guru agama) memperoleh hasil sebagaimana dicapai oleh peserta didik, ada beberapa prinsip yang perlu dipertimbangkan, yaitu: (1) prinsip keadilan yang perlu dipertimbangkan oleh guru agama sebagai evaluator agar setiap peserta didik yang dievaluasi memperoleh kesempatan yang sama untuk mengerjakan tes, yang meliputi waktu, kemudahan, ketenangan, pelayanan, dan lain-lain, (2) prinsip objektivitas bagi setiap peserta didik untuk mengerjakan soal menurut kemampuannya dan terlepas dari gangguan yang datang dari dalam maupun dari luar peserta didik, dan (3) prinsip praktikabilitas yang dipertimbangkan sebagai kemudahan bagi peserta didik yang dievaluasi maupun penyelenggara, misalnya tempat duduk tidak terlalu rapat sehingga mudah bagi pelaksana untuk mengumpulkan kertas pekerjaan. Di samping itu, peserta didik (yang dievaluasi) dapat mengerjakan soal dalam suasana tenang dan tidak tertekan.

c. Prinsip Dasar dalam Menindaklanjuti Hasil Evaluasi Pendidikan Agama Islam

Tugas guru setelah melaksanakan evaluasi bukan berarti telah selesai, tetapi guru harus menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut. Semua peserta didik yang telah mengikuti evaluasi tentu berke-

inginan untuk mengetahui hasilnya. Untuk itu, guru agama (evaluator) harus menerapkan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:

1) Prinsip objektivitas: guru agama harus menghindarkan diri dari penilaian yang tidak proporsional, misalnya guru pilih kasih dalam menilai peserta didiknya,
2) Prinsip praktikabilitas: mencakup cara, waktu, dan tenaga yang memungkinkan guru untuk menyelenggarakan evaluasi dan mengoreksi hasil pekerjaan peserta didik,
3) Prinsip psikologis: yaitu keharusan yang dijadikan pertimbangan guru dalam memberikan penilaian peserta didik, di antaranya: (a) mengoreksi pekerjaan peserta didik dengan segera dan diberitahukan hasilnya kepada peserta didik, (b) mengoreksi pekerjaan peserta didik dengan memberi tanda-tanda secara rinci agar peserta didik mengetahui dengan pasti letak kekurangan dan kesalahan dalam rangka untuk memperbaiki belajarnya, (c) komunikasi terbuka, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengajukan "pengaduan" apabila kebetulan tidak puas menerima hasil evaluasi yang diikutinya.

Ketiga prinsip dasar yang berkaitan dengan evaluasi tersebut di atas dapat dilakukan oleh guru agama Islam dalam tugasnya sebagai evaluator. Prinsip-prinsip dasar itu dapat dijadikan salah satu pedoman penilaian, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi pendidikan agama, terutama evaluasi aspek kognitif dan psikomotorik, sedangkan evaluasi aspek afektif seperti hasil belajar yang menyangkut ketelitian, kecermatan, apresiasi, perilaku akhlak membutuhkan alat evaluasi yang lain, di antaranya yaitu dengan studi kualitatif. Kurangnya perhatian terhadap aspek-aspek nonkognitif ini sudah terasa sejak berlakunya kurikulum 1975. Dengan persyaratan rumusan tujuan yang khusus, berpusat pada peserta didik, menunjukkan perubahan tingkah laku yang dapat diukur, dan menunjukkan tingkat keberhasilan dengan tepat, maka hasil belajar aspek afektif (misalnya ketelitian, kecermatan, apresiasi, perilaku akhlak dan sebagainya) belum dapat diukur. Oleh karena

itu, sekarang dirasakan (setelah "model TIK" berjalan lebih dari l9 tahun), afeksi peserta didik dan tamatan pendidikan sekolah kurang terlatih[40].

Zamroni[41] menawarkan pengembangan afektif PAI dengan berdasarkan hakikat pendidikan Islam dan karakteristik materi PAI, misalnya: tujuan dan klasifikasi aspek afektif pendidikan Islam menjadi (l) mengembangkan doktrin yang dikaitkan dengan usaha untuk memperkuat keimanan siswa atas suatu ajaran yang bersifat mutlak, (2) memperkuat komitmen keagamaan yang dikaitkan dengan keterlibatan dan kemauan siswa untuk melaksanakan ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan diri pribadi, (3) memperluas wawasan yang berkaitan erat dengan upaya untuk mengembangkan sikap siswa dalam kaitannya dengan nilai-nilai atau ajaran lain, misalnya: toleransi dengan kepercayaan orang Jawa, (4) memperhalus penghayatan yang dikaitkan dengan mempertajam penghayatan pelaksanaan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Keempat dimensi aspek afektif tersebut harus muncul secara seimbang pada setiap diri peserta didik. Bila tidak demikian, menimbulkan distorsi pada diri yang bersangkutan, misalnya menjadi individu yang memiliki doktrin kuat namun tidak diimbangi dengan dimensi lain yang pada gilirannya melahirkan sosok individu fundamentalis. Individu yang memiliki komitmen kuat tanpa dibarengi ketiga aspek yang lain melahirkan individu yang merasa dirinya paling mampu berjihad. Sementara individu yang mempunyai wawasan kuat yang tidak diimbangi dengan dimensi lain, melahirkan individu yang menawarkan ide-ide menarik dan kelihatannya begitu manusiawi, misalnya "semua agama benar dan baik", sedangkan individu yang mempunyai penghayatan kuat yang tidak diimbangi oleh dimensi lain, akan melahirkan individu dengan penghayatan agama yang begitu khusyuk, seolah-olah beragama Islam harus hidup kembali pada zaman Rasulullah SAW.

Evaluasi PAI secara umum berpedoman pada prinsip-prinsip dasar pelaksanaan evaluasi proses dan hasil belajar PAI, di samping itu, juga untuk evaluasi aspek afektif dapat digunakan penilaian sikap.

4. Macam Evaluasi

Di dalam mengajarkan mata pelajaran PAI, guru dapat melaksanakan dua macam alat evaluasi. *Pertama*, tes formatif yang bertujuan untuk mengetahui keberhasilan proses belajar mengajar. Dengan tes formatif, guru bermaksud mengetahui keberhasilan pengajaran ditinjau dari sudut siswa dan proses itu sendiri. Dengan demikian, sebetulnya, hasil tes formatif tidak dibenarkan untuk mencari peringkat (grading). *Kedua*, tes sumatif bertujuan untuk mengetahui peringkat siswa. Meskipun demikian tidaklah salah apabila guru juga memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa sekaligus keberhasilan program dalam rangka memperbaiki pelaksanaannya.[42]

5. Cara dan Teknik Evaluasi Pendidikan Agama

Berikut ini dikemukakan cara dan teknik evaluasi pendidikan agama.

a. Cara Evaluasi

Dalam melaksanakan evaluasi pendidikan agama ada dua cara yang dapat ditempuh: (1) secara kuantitatif: hasil evaluasi diberikan dalam bentuk angka misalnya, 6, 7, 65, 70, 75, dan seterusnya, dan (2) secara kualitatif: hasil evaluasi diberikan dalam bentuk pernyataan verbal, dan yang sejenis dengan itu. Misalnya: baik, kurang baik, tidak baik, dan sebagainya.

b. Teknik Evaluasi

Teknik evaluasi yang digunakan di sekolah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu teknik tes dan teknik non-tes, sebagaimana diuraikan berikut ini.

Untuk menilai kemampuan murid yang meliputi pengetahuan dan keterampilan sebagai hasil belajar, bakat khusus dan intelegensi, dapat dilakukan dengan menerapkan salah satu bentuk tes, yaitu: (1) uraian (essay test), yang meliputi uraian bebas (*free essay*) dan uraian terbatas (*limited essay*) (2) tes objektif (*objective test*) yang meliputi betul-salah (*true false*), pilihan ganda (*multiple choice*), men-

jodohkan (*matching*), dan jawaban singkat (*short answer*), atau bentuk test lain. Selain bentuk tes esai (*essay test)* dan tes objektif (*objective test)* terdapat bentuk tes yang berbeda lagi, yaitu bentuk ihtisar, bentuk laporan, dan bentuk khusus dalam pelajaran bahasa.

Untuk menilai karakteristik lainnya, misalnya minat, sikap dan kepribadian peserta didik dapat dilakukan dengan menerapkan salah satu bentuk non-tes, yaitu observasi terkontrol, wawancara (*interview*), *inventory*, *questionare* atau *anecdotal accounts*.

CATATAN

[1]Noeng Muhadjir, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial Suatu Teori Pendidikan*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1987), hlm. 109.
[2]Abin Syamsuddin Makmun. *Psikologi Kependidikan: Perangkat Sistem pengajaran Modul*.(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, l996), hlm. l52.
[3]*Ibid*
[4]*Ibid*
[5]T. Rakajoni, *Strategi Belajar Mengajar Suatu Tinjauan Pengantar*, (Jakarta: Depdikbud, 1985), hlm. 4.
[6]T. Raka Joni, o*p. cit*, hlm. 4.
[7]J.J Hasibuan dan Moedjiono, *Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Rosdakarya, 1992), hlm. 3.
[8]UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003 (Bandung: Citra Umbara, 2014), hlm. 6.

[9]Permendiknas No 23 Tahun 2006 tentang SKL untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
[10]Imam Barnadib, Sutari Imam Barnadib, *Beberapa Aspek Substansial Ilmu Pendidikan (*Yogyakarta : Andi, 1996), hlm. 27.
[11]*Ibid*., hlm. 40
[12]Muhadjir, Noeng, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial Suatu Teori Pendidikan*, (Yogyakarta, Rake Sarasin, 1987), hlm. 6.
[13]Nurcholis Madjid, "Orientasi Baru Pendidikan Agama", dalam *Amanah* Edisi Khusus, Nomor 06, Tahun X, Mei 1996, (Jakarta: Amanah, 1996), hlm. 36.
[14]QS 61: 2-3
[15]T.M. Usman Elmuhammadi, *Kuliah Iman dan Islam*, (Jakarta: Pustaka Agus Salim, 1957), hlm. 43
[16]Tyler dalam W. James Popham dan Eva L. Baker, *Bagaimana Mengajar Secara Sistematis*, (Yogyakarta, Kanisius, 1989), hlm. 55.
[17]*PP No.29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah Pasal* 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 90-91.
[18]Nana Sudjana, *Ibid*., hlm. 64.
[19]Noeng Muhadjir, *Ibid*., hlm. l8.
[20]*Ibid*, hlm. 2
[21]*Ibid*, hlm. l9
[22]Abin Syamsuddin Makmun, *Ibid*., hlm. l55
[23]M. Amin Abdullah, "Relevansi Studi Agama-agama dalam Milenium Ketiga: Mempertimbangkan Kembali Metodologi dan Filsafat Keilmuan Agama dalam Upaya memecahkan Persoalan Keagamaan Kontemporer" dalam *Jurnal Ulumul Qur'an No. 5/VII/97* (Jakarta: Cipta Prima Budaya, 1997), hlm. 59.

[24]M. Amin Abdullah, *Ibid.*, hlm. 59.
[25]*Ibid*, hlm. 78.
[26]Prasetya Irawan, *Teori Belajar, Motivasi dan Keterampilan Mengajar*, (Jakarta: Depdikbud, 1996), hlm. 2.
[27]*Ibid*.
[28]Bruner melalui Noeng Muhadjir, o*p.cit*.,hlm. 67-68.
[29]Ausubel melalui Noeng Muhadjir, *Ibid*.
[30]Gagne melalui Noeng Muhadjir, *Ibid*.
[31]*Ibid*.
[32]M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1993), hlm. 197.
[33]Muhaimin dan Abdul Mujib, *Pemikiran pendidikan Islam : Kajian Filosofik dan Kerangka Dasar Operasionalisasinya*, (Bandung : Trigenda Karya, 1993), hlm. 247-250.
[34]*Ibid*, hlm. 251-276.
[35]Suharsimi Arikunto, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Bina Aksara, 1993), hlm. 3.
[36]Anas Sudijono, *Penilaian Hasil Belajar Ranah Afektif dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, (Yogyakarta: Fak. Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga, 1997), hlm. 1.
[37]S. Nasution, dalam Zuhairini, dkk. *Ibid.*, hlm. 148.
[38]*Ibid*, hlm.149.
[39]Suharsimi Arikunto,"Prinsip Dasar Pelaksanaan Evaluasi dalam Proses Belajar-Mengajar", *Makalah Seminar Bulan Bahasa*, FPBS IKIP Yogyakarta Tanggal 13 November 1997.
[40]*Ibid*. hlm. 3.
[41]Zamroni, "Penilaian Hasil Pendidikan Agama Islam Ranah Afektif: Beberapa Alternatif Pengembangan Instrumen", dalam *Jurnal Penelitian Agama* No. 3 Januari-April 1993, (Yogyakarta: Balai Penelitian P3M IAIN Sunan Kalijaga, 1993), hlm. 18-19.
[42]Zuhairini, dkk, *Ibid*., hlm. 156.

Bab 5

DESAIN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

A. Asumsi dan Urgensi Desain Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Pada hakikatnya desain pembelajaran adalah kegiatan memilih, menetapkan, dan mengembangkan metode pembelajaran sesuai dengan kondisi yang ada untuk mencapai hasil yang diharapkan. Dengan demikian, desain pembelajaran pendidikan agama Islam juga merupakan kegiatan serupa yang diarahkan untuk pembelajaran bidang dan jenjang pendidikan yang bersifat khusus. Kegiatan itu dilakukan dengan berpijak pada empat hal pokok sebagai kondisi pembelajaran, yaitu (i) tujuan pembelajaran, (ii) isi pembelajaran, (iii) sumber belajar yang tersedia dan dapat mengantarkan pesan pembelajaran yang lebih efektif dan efisien, serta (iv) karakteristik peserta didik.

Sehubungan dengan hal di atas, pengorganisasian isi pembelajaran bermakna tampaknya merupakan sistem yang banyak diminati dan dianggap mampu menghilangkan berbagai pengaruh, khususnya *proactive interference*[1]. Lebih jauh lagi, dikatakan pula bahwa isi pembelajaran yang diorganisasikan dengan baik bisa bertahan lebih lama dalam ingatan peserta didik daripada isi pembelajaran yang tidak terstruktur dengan baik[2]. Di samping itu, terbukti pula

bahwa isi pembelajaran yang diorganisasikan dengan berpijak pada karakteristik struktur isi bidang studi dapat meningkatkan perolehan hasil belajar dan retensi daripada pengorganisasian pembelajaran dengan sekadar mengikuti urutan isi buku teks.

Beberapa temuan di atas menunjukkan bahwa penataan dan penetapan strategi pengorganisasian isi pembelajaran pendidikan agama melalui perancangan pembelajaran pendidikan agama yang profesional merupakan sesuatu yang sangat urgen. Kualitas pembelajaran tentu saja merupakan fokus kegiatan yang bisa dicapai dengan memilih dan mempreskripsikan metode pembelajaran pendidikan agama yang bermakna.

Kegiatan yang telah digambarkan di atas tentunya harus dilaksanakan dengan tetap berpijak pada beberapa asumsi berikut ini.

1. Mengacu pada kualitas pembelajaran

Kualitas pembelajaran tetap menjadi fokus kegiatan agar setiap langkah kegiatan senantiasa diarahkan pada peningkatan mutu atau kualitas pembelajaran. Anggapan itu dilandasi oleh adanya kenyataan bahwa mutu pembelajaran pendidikan agama Islam selama ini relatif rendah dan dilaksanakan secara seadanya, bersifat rutinitas, formal, kering, dan kurang bermakna.

Desain pembelajaran yang baik atau perancangan pembelajaran yang profesional merupakan titik awal yang mesti dilaksanakan agar kualitas pembelajaran mendapatkan perbaikan.

2. Mengacu pada pendekatan sistem

Pembelajaran pendidikan agama Islam harus dipandang sebagai pembelajaran yang terpadu yang melibatkan beberapa unsur: input, proses dan output. Walaupun pembelajaran itu memiliki beberapa variabel dan komponen, bukan berarti berbagai variabel dan komponen itu harus terpisah satu sama lain. Sebaliknya, harus terpadu dalam sebuah sistem yang saling berhubungan dan saling mendukung dalam mencapai tujuan pembelajaran.

3. Mengacu pada teori belajar dan pembelajaran

Pembelajaran pendidikan agama sebaiknya dirancang dengan mengacu dan atau dilandasi oleh teori belajar dan pembelajaran. Dengan kata lain, secara teoretis perancang pembelajaran harus mampu memahami bagaimana seseorang itu belajar agama dan bagaimana seseorang itu membelajarkan pendidikan agama. Hal itu dapat dipahami karena kualitas pembelajaran pendidikan agama sangat bergantung pada bagaimana pembelajaran itu dirancang dan dikembangkan berdasarkan landasan tertentu: intuitif, ilmiah, atau intuitif-ilmiah. Landasan intuitif mengacu pada kemampuan intuisi perancangnya, sedangkan landasan ilmiah lebih mengacu pada pengetahuan ilmiah atau teori-teori yang telah dikembangkan oleh ilmuwan. Sebagai kombinasi dari dua landasan itu, landasan intuitif-ilmiah mengacu baik pada kemampuan intuisi perancangnya maupun pada berbagai teori pembelajaran agama dan atau teori pendidikan agama Islam. Dengan demikian, landasan intuitif-ilmiah merupakan kombinasi landasan yang bersifat komplementer.

Pendekatan *behaviouristic, cognitivistic, humanistic, dan construcivistic* tampaknya merupakan teori belajar dan pembelajaran yang banyak dijadikan dasar pijakan sampai saat ini. Teori tersebut tentu saja harus digunakan selaras dengan metode pembelajaran yang sesuai untuk kondisi tertentu agar tujuan pembelajaran yang diharapkan bisa tercapai.

4. Mengacu pada belajar perseorangan (individual)

Rancangan pembelajaran pendidikan agama sebaiknya mengacu kepada peserta didik secara perseorangan karena pada hakikatnya belajar itu terjadi secara individual. Perlakuan atau pengaruh memang bisa diberikan dalam pembelajaran. Namun demikian, masing-masing individu tetap berjalan sesuai dengan karakteristiknya sendiri-sendiri. Masing-masing peserta didik memiliki kecepatan, kebiasaan, motivasi, dan gaya belajar yang berbeda-beda.

5. Mengacu pada hasil belajar

Pada dasarnya, hasil belajar—baik yang berupa hasil langsung maupun hasil pengiring—merupakan acuan utama setiap kegiatan pembelajaran. Di sisi lain, pada hakikatnya kualitas perencanaan pembelajaran pendidikan agama itu bisa diukur melalui hasil belajar yang telah dicapai.

Dengan mengacu pada hasil langsung, pembelajaran pendidikan agama Islam harus mengacu pada suatu rancangan pembelajaran yang hasilnya bisa diukur. Dengan mengacu pada hasil pengiring, pembelajaran pendidikan agama Islam harus mengacu pada suatu rancangan pembelajaran yang hasilnya berupa kumulasi dari berbagai peristiwa pembelajaran yang secara perlahan membentuk karakter pribadi. Dengan demikian, rancangan pembelajaran pendidikan agama Islam harus mengacu dan memperhitungkan kedua hasil pembelajaran itu. Setidaknya hasil langsung yang merupakan *output* pembelajaran yang bisa diukur itu bisa memiliki *outcome* pembelajaran yang berupa karakter atau sikap tertentu yang diharapkan bisa terbentuk. Misalnya, tumbuhnya kesadaran beragama yang mendalam pada peserta didik, sehingga beragama menjadi kebutuhan hidupnya.

6. Mengacu pada kemudahan belajar

Pada hakikatnya pembelajaran PAI merupakan upaya membelajarkan peserta didik belajar agama dan perancangan pembelajaran PAI merupakan penataan upaya membelajarkan agar dalam diri peserta didik muncul prakarsa dan perilaku belajar. Peranan guru PAI sangat penting dan kompleks dalam mengondisikan pembelajaran yang tertata, tujuan dan isi pembelajaran PAI jelas, strategi pembelajarannya yang terpilih secara optimal. Hal ini memudahkan belajar peserta didik.

Di samping itu, guru PAI dituntut sebagai seorang ahli dalam menata sumber belajar PAI dan mampu mengintegrasikan ke dalam tampilan dirinya.

Dengan demikian, perancangan pembelajaran PAI lebih tepat sebagai suatu upaya memudahkan peserta didik belajar. Kemudahan dan kenikmatan belajar PAI bagi peserta didik merupakan sasaran akhir dalam menetapkan perencanaan pembelajaran PAI.

7. Mengacu pada interelasi variabel pembelajaran

Perencanaan pembelajaran PAI harus mengacu pada semua komponen yang memengaruhi pembelajaran agama itu sendiri. Artinya, perencanaan itu harus didasarkan pada hasil identifikasi dan analisis semua komponen baik secara teoretis maupun praktis-empiris berpengaruh pada belajar PAI.

Menurut Degeng (1989)[3] komponen yang memengaruhi terjadinya perilaku belajar berupa kondisi pembelajaran, metode pembelajaran, dan hasil pembelajaran.

Kondisi pembelajaran meliputi: komponen tujuan pembelajaran PAI, karakteristik isi bidang studi PAI, keterbatasan sumber belajar dan karakteristik peserta didik. Metode pembelajaran mencakup semua cara yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran PAI dalam kondisi tertentu, misalnya strategi pengorganisasian isi pembelajaran, strategi pengelolaan pembelajaran PAI. Sedangkan komponen hasil pembelajaran yang baik mencakup: dapat meningkatkan keefektifan, keefisienan dan daya tarik pembelajaran PAI. Oleh karena itu, perencanaan pembelajaran PAI yang profesional harus mencakup keseluruhan komponen pembelajaran tersebut.

8. Mengacu pada kualitas metode pembelajaran pendidikan agama

Perencanaan pembelajaran PAI yang mendasar dan menjadi inti perencanaan terletak pada pemilihan dan penetapan metode pembelajaran PAI. Pemilihan metode harus didasarkan pada analisis kondisi pembelajaran yang ada. Hasil analisis kondisi ini menunjukkan kondisi pembelajaran yang bagaimana dan apa hasil yang diharapkan.

Dalam penetapan metode pembelajaran ada tiga prinsip yang harus diperhatikan: (i) tidak ada satu metode pembelajaran PAI untuk pencapaian semua tujuan dalam semua kondisi, (ii) strategi dan metode pembelajaran yang berbeda memiliki pengaruh yang berbeda dan konsisten pada hasil pembelajaran PAI, dan (iii) kondisi pembelajaran yang berbeda akan berpengaruh secara konsisten pada hasil pembelajaran PAI.

B. Landasan Desain Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Desain pengembangan pembelajaran PAI tidak bisa berdiri sendiri tanpa landasan yang kuat, karena desain itu merupakan bagain integral daripada belajar dan pembelajaran, karena itu desain pengembangan pembelajaran PAI harus berlandaskan pada teori belajar dan pembelajaran

1. Teori Belajar dan Pembelajaran

Perencanaan kegiatan pembelajaran membutuhkan pemahaman teori belajar dan pembelajaran. Teori belajar fokusnya pada apa yang terjadi selama seseorang melakukan kegiatan belajar, dan teori pembelajaran fokusnya pada bagaimana proses belajar itu terjadi sehingga dapat mencapai tujuan.

Menurut Scelbecker (1974)[4] teori belajar bersifat deskriptif dalam membicarakan bagaimana seorang belajar (proses belajar). Bagaimana seorang belajar dijadikan landasan dalam menetapkan cara bagaimana membelajarkan seseorang, oleh karena itu teori pembelajaran bersifat preskriptif artinya menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan untuk memecahkan masalah-masalah belajar.

Dalam tesis ini dikemukakan empat macam teori belajar dan pembelajaran sebagai landasan desain pengembangan pembelajaran PAI, yaitu teori behaviorisme, teori kognitivisme, teori konstruktivisme, dan teori perkembangan moral.

a. *Teori Behaviorisme*

Bahwa segala kejadian di lingkungan sangat memengaruhi perilaku seseorang dan memberikan pengalaman tertentu dalam diri seorang itu. Menurut teori ini belajar merupakan perubahan tingkah laku yang terjadi berdasarkan stimulus-respons (S-R). Proses terjadinya respons tertentu terhadap sesuatu yang terjadi di luar pribadi. Oleh karena itu, belajar adalah perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku ditandai oleh adanya perubahan tingkah laku yang terwujud dari adanya stimulus.

Teori behaviorisme pada awalnya dikemukakan oleh Torndike. Teori behaviorisme yang terkenal ialah *classical conditioning* yang tokohnya Pavlov. Teori ini lahir mula-mula adanya reaksi sistem tak terkontrol dalam diri individu dan reaksi emosional yang dikontrol oleh sistem urat syaraf serta gerak reflek setelah menerima stimulus dari luar. Demikian pula teori *Operant Conditioning* (Skinner) merupakan bagian dari teori behaviorisme. Hasil eksperimen Skinner melahirkan teori pembelajaran yang didasarkan pada modifikasi tingkah laku.

Teori behaviorisme dalam aplikasinya tidak jauh berbeda dengan teori-teori yang lain yaitu bergantung pada beberapa hal seperti sifat materi pembelajaran, karakteristik peserta didik, media pembelajaran dan fasilitas belajar yang tersedia. Secara umum aplikasi teori behaviorisme meliputi beberapa langkah berikut ini.

1. menentukan tujuan-tujuan pembelajaran
2. menganalisis lingkungan kelas yang ada saat ini termasuk mengidentifikasi "entry behavior" peserta didik (pengetahuan awal peserta didk)
3. menentukan materi pembelajaran (pokok bahasan, topik dan lain sebagainya)
4. memecah materi pembelajaran menjadi bagian kecil-kecil (sub pokok bahasan, sub topik)
5. menyajikan materi pembelajaran
6. memberikan stimulus yang mungkin berupa: pertanyaan, tes, latihan, dan tugas-tugas

7. mengamati dan mengkaji respons yang diberikan
8. memberikan penguatan/reinforcement baik penguatan positif maupun penguatan negatif
9. memberikan stimulus baru
10. mengamati dan mengkaji respons yang diberikan atau mengevaluasi hasil belajar peserta didik
11. memberikan penguatan
12. mengevaluasi proses dan hasil belajar.[5]

Teori behaviorisme menekankan pada apa yang dapat dilihat, yaitu tingkah laku dan tidak memperhatikan apa yang terjadi dalam pikiran karena tidak dapat dilihat[6]. Dengan demikian, proses belajar menurut behaviorisme lebih dianggap sebagai suatu proses yang bersifat mekanik dan otomatis tanpa membicarakan apa yang terjadi dalam diri peserta didik selama dalam proses belajar[7]. Hubungan S-R dalam teori behaviorisme dapat diamati pada gambar berikut.

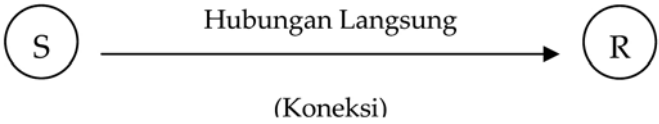

Teori behaviorisme pertama kali dikemukakan oleh Torndike. Ada beberapa teori behaviorisme yang terkenal, antara lain sebagai berikut.

1) *Classical Conditioning* (Pavlov)

Lahirnya teori ini didasari oleh reaksi sistem tak terkontrol di dalam diri individu dan reaksi emosional yang dikontrol oleh sistem urat syaraf otonom serta gerak reflek setelah menerima stimulus dari luar. Kondisi ini dapat diamati pada gambar berikut:

Stimulus yang tidak terkontrol (US) merupakan stimulus yang secara biologis dapat menyebabkan adanya respons dalam bentuk refleks (UR). Dengan demikian, respons yang dapat terbentuk tanpa ada proses belajar. Selain gejala-gejala tersebut, dalam *classical conditioning* dikenal juga generalisasi stimulus, yaitu kecenderungan untuk memberikan respons terkondisi (CS) terhadap stimuli yang serupa, meskipun stimuli tersebut belum pernah diberikan bersama dengan US. Makin banyak persamaan stimuli baru dengan CS yang pertama, makin besar pula generalisasi stimulus yang terjadi.

Sebaliknya, dalam teori ini dikenal pula apa yang disebut diskriminasi stimuli, yaitu suatu proses belajar untuk memberikan respons terhadap suatu stimulus tertentu atau tidak memberikan respons sama sekali terhadap stimulus lain. Kondisi ini dapat diperoleh dengan jalan memberikan suatu US lain[8].

2) *Operant Conditioning* (Skinner)

Menurut teori ini, setiap kali memperoleh stimulus, seseorang memberikan respons berdasarkan hubungan S-R. Respons yang diberikan beragam, bisa sesuai (benar) atau bisa tidak sesuai (salah) sebagaimana yang diharapkan. Respons yang benar perlu diberikan penguatan agar pelajar mau melakukan kembali. Menurut Hill (1980),[9] pemberian penguatan terhadap respons dapat diberikan secara kontinu (*continous reinforcement*) dan atau selang-seling (*intermittent reinforcement*).

Dari hasil eksperimen yang dilakukan Skinner, muncul teori pembelajaran yang didasarkan pada modifikasi tingkah laku. Menurut Skinner, penerapan prinsip-prinsip penguatan dan penataan pembelajaran sangat diperlukan. Hal ini disebabkan: (1) tiap-tiap tingkah laku dalam proses belajar perlu dibuat pendek-pendek berdasarkan tingkah laku yang telah dipelajari sebelumnya; (2) pada permulaan belajar perlu ada penguatan atau imbalan serta perlu ada pengontrolan secara lebih hati-hati terhadap pemberian penguatan, baik yang bersifat kontinu maupun yang baik; (3) penguatan harus diberikan secara cepat begitu tampak ada respons yang benar. Hal ini juga berfungsi sebagai umpan balik bagi pelajar sehingga

diharapkan motivasi dapat meningkat setelah mengetahui kemajuan belajar yang dicapai dalam proses belajar; dan (4) individu yang belajar perlu diberikan kesempatan untuk membuat generalisasi dan diskriminasi stimuli yang diterima karena hal ini memperbesar kemungkinan adanya keberhasilan.

b. Teori Cognitivisme

Teori ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Dalam teori kognitivisme tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi, pemahaman tentang dirinya dan situasi yang berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. Menurut teori ini belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat dilihat sebagai perubahan tingkah laku yang tidak selalu dapat dilihat sebagai perubahan tingkah laku yang konkret. Teori ini menekankan gagasan bahwa bagian situasi apapun saling berhubungan konteks secara keseluruhan situasi tersebut.

Teori kognitif yang dikemukakan oleh Piaget menyatakan bahwa perkembangan kognitif merupakan suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis dari perkembangan sistem syaraf. Semakin bertambah usia seseorang semakin kompleks susunan sel syarafnya dan semakin meningkat pula kemampuannya.

Menurut Galloway (1976),[10] belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengelolaan informasi, emosi, dan faktor-faktor lain. Proses belajar berarti pengaturan stimulus yang diterima dalam menyesuaikan dengan struktur kognitif yang terbentuk di dalam pikiran seseorang berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya.

Hubungan S-R menurut teori kognitif dapat diamati pada gambar berikut:

Beberapa teori kognitif yang penting untuk penyusunan perencanaan pembelajaran antara lain sebagai berikut.

1) Teori Perkembangan (Piaget)

Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, artinya proses yang didasarkan atas mekanisme biologis dari perkembangan sistem saraf. Semakin bertambah umur seseorang, makin kompleks susunan sel sarafnya dan makin meningkat pula kemampuannya[11].

Pada waktu tumbuh menjadi dewasa, seseorang mengalami adaptasi biologis dengan lingkungannya yang menyebabkan adanya perubahan-perubahan kualitatif di dalam struktur kognitifnya. Piaget membagi proses belajar menjadi tiga tahapan, yaitu (1) asimilasi; (2) akomodasi; dan (3) equilibrasi. Asimilasi adalah proses penyatuan (pengintegrasian) informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada dalam benak pelajar. Akomodasi adalah proses penyesuaian struktur kognitif dalam situasi yang baru. Sedangkan equilibrasi adalah proses penyesuaian berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi.

Apabila seseorang menerima informasi atau pengalaman baru, informasi tersebut dimodifikasi sesuai dengan struktur kognitif yang telah dimilikinya, maka proses ini disebut asimilasi. Sebaliknya, apabila struktur kognitif yang harus disesuaikan dengan informasi yang diterima maka hal ini disebut akomodasi. Asimilasi dan akomodasi terjadi apabila seseorang mengalami konflik kognitif atau suatu ketidakseimbangan antara yang diketahui dengan apa yang dilihat dan dialaminya sekarang. Adaptasi terjadi apabila terdapat keseimbangan di dalam struktur kognitif.

Oleh karena itu, stimulus yang diberikan diupayakan dapat menyebabkan adanya ketidakseimbangan kognitif. Dengan demikian, pelajar berusaha mengadaptasi informasi baru ke dalam struktur kognitif yang telah dimiliki. Menurut Piaget, proses belajar seseorang mengikuti pola dan tahap-tahap perkembangan tertentu sesuai dengan umurnya.

Teori Piaget mirip dengan teori Bruner dan Ausubel dalam aplikasi praktisnya sangat mementingkan keterlibatan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran. Pada pokoknya teori Piaget hanya dengan mengaktifkan peserta didik maka proses asimilasi/akomodasi pengetahuan dan pengalaman dapat terjadi dengan baik.

Secara umum pengaplikasian teori Piaget mengikuti pola-pola sebagai berikut.

a) menentukan tujuan-tujuan pembelajaran
b) memilih materi pembelajaran
c) menentukan topik-topik yang mungkin dipelajari oleh peserta didik secara aktif dengan sedikit bimbingan guru
d) menentukan dan merancang kegiatan pembelajaran yang cocok untuk topik-topik yang akan dipelajari oleh peserta didik misalnya melalui *problem solving*, eksperimentasi, *roleplay* dan lain sebagainya
e) mempersiapkan berbagai pertanyaan yang dapat memacu kreativitas peserta didik untuk berdiskusi atau bertanya
f) mengevaluasi proses dan hasil belajar.[12]

2) Teori Kognitif (Bruner)

Bruner menekankan adanya pengaruh kebudayaan terhadap tingkah laku seseorang. Sementara itu, Piaget menyatakan bahwa perkembangan kognitif menyebabkan perkembangan bahasa seseorang. Sebaliknya, Bruner menyatakan bahwa perkembangan bahasa besar pengaruhnya terhadap perkembangan kognitif[13].

Menurut Bruner, perkembangan kognitif seseorang terjadi melalui tiga tahap yang ditentukan oleh caranya melihat lingkungan. *Pertama,* tahap *enaktif*, di mana individu melakukan aktivitas dalam upaya memahami lingkungannya. *Kedua,* tahap *ekonit*, di mana individu melihat dunia melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. *Ketiga,* tahap *simbolik*, di mana individu mempunyai gagasan-gagasan abstrak yang banyak dipengaruhi bahasa dan logika berpikirnya. Komunikasi dalam hal ini dilakukan dengan pertolongan sistem simbol. Makin dewasa seseorang, makin dominan sistem

simbolnya. Hal ini tidak berarti bahwa orang dewasa tidak lagi memakai sistem *enaktif* dan *ekonit.* Keduanya tetap digunakan, hanya saja pengguanaan simbol-simbol lebih dominan. Penggunaan simbol-simbol lebih dominan. Penggunaan simbol-simbol bagi orang dewasa menunjukkan bertambahnya kematangan tingkat berpikir.

Menurut Bruner[14], pembelajaran sesuatu tidak perlu menunggu sampai anak mencapai suatu tahap perkembangan tertentu. Apabila bahan pembelajaran yang diberikan diatur dengan baik, seseorang dapat belajar meskipun umurnya belum memadai.

Anak-anak prasekolah bisa saja belajar akidah akhlak dan ibadah syariah asalkan materi pembelajaran disusun berdasarkan urutan isi dimulai dari yang sederhana dan sesuai dengan karakteristik perkembangan kognitifnya. Dengan perkataan lain, perkembangan kognitif seseorang dapat ditingkatkan dengan menata strategi pembelajarannya sesuai dengan isi bahan yang dipelajari dan tingkat perkembangannya. Menata strategi pembelajaran berarti memilih dan mengembangkan metode pembelajaran yang cocok sesuai dengan kondisi pembelajaran.

Dalam kaitannya dengan penataan isi bahan pembelajaran, setiap disiplin ilmu memiliki konsep, prinsip, dan prosedur yang harus dipahami sebelum seseorang dapat belajar. Cara terbaik untuk belajar adalah memahami konsep, arti, dan hubungannya dengan konteks hingga sampai pada kesimpulan (*discovery learning*). Burner juga mengemukakan pentingnya teori pembelajaran *free discovery learning*. Menurut teori ini, proses belajar berjalan dengan baik apabila peserta didik diberikan kesempatan untuk menemukan suatu aturan (konsep, prinsip, prosedur) melalui contoh-contoh yang menggambarkan (mewakili) aturan yang menjadi sumbernya.

Contoh aplikasi teori kognitivisme Bruner dalam kegiatan pembelajaran dapat dikemukakan sebagai berikut.

a) menentukan tujuan-tujuan pembelajaran
b) memilih materi pembelajaran
c) menentukan topik-topik yang dapat dipelajari oleh peserta didik secara induktif (dari contoh-contoh, kemudian menyimpul-

kan sendiri ke dalam konsep-konsep pengetahuan yang tersirat dalam contoh-contoh).

d) mencari contoh-contoh, tugas, ilustrasi yang dapat digunakan untuk belajar
e) mengatur topik-topik pembelajaran sedemikian rupa sehingga urutan topik dari yang paling konkret ke yang abstrak, dari yang sederhana ke yang kompleks, dari tahap enaktif, ikonis, sampai ke tahap simbolis, dan seterusnya
f) mengevaluasi proses dan hasil belajar.[15]

3) Teori Belajar Bermakna (Ausubel)

Menurut Ausubel (1963), pengetahuan yang lebih umum, inklusif, dan abstrak membawahi pengetahuan yang lebih spesifik dan konkret. Oleh karena pengetahuan diagnosis dalam ingatan seseorang dalam struktur yang hierarkis. Contoh aplikasi teori bermakna Ausubel dalam kegiatan pembelajaran secara umum sebagai berikut

a) menentukan tujuan-tujuan pembelajaran
b) mengukur kesiapan peserta didik yang meliputi minat, kemampuan, struktur kognitif baik melalui tes awal, interview, review, pertanyaan
c) memilih materi pembelajaran dan mengatur dalam bentuk penyajian konsep-konsep kunci
d) mengidentifikasi prinsip-prinsip yang harus dikuasai peserta didik dari materi pembelajaran
e) menyajikan suatu pandangan secara menyeluruh tentang apa yang seharusnya dipelajari
f) membuat dan menggunakan "advance organizer", paling tidak dengan cara membuat rangkuman materi yang baru diberikan, dilengkapi deengan uraian singkat yang menunjukkan relevansi, keterkaitan materi yang sudah diberikan dengan materi baru yang akan diberikan kepada peserta didik
g) mengajar peserta didik memahami konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang sudah ditentukan dengan memberi fokus pada

hubungan yang terjalin antara konsep-konsep yang ada

h) mengevaluasi proses dan hasil belajar.[16]

4) Teori Gagne

Menurut Gagne, cara berpikir seseorang bergantung pada keterampilan yang dimilikinya serta hierarki prasyarat belajar apa yang diperlukan untuk mempelajari suatu tugas[17]. Dalam proses belajar terdapat dua fenomena, yaitu keterampilan intelektual meningkat sejalan dengan meningkatnya umur serta intensitas latihan yang diperoleh individu. Semakin intens intelektual dilatih, semakin meningkat pula kemampuan dan keterampilan intelektual seseorang. Proses belajar lebih cepat apabila strategi kognitif digunakan dalam pemecahan masalah secara lebih efisien.

Gagne (1985)[18] menyebutkan ada lima macam unjuk kerja pada setiap kapabilitas belajar sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

KAPABILITAS BELAJAR	UNJUK KERJA
Informasi Verbal	Menyatakan informasi
Keterampilan Intelektual	Menggunakan simbol untuk berinteraksi dengan lingkungan
Diskriminasi	Membedakan perangsang yang dimiliki dimensi fisik yang berbeda
Konsep Konkret	Mengidentifikasikan contoh-contoh konsep
Konsep Abstrak	Mengklasifikasikan contoh-contoh dengan menggunakan ungkapan verbal atau definisi
Kaidah	Menunjukkan aplikasi suatu kaidah
Kaidah Tingkat Tinggi	Mengembangkan kaidah baru untuk memecahkan masalah
Strategi Kognitif	Mengembangkan cara-cara baru untuk memecahkan masalah, menggunakan berbagai cara untuk mengontrol proses belajar, dan atau berfikir

Belajar menurut Gagne hanya akan terjadi kalau ada kondisi-kondisi tertentu, yaitu (1) kondisi internal, yakni kesiapan peserta didik dalam memperoleh dan menyimpan kapabilitas yang telah dipelajari sebelumnya (*prerequisite*) untuk mendukung kapabilitas belajar yang lainnya, (2) kondisi eksternal, yakni berbagai cara dan situasi belajar yang dirancang secara sengaja untuk memudahkan dan memperlancar peserta didik dalam proses internal.

Gagne merinci proses belajar menjadi delapan jenis belajar, yaitu (1) belajar isyarat (*signal learning*), (2) belajar stimulus respons (*stimulus-response learning*), (3) belajar rangkaian (*chaining learning*), (4) belajar asosiasi verbal (*verbal association learning*), (5) belajar perbedaan atau diskriminasi (*discrimination learning*), (6) belajar konsep (*concept learning*), (7) belajar hukum atau aturan (*rule learning*), dan (8) belajar pemecahan masalah (*problem solving learning*).

Kedelapan jenis belajar tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, aplikasinya dalam pembelajaran dapat disesuaikan dengan karakteristik isi bidang studi dan karakteristik peserta didik. Pembelajaran pendidikan agama, misalnya dapat menggunakan jenis belajar *problem solving learning, discrimination learning,* dan jenis belajar lain yang sesuai dengan karakteristik peserta didik yang melakukan belajar dan pokok bahasan yang dipelajari. Penggunaan jenis belajar tersebut dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan.

c. *Teori Constructivisme*

Pada hakikatnya teori konstruktivisme adalah ide bahwa siswa harus menjadikan informasi itu miliknya sendiri.[19]

Teori ini penekanannya pada siswa sebagai siswa yang aktif sehingga teori konstruktivisme sering disebut pengajaran terpusat pada siswa. Di dalam kelas yang terpusat pada siswa, peran guru adalah membantu siswa menemukan fakta, konsep atau prinsip bagi diri mereka sendiri, bukan memberikan ceramah atau mengendalikan seluruh kegiatan kelas.

Menurut teori ini, belajar pada hakikatnya merupakan suatu proses alami dan bersifat individual. Semua orang mempunyai keinginan untuk belajar kapan saja dan di mana saja tanpa bisa dibendung oleh orang lain. Kenyataan ini didasarkan pada sifat seseorang yang mempunyai rasa ingin tahu, ingin menyerap informasi, ingin mengambil keputusan, serta ingin memecahkan masalahnya sendiri. Setiap orang mempunyai kebutuhan-kebutuhan dan tujuan yang merupakan motivator penting dalam proses belajarnya untuk menentukan masa depannya. Dalam kaitan ini, belajar lebih mudah dan lancar apabila konteks yang dipelajari, baik lingkungan belajar, isi pembelajaran, sumber belajar, dan faktor lain yang memengaruhi belajar didesain relevan dengan kebutuhan dan karakteristiknya dengan memberikan kesempatan pada peserta didik untuk bertanggung jawab atas kegiatan belajarnya.

Proses belajar tidak dapat bersifat *uniform* (perlakuan sama setiap individu yang belajar). Akan tetapi, setiap individu harus dilayani agar berkembang setinggi-tingginya sesuai karakteristik yang dimilikinya. Proses belajar dapat terjadi jika konteks pembelajaran berangkat dari apa yang menjadi persepsi, kebutuhan, dan interpretasi peserta didik terhadap lingkungan (dunianya). Kondisi ini memudahkan proses transfer belajar pada diri peserta didik terhadap pengetahuan baru maupun fungsinya.

Belajar dapat terjadi dalam keadaan sendiri atau melalui interaksi dengan sumber-sumber belajar. Interaksi dapat terjadi satu arah, yaitu ada stimuli dari luar lalu menimbulkan respons (*one directional*). Atau belajar bisa terjadi dua arah, yaitu apabila tingkah laku yang terjadi merupakan hasil interaksi antara peserta didik dengan lingkungan atau sebaliknya. Interaksi *resiprocal* terjadi apabila beberapa faktor saling memiliki kebergantungan, seperti faktor pribadi, faktor lingkungan, yang berinteraksi menyebabkan terjadinya perubahan tingkah laku[20]. Pandangan teori *constructivistic* tentang belajar adalah (1) pengetahuan adalah nonobjektif, temporer, selalu berubah, dan tidak menentu; (2) belajar adalah penyusunan pengetahuan dari pengalaman konkret, aktivitas kolaboratif,

dan refleksi, serta interpretasi; sedangkan mengajar adalah menata lingkungan agar peserta didik termotivasi dalam menggali makna serta menghargai ketidakmenentuan; (3) setiap peserta didik akan memiliki pemahaman yang berbeda terhadap pengetahuan, bergantung pada pengalamannya dan perspektif yang dipakai dalam menginterpretasikannya; dan (4) *mind* berfungsi sebagai ala untuk menginterpretasikan peristiwa, objek, atau perspektif yang ada dalam dunia nyata sehingga makna yang dihasilkannya bersifat unik dan individualistis.

Pandangan *constructivistic* tentang penataan lingkungan belajar dan pembelajaran, antara lain dapat dikemukakan: (1) peserta didik yang belajar harus bebas karena kebebasan menjadi unsur yang esensial dalam lingkungan belajar, (2) ketidakberhasilan atau kegagalan, kemampuan atau ketidakmampuan dilihat sebagai interpretasi yang berbeda, yang perlu dihargai, (3) kebebasan dipandang sebagai penentu keberhasilan belajar; peserta didik adalah subjek yang harus mampu menggunakan kebebasan untuk mengatur dirinya dalam belajar, dan (4) kontrol belajar berada pada peserta didik yang belajar.

Pandangan konstruktivistik tentang strategi pembelajaran adalah (1) penyajian isi, menekankan pada penggunaan pengetahuan secara bermakna mengikuti urutan dari keseluruhan kepada bagian; (2) pembelajaran lebih banyak diarahkan untuk melayani pertanyaan atau tanggapan peserta didik terhadap apa yang dipelajari dan kaitannya dengan konteks nyata; (3) aktivitas belajar lebih banyak didasarkan pada data primer dan bahan manipulatif dengan penekanan pada keterampilan berpikir kritis; dan (4) pembelajaran ditekankan pada proses bukan pada hasil.

Pandangan konstruktivistik tentang evaluasi adalah (1) ditekankan pada penyusunan makna secara aktif yang melibatkan keterampilan terintegrasi dengan menggunakan masalah dalam konteks nyata; (2) evaluasi menggali munculnya berpikir *divergent*, pemecahan ganda, bukan hanya satu jawaban benar, dan (3) evaluasi merupakan bagian utuh dari belajar dengan cara memberikan

tugas-tugas yang menuntut aktivitas belajar yang bermakna serta menerapkan apa yang dipelajari dalam konteks nyata. Evaluasi ditekankan pada keterampilan proses dalam kelompok.

2. Teori Perkembangan Moral

Dewasa ini, psikolog dan sosiolog menulis tentang nilai-nilai moral dalam kaitannya dengan perkembangan dan pendidikan anak yang bertolak dari anggapan bahwa tidak ada prinsip moral yang universal (kecuali moral agama) dan tidak berubah-ubah dan setiap pribadi memperoleh nilainya sendiri dari kebudayaan eksternal. Definisi berikut ini mencerminkan pandangan relativitas tersebut. Nilai moral merupakan penilaian terhadap tindakan yang umumnya diyakini oleh anggota masyarakat tertentu sebagai yang salah atau benar[21]. Para ahli lain memandang bahwa perkembangan moral dan bentuk-bentuk sosialisasi lainnya sebagai keseluruhan proses, dimana seorang pribadi lahir dengan banyak kemungkinan tingkah laku aktual yang dibatasi pada bidang yang jauh lebih spirit, yaitu suatu bidang yang lazim diterima sesuai dengan ukuran kelompoknya. Dengan demikian, perkembangan didefinisikan sebagai suatu internalisasi langsung dari norma-norma budaya eksternal. Anak yang sedang tumbuh dan berkembang dapat dilatih untuk berperilaku dengan cara sedemikian rupa sehingga ia menyesuaikan diri dengan berbagai aturan dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Pertimbangan moral adalah penilaian tentang benar dan baiknya sebuah tindakan. Akan tetapi, tidak semua penilaian tentang baik dan benar merupakan pertimbangan moral. Banyak di antara tindakan yang justru merupakan penilaian terhadap kebaikan atau kebenaran, estetis, teknologis atau bijak. Berbeda dengan penilaian terhadap kebijakan atau estetika, penilaian moral cenderung bersifat universal, inklusif, konsisten, dan didasarkan pada alasan-alasan yang objektif, impersonal, atau ideal. Struktur pertimbangan moral ditetapkan berdasarkan apa yang didapatkan seseorang sebagai sesuatu yang berharga pada setiap isu-isu moral dan bagaimana ia

mampu memilih dan menetapkan nilai-nilai, disertai alasan mengapa seseorang memilih dan menetapkan bahwa sesuatu itu berharga. Hal ini merupakan penentu struktur tingkat pertimbangan moral seseorang, yang sekaligus menentukan keputusan moral atau perilaku moral.

Kohlberg, melalui penelitian *Longitudinal and Crosscultural* menyempurnakan teori Piaget dengan menetapkan enam tingkat pertimbangan moral yang relatif tidak bergantung pada umur. Penetapan tingkat perkembangan moral ini didasarkan pada karakteristik secara empiris dengan memiliki beberapa ciri pokok: (1) tahap-tahap pertimbangan moral tersusun secara utuh, artinya sistem berpikirnya terorganisasi; (2) tahap pertimbangan moral berurutan secara invarian (tetap) dan tidak pernah terbalik di bawah semua kondisi (kecuali untuk mereka yang mengalami trauma secara ekstrem, perkembangannya selalu progresif). Tidak ada tahap-tahap terlompati, gerakannya selalu menuju tahap yang lebih tinggi; (3) tahap-tahap pertimbangan moral terintegrasi secara hierarkis, artinya tingkat pemikiran moral yang tinggi telah tercakup dan menguasai tahap-tahap dan pola pikir yang berada di bawahnya; (4) struktur tingkat pertimbangan moral berfungsi mengarahkan lahirnya kecenderungan ke arah tahapan tahapan yang lebih tinggi; (5) struktur pertimbangan moral harus dibedakan dengan isi pertimbangan moral. Sebagai contoh, suatu pilihan yang ditetapkan seseorang (sebagai sesuatu yang berharga atau tidak berharga) dalam suatu situasi yang dihadapi disebut isi pertimbangan moral, sedangkan alasan tentang penetapan suatu pilihan (struktur penetapan pilihan) berdasarkan pemikiran moralnya disebut pertimbangan moral[22].

Selanjutnya, Kohlberg[23] mengidentifikasikan enam tahap tingkat pertimbangan moral sebagai berikut:

a. Orientasi hukuman atau kepatuhan, yakni motif moral pada taraf tertentu yang didasarkan pada usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman dan tunduk pada kekuasaan sebagai rasa hormat pada peraturan moral yang mendasari, yang di-

dukung hukuman dan otoritas tanpa menghiraukan akibat perbuatannya bagi kemanusiaan.

b. Orientasi instrumental-relatif, yakni motif moral pada taraf tertentu berupa usaha memperoleh ganjaran atau agar perbuatannya memperoleh imbalan. Perbuatan benar merupakan alat untuk memuaskan kebutuhan sendiri dan kadang-kadang juga kebutuhan orang lain. Hubungan antarmanusia dipandang seperti hubungan pasar. Sikap *fair* bersifat timbal balik, kesamaan dalam ambil bagian sudah ada, tetapi semuanya dimengerti secara fisik dan pragmatis, ada elemen kewajaran. Tindakan timbal balik terjadi bukan atas rasa keadilan, melainkan sebagai imbalan yang harus diterima.

c. Orientasi masuk kelompok anak manis atau anak baik, yakni kesadaran moral pada taraf tertentu yang berfungsi sebagai upaya anak agar tidak disalahkan atau agar tidak dibenci oleh kelompok mayoritas. Setiap perilaku kerap kali dinilai menurut intensitas bukan kualitasnya. Kesadaran moral pada tahap ini yang penting bermaksud baik dan berusaha diterima oleh lingkungannya dengan bersikap baik dan manis.

d. Orientasi hukum dan ketertiban, yakni kesadaran moral berfungsi sebagai upaya membebaskan diri dari teguran atasan yang memegang kekuasaan, juga untuk melestarikan aturan-aturan umum dan membebaskan diri dari rasa bersalah yang merupakan akibat dari tindakannya. Ada yang berorientasi kepada otoritas, peraturan-peraturan yang ditetapkan, dan usaha memelihara ketertiban. Ia beranggapan bahwa perilaku yang baik semata-mata untuk melakukan kewajiban dan menunjukkan rasa hormat pada otoritas, dan memelihara ketertiban sosial yang ada.

e. Orientasi kontrak sosial legalitas, yakni motif moral pada taraf tertentu yang berkeinginan untuk mempertahankan penghargaan atau penghormatan kepada yang tidak berpihak, baik pada kelompok atau golongan maupun individu. Ia melakukannya sebagai usaha yang diniatkan untuk mempertahankan

kesejahteraan umum. Ada unsur mementingkan kemanfaatan dan kegunaan (*ulitarian*) bagi kemaslahatan orang banyak. Ia beranggapan bahwa perbuatan yang baik cenderung ditentukan dari segi hak-hak individu yang bersifat umum dan dari segi patokan yang sudah dikaji dengan krisis dan disetujui oleh masyarakat. Ada kesadaran bahwa nilai-nilai dan opini pribadi itu sangat relatif, karenanya perlu ada peraturan prosedural untuk mencapai konsensus.

f. Orientasi prinsip kewajiban, yakni konformitas terhadap prinsip moral pada taraf tertentu yang berfungsi untuk menghindarkan diri dari rasa bersalah yang timbul dari dalam dirinya. Pada tahap ini, yang baik diartikan sebagai sesuatu yang cocok dengan suara hati, sesuai dengan prinsip-prinsip etika yang dipilih berdasarkan pemahaman komprehensif secara logis, universal disertai sikap konsisten dan *ajeg*. Inti moralitas berupa prinsip-prinsip universal tentang keadilan, pertukaran hak, dan persamaan hak asasi manusia yang mengacu pada usaha penghormatan martabat manusia sebagai *person* individu.

C. Desain Pengembangan Pembelajaran Model Kemp, Dick-Carey, dan Degeng

Ciri-ciri umum model Kemp, model Dick dan Carey, dan model Degeng dalam desain pengembangan pembelajaran dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. Model Kemp

a. Analisis kondisi pembelajaran, meliputi:

1) Perkiraan kebutuhan belajar (*learning need*)
2) Memilih dan menetapkan pokok bahasan atau tugas pembelajaran
3) Meneliti dan identifikasi karakteristik peserta didik
4) Menentukan isi pelajaran dan menguraikan tugas
5) Menyatakan tujuan khusus belajar

b. Pengembangan strategi pembelajaran, meliputi:

1) Merancang kegiatan belajar mengajar
2) Memilih media untuk mendukung kegiatan pengajaran
3) Merinci pelayanan penunjang untuk mengembangkan semua kegiatan

c. Pengembangan prosedur pengukuran hasil pembelajaran, meliputi:

1) Mengembangkan alat evaluasi hasil belajar dan hasil program pengajaran
2) Melakukan uji awal untuk memperoleh produk pembelajaran.

2. Model Dick dan Carey

a. Analisis kondisi pembelajaran, meliputi:

1) Identifikasi tujuan umum
2) Analisis pembelajaran
3) Analisis karakteristik peserta didik
4) Merumuskan tujuan khusus

b. Pengembangan strategi pembelajaran, meliputi:

1) Mengembangkan butir tes
2) Mengembangkan strategi pembelajaran
3) Mengembangkan bahan pembelajaran
4) Merevisi bahan pembelajaran

c. Pengembangan prosedur pengukuran hasil pembelajaran

1) Merancang dan melakukan evaluasi formatif
2) Merancang dan melakukan evaluasi sumatif

3. Model Degeng

a. Analisis kondisi pembelajaran, meliputi:

1) Mengalisis tujuan dan karakteristik bidang studi
2) Menganalisis sumber belajar dan kendalanya
3) Menganalisis karakteristik pelajar

4) Menetapkan tujuan belajar dan isi pembelajaran

b. Pengembangan strategi pembelajaran, meliputi:

1) Menetapkan strategi pengorganisasian isi pembelajaran
2) Menetapkan strategi penyampaian isi pembelajaran
3) Menetapkan strategi pengelolaan pembelajaran

c. Pengembangan prosedur pengukuran hasil pembelajaran

Mengadakan pengembangan prosedur pengukuran hasil pembelajaran.

Lebih lanjut, ciri-ciri khusus ketiga model tersebut dalam desain pengembangan pembelajaran dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. Model Kemp

Perencanaan pembelajaran didasarkan pada empat dasar sebagai wujud jawaban pertanyaan, program untuk siapa? Peserta didik. Kemampuan yang dicapai? Tujuan. Bagaimana isi atau keterampilan dapat dipelajari? Metode. Bagaimana menentukan penguasaan pelajar? Evaluasi.

2. Model Dick dan Carey

Desain pengembangan pembelajaran dengan pendekatan sistem artinya setiap komponen sistem menjadi satu kesatuan secara sistemis.

3. Model Degeng

Desain pengembangan pembelajaran didasarkan pada variabel yang memengaruhi pembelajaran berupa tujuan dan karakteristik bidang studi, sumber belajar dan kendala, karakteristik peserta didik, tujuan belajar dan isi pembelajaran, strategi pengorganisasian isi pembelajaran, strategi penyampaian isi pembelajaran, strategi pengelolaan pembelajaran, pengembangan prosedur pengukuran hasil pembelajaran.

Jika diamati lebih jauh lagi, ketiga model desain pembelajaran di atas menampakkan adanya kelebihan dan kelemahan. Yang

merupakan kelebihan secara umum ketiga model tersebut ialah berorientasi pada pengembangan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (*pupil centered*). Namun demikian, ketiga model itu juga memiliki kelemahan umum, yaitu pada setiap model tidak membahas pengaruh peran guru terhadap keberhasilan pembelajaran. Berikut ini dikemukakan kelebihan dan kelemahan masing-masing model tersebut.

1. Model Kemp

Model Kemp memiliki kelebihan yaitu bahwa variabel-variabel yang berpengaruh pada pembelajaran disebutkan secara rinci sehingga mudah untuk dipraktikkan dalam pembuatan desain pengembangan pembelajaran. Di sisi lain, model ini tidak menyebutkan variabel apa yang dominan yang berpengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran.

2. Model Dick dan Carey

Pada model Dick dan Carey konsep pengembangan desain pembelajaran lebih lengkap dan komprehensip dan penekanannya dalam pengembangan pembelajaran terletak pada pendekatan sistem. Namun demikian, pada model ini subsistem yang amat berpengaruh pada pencapaian hasil pembelajaran tidak tampak.

3. Model Degeng

Pada model Degeng konsep desain pengembangan pembelajaran bersifat sederhana atau singkat, sehingga mudah dipahami oleh para guru. Namun demikian, di dalam model ini tidak tampak adanya hubungan antara keempat unsur secara sistemis.

D. Desain Pengembangan Pembelajaran PAI di Sekolah dan Madrasah

Berdasarkan tinjauan berbagai model desain pembelajaran yang telah dikemukakan di atas dan berdasarkan berbagai tinjauan atas kelebihan dan kelemahannya, formulasi desain pengembangan pembelajaran PAI diusulkan sebagai berikut.

Dengan perubahan dan perkembangan ilmu, teknologi dan seni secara cepat berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat dan beragama. Hal ini menuntut adanya upaya di bidang pendidikan agama Islam untuk disempurnakan dan dikembangkan secara nasional berupa kurikulum dengan ciri-ciri sebagai berikut.

a. Lebih menitikberatkan pencapaian target kompetensi (*attainment targets*) daripada penguasaan materi
b. Lebih mengakomodasikan keragaman kebutuhan dan sumber daya pendidikan yang tersedia
c. Memberikan kebebasan yang lebih luas kepada pelaksana pendidikan di lapangan untuk mengembangkan dan melaksanakan program pembelajaran sesuai dengan kebutuhan.[24].

Untuk mewujudkan kurikulum yang mempunyai ciri tersebut diperlukan suatu model. Desain pengembangan pembelajaran bidang pelajaran pendidikan agama Islam untuk Sekolah Menengah Umum ().

Model-model desain pengembangan pembelajaran banyak ragam dan macamnya. Berdasarkan pembahasan model-model desain tersebut di atas, penulis memformulasikan dari model-model yang ada sebagai berikut.

Tahap pertama, definisi meliputi:

a. Analisis target kompetensi (tujuan)
b. Analisis materi pembelajaran
c. Analisis karakteristik peserta didik

Tahap kedua, pengembangan sistem meliputi

a. memilih dan menentukan pendekatan
b. memilih dan menentukan pengorganisasian

Tahap ketiga evaluasi, meliputi

c. evaluasi hasil belajar
d. mengembangkan hasil evaluasi

Model desain yang penulis formulasikan sebagai salah satu tawaran yang mungkin dapat dimanfaatkan sebagai salah satu model desain pengembangan pembelajaran pendidikan agama Islam un-

tuk Sekolah Menengah Umum () pada masa-masa yang akan datang. Hal ini dimaksudkan sebagai sumbangan pikiran berkenaan dengan lahirnya kurikulum baru berbasis kompetensi (KBK)

Langkah-langkah Desain Pengembangan Pembelajaran PAI dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. Analisis Standar Kompetensi

Menganalisis standar kompetensi dimulai dari apa yang dimaksud kompetensi itu. Kompetensi merupakan kebulatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat didemonstrasikan, ditunjukkan, atau ditampilkan oleh peserta didik sebagai hasil belajar. Sesuai dengan pengertian tersebut, maka standar kompetensi adalah kemampuan standar yang harus dikuasai untuk menunjukkan bahwa hasil mempelajari bidang studi PAI atau mata pelajaran tertentu berupa penguasaan atas pengetahuan, sikap, dan keterampilan tertentu telah dicapai[25].

Dalam menganalisis standar kompetensi paling tidak terdapat dua masalah pertama berkaitan dengan cakupan, ruang lingkup, aspek, ranah, matra atau domain. Kedua berkaitan dengan kata kerja yang digunakan.

Untuk masalah cakupan, aspek, kawasan atau domain dapat menganalisis kompetensi aspek kognitif, kompetensi aspek sikap dan kompetensi aspek keterampilan motorik, produk, eksplorasi, ekspresif dan yang lainnya. Sedangkan untuk menganalisis yang berkaitan dengan kata kerja yang digunakan dapat memilih kata kerja operasional, yaitu kata kerja yang dapat diamati ketika peserta didik melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan hasil pelaksanaannya dapat diukur.

Kompetensi umum PAI untuk Sekolah Menengah Umum sebagai berikut:

a. Mampu membaca dengan mengetahui hukum bacaannya, menulis, dan memahami ayat Al-Qur'an serta mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari
b. Beriman kepada Allah SWT, malaikat, kitab-kitab, rasul, hari

kiamat, dan qadha qadar dengan mengetahui fungsi dan hikmahnya serta terefleksi dalam sikap, perilaku, dan akhlak peserta didik pada dimensi kehidupan sehari-hari;

c. Terbiasa berperilaku dengan sifat-sifat terpuji, menghindari sifat-sifat tercela, dan bertatakrama dalam kehidupan sehari-hari;

e. Memahami sumber hukum dan ketentuan hukum Islam tentang ibadah, muamalah, mawaris, munakahah, jenazah, dan mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari;

f. Memahami dan mampu mengambil manfaat dan hikmah perkembangan Islam fase Umayah, Abbasiyah, abad pertengahan, abad pembaruan, dan perkembangan Islam di Indonesia dan dunia serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari[26].

Misalnya: membaca ayat 67 surat Al-Mukmin, menjelaskan makna harfiah dan makna ayat secara lengkap, menyimpulkan isi ayat tersebut, dan bisa menunjukkan perilaku yang mencerminkan isi ayat 67 surat Al-Mukmin.

Menganalisis standar kompetensi berarti melakukan perincian suatu kompetensi menjadi sub-sub kompetensi. Kemudian hasil rincian sub-sub kompetensi tersebut diurutkan. Cara mengurutkan dapat menggunakan pendekatan prosedural dan hierarkis.

Untuk selanjutnya standar kompetensi dirumuskan dalam kemampuan dasar yang harus dimiliki atau dikuasai oleh peserta didik berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap minimal yang ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain, kemampuan dasar merupakan perincian lebih lanjut dari standar kompetensi. Untuk memperoleh perincian tersebut, diperlukan analisis kompetensi, dengan cara mengajukan pertanyaan, pengetahuan, keterampilan atau sub keterampilan apa saja yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam rangka mencapai standar kompetensi? Jawaban atas pertanyaan tersebut berupa daftar lengkap pengetahuan, keterampilan, atau sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka mencapai standar kompetensi. Daftar rincian diurutkan berdasarkan kemampuan dasar sebagaimana mengurutkan beberapa standar

kompetensi dengan menggunakan pendekatan prosedural, pendekatan hierarkis, regional kompleks, dari mudah ke sukar, dari konkret ke abstrak, pendekatan spiral, pendekatan tematis, pendekatan terpadu (*integrated*), terjala (*webbed*) dan yang lainnya.

2. Analisis Materi Pembelajaran

Materi pelajaran pendidikan agama Islam merupakan isi atau pesan yang harus dipelajari peserta didik sebagai sarana pencapaian standar kompetensi dan kemampuan dasar yang dinilai dengan menggunakan soal-soal yang disusun berdasar indikator pencapaian belajar. Pokok-pokok materi selanjutnya dirinci atau diuraikan dan diurutkan guna memudahkan kegiatan pembelajaran. Beberapa butir yang perlu diperhatikan dalam merinci atau menguraikan materi pelajaran PAI sebagai berikut.

Menurut Reigeluth dan Merril[27] konstruk bidang studi meliputi fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Materi jenis fakta adalah materi berupa nama-nama objek, nama tempat, nama orang, lambang, peristiwa sejarah, nama bagian atau komponen suatu benda, misalnya Makkah al-Mukarramah sebagai kota suci umat Islam. Materi konsep berupa pengertian, definisi, hakikat, inti isi, misalnya konsep tentang manusia, ibadah, hari akhir, surga, dan neraka. Materi jenis prinsip berupa dalil, rumus, postulat, adagium, paradigma, misalnya hubungan diciptakannya manusia dengan perintah ibadah, hubungan perintah melakukan shalat dengan pencegahan perbuatan keji dan mungkar. Materi jenis prosedur berupa langkah-langkah mengerjakan sesuatu secara urut, misalnya prosedur menetapkan hukum dalam Islam terhadap suatu masalah di samping harus melalui prosedur tertentu juga harus berdasarkan Al-Qur'an, hadis, ijma' dan qiyas.

Materi yang diajarkan perlu diidentifikasi apakah termasuk jenis fakta, jenis konsep, jenis prinsip, jenis prosedur, atau gabungan lebih dari satu jenis materi. Identifikasi jenis materi yang diajarkan untuk mendapatkan kemudahan dalam cara mengajarkannya. Sebab setiap jenis materi pelajaran memerlukan strategi pembelajaran atau metode, media, dan sistem evaluasi yang berbeda-beda.

Penentuan materi standar beserta uraiannya tentunya setelah standar kompetensi dan kemampuan dasar ditetapkan sebelumnya. Ada beberapa prinsip yang digunakan dalam menentukan materi standar beserta uraiannya, prinsip relevansi, konsistensi, dan adequasi atau kecukupan antara standar kompetensi, kemampuan dasar, dan indikator. Relevansi berarti ada keterkaitan antara materi standar dengan standar kompetensi, dan kemampuan dasar. Konsistensi berarti ada keajegan antara materi standar dengan kemampuan standar dan kemampuan dasar, misalnya standar kompetensi menyangkut kawasan kognitif tingkat pemahaman, misalnya tentang definisi, pengertian, ciri-ciri, persamaan dan perbedaan. Bila kemampuan dasar yang diharapkan dikuasai peserta didik berupa keterampilan analisis dan sintesis, maka materi standar yang diajarkan juga harus berkenaan dengan kemampuan menganalisis atau langkah-langkah memecahkan masalah. Kecukupan (*adequasai*) berarti ruang atau cakupan materi pelajaran yang diberikan memadai atau cukup lengkap digunakan untuk mencapai kemampuan yang telah ditentukan. Misalnya, bila pelajaran dimaksudkan untuk memberikan kemampuan kepada peserta didik masalah jual beli, maka materinya mencakup: penguasaan konsep atau pengertian modal, pembelian, penjualan, laba dan rugi. Rumus menghitung laba dan rugi, dan juga penerapan rumus menghitung laba dan rugi.

Materi pelajaran ditentukan pula jenis dan ruang lingkupnya. Langkah-langkah menentukan jenis dan cakupan materi pelajaran meliputi:

a. Mengidentifikasi atau mengklasifikasikan apakah materi pelajaran yang akan diajarkan termasuk fakta, konsep, prinsip, prosedur atau gabungan dari beberapa jenis materi pelajaran.
b. Memerinci atau menganalisis cakupan atau ruang lingkup materi yang terdapat pada standar kompetensi, dan kemampuan dasar.
c. Penyajian materi dapat diurutkan dengan menggunakan pendekatan prosedural, hierarkis, dari sederhana ke sukar, dari konkret ke abstrak, spiral, tematis, terpadu dan sebagainya.

3. Analisis Karakteristik Peserta Didik

Untuk menganalisis karakteristik peserta didik terlebih dahulu menjawab pertanyaan siapa yang belajar, bagaimana tingkat pengetahuan prasyarat, pengetahuan awal, dan karakteristik peserta didik yang diberi pelajaran. Karakteristik perseorangan bisa berupa aspek bakat, motivasi belajar. Hasil analisis berupa daftar yang memuat pengelompokan karakteristik peserta didik yang menjadi sasaran pembelajaran.

Dengan mengetahui kemampuan awal dan karakteristik peserta didik terhindar dari kesulitan memberikan materi terlalu tinggi atau terlalu rendah. Sering terjadi pemberian materi pelajaran terlalu sulit atau terlalu mudah. Melalui pembelajaran berbasis kompetensi dapat terhindar dari pemberian materi pelajaran yang tidak perlu tidak tepat sasarannya, sebaliknya pemberian materi pembelajaran disesuaikan dengan keberadaan peserta didik sehingga dapat membantu pencapaian kompetensi yang telah ditentukan.

Langkah-langkah analisis kemampuan awal adalah (1) amatilah peserta didik secara perseorangan, bisa menggunakan tes kemampuan awal angket, dan wawancara; tes kemampuan awal untuk mengetahui konsep, prosedur, atau prinsip yang dimiliki. Wawancara dan angket digunakan untuk menggali informasi mengenai kemampuan awal yang lain, seperti pengetahuan tidak terorganisasi, pengetahuan pengalaman, analogi, dan strategi kognitif; (2) tabulasi karakteristik perseorangan berdasarkan pengamatan awal, kemudian diklasifikasi secara rinci; hasil tabulasi digunakan untuk membuat daftar klasifikasi karakteristik menonjol yang perlu diperhatikan dalam penetapan strategi pengelolaan; dan (3) buatlah daftar karakteristik peserta didik yang selanjutnya untuk menentukan strategi pengelolaan pembelajaran; pembuatan daftar karakteristik harus disesuaikan dengan kemajuan-kemajuan belajar yang dapat dicapai peserta didik.

4. Memilih dan Menetapkan Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran PAI didasarkan pada target standar kompetensi, kemampuan dasar yang telah ditetapkan. Untuk mencapai target tersebut pendekatan yang digunakan adalah pendekatan terpadu artinya pendekatan yang satu berkaitan erat dengan pendekatan yang lainnya. Pendekatan terpadu meliputi: keimanan, pengamalan, pembiasaan, rasional, emosional, fungsional, dan keteladanan[28].

a. Pendekatan keimanan

Pendekatan keimanan memberikan peluang kepada peserta didik untuk mengembangkan pemahaman adanya Tuhan sebagai sumber kehidupan makhluk sejagat.

b. Pendekatan pengamalan

Pendekatan pengamalan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempraktikkan dan merasakan hasil-hasil pengamalan ibadah dan akhlak dalam menghadapi tugas-tugas dan masalah dalam kehidupan.

c. Pendekatan pembiasaan

Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membiasakan sikap dan perilaku baik yang sesuai dengan ajaran Islam dan budaya bangsa dalam menghadapi masalah kehidupan.

d. Pendekatan rasional

Pendekatan rasional ini memberikan peranan pada rasio (akal) peserta didik dalam memahami dan membedakan berbagai bahan ajar dalam materi pokok serta kaitannya dengan perilaku yang baik dengan perilaku yang buruk dalam kehidupan duniawi.

e. Pendekatan emosional

Pendekatan ini berupa menggugah perasaan (emosi) peserta didik dalam menghayati perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam dan budaya bangsa.

f. Pendekatan fungsional

Pendekatan fungsional adalah menyajikan bentuk semua materi pokok (Al-Qur'an, keimanan, ibadah/fiqh, akhlak), dari segi manfaatnya bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari dalam arti luas.

g. Pendekatan keteladanan

Pendekatan keteladanan, misalnya berupa menjadikan figur guru agama dan non-agama serta petugas sekolah lainnya maupun orang tua peserta didik sebagai cermin manusia berkepribadian agama.

5. Pengorganisasian Materi

Materi pokok merupakan bagian dari struktur keilmuan suatu bahan kajian yang dapat berupa bidang ajar, gugus isi, proses, keterampilan, dan/atau pengertian konseptual, yang harus dimiliki dan dikembangkan pada peserta didik.[29].

Pengorganisasian materi pembelajaran terbagi menjadi tiga macam kegiatan, yaitu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Pada hakikatnya pengorganisasian merupakan kegiatan menyiasati proses pembelajaran terhadap unsur-unsur instrumental melalui upaya pengorganisasian secara rasional dan menyeluruh.

Perencanaan pembelajaran terdiri dari perencanaan per satuan waktu dan perencanaan per satuan bahan ajar. Perencanaan per satuan waktu terdiri dari program tahunan dan program semester. Perencanaan per satuan bahan ajar dibuat berdasarkan satu kebulatan bahan ajar yang dapat disampaikan dalam satu atau beberapa kali pertemuan.

Pelaksanaan pembelajaran terdiri langkah-langkah pembelajaran di dalam atau di luar kelas, mulai dari pendahuluan, penyajian, dan penutup.

Penilaian pembelajaran merupakan proses yang dilakukan terus menerus sejak perencanaan, pelaksanaan, dan setelah pelaksanaan pembelajaran per pertemuan, satuan bahan ajar, maupun per satuan waktu pertemuan.

Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran didasarkan prinsip-prinsip didaktik, yaitu dimulai dari mudah ke sulit, dari sederhana ke kompleks, dan dari konkret ke abstrak.

6. Menetapkan Evaluasi Hasil Pembelajaran

Evaluasi hasil pembelajaran senantiasa didasarkan pada tiga aspek ketercapaian, yaitu aspek standar kompetensi, aspek kemampuan dasar, dan aspek indikator-indikator yang telah ditetapkan sebelumnya.

Di dalam kurikulum berbasis kompetensi mata pelajaran pendidikan agama Islam (PAI) untuk Sekolah Menengah Umum () ada lima unsur pokok mata pelajaran PAI yaitu Al-Qur'an, keimanan, akhlak, fiqh/ibadah, dan tarikh. Kelima unsur tersebut telah dijabarkan satu persatu.

Di samping itu, dari kelima unsur pokok materi PAI telah dijabarkan indikator-indikator atau kompetensi spesifik yang diharapkan dapat dikuasai peserta didik. Indikator-indikator ini dijadikan sebagai target pencapaian pembelajaran dan sekaligus menjadi ukuran keberhasilan proses pembelajaran PAI.

Rumusan kompetensi dalam indikator berupa kompetensi operasional, sehingga tingkat ketercapaiannya dapat diukur. Misalnya "siswa dapat melaksanakan shalat fardhu".

Pada dasarnya kompetensi dasar dianggap telah dikuasai siswa, jika spesifikasi kompetensi yang menjadi indikator telah dikuasai. Akan tetapi pada kompetensi dasar tertentu ketercapaiannya diukur sesuai dengan apa yang ada dalam indikator saja, belum memadai untuk dijadikan petunjuk ketercapaian kompetensi dasar, hal ini disebabkan sulitnya memerinci kompetensi dasar menjadi bentuk perilaku operasional. Misalnya kompetensi dasar beriman. Oleh karena itu, indikator ketercapaian kompetensi dasarnya adalah aspek-aspek perilaku lahiriah dari keimanan.

CATATAN

[1]Ausubel, Robins dan Blake melalui Muhaimin et al, *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah* (Bandung: Rosdakarya, 2001), hlm. 189.
[2]*Ibid*. hlm. 190
[3]*Ibid*., hlm. 194.
[4]*Ibid*., hlm. 196
[5]Prasetya Irawan, *Teori Belajar Motivasi Dan Keterampilan Mengajar* (Jakarta: Dikti,1996), hlm. 25.
[6]Leachey dan Harris, melalui Toeti Soekamto, *Teori Belajar dan Model-Model Pembelajaran* (Jakarta: Dikti, 1996), hlm. 13.
[7]*Ibid*.
[8]*Ibid*., hlm. 15
[9]*Ibid*,. hlm. 16.
[10]*Ibid*., hlm. 21.
[11]*Ibid*., hlm. 22.
[12]Prasetya Irawan, *Ibid*., hlm. 30.
[13]Hilgard dan Bower, 1981, melalui Toeti Sukamto, *Ibid*., hlm. 24.
[14]Bruner melalui Toeti Soekamto, *Ibid*
[15]Prasetya Irawan, *Ibid*., hlm. 31.
[16]*Ibid*., hlm. 32.
[17]Warrel dan Stiwell, melalui Toeti Soekamto, *Ibid*., hlm. 30
[18]*Ibid*.
[19]Brooks, 1990; Leinhardt, 1992; Brown et al.; 1989, melalui Muhamad Nuh dan Prima Retno Wikandari (Surabaya: UNES, 2000), hlm 2-3
[20]Brooks dan Brooks dalam Muhaimin et al., *Ibid*., hlm. 204.
[21]Berkowitz, 1964, melalui Muhaimin, et. al., *Ibid*., hlm. 215
[22]Kohlberg, melalui Muhaimin, et. al., *Ibid*., hlm. 216.
[23]Melalui Muhaimin, et. al., *Ibid*.
[24]Diknas, *Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam SMU*, (Jakarta: 2002), hlm. 3.
[25]Abdul Gafur, "Teknik Penyusunan Silabus Kurikulum Berbasis Kompetensi", Bahan Lokakarya Micro Teaching dan Praktek Pengalaman Lapangan bagi Dosen Pembimbing pada Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 28 Pebruari s/d 1 Maret 2003
[26]*Ibid*. hlm. 6-7
[27]Reigeluth dan Merril, melalui Muhaimin, *Ibid*., hlm. 238
[28]Diknas, *Ibid*. hlm. 10
[29]Diknas, *Ibid*. hlm. 9

Bab 6

PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH DAN MADRASAH

A. Prinsip-prinsip Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Dalam mengembangkan pembelajaran pendidikan agama Islam hendaknya pengembang dan perencana pembelajaran memilih, menetapkan, dan mengembangkan metode pembelajaran serta memahami prinsip-prinsip pembelajaran yang mengacu pada teori belajar dan pembelajaran. Di samping itu, pengembang dan perencana pembelajaran memahami prinsip-prinsip dasar agama Islam dan karakteristik utama Islam.

Prinsip-prinsip belajar dapat ditransfer sebagai landasan pelaksanaan pembelajaran karena pada hakikatnya pembelajaran merupakan proses bagaimana pembelajaran membelajarkan peserta didik. Yang dimaksud pembelajaran di sini adalah suatu cara yang membuat peserta didik belajar[1]. Prinsip-prinsip itu meliputi (i) prinsip kesiapan (*radiness*), (ii) prinsip motivasi (*motivation*), (iii) prinsip perhatian, (iv) prinsip persepsi, (v) prinsip retensi, dan (vi) prinsip

transfer. Untuk lebih jelasnya masing-masing prinsip itu dibahas lebih lanjut berikut ini.

1. Prinsip Kesiapan

Kesiapan peserta didik dalam pembelajaran pendidikan agama Islam berpengaruh sekali terhadap pencapaian suatu tujuan pembelajaran itu sendiri. Kesiapan peserta didik yang berupa kondisi fisik-psikis (jani-mental) merupakan kesiapan untuk melaksanakan tugas. Peserta didik yang belum siap melaksanakan tugas dalam pembelajaran mengalami kesulitan atau bahkan dapat berputus asa tidak mau belajar. Kesiapan belajar ialah kematangan dan pertumbuhan fisik, psikis, intelegensi, latar belakang pengalaman, hasil belajar yang baik, motivasi, persepsi, dan faktor-faktor lain yang memungkinkan seseorang dapat belajar[2].

Menyiapkan peserta didik pada awal pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang amat penting sebab pada saat peserta didik masuk ke kelas dan guru mengawali pembelajaran seribu satu macam pikiran peserta didik terbawa ke dalam kelas[3]. Oleh karena itu, prinsip kesiapan belajar peserta didik dalam pembelajaran pendidikan agama Islam akan dapat berlangsung lancar apabila: (i) tugas dalam pembelajaran yang diberikan kepadanya sesuai dengan kesiapan kematangan usia, kemampuan, minat, dan latar belakang pengalamannya, (ii) kesiapan peserta didik harus dikaji lebih dulu untuk memperoleh gambaran kesiapan belajar, dengan cara mengetes kesiapan atau kemampuan, (iii) bagi peserta didik yang kurang siap untuk melaksanakan tugas, maka akan menghambat proses pengaitan pengetahuan baru ke dalam struktur kognitif yang dimilikinya, (iv) kesiapan peserta didik mencerminkan jenis dan taraf kesiapan untuk menerima yang baru dalam membentuk atau mengembangkan kemampuan yang lebih matang, dan (v) untuk menentukan bahan dan tugas-tugas yang sangat baik bila divariasi sesuai dengan faktor kesiapan kognitif, afektif, dan psikomotor.

2. Prinsip Motivasi

Dalam pengembangan pembelajaran pendidikan agama Islam perlu diupayakan bagaimana agar dapat memengaruhi dan menimbulkan motivasi intrinsik melalui penataan metode pembelajaran yang dapat mendorong tumbuhnya motivasi belajar dalam diri peserta didik, sedangkan untuk menumbuhkan motivasi ekstrinsik dapat diciptakan suasana lingkungan yang religius sehingga tumbuh motivasi untuk mencapai tujuan Pendidikan Agama Islam sebagaimana yang ditetapkan.

Berkenaan dengan prinsip motivasi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan guru pendidikan agama Islam dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam.

a. Memberikan dorongan (drive)

Guru PAI memberikan dorongan terhadap peserta didik. Dorongan tersebut memberikan pengaruh terhadap tingkah laku peserta didik. Dorongan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam sebaiknya berkaitan dengan pendidikan agama Islam sebagai salah satu kebutuhan yang esensial bagi setiap manusia. Tingkah laku peserta didik terdorong ke arah suatu tujuan tertentu apabila ada kebutuhan. Kebutuhan ini menyebabkan timbulnya dorongan internal yang selanjutnya mendorong peserta didik untuk melakukan sesuatu menuju tercapainya suatu tujuan. Setelah tujuan dapat dicapai biasanya intensitas dorongan semakin menurun.

b. Memberikan insentif

Dalam kegiatan pembelajaran guru pendidikan agama Islam juga memberikan insentif untuk lebih meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Insentif dalam pembelajaran pendidikan Agama Islam tidak selalu berupa materi, tetapi bisa berupa nilai atau penghargaan sesuai kadar kemampuan yang dapat dicapai peserta didik. Bila perlu insentif dapat diberikan kepada peserta didik secara bertahap sesuai tahap tingkatan yang dapat dicapainya.

c. Motivasi berprestasi

Setiap peserta didik masing-masing mempunyai motivasi untuk bekerja karena adanya kebutuhan orang untuk dapat berprestasi. McClelland[4] mengemukakan bahwa motivasi merupakan fungsi dari tiga variabel, yaitu (i) harapan untuk melakukan tugas dengan berhasil, (ii) prestasi tertinggi tentang nilai tugas, dan (iii) kebutuhan untuk keberhasilan atau kesuksesan. Oleh karena itu, guru PAI perlu mengetahui sejauh mana kebutuhan berprestasi setiap peserta didik. Peserta didik yang memiliki motivasi berprestasi tinggi menyelesaikan tugas atau masalah yang memberikan tantangan dan kepuasan secara lebih cepat. Peserta didik jenis ini memerlukan balikan setiap unjuk kerjanya dengan nilai atau pujian yang tepat. Sebaliknya, peserta didik yang memiliki motivasi berprestasi rendah, pada umumnya tidak realistis untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu, tugas berat atau ringan bagi peserta didik jenis ini sama saja tidak ada pengaruhnya bagi tumbuhnya motivasi untuk berprestasi. Jika tugas-tugas itu mudah, ia akan mengerjakannya, tetapi jika tugas-tugas itu berat dan gagal melakukannya maka tidak akan memiliki dampak atau arti apa-apa baginya, bahkan ia tidak merasa mempunyai beban atas kegagalannya. Dengan perkataan lain, peserta didik yang yakin keberhasilan dan kegagalan terutama dikarenakan upaya mereka sendiri, mereka akan berupaya keras dan sungguh-sungguh untuk meraih keberhasilan, dan sebaliknya bagi peserta didik yang berkeyakinan bahwa keberhasilan dan kegagalan karena mujur, tingkah guru atau faktor lainnya, mereka akan kehilangan semangat dan cepat putus asa[5].

d. Motivasi kompetensi

Setiap peserta didik memiliki keinginan untuk menunjukkan kompetensi dengan berusaha menaklukkan lingkungannya untuk menunjukkan kemampuan dan penguasaannya kepada yang lain. Oleh karena itu, diperlukan keterampilan mengevaluasi diri, nilai tugas bagi peserta didik, harapan untuk sukses, patokan keberhasilan, kontrol belajar, dan penguatan diri untuk mencapai tujuan[6].

e. *Motivasi kebutuhan menurut Maslow*

Menurut Maslow[7], manusia memiliki kebutuhan yang bersifat hierarkis, sebagaimana ditunjukkan pada diagram berikut ini.

Teori Kebutuhan Maslow

Teori tersebut menunjukkan bahwa (i) individu bukan hanya didorong oleh pemenuhan kebutuhan-kebutuhan biologis, sosial, dan emosional, melainkan dapat diberikan dorongan untuk mencapai sesuatu yang lebih dari apa yang dimiliki saat ini, (ii) pengetahuan kemajuan yang dicapai dalam memenuhi keinginan untuk mencapai tujuan dapat mendorong terjadinya peningkatan usaha, dan pengalaman tentang kegagalan yang tidak merusak citra diri peserta didik dapat memperkuat kemampuan memelihara kesungguhan dalam belajar, (iii) dorongan yang mengatur perilaku tidak selalu jelas bagi peserta didik, misalnya seorang peserta didik yang mengharapkan dari gurunya untuk bisa berubah lebih dari itu karena kebutuhan emosi untuk mencapai sesuatu, (iv) motivasi dipengaruhi oleh unsur-unsur kepribadian, seperti rasa rendah diri atau keyakinan diri sehingga peserta didik yang termasuk pandai belum tentu bisa menghadapi setiap masalah, (v) rasa aman dan keberhasilan dalam mencapai tujuan cenderung meningkatkan motivasi belajar, kegagalan dapat meningkatkan atau menurunkan motivasi belajar, semuanya ini bergantung pada berbagai faktor. Oleh karena itu, tidak semua peserta didik dapat diberikan dorongan yang sama untuk melakukan suatu tugas, dan (vi) setiap media pembelajaran memiliki pengaruh motivasi yang berbeda pada diri peserta didik sesuai dengan karakteristik individu.

3. Prinsip Perhatian

Perhatian adalah pemusatan tenaga psikis tertuju pada suatu objek, dan atau perhatian banyak sedikitnya kesadaran yang menyertai suatu aktivitas yang dilakukan[8].

Dalam proses pembelajaran, perhatian merupakan faktor yang besar pengaruhnya. Kalau peserta didik mempunyai perhatian yang besar mengenai apa yang disajikan atau dipelajari, peserta didik dapat menerima dan memilih stimuli yang datang dari luar. Perhatian dapat membuat peserta didik untuk mengarahkan diri pada tugas yang diberikan, melihat masalah-masalah yang akan diberikan, memilih dan memberikan fokus pada masalah yang harus diselesaikan, dan mengabaikan hal-hal lain yang tidak relevan.

Beberapa prinsip yang diajukan Chield[9], yang perlu diperhatikan dalam memengaruhi perhatian seseorang adalah memperhatikan faktor-faktor internal yang memengaruhi belajar, yaitu minat, kelelahan, karakteristik peserta didik, motivasi dan memperhatikan faktor-faktor eksternal yang memengaruhi belajar, meliputi intensitas stimulus, kemenarikan stimulus yang baru, keragaman stimuli, penataan metode yang sesuai dan sebagainya.

Prinsip perhatian dalam pembelajaran pendidikan agama Islam tidak hanya terbatas pada penguasaan materi-materi pendidikan agama Islam, tetapi perhatian ini mencakup penghayatan dan pengamalan isi ajaran agama Islam yang dipelajari. Perhatian peserta didik secara psikologis adalah perhatian yang dipusatkan pada pokok-pokok pembicaraan pelajaran, maka rangsangan yang datang dari luar yang akan mengganggu akan terdesak dan diabaikan sama sekali, begitu pula perhatian secara didaktis yang dipusatkan penuh pada objek pelajaran maka kemungkinan masuknya rangsangan luar yang dapat memperdaya tanggapan dan ingatan menjadi larut dalam pemusatan perhatian[10].

4. Prinsip Persepsi

Persepsi adalah suatu proses yang bersifat kompleks yang menyebabkan orang dapat menerima atau meringkas informasi yang

diperoleh dari lingkungannya[11]. Semua proses belajar selalu dimulai dengan persepsi, yaitu setelah peserta didik menerima stimulus atau suatu pola stimuli dari lingkungannya. Persepsi dianggap sebagai kegiatan awal struktur kognitif seseorang. Persepsi bersifat relatif, selektif, dan teratur. Oleh karena itu, sejak dini kepada peserta didik perlu ditanamkan rasa memiliki persepsi yang baik dan akurat mengenai apa yang dipelajari. Kalau persepsi peserta didik terhadap apa yang akan dipelajari salah, maka akan memengaruhi keberhasilan atau kegagalan kegiatan belajar yang akan ditempuh.

Bagi peserta didik memiliki persepsi yang salah mengenai apa yang dipelajari maka untuk selanjutnya akan sukar diubah persepsi yang sudah melekat tadi, sehingga dengan demikian ia akan mempunyai struktur kognitif yang salah[12]. Agar persepsi dapat berfungsi secara efektif, kemampuan untuk mengadakan persepsi tentang sesuatu harus ditanamkan dan dikembangkan sebagai suatu kebiasaan dalam setiap memulai kegiatan pembelajaran.

Untuk membentuk persepsi yang akurat mengenai stimuli yang diterima serta mengembangkannya menjadi suatu kebiasaan, peserta didik perlu diberi latihan-latihan dalam bentuk dan kondisi situasi yang bermacam-macam agar peserta didik tetap dapat mengenal pola stimuli itu, meskipun disajikan dalam bentuk yang baru.

Prinsip persepsi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam amat tepat digunakan sebagai proses pemahaman yang akurat terhadap materi-materi pendidikan agama Islam dan pengembangannya menjadi amal ibadah yang dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari.

Prinsip-prinsip umum yang perlu diperhatikan dalam menggunakan persepsi adalah (i) makin baik persepsi peserta didik mengenai sesuatu makin mudah belajar mengingat sesuatu tersebut, (ii) dalam pembelajaran perlu dihindari persepsi yang salah karena hal ini akan memberikan pengertian yang salah pula pada peserta didik tentang apa yang dipelajarinya, dan (iii) dalam pembelajaran perlu diupayakan berbagai sumber belajar yang dapat mendekati

benda sesungguhnya, sehingga peserta didik memperoleh persepsi yang lebih akurat[13].

Akurasi prinsip persepsi dalam pembelajaran peserta didik menerima pendidikan agama Islam dan mengamalkan isi pendidikan agama Islam yang diajarkan.

5. Prinsip Retensi

Dalam pembelajaran perlu diperhatikan prinsip-prinsip untuk meningkatkan retensi belajar seperti yang diungkapkan dari hasil temuan Thomburg[14] yang menunjukkan bahwa (i) isi pembelajaran yang bermakna akan lebih mudah diingat dibandingkan dengan isi pembelajaran yang tidak bermakna, (ii) benda yang lebih jelas dan konkret akan lebih mudah diingat dibandingkan benda yang bersifat abstrak, (iii) retensi akan lebih baik untuk isi pembelajaran yang bersifat kontekstual atau serangkaian kata-kata yang mempunyai kekuatan asosiatif dibandingkan dengan kata-kata yang tidak memiliki kesamaan internal, dan (iv) tidak ada perbedaan antara retensi dengan apa yang telah dipelajari peserta didik yang mempunyai berbagai tingkatan IQ. Prinsip retensi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam tentunya sangat tepat untuk digunakan karena pendidikan agama Islam sarat dengan muatan-muatan nilai spiritualitas yang terintegrasi dalam pendidikan agama Islam itu sendiri.

Di samping itu perlu diingat pula bahwa retensi belajar sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu apa yang dipelajari pada permulaan (*original learning*), belajar melebihi permulaan (*over learning*), dan pengulangan dengan interval waktu (*space review*).

Sehubungan dengan hasil temuan Thomburg tersebut, Chauham[15] mengajukan cara-cara untuk meningkatkan retensi belajar, antara lain (i) usahakan agar isi pembelajaran yang dipelajari disusun dengan baik dan bermakna. Sebagai bukti, pembelajaran syair akan diingat sebanyak 58% setelah 30 hari, pembelajaran prosa akan diingat sebanyak 40%, dan pembelajaran kata tanpa makna diingat sebanyak 28%, (ii) pembelajaran dapat dibantu dengan jembatan

keledai (*macmonic*), karena akan meningkatkan organisasi materi yang dipelajari seperti akronim NIMIM (Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad) untuk mengingat nabi mendapat gelar Ulul Azmi, (iii) berikan resitasi karena hal ini akan meningkatkan aktivitas peserta didik, (iv) susun dan sajikan konsep yang jelas, misalnya dengan bantuan media audio visual, dan (v) berikan latihan pengulangan terutama untuk pembelajaran keterampilan motorik.

Pembelajaran pendidikan agama Islam tidak saja membekali peserta didik dengan ilmu agama agar intelektualitas peserta didik terpenuhi, tetapi peserta didik juga dibekali dengan kemampuan dan keterampilan pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari.

6. Prinsip Transfer

Transfer merupakan suatu proses di mana sesuatu yang pernah dipelajari dapat memengaruhi proses dalam mempelajari sesuatu yang baru. Dengan demikian, transfer berarti pengaitan pengetahuan yang sudah dipelajari dengan pengetahuan yang baru dipelajari. Pengetahuan atau keterampilan yang diajarkan di sekolah selalu diasumsikan atau diharapkan dapat dipakai untuk memecahkan masalah yang dialami dalam kehidupan atau dalam pekerjaan yang dihadapi kelak. Transfer belajar atau transfer latihan berarti aplikasi atau pemindahan pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, sikap, atau respons-respons lain dari suatu situasi ke dalam situasi yang lain.

Menurut Chauham[16], transfer dapat diklasifikasikan atas (i) *tranfer horisontal,* yakni apabila pengetahuan atau keterampilan yang dipelajari sebelumnya dapat dialihkan ke dalam proses mempelajari pengalaman yang setingkat atau dalam satu kategori. Bentuk transfer horisontal meliputi *transfer lateral,* yakni apabila pengetahuan atau keterampilan yang dipelajari sebelumnya dapat diterapkan dalam situasi belajar di dalam kehidupan tanpa pengawasan orang yang mengajar, dan *transfer sequecial,* yakni apabila yang dipelajari sekarang secara positif ada hubungannya dengan apa yang akan dipelajari pada masa yang akan datang; dan (ii) *transfer vertikal,*

yaitu apabila pemahaman tentang apa yang dipelajari sebelumnya dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang lebih sulit atau yang berada pada jenjang pengetahuan yang lebih tinggi.

Lebih lanjut, Chauham mengemukakan beberapa teori yang melandasi transfer dalam pembelajaran, yaitu teori disiplin mental *(mental diciplin theory),* teori unsur-unsur yang sama *(identical elements),* teori generalisasi, dan teori transposisi. Menurut teori disiplin mental, seseorang dapat dilihat seperti badan yang terdiri dari bagian-bagian. Menurut teori unsur-unsur yang sama, sesuatu yang dipelajari dapat ditransfer ke dalam situasi lain selama terdapat unsur-unsur yang identik pada kedua macam pengalaman tersebut. Sesuai dengan teori generalisasi, transfer belajar dapat terjadi apabila peserta didik dapat memahami prinsip-prinsip umum, bukan pemecahan masalah yang bersifat spesifik. Tekanan dari teori ini terletak pada intelegensi yang menyebabkan seseorang dapat memakai dan menerapkan pengetahuan pengetahuan tentang prinsip-prinsip dari satu situasi ke dalam situasi lain. Menurut teori transposisi, dalam pembelajaran timbul persamaan persepsi antara situasi dan apa yang ada dalam bentuk umum. Belajar dapat menumbuhkan sesuatu dalam pola yang utuh atau dalam suatu konfigurasi yang mempunyai makna.

Proses yang terjadi dalam transfer adalah (i) pengelompokan, generalisasi, dan strukturisasi materi; (ii) terdapat hubungan dalam berbagai bentuk atau ukuran; (iii) adanya struktur dalam; dan (iv) adanya proses berpikir yang konsisten. Prinsip-prinsip belajar tersebut di atas dapat dipergunakan secara maksimal sebagai landasan pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pengembangan pembelajaran pendidikan agama Islam dilandaskan pada prinsip-prinsip belajar. Di samping itu, pengembangan pembelajaran pendidikan agama Islam juga didasarkan pada prinsip-prinsip dasar agama Islam dan karakteristiknya.

B. Prinsip Dasar Agama Islam dan Karakteristiknya

Islam adalah agama kebenaran yang merupakan perwujudan dari aturan-aturan hidup yang telah diwahyukan Allah, Sang Pencipta dan Penguasa alam semesta. Sehubungan dengan hal itu, untuk mengembangkan hidup manusia secara wajar, diperlukan dua hal, yaitu sumber-sumber untuk mempertahankan hidup, pemenuhan kebutuhan material secara individu maupun kelompok dan pengetahuan tentang prinsip tingkah laku baik individu maupun masyarakat yang memungkinkan untuk mengisi hidup, menegakkan keadilan dan kedamaian.

Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut Allah SWT telah memberikan kecukupan, baik kebutuhan berupa material maupun kebutuhan spiritual, sosial dan kultural manusia. Untuk memenuhi kebutuhan material, Allah telah menyediakan berbagai sumber yang siap digali, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan spiritual, sosial dan kultural manusia, Allah telah mengutus rasul-rasul dan mewahyukan aturan-aturan hidup yang akan membimbing manusia ke jalan lurus, yaitu agama Islam.

Dasar agama Islam yang pertama adalah tauhid (keesaan Tuhan). Dengan tauhid berarti hanya ada satu Tuhan yang Maha Agung dalam alam semesta ini, yaitu Allah Yang Maha Kuasa, Maha Ada dan Pemelihara dunia beserta isinya. Dasar agama Islam kedua adalah mempercayai kerasulan Muhammad saw, menerima agama yang disampaikannya dan mematuhi perintah-perintahnya. Dasar agama Islam ketiga adalah kepercayaan kepada hari akhir.

Menurut Khurshid Ahmad[17] karakteristik utama agama Islam meliputi (i) sederhana, rasional dan praktis, (ii) perpaduan antara material dan spiritual, (iii) *way of life* yang adil, (iv) menjaga keseimbangan antara individu dan masyarakat, (v) universal dan humanistis, (vi) unsur-unsur permanen dan berubah-ubah, dan (vii) lengkap dan lestari. Islam adalah agama tanpa mitologi. Ajaran-ajarannya sederhana dan mudah dimengerti. Agama Islam menggalakkan

kecakapan berpikir dalam diri manusia dan mengajak manusia untuk menggunakan akal.

Demikian pula Islam merupakan sebuah agama yang praktis dan tidak menyibukkan diri dengan teori-teori kosong yang tak berguna. Keimanan dalam Islam bukanlah percaya semata-mata melainkan iman sebagai sumber kehidupan. Akhlak yang baik harus menyertai kepercayaan kepada Allah SWT. Agama Islam bukanlah sebagai penghias kata-kata melainkan agama untuk diamalkan[18].

Agama Islam tidak membenarkan pemisahan antara hidup "moral" dan "material" dan spiritual, "duniawi" dan "spiritual" serta menyuruh manusia untuk mengerahkan segala potensi yang dimilikinya untuk membangun kehidupan di atas landasan moral yang sehat. Agama Islam bertujuan membuat keseimbangan di antara kedua segi kehidupan, segi material dan spiritual. Islam adalah sebuah *way of life* yang adil yang sempurna yang mencakup semua bidang kehidupan manusia. Islam memberikan bimbingan dalam segala aspek kehidupan secara individual-sosial, material-moral, ekonomi-politik, legal-kultural, dan nasional-internasional.

Islam sangat memperhatikan aspek individu dan masyarakat dengan menegakkan keharmonisan dan keseimbangan antar keduanya serta menetapkan kewajiban. Misi Islam ditujukan kepada semua umat manusia. Allah di dalam agama Islam adalah Tuhan alam Semesta[19] dan Rasul adalah utusan untuk semua manusia.

Alquran dan Sunnah berisi petunjuk abadi dari Allah dan Rasul-Nya. Petunjuk ini bebas dari ikatan-ikatan waktu dan ruang. Prinsip-prinsip tingkah laku individu dan sosial yang ditunjukkan Allah bersifat abadi dan berdasarkan realitas. Akan tetapi Allah menurunkan prinsip-prinsip saja dan Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk menggunakan prinsip-prinsip itu menurut cara yang cocok dengan semangat dan kondisi setiap zaman. Manusia dapat melakukan ijtihad dalam menggunakan dan memanfaatkan petunjuk-petunjuk Allah dalam menghadapi problema yang dihadapinya. Oleh karena itu, petunjuk pokok dari Allah bersifat permanen, sedangkan metodenya boleh berubah-ubah menurut kepentingan yang sesuai dengan zaman.

C. Faktor-faktor yang Memengaruhi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Dalam pembelajaran PAI terdapat tiga komponen utama yang saling berpengaruh. Ketiga komponen tersebut adalah (i) kondisi pembelajaran, (ii) metode pembelajaran, dan (iii) hasil pembelajaran. Lebih lanjut hal itu dibahas berikut ini.

1. Kondisi Pembelajaran

Kondisi pembelajaran agama Islam secara metodologis belum mencerminkan target tujuan PAI secara utuh, integral, dan terpadu. Hal ini di antaranya disebabkan oleh beberapa permasalahan, misalnya (i) belum tercapainya tujuan pembelajaran secara ideal, (ii) penggunaan strategi pembelajaran yang belum optimal, (iii) penyusunan materi yang kurang integratif, (iv) penggunaan metode pembelajaran yang kurang variatif, dan (v) sistem evaluasi yang belum mencerminkan keseluruhan aspek pembelajaran PAI.

Kondisi pembelajaran pendidikan agama Islam merupakan semua faktor yang memengaruhi penggunaan metode pembelajaran PAI itu sendiri. Paling tidak ada hal yang berkaitan langsung dengan kondisi pembelajaran PAI yang berupa tujuan dan karakteristik bidang studi PAI serta karakteristik peserta didik.

Tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam adalah pernyataan tentang hasil pembelajaran Pendidikan Agama Islam atas apa yang diharapkan. Tujuan pembelajaran ini bisa bersifat umum, bisa dalam kontinum umum-khusus, dan bisa bersifat khusus. Tujuan Pendidikan Agama Islam yang bersifat umum tecermin dalam GBPP mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah, bahwa Pendidikan Agama Islam bertujuan "meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan siswa terhadap agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi"[20].

Pernyataan tujuan tersebut masih sangat luas, idealis, dan sangat umum. Oleh karena itu, unsur-unsur yang terkandung dalam rumusan tujuan tersebut perlu dijabarkan sampai pada tataran yang lebih rinci (khusus) dan operasional. Tujuan dalam kontinum umum-khusus, misalnya siswa memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap lingkungan serta terbiasa menampilkan perilaku agamis dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan tersebut masih perlu dijabarkan lebih khusus lagi, misalnya (i) peserta didik dapat memilih lingkungan yang bersih, sehat, indah, dan agamis, (ii) peserta didik dapat menghargai lingkungan yang sehat, bersih, indah, agamis, dan (iii) peserta didik dapat berperilaku menjaga lingkungan yang sehat, bersih, indah, dan agamis dalam kehidupan sehari-hari.

Karakteristik bidang studi Pendidikan Agama Islam adalah aspek-aspek suatu bidang studi yang terbangun dalam struktur isi dan konstruk/tipe isi bidang studi Pendidikan Agama Islam berupa fakta, dalil/hukum, prinsip/kaidah, prosedur, dan keimanan yang menjadi landasan dalam mendeskripsikan strategi pembelajaran.

2. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran yang berpengaruh pada pelajaran PAI dapat diklasifikasikan menjadi strategi pengorganisasian, strategi penyampaian, dan strategi pengelolaan pembelajaran.

Strategi penyampaian pembelajaran PAI adalah metode-metode penyampaian pembelajaran yang dikembangkan untuk membuat siswa dapat merespons dan menerima pelajaran dengan mudah, cepat, dan menyenangkan. Oleh karena itu, penetapan strategi penyampaian perlu menerima serta merespons masukan dari peserta didik. Gagne dan Briggs[21] menyebut strategi ini dengan *delivery system,* yang didefinisikan sebagai "*the total of all components necessary to make an instructional system operate as intended"*. Dengan demikian, strategi penyampaian mencakup lingkungan fisik, guru atau orang, bahan-bahan pembelajaran, dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembelajaran yang lain. Dengan perkataan lain,

media pembelajaran merupakan satu komponen penting dan menjadi kajian utama dalam strategi ini. Strategi penyampaian ini berfungsi sebagai penyampai isi pembelajaran kepada peserta didik untuk menampilkan unjuk kerja.

Ada tiga komponen dalam strategi penyampaian ini, yaitu (i) media pembelajaran, (ii) interaksi media pembelajaran dengan peserta didik, dan (iii) pola atau bentuk belajar-mengajar. Media pembelajaran Pendidikan Agama Islam mencakup semua sumber yang diperlukan untuk melakukan komunikasi dengan peserta didik[22]. Media pembelajaran dapat berupa apa saja yang dapat dijadikan perantara (medium) untuk dimuati pesan nilai-nilai pendidikan agama yang akan disampaikan kepada peserta didik. Media bisa dapat berupa perangkat keras, seperti komputer, televisi, projektor, orang atau alat dan bahan-bahan cetak lainnya. Media bisa berupa perangkat lunak yang digunakan pada perangkat keras tersebut. Dengan batasan tersebut, GPAI merupakan salah satu media pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang mengantarkan pesan nilai-nilai dan norma-norma ajaran Islam melalui pembelajaran yang direncanakan.

Pemilihan media pembelajaran Pendidikan Agama Islam sekurang-kurangnya dapat mempertimbangkan lima hal, yaitu (i) tingkat kecermatan representasi, (ii) tingkat interaktif yang mampu ditimbulkannya, (iii) tingkat kemampuan khusus yang dimilikinya, (iv) tingkat motivasi yang mampu ditimbulkannya, dan (v) tingkat biaya yang diperlukannya.

Interaksi peserta didik dengan media berarti bagaimana peran media pembelajaran dalam merangsang kegiatan belajar peserta didik. Setiap media pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang direncanakan hendaknya dipilih, ditetapkan, dan dikembangkan, sehingga dapat menimbulkan interaksi peserta didik dengan pesan-pesan yang dibawa media pembelajaran. Kecocokan suatu media dapat diukur dari tingkat keefektifan, keefisienan, kemudahan, serta kemenarikan peserta didik untuk menampilkan unjuk kerja (hasil belajar) melalui media yang digunakan. Oleh karena itu,

dalam pemilihan suatu media dipengaruhi karakteristik bidang studi dan kendala sumber belajar yang tersedia.

Djalaludin[23] berpendapat bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat memberikan dampak positif dan negatif dalam kehidupan luas. Dampak positifnya adalah bahwa jalan menuju ke jalan Tuhan (beriman dan bertakwa) dengan *hikmah, mauidhah hasanah,* dan *mujadalah* lebih menonjol. Dalam hal ini, manfaatnya bagi proses penyebaran dan perembesan dalam kegiatan pendalaman, pemahaman, dan sekaligus pengalaman agama dapat diupayakan dengan maksimal.

Dewasa ini dapat kita saksikan penggunaan media informasi yang beragam model dan gaya untuk pembelajaran Pendidikan Agama Islam, baik melalui media cetak maupun elektronik cukup tersedia. Dari media elektronik dapat disaksikan model rekaman (*cassete*) yang berisi pengajian lewat radio dan layat kaca (TV) yang berupa pembelajaran agama (kuliah subuh, di ambang fajar, hikmah fajar, dan pengajian pagi). Dari media cetak dapat kita jumpai berbagai bentuk dan model penerbitan dan publikasi pembelajaran agama, mulai yang bersifat brosur, mulai dari yang bernilai jurnal ilmiah sampai dengan majalah anak-anak, seperti Aku Anak Saleh.

Tingkat pengaruh motivasional yang dimiliki suatu media juga penting artinya untuk keperluan mempreskripsikan strategi penyampaian. Pengaruh motivasional ini kerap kali bervariasi sejalan dengan perbedaan perseorangan di antara peserta didik. Misalnya, seorang guru dalam kondisi tertentu menjadi media belajar yang dapat membangkitkan motivasi belajar peserta didik, namun pada saat yang sama justru guru menjadi penyebab menurunnya motivasi belajar peserta didik. Media bisa memberikan pengaruh motivasional yang berbeda. Perbedaan ini terkait dengan karakteristik peserta didik. Makin dekat kesamaan karakteristik peserta didik dengan media yang digunakan, makin tinggi pengaruh motivasional yang bisa ditimbulkan oleh media itu.

Selain interaksi dengan karakteristik peserta didik, media juga dapat berinteraksi dengan tipe isi bidang studi dalam menentukan

pengaruh motivasionalnya. Tipe isi-konsep lebih tepat didekati dengan media benda konkret, atau gambar diagram, sedangkan untuk tipe isi-prosedural dapat digunakan media film bersuara yang dapat menimbulkan motivasional yang tinggi. Namun demikian, pemanfaatan media pembelajaran juga perlu dipertimbangkan kemampuan pembiayaan mulai dari perancangan, pembuatan, hingga penggunaan. Pemilihan dan penggunaan media pembelajaran juga harus dikaitkan dengan strategi pengelolaan pembelajaran.

Strategi pengelolaan pembelajaran adalah metode untuk menata interaksi antara peserta didik dengan komponen-komponen metode pembelajaran lain, seperti pengorganisasian dan penyampaian isi pembelajaran. Strategi pengelolaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam berupaya untuk menata interaksi peserta didik dengan memperhatikan empat hal, yaitu (i) penjadwalan kegiatan pembelajaran yang menunjukkan tahap-tahap kegiatan yang harus ditempuh peserta didik dalam pembelajaran, (ii) pembuatan catatan kemajuan belajar peserta didik melalui penilaian yang komprehensif dan berkala selama proses pembelajaran berlangsung maupun sesudahnya, (iii) pengelolaan motivasi peserta didik dengan menciptakan cara-cara yang mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik, dan (iv) kontrol belajar yang mengacu pada pemberian kebebasan untuk memilih tindakan belajar sesuai dengan karakteristik peserta didik.

3. Hasil Pembelajaran

Faktor ketiga yang memengaruhi pembelajaran PAI adalah hasil pembelajaran PAI yang kurang menggembirakan. Hasil pembelajaran PAI ini mencakup indikator nilai yang diakibatkan oleh penggunaan metode pembelajaran dan kondisi pembelajaran PAI yang berbeda-beda.

Hasil pembelajaran dapat diklasifikasikan atas keefektifan, keefisiensian, dan daya tarik. Keefektifan pembelajaran dapat diukur dengan kriteria (i) kecermatan penguasaan kemampuan atau perila-

ku yang dipelajari, (ii) kecepatan unjuk kerja sebagai bentuk hasil belajar, (iii) kesesuaian dengan prosedur kegiatan belajar yang harus ditempuh, (iv) kuantitas unjuk kerja sebagai bentuk hasil belajar, (v) kualitas hasil akhir yang dapat dicapai, (vi) tingkat alih belajar, dan (vii) tingkat retensi belajar. Efisiensi pembelajaran dapat diukur dengan rasio antara keefektifan dan jumlah waktu yang digunakan atau jumlah biaya yang dikeluarkan. Daya tarik pembelajaran biasanya diukur dengan mengamati kecenderungan peserta didik untuk berkeinginan terus belajar.

D. Pola Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Pola pembelajaran adalah model yang menggambarkan kedudukan serta peran guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran[24]. Secara historis perkembangan pola pembelajaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut. *Pertama*, pola pembelajaran yang didominasi oleh guru sebagai satu-satunya sumber belajar, penentu metode belajar, bahkan termasuk penilaian kemajuan belajar peserta didik. Dominasi peranan guru dalam pembelajaran seperti itu dapat dilihat melalui diagram berikut ini.

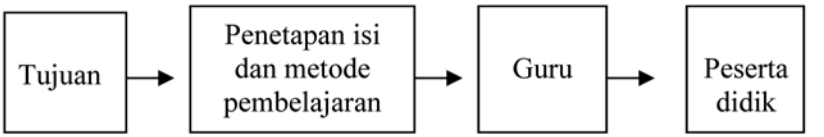

Kedua, perkembangan pembelajaran telah memengaruhi pola pembelajaran. Guru yang semula sebagai satu-satunya sumber belajar, peranannya mulai dibantu media pembelajaran, sehingga proses pembelajaran tampak berubah lebih efisien. Pola ini dapat diamati pada diagram berikut:

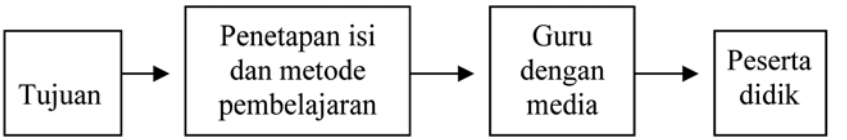

Ketiga, pembelajaran terus mengalami perkembangan sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, kurang memadai kalau sumber belajar hanya berasal dari guru atau berupa media buku teks atau *audio-visual*. Kondisi ini mulai dirasakan perlu ada cara baru dalam mengomunikasikan pesan verbal maupun nonverbal. Kecenderungan pembelajaran dewasa ini adalah sistem belajar mandiri dalam program terstruktur. Untuk itu perlu dipersiapkan sumber belajar secara khusus yang memungkinkan dapat dipergunakan pelajar secara langsung. Sumber belajar jenis ini lazimnya berupa media yang dipersiapkan oleh kelompok guru dengan tenaga ahli media, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Guru dan ahli media berinteraksi dengan pelajar berdasarkan satu tanggung jawab bersama. Pola pembelajaran jenis ini dapat dicermati pada diagram berikut.

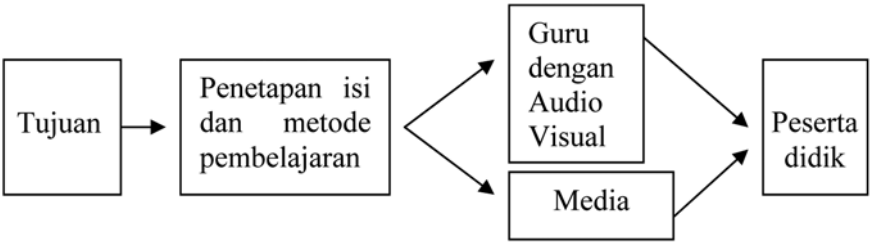

Dalam diagram tersebut kerja sama guru dengan guru ahli media, sangat membantu kegiatan belajar pelajar dan di sisi lain peran guru dalam pembelajaran terbantu oleh penggunaan media pembelajaran.

Keempat, sejalan dengan meningkatnya kebutuhan kualitas tenaga guru yang profesional, salah satu jalan yang dapat ditempuh adalah dengan membekali para guru agar mampu mengembangkan pembelajaran yang sistematis dan terprogram seperti buku ajar, modul, atau media lain yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, peserta didik lebih mandiri dalam melakukan kegiatan pembelajaran.

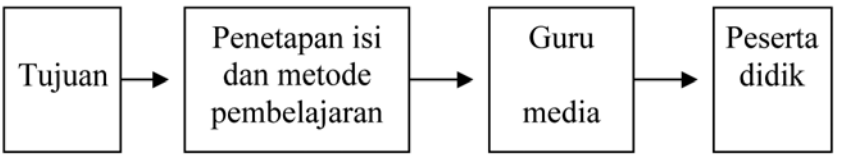

Keempat pola dasar pembelajaran tersebut masih mungkin dikombinasikan supaya proses pembelajaran sebagai suatu sistem dapat berjalan secara lebih efektif dan efisien. Kombinasi keempat pola dasar pembelajaran tersebut dapat diamati pada diagram berikut.

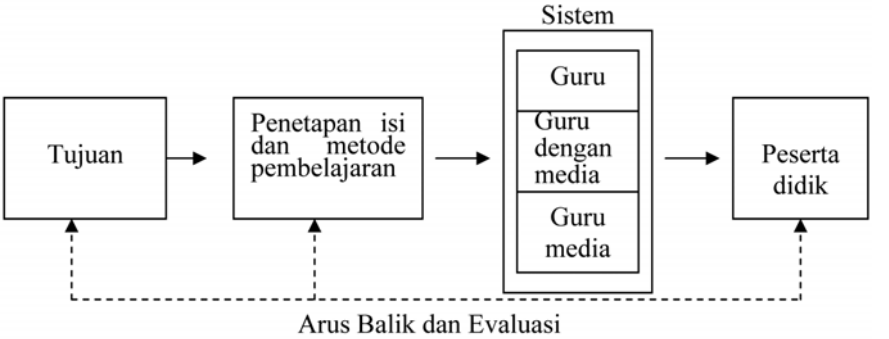

Diagram tersebut menunjukkan bahwa pola pembelajaran dapat dijalani melalui interaksi antara guru, guru media (media berfungsi guru), dan guru dengan media dengan pelajar. Sumber belajar bagi pelajar bisa berupa guru, media yang dirancang oleh guru, dan guru dengan media yang merupakan suatu sistem dalam proses pembelajaran. Untuk lebih jelasnya, kombinasi keempat pola dasar pembelajaran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Dalam praktiknya tidak ada pola pembelajaran yang baku dan dapat digunakan dalam berbagai kondisi pembelajaran. Berbagai pola tersebut saling berbaur dan melengkapi satu dengan yang lainnya. Secara operasional, penerapan pola pembelajaran tersebut mempunyai ciri pokok, antara lain hal berikut:

1. Fasilitas fisik sebagai perantara penyajian informal
2. Sistem pembelajaran dan pemanfaatan fasilitas yang merupakan komponen terpadu
3. Adanya pilihan yang memungkinkan terjadinya (i) perubahan fisik tempat belajar, (ii) hubungan guru dan pelajar yang dibantu media, (iii) aktivitas peserta didik yang lebih mandiri, (iv) perlunya kerja sama lintas disiplin ilmu seperti ahli instruksional, ahli media pembelajaran, (v) perubahan peranan dan kecakapan mengajar, dan (vi) keluwesan waktu dan tempat balajar.

E. Pendekatan Sistem dalam Pengembangan Pembelajaraan Pendidikan Agama Islam

Dalam konteks pembelajaran, sistem dapat didefinisikan sebagai keseluruhan komponen terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan untuk bekerjasama mencapai hasil atau tujuan yang diharapkan. Dengan demikian, sistem mempunyai sejumlah komponen, setiap komponen memiliki fungsi yang berbeda, tetapi antarkomponen satu dengan yang lainnya memiliki keterkaitan dan bekerjasama untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan.

Semua sistem tersebut memiliki batasan tersendiri yang membedakan sistem yang satu dengan yang lain, apabila ditinjau dari unsur-unsur sistem yang menjadi *input* proses dan hasil yang dicapai. Akan tetapi, ciri-ciri sistem memiliki kesamaan dalam bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan.

1. Ciri-ciri Sistem

Ciri-ciri sistem adalah memiliki tujuan, fungsi masing-masing komponen, keterkaitan komponen yang satu dengan komponen yang lain, ada keterpautan atau kerja sama, proses transformasi, umpan balik, dan ada kawasan.

Sebagai ilustrasi keterkaitan subsistem pendidikan agama Islam Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Umum dapat dijelaskan berikut ini. *Pertama* segi kurikulum PAI, yang meliputi kurikulum SD, SMP, dan, secara

prinsipil ditinjau dari segi komponen pokok tidak ada perbedaan yang mencolok, kecuali perbedaan itu terjadi pada penekanan masing-masing komponen. Di dalam kurikulum PAI SD lebih ditekankan pada empat unsur pokok, yaitu: keimanan, ibadah, al-Qur'an dan akhlak, sedangkan kurikulum PAI SMP dan, di samping ditekankan pada empat unsur pokok tersebut, ditekankan juga pada tiga unsur pokok yang lain, yaitu: mu'amalah, syariah, dan tarikh.

Kedua, kurikulum PAI SD, SMP dan ditinjau dari segi dimensi horizontal belum menampakkan perbedaan karena kurikulum PAI masih bersifat monoton dan hanya berkenaan dengan ilmu-ilmu agama semata. Di dalam kurikulum itu, ilmu pengetahuan dan teknologi belum digabungkan atau dipadukan dalam satuan pembelajaran PAI. Jika ditinjau dari segi dimensi vertikal, artinya dimensi hubungan perbedaan jenjang pendidikan, kurikulum PAI baik di SD, SMP maupun juga belum tampak karena meskipun PAI bersifat berkesinambungan dari SD, SMP dan tetapi baru penjenjangan dan penekanan unsur-unsur pokok kurikulum PAI pada masing-masing jenjang pendidikan saja yang lebih diupayakan, sedangkan segi vertikal, terutama yang berkenaan dengan perbaikan keterpaduan dan penggabungan PAI dengan berbagai disiplin, belum jelas adanya.

Untuk memenuhi segi horisontal dan vertikal tersebut, kurikulum PAI (terutama bahan pengajaran), diupayakan untuk lebih relevan dengan kebutuhan dan tantangan masyarakat yang dipengaruhi oleh maraknya perubahan sosial dan pesatnya perkembangan IPTEK.

Ketiga, kurikulum PAI SD, SLTP dan ditinjau dari segi penekanannya masih bersifat *subject centered curriculum* yaitu lebih mementingkan pemanfaatan isi, sehingga terkesan lebih terarah pada pengajaran keagamaan daripada pendidikan spiritual dan moral. Hal itu kiranya dapat dipahami karena kurikulum PAI tersebut kurang memperhatikan aspek peserta didik dengan segala variasi potensi yang dimilikinya. Dengan kata lain, kategori *leaner centered curriculum* atau kurikulum yang ditekankan pada peserta didik be-

lum mendapatkan porsi yang memadai. Padahal, semestinya kurikulum berkembang bersamaan dengan berlangsungnya aktivitas pendidikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kurikulum SD, SLTP, dan yang berlaku sekarang ini masih bersifat *not-pre-planed* (tidak kunjung selesai).[25]

Dengan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kurikulum PAI SD, SLTP dan ditinjau dari segi komponen pokok lebih mementingkan komponen tertentu dari komponen yang lain. Secara garis besar hal itu dapat dibedakan bahwa: (i) PAI SD ditekankan pada aspek keimanan, ibadah, al-Qur'an, dan akhlak; dan (ii) PAI SLTP dan dititikberatkan pada aspek muamalah, syariah, dan tarikh di samping keempat aspek pada PAI SD di muka.

Segi horisontal dan vertikal belum tergambar secara konkret dalam PAI SD, SLTP dan karena penggabungan dan keterpaduan PAI dengan berbagai disiplin ilmu yang lain belum dan baru saja diupayakan, sedangkan segi penekanan kurikulum lebih dominan pada *subject centered curriculum (pupil centered),* sehingga bagi peserta didik kurang menarik, membosankan, dan kurang efisien.

Untuk menjembatani dan mengupayakan adanya solusi terhadap permasalahan kurikulum PAI tersebut di atas perlu adanya konsep kurikulum PAI yang komprehensif dalam batas-batas yang wajar, artinya baik secara konseptual maupun operasional memenuhi standar ilmiah.

Suatu sistem sudah pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai. Tujuan menjadi pegangan kerja dan arah dari semua proses sistem karena titik akhir produk yang dihasilkan dari kerja adalah tercapainya tujuan. Misalnya, tujuan pembelajaran adalah peserta didik dapat bertingkah laku tertentu sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Adanya tujuan yang hendak dicapai, maka suatu sistem menuntut terlaksananya berbagai fungsi dari masing-masing komponen yang diperlukan untuk menunjang tercapainya tujuan secara maksimal. Dalam konteks pembelajaran, dituntut berfungsinya komponen pengembangan, penelitian, pelaksana pembelajaran, dan sebagainya.

Supaya masing-masing komponen berfungsi dengan baik dalam mencapai tujuan pembelajaran, maka dalam suatu sistem fungsi masing-masing komponen harus dilakukan tenaga yang berkompeten. Misalnya, fungsi pengembangan dilakukan oleh ahli desain pembelajaran, fungsi penelitian dilakukan oleh peneliti pembelajaran, fungsi pelaksana dilakukan oleh guru, instruktur, atau dosen sesuai bidang keahliannya.

Bagian dari subsistem yang melakukan fungsinya untuk menunjang tercapainya tujuan sistem disebut komponen sistem. Dengan demikian, suatu sistem terdiri atas komponen-komponen yang masing-masing komponen memiliki fungsi yang berbeda, tetapi antara komponen yang satu dengan yang lainnya memiliki keterkaitan dan kerja sama untuk mencapai tujuan. Seperti komponen pengembang terkait dengan penelitian dan pelaksana pembelajaran.

Keterpaduan dan kerja sama merupakan ciri sistem, di mana bagian-bagian komponen terorganisasi. Semua komponen terjalin secara padu sebagai suatu sistem yang bekerjasama untuk mencapai hasil yang ditetapkan. Seperti hasil pembelajaran tercapai jika semua komponen pembelajaran bekerjasama secara utuh dan padu. Keutuhan ditunjukkan oleh kelengkapan unsur-unsur komponen yang harus ada dalam memengaruhi keberhasilan pembelajaran. kepaduan ditunjukkan dengan adanya keterkaitan, kesesuaian, dan kerja sama antarkomponen pembelajaran dalam memengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran.

Proses transformasi dalam suatu sistem juga mempunyai misi untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk itu, dalam sistem diperlukan proses yang mengubah masukan (*input*) menjadi hasil (*output*). Proses kerja sistem dapat digambarkan sebagai berikut:

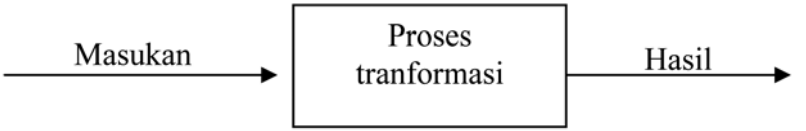

Diagram di atas menampakkan bahwa komponen hasil diperoleh melalui proses transformasi dari masukannya. Namun demikian, komponen hasil tersebut lebih lanjut menjadi masukan bagi proses transformasi berikutnya. Misalnya, lulusan SD diproses dan berproses di SLTP. Lulusan SLTP diproses dan berproses di SLTA dan seterusnya; bahkan lulusan PT juga masih berproses di lingkungan profesi atau dunia yang ditekuninya. Dengan demikian, timbulah suatu rangkaian proses yang secara sederhana dapat dilukiskan sebagai berikut:

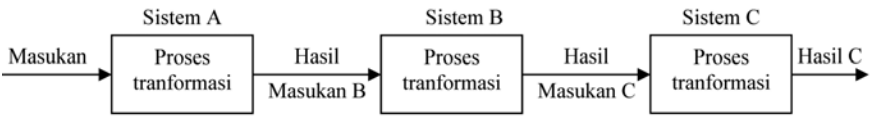

Sesuai dengan gambar di atas dapat dipahami bahwa suatu sistem memiliki subsistem-subsistem dan masing-masing subsistem merupakan sistem juga, sehingga dalam suatu sistem tidak hanya terjadi sebuah proses, tetapi terjadi serangkaian proses yang memiliki keterkaitan antarsistem. Selanjutnya, informasi hasil kerja suatu sistem dapat dijadikan sebagai masukan proses transformasi sistem yang lain pula. Serangkaian proses tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.

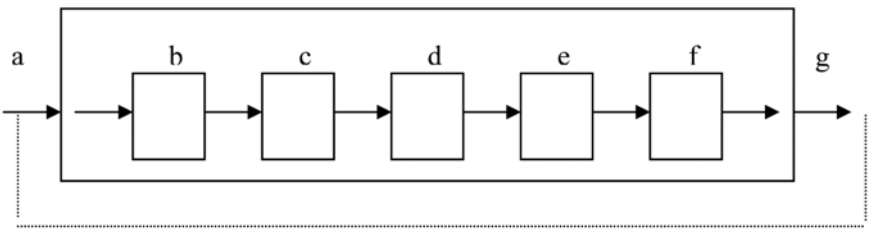

Bagan Keterkaitan Proses Sistem

Umpan balik sebagai ciri sistem dapat digunakan untuk melihat kelemahan atau kekurangsesuaian dalam melakukan kerja sama, keterkaitan, dan keterpaduan antarsubsistem. Oleh karena itu, diperlukan umpan balik selama proses dan setelah pelaksanaan. Informasi ini diperlukan untuk dijadikan dasar dalam menetapkan

pertimbangan perubahan, perbaikan, revisi, penyempurnaan atau penyesuaian sesuai dengan kebutuhan dalam mencapai tujuan. Upaya ini dilakukan agar semua komponen dapat berjalan dalam proses pelaksanaan secara maksimal sehingga dapat dicapai hasil yang maksimal. Dalam analisis sistem, fungsi umpan balik tersebut secara sistematis dapat digambarkan sebagai berikut.

Antara sistem satu dengan sistem yang lain dalam satu kawasan atau lingkungan memiliki hubungan yang imajiner. Namun dalam rangka pencapaian tujuan tertentu, masing-masing sistem perlu diberikan batasan sesuai kawasannya. Batasan ini perlu dilakukan atas dasar ciri-ciri suatu sistem. Misalnya, pendidikan sebagai suatu sistem dapat dipisahkan kawasannya dengan pendidikan agama, Pendidikan Agama Islam, teknologi pendidikan agama Islam, teknologi pembelajaran, teknologi pembelajaran agama, manajemen pendidikan agama, dan sebagainya.

Dengan demikian, batasan suatu sistem juga merupakan sistem yang lebih besar, yang disebut dengan suprasistem, sedangkan sistem yang berdiri sendiri sebagai bagian dari suprasistem disebut subsistem. Ilustrasi kondisi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.

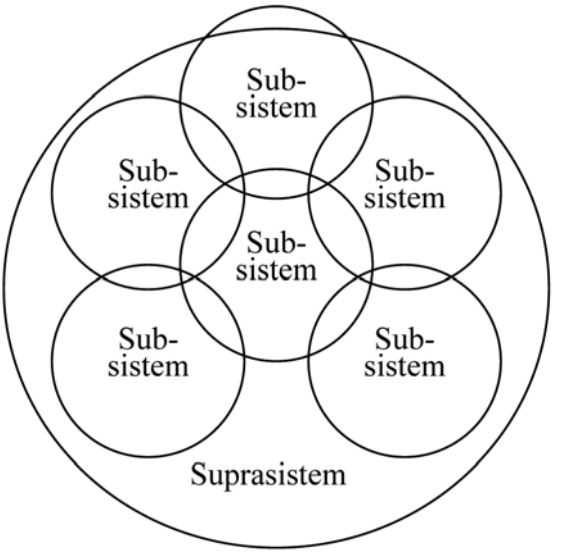

2. Manfaat Sistem

Pengetahuan tentang sistem sangat bermanfaat bagi kegiatan penyusunan perencanaan pembelajaran. Ely[26] mengemukakan bahwa perencanaan merupakan suatu proses dan cara berpikir yang dapat membantu menciptakan hasil yang diharapkan.

Kegiatan perencanaan pembelajaran dilakukan melalui beberapa tahap yang dimulai dari memilih suatu cara terbaik berdasarkan pertimbangan dan penilaian dengan memperhatikan faktor tujuan, karakteristik pelajar, dan pemanfaatan sumber-sumber belajar guna mencapai hasil yang maksimal. Dengan pendekatan sistem, penyusunan perencanaan pembelajaran dapat dilakukan dengan cara menganalisis lebih dulu semua komponen yang memengaruhi pembelajaran dan keterkaitannya yang selanjutnya dijadikan pijakan untuk menetapkan perencanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan, sehingga pembelajaran yang dilakukan atau hasil yang ingin dicapai dapat direncanakan secara baik, bukan berdasarkan spekulasi semata atau coba-coba.

Dengan demikian, manfaat yang diperoleh dari penyusunan perencanaan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan sistem antara lain bahwa manusia memiliki kelemahan-kelemahan yang kadang tidak disadari. Oleh karena itu, diperlukan (i) penyusunan perencanaan pembelajaran yang sistematis sebagai alat untuk menganalisis, mengidentifikasi, dan memecahkan masalah sesuai dengan yang dibutuhkan, dan (ii) perencanaan yang sistematis mempunyai daya ramal dan daya kontrol yang baik sehingga hasil yang diinginkan dapat dicapai secara optimal.

3. Pendekatan Sistem Pengembangan Pembelajaran PAI

Pendekatan sistem adalah suatu proses kegiatan mengidentifikasi kebutuhan, memilih problem, mengidentifikasi syarat-syarat pemecahan problem, memilih alternatif pemecahan problem yang paling tepat, memilih, menetapkan, dan menggunakan metode dan alat yang tepat, mengevaluasi hasil dan merevisi sebagian atau seluruh sistem yang dilaksanakan sehingga dapat memenuhi kebutuhan dalam memecahkan masalah secara lebih baik.

Dengan demikian, penggunaan pendekatan sistem dapat mengetahui seluruh variabel yang memengaruhi belajar serta keterkaitan antarvariabel tersebut sehingga dapat dijadikan pijakan dalam memilih, menetapkan, dan mengembangkan pembelajaran yang terbaik sesuai kondisi yang ada.

Pendidikan agama Islam sebagai suatu sistem, artinya tidak berhenti dan terbatas pada pengertian PAI sebagai mata pelajaran yang konotasinya pada pengajaran keagamaan, melainkan PAI harus ditekankan pula pada pendidikan spiritual dan moral, di samping pendidikan keagamaan (ilmu-ilmu agama)[27].

Proses belajar-mengajar PAI sebagai suatu sistem, tampak jelas bila dikaitkan dengan karakteristik Islam. Menurut Yusuf al-Qardhawi[28], untuk menanamkan nilai-nilai keimanan dalam pendidikan dapat melalui beberapa cara yang berkenaan dengan: (i) ibadah wajib dan sunah, (ii) adab (etika) sopan santun, (iii) tarbiyah dan takwin (pembentukan diri), (iv) penerangan, pengarahan, dan pencerdasan kehidupan umat, dan (v) tasyri' (perundang-undangan).

Berkaitan dengan PAI sebagai suatu sistem, kiranya perlu diperhatikan pendapat Arnold J. Toynbee[29] yang mengatakan bahwa sekarang yang sangat kita perlukan adalah perbaikan spiritual dalam diri kita sendiri dan dalam hubungan-hubungan kita dengan sesama umat manusia, namun ini merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat terpenuhi oleh ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Bahkan Toynbee lebih jauh mengatakan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menyebabkan kekosongan agama karena agama yang semula diterima dan diimani menjadi tidak dipercayai lagi. Ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat mengisi kekosongan itu, kecuali dengan agama.

Dengan pemaparan pendapat tersebut posisi PAI sebagai suatu sistem yang bersifat integratif dengan IPTEK tidak dapat dipungkiri dan dielakkan keberadaannya. Sebagai suatu sistem, PAI tidak dapat tercerabut dari masyarakat, lingkungan, ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan kesenian. Dengan kata lain, pelaksanaan PAI hen-

daknya tetap terkait dengan IPTEK. Lebih lanjut, dapat dikatakan bahwa agama pada hakikatnya merupakan hak manusiawi yang paling asasi dan manusiawi. Hal itu beralasan karena ternyata IPTEK tidak dapat memenuhi kebutuhan spiritual manusia, tetapi justru satu-satunya yang dapat mengisi dan memenuhi kebutuhan spiritual manusia itu adalah agama. Dalam hal ini, untuk menanamkan nilai agama bagi setiap manusia di antaranya dengan melalui proses pendidikan agama.

Menurut Yusuf al-Qardlawi[30] ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan bagian salah satu karakteristik Islam yang berfungsi sebaga cara/sarana memberikan penerangan, pengarahan dalam mencerdaskan kehidupan umat di samping bermanfaat dalam kehidupan umat. Oleh karena itu, PAI merupakan suatu sistem integral mutlak diperlukan dan dilaksanakan dalam mewujudkan tujuan bagi setiap jenis, jenjang, dan jalur pendidikan. Di samping itu, untuk mewujudkan bahwa proses belajar mengajar PAI merupakan sebuah sistem, ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh sistem PAI tersebut, yaitu: (i) PAI sebagai bagian integral dari pendidikan pada umumnya[31]; (ii) PAI merupakan tanggung jawab semua guru, pimpinan sekolah dan seluruh pegawai/karyawan, sehingga PAI bukan semata-mata tanggung jawab guru agama Islam; (iii) wawasan keilmuan tidak lagi dipandang secara dikotomis dalam pembagian ilmu-ilmu "agama" dan ilmu-ilmu "umum", meskipun dapat dibedakan namun bukan berarti kedua ilmu tersebut harus dipisahkan[32]; (iv) wawasan PAI terfokuskan pada wawasan keimanan, keislaman, dan keikhlasan secara integratif[33].

Sebagai ilustrasi aplikasi pendekatan sistem dapat dikemukakan salah satu model perencanaan pembelajaran sistematis Kaufman[34] sebagai contoh berikut.

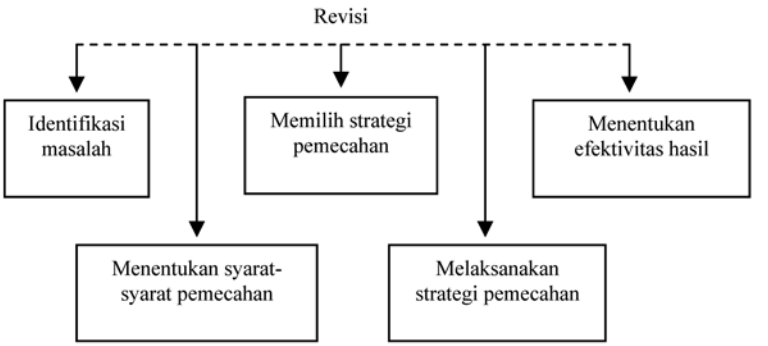

Perencanaan pembelajaran yang sistematis pada hakikatnya sama dengan proses pemecahan masalah secara umum (*a general problem solving process)*. Untuk dapat membuat perencanaan pembelajaran yang sistematis diperlukan pola pemikiran sistematis, yang biasanya dituangkan dalam bentuk model.

Langkah-langkah kerja model ini secara sistematis dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Mengidentifikasi masalah berdasarkan kebutuhan. Contoh, idealnya pembelajaran Pendidikan Agama Islam perlu ditunjang penciptaan suasana religius yang memungkinkan si pelajar terbiasa mengamalkan ajaran dan nilai agama Islam yang diketahui dan diyakininya, baik di sekolah maupun di rumah. Akan tetapi, kondisi riil di sekolah dan di rumah tidak menunjang, maka timbul masalah pembelajaran pendidikan agama Islam yang tidak berhasil karena tidak ditunjang oleh kondisi yang memungkinkan pelajar terbiasa mengamalkan ajaran agama yang diketahui dan diyakininya. Akan tetapi kondisi ideal tersebut justru berkebalikan dengan kenyataan yang ada, karena pada prinsipnya peserta mempelajari PAI sebagai cara beragama dengan benar, artinya agama dipelajari dan diamalkan sesuai dengan ajaran-ajaran yang dipelajarinya.
b. Menentukan syarat-syarat dan alternatif pemecahannya. Untuk memecahkan suatu masalah perlu dilakukan identifikasi prasyarat, yaitu faktor-faktor yang dapat mendukung dan faktor-faktor yang menjadi penghambat pemecahan masalah. Misal-

nya, faktor ketersediaan dana, fasilitas, personal, dan waktu hingga dapat dipilih alternatif pemecahan masalah terbaik sesuai kondisi yang ada.

c. Memilih strategi pemecahan berdasarkan alternatif pemecahan terpilih yang dianggap relevan dan paling efektif untuk menetapkan metode atau strategi pelaksanaannya.
d. Melaksanakan strategi yang dipilih, dari alternatif pemecahan terpilih dan metode yang ditetapkan, selanjutnya ditetapkan pelaksanaannya. Misalnya, alternatif terpilih mengadakan pelatihan, perlu ditetapkan pelaksanaannya, berapa hari pelaksanaannya, berapa dana dan waktu yang dibutuhkan.
e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penggunaan metode terpilih dapat menyelesaikan masalah. Oleh karena evaluasi perlu dilakukan secara terus menerus mulai dari persiapan, proses pelaksanaan, hingga hasil yang dicapai. Hasil pendidikan dan pembelajaran ada yang dapat diketahui secara langsung ada pula hasil pengiring yang tidak dapat segera diketahui. Hasil langsung yang dapat diukur menyangkut keterampilan kognitif dan psikomotor tertentu. Sedangkan hasil pengiring yang tidak segera dapat diketahui, seperti sikap, pola pikir, kebiasaan, dan sebagainya. Oleh karena itu, evaluasi merupakan kegiatan yang berproses.
f. Mengadakan revisi pada setiap langkah bila mentari bersinar lagi diperlukan. Pembelajaran merupakan proses yang membutuhkan waktu lama. Oleh karena itu, dalam setiap bagian kegiatan bila mentari bersinar lagi perlu dilakukan revisi guna mencapai hasil yang optimal.

F. Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang Berorientasi pada Pendidikan Nilai Afektif

Pembelajaran pendidikan agama Islam yang selama ini berlangsung agaknya terasa kurang terkait atau kurang *concern* terhadap persoalan bagaimana mengubah pengetahuan agama yang bersifat

kognitif menjadi "makna" dan "nilai" yang perlu diinternalisasikan dalam diri peserta didik, untuk selanjutnya menjadi sumber motivasi bagi peserta didik untuk bergerak, berbuat dan berperilaku secara konkret-agamis dalam kehidupan praktis sehari-hari.

Upaya pengembangan pembelajaran Pendidikan Agam Islam yang berorientasi pada pendidikan nilai afektif pada dasarnya perlu mempertimbangkan tiga komponen faktor-faktor yang memengaruhi pembelajaran Pendidikan Agama Islam sebagaimana uraian tersebut di atas. Karakteristik peserta didik, terutama dalam hal perkembangan nilai moral, yang sekaligus dapat memengaruhi pilihan strategi (pendekatan, metode, dan teknik) yang dikembangkannya, sebagai berikut.

1. Tahap-Tahap Perkembangan Nilai Moral dan Karakteristiknya

J. Piaget dan L. Kohlberg[35] telah membagi tahap perkembangan nilai moral seseorang ke dalam empat tahap beserta ciri-cirinya, dan perkembangan moral itu berhubungan dengan perkembangan kognitif seseorang, yaitu berikut ini.

Tahap pertama: usia 0 – 3 tahun (*pra-moral*). Ciri fase ini anak tidak mempunyai bekal pengertian tentang baik dan buruk; tingkah lakunya dikuasai oleh dorongan-dorongan naluriah saja; tidak ada aturan yang mengendalikan aktivitasnya; aktivitas motoriknya tidak dikendalikan oleh tujuan yang berakal.

Tahap kedua: usia 3–6 tahun (*tahap egosentris*). Pada fase ini anak hanya mempunyai pikiran yang samar-samar dan umum tentang aturan-aturan; ia sering mengubah aturan untuk memuaskan kebutuhan pribadi dan gagasannya yang timbul mendadak; ia bereaksi terhadap lingkungannya secara instinktif dengan hanya sedikit kesadaran moral.

Tahap ketiga: usia 7–12 tahun (*tahap heteronom*). Pada fase ini ditandai dengan suatu paksaan. Di bawah tekanan orang dewasa atau orang berkuasa, anak menggunakan sedikit kontrol moral dan logika terhadap perilakunya; masalah moral dilihat dalam arti hitam

putih, boleh tidak boleh, dengan otoritas dari luar (orang tua, guru, dan anak yang lebih besar) sebagai faktor utama dalam menentukan apa yang baik dan yang jahat. Oleh karena itu, pemahaman tentang moralitas yang sebenarnya masih sangat terbatas.

Tahap keempat: usia 12 tahun dan seterusnya (*tahap otonom*). Pada fase ini seseorang mulai mengerti nilai-nilai dan mulai memakainya dengan caranya sendiri. Moralitas ditandai dengan kooperatif, bukan paksaan, interaksi dengan teman sebaya, diskusi, kritik diri, rasa persamaan, dan menghormati orang lain merupakan faktor utama dalam tahap ini. Aturan dan pikiran dipertanyakan, diuji dan dicek kebenarannya. Aturan yang dianggap dapat diterima secara moral diinternalisasikan dan menjadi bagian khas dari kepribadiannya. Pada masa remaja, seseorang menganggap aturan-aturan sebagai persetujuan teman-teman sebaya yang saling menguntungkan. Ia memberontak terhadap moralitas orang tua, tetapi akhirnya mereka kembali pada moralitas yang sebelumnya mereka tolak mati-matian sewaktu masih remaja.

Selanjutnya, L. Kohlberg[36] mengembangkan konsep tingkat perkembangan moral dari J. Piaget tersebut menjadi 6 tingkatan, yaitu: *pertama, preconventinal level* (tingkat pra-konvensional), yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu: (i) orientasi pada kepatuhan dan hukuman, yakni anak patuh agar tidak dihukum; dan (ii) orientasi *relativistic hedonism*, yakni anak melakukan sesuatu sejauh menyenangkan, atau perbuatan baik itu dilakukan bila ada imbalan. *Kedua, conventional level* (tingkat konvensional), yang dibagi menjadi dua bagian: (iii) orientasi anak manis, yakni perbuatan baik itu kalau diterima oleh kelompok/masyarakat, atau agar tidak disalahkan oleh kelompok/masyarakat; dan (iv) orientasi hukum dan ketertiban (mempertahankan norma sosial dan otoritas), yakni perbuatan baik adalah yang diterima oleh masyarakat dan turut mempertahankan norma-norma yang ada di dalamnya, dan menghormati otoritas (misalnya, pejabat dan sebagainya). *Ketiga, post-conventional, automous, or principled level* (tingkat pasca-konvensional, otonomi, atau berprinsip), yang dibagi menjadi dua bagian: (v) orientasi terhadap

perjanjian diri dengan lingkungan. Dalam arti anak berbuat baik karena lingkungan juga baik terhadapnya. Anak memperlihatkan kewajibannya agar sesuai dengan tuntutan sosialnya, karena lingkungan memberi perlindungan terhadapnya. Jika melanggar kewajiban merasa melanggar perjanjian dengan lingkungannya. Pada tingkat ini anak menyadari akan hak dan kewajibannya; dan (vi) orientasi prinsip etika universal, yakni perilaku yang baik adalah sesuatu yang cocok dengan hati nurani, yang sesuai dengan prinsip-prinsip etika yang dipilih sendiri dengan berpedoman pada pemahaman moralitas yang logis, universal, dan konsisten.

Untuk memahami lebih lanjut mengenai tingkat perkembangan moral tersebut, maka dapat diberikan contoh akhlak terhadap sesama manusia, tentang "memberi bantuan orang yang tertimpa bencana alam" sebagai berikut: *Tingkat pertama:* Jika saya ikut membantu orang yang tertimpa bencana alam maka saya dipuji oleh bapak/ibu guru. (Saya harus menaati guru, kalau tidak maka dihukum). *Tingkat kedua,* Jika saya memberi bantuan orang yang tertimpa bencana alam, nanti saya juga dibantu bila terkena bencana alam. (Saya berbuat begitu agar orang lain berbuat begitu pada saya, atau jika saya berbuat begitu, maka orang lain berbuat begitu pada saya). *Tingkat ketiga:* Jika saya memberi bantuan kepada orang yang tertimpa bencana alam, nanti saya dikatakan sebagai orang yang dermawan. Atau, jika saya membantu/beramal maka saya disukai oleh orang-orang. (Saya mungkin harus berbuat begitu, sebab semua orang mengharapkan berbuat begitu). *Tingkat keempat,* Saya memberi sumbangan kepada orang yang tertimpa bencana alam, sebab menurut hukum atau aturan sosial bahwa saya berkewajiban untuk saling tolong-menolong. (Saya harus begitu sebab saya berkewajiban untuk menaati peraturan yang berlaku demi ketertiban dan kesejahteraan hidup bersama). *Tingkat kelima:* Beramal atau bersedekah adalah suatu kewajiban sosial karena bisa menyenangkan dan membahagiakan orang lain, walaupun bantuan atau sumbangan itu sedikit sesuai dengan kemampuan. Bila saya tidak punya uang maka saya harus mendorong dan menggerakkan orang lain untuk

beramal/bersedekah. *Tingkat keenam:* Saya membantu orang yang terkena bencana alam karena saya sadar bahwa seandainya saya tertimpa bencana alam seperti itu, bagaimana rasa penderitaan saya. Saya suka membantu atau memberi sumbangan kepada orang karena bisa mendekatkan diri kepada Allah, dekat dengan sesama manusia, dekat dengan surga, dan jauh dari neraka.

2. Strategi Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang berorientasi pada Nilai (Afektif)

a. S*trategi tradisional*, yaitu dengan jalan memberikan nasihat atau indoktrinasi. Dengan kata lain, strategi ini ditempuh dengan jalan memberitahukan secara langsung nilai-nilai mana yang baik dan yang kurang baik. Dengan strategi tersebut guru memiliki peran yang menentukan, karena kebaikan/kebenaran datang dari atas, dan siswa tinggal menerima kebaikan/kebenaran itu tanpa harus mempersoalkan hakikatnya. Penerapan strategi tersebut menjadikan peserta didik hanya mengetahui atau menghafal jenis-jenis nilai tertentu yang baik dan kurang baik, dan belum tentu melaksanakannya. Oleh karena itu, tekanan dari strategi ini lebih bersifat kognitif, sementara segi afektifnya kurang dikembangkan. Di sinilah antara lain letak kelemahan strategi tradisional.

   Kelemahan lainnya terletak pada aspek pengertian peserta didik terhadap nilai itu sendiri yang bersifat paksaan, dan paksaan lebih efektif bila disertai dengan hukuman atau penggunaan hukuman/ganjaran yang bersifat material. Hal ini jelas kurang menguntungkan untuk pembelajaran nilai yang seharusnya mengembangkan kesadaran internal pada diri peserta didik.

b. *Strategi bebas* merupakan kebalikan dari strategi tradisional, dalam arti guru/pendidik tidak memberitahukan kepada peserta didik mengenai nilai-nilai yang baik dan buruk, tetapi peserta didik justru diberi kebebasan sepenuhnya untuk memilih dan menentukan nilai mana yang diambilnya karena nilai yang baik bagi orang lain belum tentu baik pula bagi peserta

didik itu sendiri[37]. Dengan demikian, peserta didik memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk memilih dan menentukan nilai mana yang baik dan tidak baik, dan peran peserta didik dan guru sama-sama terlibat secara aktif.

Strategi tersebut juga mempunyai kelemahan, antara lain peserta didik belum tentu mampu memilih nilai-nilai mana yang baik dan kurang baik karena masih memerlukan bimbingan dari pendidik untuk memilih nilai yang terbaik baginya. Oleh karena itu, strategi ini lebih cocok digunakan bagi orang-orang dewasa dan pada objek-objek nilai kemanusiaan.

c. S*trategi reflektif* adalah dengan jalan mondar-mandir antara menggunakan pendekatan teoretis ke pendekatan empiris, atau mondar-mandir antara pendekatan deduktif dan induktif[38].

   Dalam pengguanaan strategi tersebut dituntut adanya konsistensi dalam penerapan kriteria untuk mengadakan analisis terhadap kasus-kasus empiris yang kemudian dikembalikan pada konsep teoretisnya, dan juga diperlukan konsistensi penggunaan aksioma-aksioma sebagai dasar deduksi untuk menjabarkan konsep teoretis ke dalam terapan pada kasus-kasus yang lebih khusus dan operasional.

   Strategi tersebut lebih relevan dengan tuntutan perkembangan berpikir peserta didik dan tujuan pembelajaran nilai untuk menumbuhkembangkan kesadaran rasional dan keluasan wawasan terhadap nilai tersebut[39].

d. S*trategi transinternal* merupakan cara untuk membelajarkan nilai dengan jalan melakukan transformasi nilai, dilanjutkan dengan transaksi dan transinternalisasi. Dalam hal ini, guru dan peserta didik sama-sama terlibat dalam proses komunikasi aktif, yang tidak hanya melibatkan komunikasi verbal dan fisik, tetapi juga melibatkan komunikasi batin (kepribadian) antara keduanya.

Dengan strategi tersebut, guru berperan sebagai penyaji informasi, pemberi contoh/teladan, serta sumber nilai yang melekat dalam pribadinya. Sedangkan peserta didik menerima informasi dan

merespons stimulus guru secara fisik, serta memindahkan dan mempolakan pribadinya untuk menerima nilai-nilai kebenaran sesuai dengan kepribadian guru tersebut. Strategi inilah yang sesuai untuk pembelajaran nilai ketuhanan dan kemanusiaan[40]

Berbagai strategi tersebut perlu dijabarkan ke dalam beberapa pendekatan tertentu dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang pada intinya terdapat enam pendekatan.

1) Pendekatan Pembelajaran Pendidikan Nilai

(a) pendekatan pengalaman, yakni memberikan pengalaman keagamaan kepada peserta didik dalam rangka penanaman nilai-nilai keagamaan;

(b) pendekatan pembiasaan, yakni memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk senantiasa mengamalkan ajaran agamanya dan/atau akhlakul karimah;

(c) pendekatan emosional, yakni usaha untuk menggugah perasaan dan emosi peserta didik dalam meyakini, memahami, dan menghayati akidah Islam serta memberi motivasi agar peserta didik ikhlas mengamalkan ajaran agamanya, khususnya yang berkaitan dengan akhlakul karimah;

(d) pendekatan rasional, yakni usaha untuk memberikan peranan kepada rasio (akal) dalam memahami dan menerima kebenaran ajaran agama;

(e) pendekatan fungsional, yakni usaha menyajikan ajaran agama Islam dengan menekankan pada segi kemanfaatannya bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tingkat perkembangannya; dan

(f) pendekatan keteladanan, yakni menyuguhkan keteladanan, baik antara personal sekolah, perilaku pendidik dan tenaga kependidikan lain yang mencerminkan akhlak terpuji, maupun yang tidak langsung melalui suguhan ilustrasi berupa kisah-kisah keteladanan.

2) Metode Pembelajaran Pendidikan Nilai (Afektif)

Pembelajaran pendidikan nilai (afektif) dengan berbagai pendekatan tersebut memerlukan beberapa metode yang dipandang cocok atau sesuai, di antaranya metode-metode pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang berorientasi pada nilai, yaitu (i) metode dogmatis; (ii) metode deduktif; (iii) metode induktif; dan (iv) metode reflektif[41].

(a) Metode dogmatik adalah metode untuk mengajarkan nilai kepada peserta didik dengan jalan menyajikan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran yang harus diterima apa adanya tanpa mempersoalkan hakikat kebaikan dan kebenaran itu sendiri.

Metode tersebut dianggap kurang mampu mengembangkan kesadaran rasional peserta didik dalam memahami dan menghayati nilai-nilai kebenaran. Bila peserta didik menghayati dan menerima suatu kebenaran, maka penerimaannya cenderung bersifat dangkal dan terpaksa karena takut pada otoritas guru atau atasannya.

(b) Metode deduktif adalah cara menyajikan nilai-nilai kebenaran (keutuhan dan kemanusiaan) dengan jalan menguraikan konsep tentang kebenaran itu agar dipahami oleh peserta didik. Metode ini bertolak dari kebenaran sebagai teori atau konsep yang memiliki nilai-nilai baik, selanjutnya ditarik beberapa contoh kasus terapan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, atau ditarik ke dalam nilai-nilai lain yang lebih khusus atau sempit ruang lingkupnya.

Metode tersebut mempunyai kelebihan, terutama bagi peserta didik yang masih dalam taraf pemula dalam mempelajari nilai, karena mereka terlebih dahulu akan diperkenalkan beberapa konsep atau teori tentang nilai secara umum, kemudian ditarik rincian-rincian yang lebih khusus dan mendetail, serta dikaitkan dengan kasus-kasus yang terjadi di masyarakat.

(c) Metode induktif adalah sebagai kebalikan dari metode deduktif, yakni dalam membelajarkan nilai dimulai dengan mengenalkan kasus-kasus dalam kehidupan sehari-hari, kemudian ditarik maknanya secara hakiki tentang nilai-nilai kebenaran yang berada dalam kehidupan tersebut. Metode tersebut cocok diterapkan untuk peserta didik yang telah memiliki kemampuan berpikir abstrak sehingga mampu membuat kesimpulan dari gejala-gejala konkret untuk diabstrakkan. Sedangkan kelemahannya, kadang-kadang dalam mengembalikan antarberbagai kasus yang sama, diberikan nilai yang berbeda-beda sehingga membingungkan peserta didik. Oleh karena itu, dalam penerapan metode ini perlu menjaga konsistensi penggunaan kriteria pada kasus yang serupa.

(d) Metode reflektif merupakan gabungan dari penggunaan metode deduktif dan induktif, yakni membelajarkan nilai dengan jalan mondar-mandir antara memberikan konsep secara umum tentang nilai-nilai kebenaran, kemudian melihatnya dalam kasus-kasus kehidupan sehari-hari, atau dari melihat kasus-kasus sehari-hari dikembalikan kepada konsep teoritisnya yang umum.

Penerapan metode tersebut dapat mengatasi kekurangan metode deduktif yang kadangkala kurang bersifat empiris, dan sekaligus mengatasi kekurangan metode induktif yang kadang kala kurang konsisten dalam menerapkan kriteria untuk masing-masing kasus yang serupa.

Dalam penggunaan metode tersebut guru harus menguasai teori-teori atau konsep secara umum tentang nilai-nilai kebenaran dan sekaligus dituntut untuk memiliki daya penalaran yang tinggi untuk mengembalikan setiap kasus dalam tataran konsep nilai itu[42].

Berbagai metode tersebut selanjutnya perlu dikembangkan secara rinci ke dalam teknik atau prosedur pembelajarannya. Teknik pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang berorientasi pada nilai (afek) ada bermacam-macam, diantaranya ialah (i) teknik indok-

trinasi; (ii) teknik moral reasoning; (iii) teknik meramalkan konsekuensi; (iv) teknik klarifikasi dan (v) teknik internalisasi[43].

3). Teknik Pembelajaran Pendidikan Nilai (afektif)

(a) Teknik indoktrinasi: prosedur teknik ini dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu (i) tahap *brainwashing*, yakni pendidik memulai pendidikan nilai dengan jalan merusak tata nilai yang sudah mapan dalam pribadi siswa untuk dikacaukan, sehingga mereka menjadi tidak mempunyai pendirian lagi. Beberapa metode dapat digunakan untuk mengacaukan pikiran siswa, misalnya dengan tanya jawab, wawancara mendalam dengan teknik dialektik, dan sebagainya. Pada saat pikirannya sudah kosong dan kesadaran rasionalnya sudah tidak lagi mampu mengontrol dirinya, serta pendiriannya sudah hilang maka dilanjutkan dengan tahap kedua; (ii) tahap menanamkan fanatisme, yakni pendidik berkewajiban menanamkan ide-ide baru yang dianggap benar sehingga nilai-nilai yang ditanamkannya masuk kepada anak tanpa melalui pertimbangan rasional yang mapan. Dalam menanamkan fanatisme ini lebih banyak digunakan pendekatan emosional daripada pendekatan rasional. Apabila siswa telah mau menerima nilai-nilai itu secara emosional, barulah ditanamkan doktrin yang sesungguhnya; (iii) tahap penanaman doktrin, pada tahap ini pendidik dapat menggunakan pendekatan emosional, keteladanan. Pada saat penanaman doktrin ini hanya dikenal adanya satu nilai kebenaran yang disajikan dan tidak ada alternatif lain. Semua siswa harus menerima kebenaran itu tanpa harus mempertanyakan hakikat kebenaran itu.

(b) Teknik moral reasoning: langkah-langkah teknik ini dilakukan dengan jalan: (i) penyajian dilema moral, pada tahap ini siswa dihadapkan dengan problematik nilai yang bersifat kontradiktif, dari yang bersifat sederhana sampai pada yang kompleks. Cara penyajiannya dapat melalui obser-

vasi, membaca koran atau majalah, mendengarkan sandiwara, melihat film dan sebagainya; (ii) pembagian kelompok diskusi setelah disajikan problematick dilema moral tersebut, kemudian siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil untuk mendiskusikan hasil pengamatan terhadap dilema moral tersebut; (iii) hasil diskusi kelompok selanjutnya dibawa dalam diskusi kelas dengan tujuan untuk mengadakan klarifikasi nilai, membuat alternatif dan konsekuensinya; (iv) setelah siswa mendiskusikan secara intensif dan melakukan seleksi nilai sesuai dengan alternatif yang diajukan, selanjutnya siswa mengorganisasi nilai-nilai terpilih tersebut dalam dirinya. Hal ini bisa diketahui lewat pendapat siswa, misalnya melalui karangan-karangannya yang disusun setelah diskusi, atau tindakan *follow up* dari kegiatan diskusi itu.

(c) *Teknik meramalkan konsekuensi:* teknik ini sebenarnya merupakan penerapan dari pendekatan rasional dalam mengajarkan nilai. Dalam arti, mengandalkan kemampuan berpikir ke depan bagi siswa untuk membuat proyeksi tentang hal-hal yang terjadi dari penerapan suatu nilai tertentu. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut: *tahap pertama,* siswa diberikan suatu kasus melalui cerita, membaca majalah, melihat film atau melihat kejadian konkret di lapangan; *tahap kedua,* siswa diberi beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan nilai-nilai yang ia lihat, ketahui dan ia rasakan. Pertanyaan itu adakalanya bersifat memperdalam wawasan tentang nilai yang dilihat, alas an dan kemungkinan yang terjadi dari nilai-nilai tersebut, atau menghubungkan kejadian itu dengan kejadian-kejadian lain yang ada kaitannya dengan kasus tersebut; *tahap ketiga,* upaya membandingkan nilai-nilai yang terdapat dalam kasus itu dengan nilai lain yang bersifat kontradiktif; *tahap keempat,* adalah kemampuan meramalkan konsekuensi yang akan terjadi dari pemilihan dan penerapan suatu tata nilai tertentu.

(d) *Teknik klarifikasi:* teknik ini merupakan salah satu cara untuk membantu anak dalam menentukan nilai-nilai yang akan dipilihnya. Dalam teknik ini dapat ditempuh lewat tiga tahap, yaitu (i) tahap pemberian contoh: pada tahap ini guru memperkenalkan kepada siswa nilai-nilai yang baik dan memberikan contoh penerapannya. Hal ini bisa ditempuh dengan jalan observasi, melibatkan siswa dalam kegiatan nyata, pemberian contoh secara langsung dari guru kepada siswa, dan sebagainya; (ii) tahap mengenal kelebihan dan kekurangan nilai yang telah diketahui oleh siswa lewat contoh-contoh tersebut di atas. Hal ini bisa ditempuh melalui diskusi atau tanya jawab, guna melihat kelebihan dan kekurangan nilai tersebut. Dari kegiatan ini akhirnya siswa dapat memilih nilai-nilai yang ia setujui dan yang dianggap paling baik dan benar; (iii) tahap mengorganisasikan tata nilai pada diri siswa. Setelah pemilihan nilai ditentukan maka siswa dapat mengorganisasikan sistem nilai tersebut dalam dirinya dan menjadikan nilai itu sebagai bagian dari pribadinya.

(e) *Teknik internalisasi:* kalau teknik-teknik di atas hanya terbatas pada pemilihan nilai dengan disertai nilai wawasan yang cukup luas dan mendalam maka dalam teknik internalisasi ini sasarannya sampai pada tahap pemilikan nilai yang menyatu dalam kepribadian siswa, atau sampai pada taraf karakterisasi atau mewatak. Tahap-tahap dari teknik internalisasi ini adalah: (i) tahap transformasi nilai: pada tahap ini guru sekadar menginformasikan nilai-nilai yang baik dan yang kurang baik kepada siswa, yang semata-mata merupakan komunikasi verbal; (ii) tahap transaksi nilai, yakni suatu tahap pendidikan nilai dengan jalan melakukan komunikasi dua arah, atau interaksi antara siswa dan guru bersifat interaksi timbal balik. Kalau pada tahap transformasi, komunikasi masih dalam bentuk satu arah, yakni guru yang aktif. akan tetapi, dalam transaksi ini guru dan

siswa sama-sama memiliki sifat yang aktif. Tekanan dari komunikasi ini masih menampilkan sosok fisiknya daripada mentalnya. Dalam tahap ini penampilan guru di hadapan siswa bukan lagi sosok fisiknya melainkan sikap mentalnya (kepribadiannya). Demikian juga siswa merespons kepada guru bukan hanya gerakan/penampilan fisiknya, melainkan sikap mental dan kepribadiannya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dalam transinternalisasi ini adalah komunikasi dua kepribadian yang masing-masing terlibat secara aktif.

Proses transinternalisasi itu mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks, yaitu mulai dari: (i) menyimak (*receiving*), yakni kegiatan siswa untuk bersedia menerima stimulus yang berupa nilai-nilai baru yang dikembangkan dalam sikap afektifnya; (ii) menanggapi (*responding*), yakni kesediaan siswa untuk merespons nilai-nilai yang ia terima dan sampai ke tahap memiliki kepuasan untuk merespons nilai tersebut; (iii) memberi nilai (*valuing*), yakni sebagai kelanjutan dari aktivitas merespons nilai menjadi siswa mampu memberikan makna baru terhadap nilai-nilai yang muncul dengan kriteria nilai-nilai yang diyakini kebenarannya; 4) mengorganisasi nilai (*organization of value*), yakni aktivitas siswa untuk mengatur berlakunya sistem nilai yang ia yakini sebagai kebenaran dalam laku kepribadiannya sendiri sehingga ia memiliki satu sistem nilai yang berbeda dengan orang lain; dan (v) karakteristik nilai (*characterization by a value or value complex*), yakni dengan membiasakan nilai-nilai yang benar yang diyakini, dan yang telah diorganisir dalam laku pribadinya sehingga nilai tersebut sudah menjadi watak (kepribadiannya), yang tidak dapat dipisahkan lagi dari kehidupannya. Nilai yang sudah mempribadi inilah yang dalam islam disebut dengan kepercayaan/keimanan yang istiqomah, yang sulit tergoyahkan oleh situasi apa pun.

Ilustrasi pembelajaran PAI berorientasi pada nilai atau afektif dapat dicontohkan sebagai berikut[44].

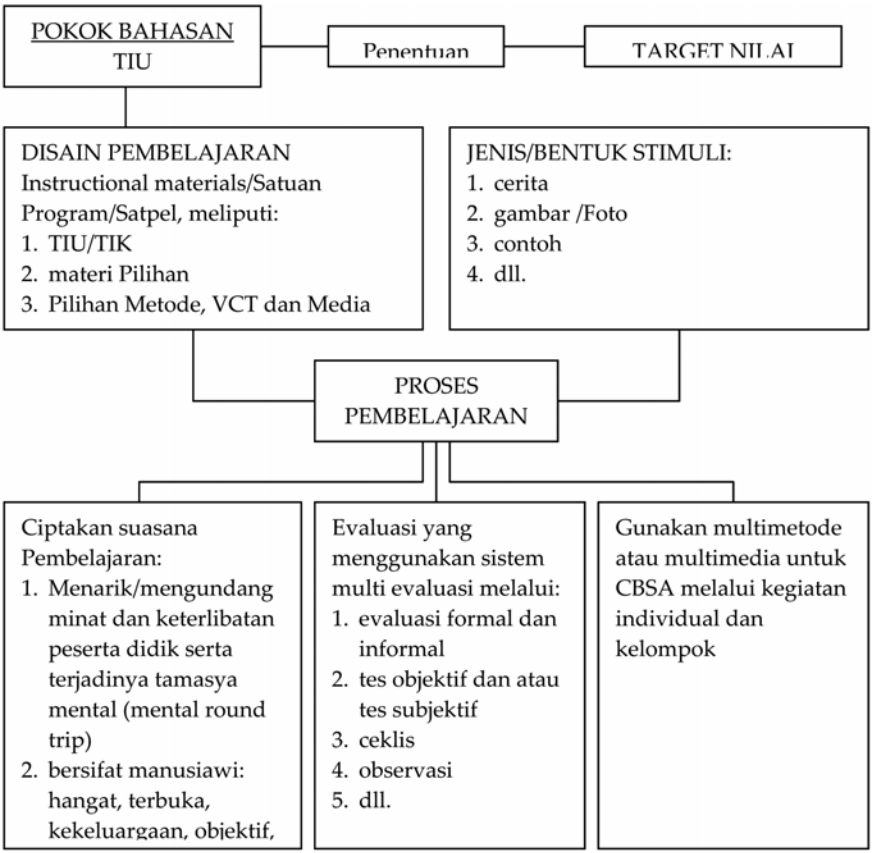
POKOK BAHASAN
TIU
Penentuan
TARGET NILAI
DISAIN PEMBELAJARAN
Instructional materials/Satuan Program/Satpel, meliputi:
1. TIU/TIK
2. materi Pilihan
3. Pilihan Metode, VCT dan Media
JENIS/BENTUK STIMULI:
1. cerita
2. gambar /Foto
3. contoh
4. dll.
PROSES PEMBELAJARAN
Ciptakan suasana Pembelajaran:
1. Menarik/mengundang minat dan keterlibatan peserta didik serta terjadinya tamasya mental (mental round trip)
2. bersifat manusiawi: hangat, terbuka, kekeluargaan, objektif,
Evaluasi yang menggunakan sistem multi evaluasi melalui:
1. evaluasi formal dan informal
2. tes objektif dan atau tes subjektif
3. ceklis
4. observasi
5. dll.
Gunakan multimetode atau multimedia untuk CBSA melalui kegiatan individual dan kelompok

CATATAN

[1]Djemari Mardapi, dalam Fuaduddin & Cik Hasan Bisri, *Dinamika Pemikiran Islam di Perguruan Tinggi.* (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 178.
[2]Muhaimin, et.al, *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, (Bandung: Rosdakarya, 2001), hlm. 137.
[3]Soeparman Kardi dan Mohamad Nur. *Pengajaran Langsung*, (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya University Press, 2000). Hlm, 30.
[4]McClelland melalui Muhaimin, et.al, *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*. (Bandung: Rosdakarya, 2001) hlm. 139.
[5]*Ibid*, hlm. 20.
[6]Worell dan Stiwell, melalui Muhaimin, et.al, *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah* (Bandung: Rosdakarya, 2001) hlm. 141.
[7]*Ibid*, hlm. 140
[8]Sumadi Suryabrata, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali, 1984) hlm. 16.
[9]Chield melalui Muhaimin, et.al, *Ibid.,* hlm. 142
[10]Tayar Yusuf, Syaiful Anwar, *Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab*, (Jakarta: Grafindo, 1997) hlm. 101-102.
[11]Fleming dan Levie, melalui Muhaimin, et.al, *Ibid.,* hlm. 142.
[12]Lawther, *Ibid.*
[13]Fleming dan Levie, *Ibid*: hlm. 143
[14]Thomburg, *Ibid*.
[15]Chauham, *Ibid*.
[16]Chauham, *Ibid*: hlm. 144.
[17]Khurshid Ahmad, *Islam Prinsip Dasar Dan Karakteristiknya* (Bandung: Pustaka,1981), hlm.8-18.
[18]QS.13: 29
[19]QS.1: 1
[20]Departemen Agama Republik Indonesia, *GBPP PAI SMU*, (Depag RI, 1994), hlm. 1.
[21]Gagne dan Briggs, Ibid., hlm. 152.
[22]Martin dan Briggs, *Ibid*.
[23]Djalaludin, *Ibid*: hlm. 154.
[24]Muhaimin, et.al, o*p. cit.* hal 156.
[25]Zamroni, "Pengembangan Kurikulum dan Silabi" *Makalah Lokakarya,* (Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga, tanggal 22 Februari 1993), hlm. 3.
[26]Ely melalui Muhaimin, at. al., *Ibid.,* hlm. 104

[27]Harun Nasution, " Agama dan Ilmu Pengetahuan Serta Peranannya di Zaman Modern Sekarang dalam Sutan Takdir Alisjahbana, *Dasar-dasar Krisis Semesta dan Tanggung Jawab Kita*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1983), hlm. 204.

[28]Yusuf al-Qardhawi, *Karakteristik Islam Kajian Analitik*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 24-35

[29]Arnold J. Toynbee, *Menyelamatkan Hari Depan Umat Manusia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1988), hlm. 61

[30]Yusuf al-Qardlawi, *Ibid*., hlm. 34.

[31]Ahmad Ludjito, *Pendekatan Integralistik Pendidikan Agama pada Sekolah di Indonesia dalam Reformulasi Filsafat Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 314.

[32]A.M. Saefudddin et.al., *Desekularisasi Pemikiran: Landasan Islamisasi*, (Bandung: Mizan, t.t), hlm. 116.

[33]*Ibid*

[34]Kaufman, melalui Muhaimin, et.al, o*p. cit.* hlm. 165.

[35]J. Piaget dan L. Kohlberg, melalui Muhaimin at.all., o*p .cit*. hlm. 169

[36]*Ibid*, hlm. 170.

[37]M. Chabib Thaha, *Kapita Selecta Pendidikan Islam,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1988), hlm. 78

[38]*Ibid*,79.

[39]*Ibid*, 80

[40]*Ibid*, 72

[41]Noeng Muhadjir, melalui Chabib Thaha, *Ibid*., hlm. 85

[42]*Ibid*., hlm. 86.

[43]Noeng Muhadjir, melalui Chabib Thaha, *Ibid*. hlm. 87

[44]Diambil dengan modifikasi dari J.R. Sutarjo Adisusilo dalam A. Atamadi dan Y. Setyaningsih, *Transformasi Pendidikan:Memasuki Milenium Ketiga,* (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2000), hlm. 83.

Bab 7

IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN METODOLOGI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PENDEKATAN DIALEKTIS

A. Konsep Pengembangan Metodologi

Pengertian metodologi berasal dari kata metode dan logos. Metode berasal dari bahasa Latin *"meta"* dan *"hodos"*. *Meta* artinya jauh (melampaui). *Hodos* artinya jalan (cara). Yang dimaksud metode adalah cara mencapai tujuan, sedangkan *logos* berasal bahasa Yunani yang lazim dipahami suatu pengetahuan sistematik.[1]

Metodologi adalah ilmu yang mengkaji tentang metode.[2] Menurut Muhbib Abdul Wahab metodologi terkait dengan berpikir ilmiah.[3] Berpikir ilmiah merupakan bagian dari proses saintifikasi. Metode adalah suatu rancangan secara menyeluruh yang saling berkaitan sebagai cara mencapai suatu tujuan. Metodologi berarti ilmu yang mengkaji suatu rancangan secara menyeluruh yang saling berkaitan masing-masing unsur sebagai cara untuk mencapai suatu tujuan. Unsur-unsur metode meliputi seleksi, gradasi, repetisi, dan presentasi. Metodologi adalah ilmu tentang metode yang unsur-unsur adalah seleksi, gradasi, repetisi, dan presentasi.

Keempat unsur metode pada intinya menjadi satu kesatuan utuh dan saling berkaitan erat dan tidak terpisahkan unsur satu dengan lainnya. Unsur seleksi, gradasi, repetasi, dan presentasi sebagai penjabaran metode tentang materi pembelajaran (PAI). Implikasi metode terhadap materi PAI dilakukan seleksi dari sejumlah materi/bahan dan sumber bahan ajar. Di dalam seleksi materi PAI dilakukan identifikasi menjadi empat aspek pengembangan materi PAI. Keempat aspek materi PAI sebagai berikut. (a) materi berupa fakta empiris atau nonempiris, (b) berupa konsep atau definisi/takrif, (c) berupa prinsip atau dalil-dalil atau rumus-rumus, dan (d) berupa prosedur atau langkah-langkah. Setelah seleksi materi PAI dilakukan, kemudian dilakukan gradasi materi PAI untuk mengurutkan dan mengklasifikasikan unsur-unsur materi PAI selanjutnya. Hasil klasifikasi materi PAI ini menuntut dilakukan penggolongan sistemik yang memerlukan pembahasan secara komprehensif atau interdisipliner antara PAI dengan *ulum al-din* dan saintifik yang dijadikan pondasi berpikir agama dan sains integratif/nondikotomis.

Langkah berikutnya adalah repetisi artinya materi PAI perlu dilakukan pengulangan unsur-unsur materi PAI yang inti/pokok/*ushuliyah* sebagai penguatan materi PAI yang bersifat *ushuliyah* dan dikuatkan materi bersifat *furu'iyah* (cabang). Langkah keempat adalah presentasi dimaksudkan untuk menunjukkan perlu dan pentingnya aspek materi PAI yang dilakukan melalui tahapan-tahapan seleksi, gradasi, repetisi, dan presentasi untuk dipresentasikan ke dalam satu kesatuan utuh sehingga dapat diketahui kelebihan dan kelemahan jika dikaji dalam perspektif metodologis.

Pengembangan metodologi PAI pendekatan dialektik di sampaing memperhatikan unsur-unsur pengembangan materi juga memperhatikan tingkat pikiran peserta didik. Secara umum tingkat pikiran manusia dikategorikan sebagai berikut.

B. Tingkat Pikiran Manusia dengan Pola Pikir dan Peta Konsep

Menurut R. Paryana Suryadipura[4] tingkat pikiran manusia dapat dilihat dalam tabel 1 berikut ini.

Tabel 1: Tingkat Pikiran Manusia

Tingkat pikiran manusia				
Alat-alat pikir	Pancaindera lahir (sensus exterior) dan akal	Badan pikir (mentaal lichaam)	Pancaindera batin (sensus interior) dan Budi	Atman (roh rahmani)
Bidang pikiran	Alam lahir	Ilmu Pengetahuan	Filsafat	Religi
Bentuk pikiran	Perkembangan akal (verstanddelijk denken)	Pikiran ideatief kreatif	Normative	Tauhid
Soal	Ada atau tidak ada?	Bagaimana?	Oleh sebab apa?	Apa tujuannya?
Objek apa yang dijumpai	Benda nyata	Kewajaran wujud (feitelijkheden van de Realiteit)	Latar belakang wujud	Hakikat
	Wujud	Hakikat yang relatif, hukum-hukum Alam	Hal-hal yang berlaku (geldigheden), Latar belakang (achtergronden)	Kepastian-kepastian (zekerheden)

Tabel di atas dapat dipahami bahwa tingkat pikiran manusia (termasuk peserta didik) dilihat dari *alat pikir, bidang pikir, bentuk pikiran, soal, dan objek apa yang dijumpai* yang berawal dari konkret (sederhana) berkembang menuju abstrak.

Relevansi tingkat pikiran manusia dengan pola pikir (*mindset*) dan peta konsep (*mindmap*) dapat dilihat dengan lebih jelas pada tabel 2a-d berikut ini.[5]

Tabel 2a: Relevansi Tingkat Pikiran I dan Pola Pikir/ Peta Konsep

Tingkat pikiran I		**Pola Pikir (Mindset)**	**Peta Konsep (Mindmap)**
Alat-alat pikir	Pancaindera lahir (sensus exterior) dan akal	Pengertian panca indra dan akal	Unsur-unsur panca indra dan akal
Bidang pikiran	Alam lahir	Konkret dan riil	Fakta-fakta riil
Bentuk pikiran	Perkembangan akal (verstanddelijk denken)	Macam-macam benda	Fungsi-fungsi benda
Soal	Ada atau tidak ada?	Yang ada atau yang tidak ada	Penataan yang ada/tidak ada
Objek apa yang dijumpai	Benda nyata	Segala yang ada	Benda-benda yang ada
	Wujud	Al-Makhluq	Al-Khaliq

Tabel 2b: Relevansi Tingkat Pikiran II danPola Pikir/ Peta Konsep

Tingkat pikiran II		Pola Pikir (Mindset)	Peta Konsep (Mindmap)
Alat-alat pikir	Badan pikir (mentaal lichaam)	Organ-organ pikir	Unsur-unsur organ pikir
Bidang pikiran	Ilmu Pengetahuan	Sains dan teknologi	Agama dan sains nondikotomik
Bentuk pikiran	Pikiran ideatief kreatif	Ide/gagasan/konsep/teori	Integrasi nondikotomik
Soal	Bagaimana?	Pengertian bahasa dan konsep	Induktif-deduktif-validatif
Objek apa yang dijumpai	Kewajaran wujud (feitelijkheden van de Realiteit)	Sains dan teknologi	Metodologi agama dan sains nondikotomik
	Hakikat yang relatif, hukum-hukum alam	Hukum-hukum alam	Sifat Aqliyah dan Naqliyah

Tabel 2c: Relevansi Tingkat Pikiran III dan Pola Pikir/ Peta Konsep[6]

Tingkat pikiran III		Pola Pikir (Mindset)	Peta Konsep (Mindmap)
Alat-alat pikir	Pancaindera batin (sensus interior) dan Budi	Akal dan fingsi pikir, hati dan fungsi rasa	fungsionalisasi
Bidang pikiran	Filsafat	Ontologi, epistemologi, dan aksiologi	Tahapan akliyah (pemikiran)
Bentuk pikiran	Normative	hikmah	Tahapan nilai
Soal	Oleh sebab apa?	kausalitas	Hubungan timbal balik
Objek apa yang dijumpai	Latar belakang wujud	Al-Khaliq dan al-Makhluq	Al-Makhluqat dalil wujud al-Khaliq
	Hal-hal yang berlaku (geldigheden), latar belakang (achtergronden)	Sebab-sebab terjadi/qarinah	Sejarah dan kontekstualisasi

Tabel 2d: Relevansi Tingkat Pikiran IV dan Pola Pikir/ Peta Konsep

Tingkat pikiran IV		Pola Pikir (Mindset)	Peta Konsep (Mindmap)
Alat-alat pikir	Atman (roh rahmani)	Adanya roh	Roh prerogratif al-Khaliq
Bidang pikiran	Religi	Agama	Ditemukan dan diperoleh
Bentuk pikiran	Tauhid	Nondikotomik	Ke-Esaan dan tahapan Naqliyah
Soal	Apa tujuannya?	Taat dan taslim	Terhomat dan selamat
Objek apa yang dijumpai	Hakikat	Kebenaran mutlak	Universal
	Kepastian-kepastian (zekerheden)	Iman	Ke-Imanan atas dalil aqliyah dan naqliyah

Keempat tingkat pikiran manusia dapat diklasterkan menjadi dua klaster besar yaitu: (a) klaster pendidikan dasar (SD/MI); menengah (SMA/MA/SMK/MAK); dan (b) klaster pendidikan tinggi (S1, S2, dan S3). Pendidikan Agama Islam jenjang pendidikan sekolah atau madrasah dari jenjang SD/MI, jenjang SMP/MTs, dan jenjang SMA/MA/SMK/MAK merupakan kelanjutan dari PAI jenjang sebelumnya. Untuk itu, setiap jenjang terdapat perbedaan. Berdasarkan klaster tersebut di atas hemat penulis tingkat pikiran peserta didik jenjang pendidikan dasar (SD/MI, dan SMP/MTs, dibedakan dengan jenjang pendidikan menengah (SMA/MA/SMK/MAK. Jenjang pendidikan dasar dan menengah dijadikan menjadi satu klaster, sedangkan jenjang pendidikan tinggi (S1, S2, dan S3) menjadi

satu klaster. Kedua klaster besar ini didasarkan pada tingkat pikiran peserta didik.

Klaster inilah dapat dipergunakan oleh setiap pendidik untuk mengintegrasikan dan menginterkoneksikan setiap materi PAI sesuai dengan tingkat pikiran peserta didik pada penggolongan klaster tersebut. Oleh karena itu, setiap pendidik di samping memahami standar nasioanl pendidikan juga memahami tingkat pikiran peserta didiknya. Jika pendidik memiliki empat kompetensi (personal, sosial, profesional, dan pedagogi), maka akan memudahkan melakukan pengembangan metodologi PAI ini sesuai dengan klaster peserta didik.

Di satu sisi peserta didik pada umumnya mengalami berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam diri maupun dari luar diri mereka. Di sisi lain lembaga penyelenggara PAI dituntut menyesuaikan dan memenuhi tuntutan baik dari peserta didik (orang tua/wali siswa) maupun dari masyarakat. Tuntutan dan harapan orang tua/wali siswa dan masyarakat berupa suatu harapan agar peserta didik menjadi generasi yang baik, sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Tahap-tahap semacam ini merupakan tahap pengembangan metodologi PAI sebagai upaya dan solusi alternatif permasalahan metodologi PAI yang selama ini terjadi baik bersifat internal maupun eksternal dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Pada akhir bab ini akan dibahas pengembangan metodologi PAI pendekatan dialektik. Hal ini dimaksudkan sebagai salah satu tawaran penulis untuk mengatasi berbagai problematika pembelajaran PAI di jenjang pendidikan sekolah dan madrasah.

C. Konsep Pendidikan Agama Islam

Pendidikan pada hakikatnya adalah suatu upaya yang dilakukan seseorang atau lembaga secara sengaja untuk memanusiakan manusia sesuai dengan fitrahnya. Fitrah manusia berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadis, sebagai berikut. Dalam diri manusia terdapat berbagai macam fitrah yang antara lain adalah (i) fitrah agama (QS.

al-A'raf: 172), (ii) fitrah suci (QS. al-Muthaffifin: 14 dan H.R. Ahmad), (iii) fitrah berakhlak (H.R. Bukhari, Hakim, dan Baihaqi), (iv) fitrah kebenaran (QS. Al-Baqarah: 26), dan (v) fitrah kasih sayang (QS. Ar-Rum:21)

Untuk mempertahankan dan memperkokoh kefitrahan manusia, peran dan fungsi ilmu agama Islam sangat menentukan karena pada hakikatnya ilmu agama Islam itu pada pokok dan utamanya bersumber pada al-Qur'an dan al-Hadis Nabi Muhammad saw. yang tujuan utama diturunkannya al-Qur'an adalah sebagai petunjuk aqidah salimah (keyakinan/keimanan yang benar/selamat), sebagai petunjuk syariah (aturan hidup dan sistem kehidupan manusia), dan petunjuk akhlak.

Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan materi wajib pada semua jenjang pendidikan (UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003). Pendidikan Agama Islam adalah usaha secara sistematis dan pragmatis dalam membantu anak didik agar mereka hidup sesuai dengan ajaran Islam.[7] Untuk menanamkan nilai-nilai keislaman kepada peserta didik perlu diajarkan oleh guru khusus yang menguasai ilmu keislaman dan kemampuan profesional kependidikan, di samping memiliki komitmen terhadap Agama Islam dan kepribadian Islami.[8]

Pendidikan Agama Islam bagi peserta didik pada esensinya menjadikan peserta didik secara baik dan benar dalam memeluk agama Islam dalam kehidupan secara diri sendiri dan sosial. Oleh karena itu, peserta didik ditanamkan makna hakiki Agama Islam. Untuk lebih memudahkan memahami pengertian Agama Islam berikut ini dibahas lebih dahulu, pengertian agama dan Islam. Agama secara etimologi berasal dari dua kata *a* dan *gama*, yang berarti *a* adalah tidak, *gama* adalah kacau, berantakan.[9] Kata *agam*a berasal dari bahasa sansekerta; yaitu pertama (a), dan kedua (gama). Diartikan *a* adalah tidak, dan *gama* adalah kocar kacil atau berantakan. Dengan demikian *agama* secara etimologis diartikan tidak kocar kacir, atau tidak berantakan.

Disebutkan juga di dalam Ensiklopedia Indonesia, yang dimaksud agama adalah manusia mengakui dalam agama adanya Yang Suci: manusia itu insaf, bahwa ada suatu kekuasaan yang memungkinkan dan melebihi segala yang ada. Kekuasaan inilah yang dianggap sebagai asal atau Khalik (pencipta) segala yang ada. Ada beberapa istilah agama (bahasa Indonesia), religion (bahasa Inggris), religie (bahasa Belanda), din (bahasa Arab), secara etimologis memiliki arti sendiri-sendiri, masing-masing mempunyai riwayat dan sejarahnya sendiri. Namun dalam arti terminologis dan teknis istilah itu, inti maknanya sama.[10]

Menurut Mukti Ali dalam H. Endang Saifuddin Anshari, memberikan arti kata agama paling sulit, karena tiga hal: *pertama*, pengalaman agama itu soal batin dan subjektif, dan sangat individualistis, *kedua* ketika orang berbicara agama sangat semangat dan emosional daripada bicara selain agama, sehingga ketika seseorang berbicara agama melebihi batas emosional umumnya, *ketiga* konsepsi tentang agama akan dipengaruhi oleh tujuan orang yang memberikan pengertian agama itu.[11]

Agama secara terminologi adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan syariah (tata aturan/hukum peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa) serta kaidah akhlak (tata hubungan) manusia dengan Allah SWT, manusia dengan alam lingkungannya, manusia dengan manusia, manusia dengan kehidupan dunia-akhirat. Agama memiliki tiga pilar, yaitu: iman (akidah/teologi), islam (syariah/aturan/hukum) dan ihsan (akhlak/etika) yang bersumber dari Tuhan YME.

Islam adalah agama Allah SWT. Secara etimologis kata Islam dari bahasa Arab *aslama yuslimu islaman salam* atau *salamah* yang berarti penyerahan diri/penghambaan manusia kepada Allah SWT, atau tunduk kepada Allah SWT untuk mencapai *salam* atau *salamah* (keselamatan atau kedamaian) di dunia dan akhirat. Prosesnya disebut *islam* dan pelakunya disebut *muslim.* Dengan kata lain, Islam berarti penyerahan diri manusia hanya kepada Allah SWT untuk mendapatkan keselamatan, kedamaian, kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Yang sering dilupakan dalam menjelaskan pengertian *islam* ini adalah apa kehendak Allah SWT yang jika diikuti akan menghantarkan pada keselamatan dan kedamaian dari dunia sampai akhirat dan sebaliknya. Penyerahan diri/penghambaan manusia kepada Allah SWT didasarkan pada tiga pilar utama Islam yaitu iman, islam dan ihsan atau akidah, syariah, dan akhlak. Ketiga pilar Islam ini sebagai ajaran dan sakaligus sistem nilai yang mengatur hidup dan sistem kehidupan manusia menjadi *islami*. Oleh karena itu, bangunan kehidupan *islami* adalah kehidupan yang dilandasi dan sesuai dengan tiga ayat, yaitu ayat Quraniah, ayat Kauniah, dan ayat Insaniah serta sunatullah (hukum alam).

Islam merupakan sistem nilai yang komprehensif, mengatur segala urusan duniawi dan ukhrawi, hubungan manusia dengan Allah SWT, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan alam lingkungannya. Oleh karena itu, sistem sosial yang dilakukan senantiasa mengacu pada sistem nilai Islami, sistem kepribadian seseorang dibangun berdasarkan sistem nilai Islami, dan begitu juga sistem organisme akan tunduk dan mengikuti sesuai dengan sistem nilai Islami.

Dengan demikian, agama Islam yaitu agama fitrah yang cocok dengan fitrah manusia. Islam adalah agama yang menuntun para pemeluknya berpegang teguh pada ajaran yang bersumber pada al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw serta hasil ijtihad yang tidak bertentangan al-Qur'an dan Sunnah. Karakteristik agama Islam adalah *rahmatan lil 'alamin* dan *ya'lu wa la yu'la 'alaih.* Oleh karena itu, bagi setiap pemeluk agama Islam senantiasa menjadi dan memberi contoh teladan yang baik dan benar. Esensi Agama Islam adalah *al-tha'at* (kepatuhan/ketaatan/ketundukan) dan *al-taslim* (keselamatan/kehormatan) hanya kepada Allah SWT dan Rasulullah Muhammad saw.

Berdasarkan uraian di atas, yang dimaksud pendidikan agama Islam adalah usaha secara sistematis dan pragmatis yang dilakukan baik oleh seseorang maupun lembaga dalam membantu anak didik agar mereka hidup sesuai dengan ajaran Islam, senatiasa memper-

tahankan dan menjaga fitrah yang dimilikinya, taat/tunduk/patuh kepada Allah SWT dan Rasulullah saw serta taslim kepada-Nya.

D. Konsep Berpikir Pendekatan Dialektis

Untuk pengembangan metodologi PAI pendekatan dialektik dapat dipetakan sebagai berikut (PETA KONSEP 2):

Penjelasan Peta Konsep 2

1. Pahami esensi (inti/hakikat) *Body of Knowledge*/kata kunci topik/judul
2. Pahami esensi *body of knowledge*/kata kunci topik/judul dari makna kata dan konsep
3. Pemahaman esensi dari makna kata dan konsep disebut tahap TESIS
4. Lakukan ANTI TESIS dengan lima langkah dalam peta konsep sehingga temukan SINTESIS
5. Sintesis penulis akan menjadi TESIS BARU bagi penulis
6. Pahami unsur-unsur sintesis baru dari SUBSTANSI (isi/materi/bahan)

7. Perpaduan sintesis baru dan substansi disusun menjadi BAB/ SUBBAB/SUBSUB BAB

Pertama natural sciences, humanities sciences dan *social sciences* pahami *body of knowledge*-nya. Misalnya: PAI, Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Sosologi, Psikologi, Antropologi dst. *Kedua,* pahami PAI, Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Sosologi, Psikologi, Antropologi dan seterusnya menurut pengertian etimologi (kamus/ ensiklopedi), dan terminologi (definisi/istilah)/teori atau pendapat para ahli dalam bidangnya. *Ketiga,*Pengertian istilah/definisi atau pendapat ahli (dicari dalam referensi). Tahap ketiga ini disebutnya tahap tesis (konsep/ide/gagasan/pendapat), dilanjutkan tahap berikutnya.

Keempat, pengertian istilah/definisi/teori atau pendapat ahli dianalisis dengan langkah-langkah berikut. (1) tulis istilah/definisi atau pendapat ahli/teori secara lengkap, (2) identifikasi dan klasifikasi istilah/definisi atau pendapat ahli. Klasifikasi yang dimaksud di sini adalah penggolongan sistemis berdasarkan unsur-unsur yang ada dalam makna bahasa dan konsep. Ketika penulis melakukan penggolongan sistemis berarti penulis harus mampu mengembangkannya sesuai dengan inti dan isi yang digali dari pengertian tersebut, (3) bahas unsur yang sama dan yang beda antara pengertian istilah/definisi atau pendapat ahli, (4) mengapa ada unsur yang sama dan ada yang beda dari istilah/definisi atau pendapat ahli, dan (5) penulis menemukan "benang merah" antara yang sama dan yang beda. Pada tahap keempat melalui proses point 1 sampai point 5 disebutnya proses *anti tesis* untuk mendapatkan sintesis. Tahap *kelima,* adalah merumuskan hasil pembahasan istilah/definisi atau pendapat ahli menjadi sikap ilmiah penulis. Jika penulis telah menemukan dan menentukan sikap ilmiah berarti penulis telah memahami esensi *body of knowledge* yang dikaji. Oleh karena itu, setiap penulis/pengkaji bidang keilmuan dituntut sampai dengan penulis menemukan *sintesis* apa yang akan dibahas/dikaji.

Berpikir berarti kita ada, eksistensi berpikir bagi manusia menunjukkan keberadaan diri manusia. Berpikir perlu dilatih dan di-

kembangkan menjadi buah pikir yang memberikan manfaat bagi manusia. Berpikir senantiasa didasarkan pada sebuah objek. Objek berpikir dapat berupa apa saja baik berupa benda, fakta, realitas, peristiwa, hal, tindakan, kejadian, ilmu pengetahuan, teknologi, hidup, sistem kehidupan, ideologi, segala norma, teori, praktik, dan segala macam makhluk Tuhan YME.

1. Dasar Teologis-Tauhidik

Secara teologis agama dan sains nondikotomis bersumber dan berasal dari Allah SWT. Eksistensi agama yang diimani, diyakini dan diamalkan ajarannya akan membawa pemeluknya dalam hidup dan sistem kehidupan lebih baik, tertib, dan berkualitas. Aspek kehidupan agama, sains, politik, ekonomi, sosial, pendidikan, kekeluargaan, kebudayaan, olah raga kesenian, kesehatan, lingkungan hidup dan pertahanan keamanan. Demikian pula eksistensi sains bagi agama berfungsi sebagai pengokoh, dan penguat agama bagi pemeluknya, karena dengan sains mampu mengungkap rahasia-rahasia alam semesta dan seisinya, sehingga akan menambah hidmat dan khusyuk dalam beribadah dan bermu'amalah. Lebih lanjut sains bermanfaat untuk mendapatkan kedamaian hidup secara individual dan secara kolektif bermasyarakat, berbangsa bernegara dan bahkan dalam ikut mewujudkan ketertiban dunia. Oleh karena itu, kemanfaatan sains luar biasa dan akan menjadikan manusia dekat dengan Tuhan, hidup lebih nikmat, bahagia, dan sejahtera.

2. Metodologi Berpikir

Pengembangan berpikir memerlukan metodologi berpikir. Metodologi berpikir berkaitan erat sekali dengan fungsionalisasi akal sebagai pusat berpikir, fungsionalisasi hati sebagai pusat rasa. Fungsionalisasi akal dan hati akan efektif bilamana berpusat pada pembenahan dan penataan kembali *mindset* (pola pikir) dan *mindmap* (peta konsep). Mindset dan mindmap sebagai sentral pengembangan berpikir memerlukan metodologi berpikir yang tepat dan efektif. Metodologi pengembangan berpikir dapat kokoh dan kuat jika diba-

ngun dan didasarkan pada prinsip dasar agama dan sains nondikotomis/tauhidik. Prinsip dasar ini memosisikan secara tegas dan jelas posisi agama dan sains yang selanjutnya akan memberikan ketegasan dan kejelasan hubungan agama dan sains secara filosofis, metodologis, teologis dan dogmatis, serta ideologis.

Bahasan ini diharapkan sebagai *sharing* kepada pembaca dan memberikan solusi alternatif dalam menyelesaikan permasalahan dari "moralitas dikotomis" menjadi "moralitas tauhidik" bahwa agama dan sains adalah nondikotomis melalui pendekatan dialektik. Moralitas tauhidik dibangun berdasarkan pondasi yang paling esensi adalah *agama dan sunnatullah* (hukum alam); pondasi ini dibingkai dengan iman dan takwa; bingkai iman dan takwa adalah *think and remembering Allah;* dibingkai ke dalam *mindset* dan *mindmap;* dibingkai ke dalam *body of knowledge;* dibingkai ke dalam berpikir dialektis yang diawali dari tesis-antitesis-sintesis; dibingkai ke dalam firman/qauliyah Allah SWT: dogma/doktrin, kauniyah (ayat alam semesta), dan nafsiyah (ayat kemanusiaan) serta sunnatullah (hukum alam); dibingkai ke dalam paradigma agama dan sains nondikotomis. Sepanjang umat manusia tidak tegas dan jelas memosisikan agama dan sains senantiasa akan terjadi permasalahan yang tiada henti-hentinya, karena hal ini akan berpengaruh pada hubungan agama dan sains tidak tegas dan jelas yang pada akhirnya melahirkan "moralitas dikotomis" secara laten/permanen.

3. Implementasi Pengembangan Berpikir Dialektik

Berpikir dialektis meliputi tiga langkah inti, yaitu diawali dengan tesis, antitesis, dan sintesis kreatif. Langkah pertama adalah tesis. Yang dimaksud tesis adalah ide/gagasan/pendapat/konsep seseorang tentang pemahaman terhadap *keywords* (kata kunci) dalam topik/judul, atau *body of knowledge* (ilmu pengetahuan) baik *natural sciences, technology, social sciences, humanities,* dan *ulum al-din* maupun ilmu-ilmu cabang. Untuk memahami tesis mencakup tiga hal pokok, yaitu: memahami makna kata (etimologi), makna konsep/definisi (terminologi), dan makna sosial historis (sosial, politik,

budaya, dan agama). Pemahaman tesis dapat diilustrasikan secara singkat sebagai berikut. Memahami *Body of knowledge,* misalnya: Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Sosologi, Psikologi, Antropologi dst. Dipahami menurut pengertian etimologi (periksa kamus/ ensiklopedi), dan terminologi (definisi/istilah/teori atau pendapat para ahli dalam bidangnya), sedangkan makna sosial historis (sosial, politik, budaya, dan agama) dapat diperoleh melalui kajian interdisipliner terhadap referensi yang ada. Pemahaman tiga unsur tersebut disebut pemahaman tesis.

Langkah kedua berpikir dialektis adalah antitesis. Antitesis paling tidak memiliki lima tahap, yaitu: (1) tulis makna kata, istilah/ definisi atau pendapat ahli/teori, dan makna sosial historis secara lengkap; (2) identifikasi dan klasifikasi istilah/definisi dan sosial historis pendapat ahli. Klasifikasi yang dimaksud di sini adalah penggolongan sistemis berdasarkan unsur-unsur yang ada dalam makna bahasa, makna konsep, dan makna sosial historis. Ketika penulis melakukan penggolongan sistemis berarti penulis harus mampu mengembangkannya sesuai dengan inti dan isi yang terdapat dalam tesis tersebut; (3) bahas unsur yang sama dan yang beda antara pengertian istilah/definisi/sosial historis pendapat ahli; (4) mengapa ada unsur yang sama dan ada yang beda dari istilah/definisi/sosial historis pendapat ahli, dan (5) penulis menemukan *"benang merah"* antara yang sama dan yang beda. Kelima unsur tersebut di atas dinamakan antitesis. Jika penulis telah menemukan titik temu atau *kalimatun sawa* penulis tinggal satu langkah lagi merumuskan menjadi sintesis kreatif. Langkah ketiga berpikir dialektis adalah sintesis kreatif. Yang dimaksud sintesis kreatif di sini adalah sikap ilmiah penulis. Sikap ilmiah penulis merupakan suatu hasil berpikir dialektis penulis melalui tahap tesis-antitesis-sintesis kreatif. Sintesis kreatif penulis dapat disebut sebagai orisinilitas pemikiran penulis berdasarkan pengembangan berpikir dialektis.

Dengan demikian, jika penulis telah menemukan dan menentukan sikap ilmiah menjadi sintesis kreatif berarti penulis telah

memahami esensi *body of knowledge* yang dikaji. Sintesis kreatif bagi penulis menjadi milik dan kompetensi untuk selanjutnya sintesis kreatif ini sebagai tesis baru bagi penulis dan perlu tindak lanjut sebagaimana langkah di atas. Tesis baru bagi penulis tinggal memahami substansi *body of knowledge/topik/judul* yang dikaji dan hasil yang diperoleh melalui tiga langkah berpikir dialektis. Unsur-unsur inilah yang akan dijadikan BAB, SUB BAB, SUB SUB BAB ddab seterusnya.

4. Contoh-Contoh Topik Berpikir Dialektis

Berikut ini diberikan contoh berpikir dialektis

a. Moralitas Dikotomis Versus Moralitas Tauhidik

Moralitas adalah "nilai baik dan buruk setiap perbuatan manusia sendiri", sedangkan etika adalah "ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk" atau filsafat moral. Moralitas seseorang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang dialami dirinya. Secara internal moralitas seorang diri dipengaruhi faktor-faktor kepribadian yang ia miliki, agama yang dipeluk, keyakinan, kebutuhan, ilmu pengetahuan, prinsip hidup, tujuan hidup, makna dan manfaat hidup. Secara eksternal dipengaruhi beberapa faktor kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Faktor ini berkaitan dengan agama, sosial kelembagaan, sains, politik, ekonomi, sosial, pendidikan, kekeluargaan, kebudayaan, tradisi, adat istiadat, olah raga, kesenian, kesehatan, lingkungan hidup dan pertahanan keamanan.

1). Permasalahan Manusia

Permasalahan kemanusiaan dari yang sederhana hingga yang kompleks bahkan tragis dan anarkis yang terjadi di belahan dunia hingga kini dan senantiasa tidak ada henti-hentinya,jika dikaji secara mendalam dan komprehensif secara teoretis, metodologis, filosofis, dan teologis-dogmatis penyebab intinya yang mendasar adalah sikap mental manusia yang penulis kategorikan "moralitas dikotomis" terhadap baik buruk perbuatan diri manusia yang didasarkan pada

objek disiplin masing-masing sehingga kebenaran diukur menurut subjektivitas diri dan ilmu pengetahuan yang menjadi kompetensinya dengan tidak mempertimbangkan dan mengomparasikan dengan pihak-pihak lain yang memiliki kompetensi yang berbeda. Kemudian dipertanyakan mengapa manusia mengalami "moralitas dikotomis"? secara umum dapat dijawab bahwa penyebab "moralitas dikotomik" adalah pendidikan dan kehidupan yang diperoleh umat manusia hingga kini dengan dikotomis yakni perbedaan dan pertentangan antara agama dan sains. Karakteristik dikotomis seperti ini tampak dalam mengatasi setiap permasalahan manusia pada umumnya dilihat dari sudut pandang yang berbeda-beda, misalnya: masalah "hukuman mati" bagi terpidana mati hingga kini masih diperdebatkan dengan argumentasi masing-masing yang berbeda-beda pula. Bagi ahli hukum misalnya, jika narapidana telah memenuhi koridor positif tentang hukuman mati yang berlaku, maka hukuman mati harus ditegakkan. Hal ini berbeda dengan ahli yang mendasarkan pada perspektif HAM, hukuman mati dinyatakan bertentangan dengan ketentuan tentang hak hidup manusia. Berbeda juga menurut perspektif ahli hukum agama bahwa hukuman mati tetap dilakukan setelah memenuhi koridor hukuman mati sesuai kaidah hukum agama. Ini salah satu bukti empiris dan realistis adanya perbedaan yang luar biasa dalam penerapan hukuman mati bagi terpidana, jika dikaji secara mendalam dari perspektif yang multidisipliner atau interdisipliner.

Perbedaan dalam memahami hukuman mati dari berbagai perspektif inilah yang penulis maksudkan adalah titik awal "moralitas dikotomis" yang diperolehnya melalui kajian-kajian keilmuan secara dikotomis pula. Artinya, bagi para ahli tidak atau belum melakukan kajian secara utuh/komprehensif "nondikotomis" atau "moralitas tauhidik" dalam memberikan argumentasi sesuai bidang keahlian masing-masing yang belum didialogkan dengan para ahli yang lain secara integratif, sehingga terjadi pro dan kontra dalam hukuman mati tidak terhindarkan. Untuk menghindari argumentasi yang bersifat dikotomis tersebut diperlukan perubahan paradig-

ma *mindset* dan *mindmap* bagi para ahli dengan berpijak dan berdasar fokus pada esensi permasalahan yang diperdebatkan untuk dicari dan disamakan persepsi terlebih dulu. Persamaan persepsi harus dikembalikan pada pemahaman esensi "hukuman mati". Pemahaman esensi "hukuman mati" seharusnya dipahami dari makna kata, makna konsep, dan makna sosial historis (sosial, politik, budaya, dan agama). Pemahaman semacam ini dikategorikan sebagai pemahaman tesis yang menuntut dilakukan anti-tesis untuk menemukan persamaan persepsi "hukuman mati", pada tahapan berikutnya ditemukan sintesis kreatif tentang "hukuman mati". Kegelisahan akademis itulah diantaranya penulis menuangkan pikiran dengan topik "Moralitas Dikotomis Versus Moralitas Tauhidik".

2). Moralitas Tauhidik

Secara teologis agama dan sains nondikotomis bersumber dan berasal dari Allah SWT. Eksistensi agama yang diimani, diyakini dan diamalkan ajarannya akan membawa pemeluknya dalam hidup dan sistem kehidupan lebih baik, tertib, dan berkualitas. Aspek kehidupan agama, sains, politik, ekonomi, sosial, pendidikan, kekeluargaan, kebudayaan, olah raga kesenian, kesehatan, lingkungan hidup dan pertahanan keamanan. Demikian pula eksistensi sains bagi agama berfungsi sebagai pengokoh, dan penguat agama bagi pemeluknya, karena dengan sains mampu mengungkap rahasia-rahasia alam semesta dan seisinya, sehingga akan menambah hidmat dan khusyuk dalam beribadah dan bermu'amalah. Lebih lanjut sains bermanfaat untuk mendapatkan kedamaian hidup secara individual dan secara kolektif bermasyarakat, berbangsa bernegara dan bahkan dalam ikut mewujudkan ketertiban dunia. Oleh karena itu, kemanfaatan sains luar biasa dan akan menjadikan manusia dekat dengan Allah SWT, hidup lebih nikmat, bahagia, dan sejahtera.

Makalah ini diharapkan sebagai *sharing* kepada pembaca dan memberikan solusi alternatif dalam menyelesaikan permasalahan dari "moralitas dikotomis" menjadi "moralitas tauhidik" bahwa agama dan sains adalah nondikotomis melalui pendekatan dialek-

tik. Moralitas tauhidik dibangun berdasarkan pondasi yang paling esensi adalah agama dan sunnatullah (hukum alam); fondasi ini dibingkai dengan iman dan takwa; bingkai iman dan takwa adalah *think and remembering Tuhan;* dibingkai ke dalam *mindset* dan *mindmap;* dibingkai ke dalam *body of knowledge;* dibingkai ke dalam berpikir dialektis yang diawali dari tesis-antitesis-sintesis; dibingkai ke dalam firman/qauliyah Allah SWT: dogma/doktrin, kauniyah, dan nafsiyah serta sunnatullah (hukum alam); dibingkai ke dalam paradigma agama dan sains nondikotomis. Sepanjang umat manusia tidak tegas dan jelas memosisikan agama dan sains senantiasa akan terjadi permasalahan yang tiada henti-hentinya, karena hal ini akan berpengaruh pada hubungan agama dan sains tidak tegas dan jelas yang pada akhirnya melahirkan "moralitas dikotomik" secara laten/permanen.

3). Revolusi Mental dengan Memosisikan Agama dan Sains-Teknologi

Mengapa penting sekali memosisikan agama dan sains ini, karena pada hakikatnya agama hanya diperuntukkan untuk manusia. Manusia oleh Allah SWT diberi kebebasan dalam hal agama mau taat atau inkar, sedangkan sains pada esensinya adalah pembuktian sunnatullah (hukum alam) yang dipelajari secara mendalam, luas hingga radikal dalam berpikir sehingga menemukan kebenaran ilmiah yang dikategorikan sains dan teknologi.

Jika manusia memosisikan agama dan sains jelas dan tegas, maka diharapkan terhindar dari pemahaman dikotomis terhadap agama secara terpisah dengan sains. Pada penghujung permasalahan tetap akan terjadi "moralitas dikotomis" versus "moralitas tauhidik/nondikotomis" dalam segala peri kehidupan umat manusia. Untuk itu, perlu dilakukan "revolusi mental" dengan memosisikan agama dan sains-teknologi jelas dan tegas sehingga hubungan vertikal dan horizontal serta fungsional agama dan sains menjadi terang benderang yang pada akhirnya akan melahirkan "moralitas tauhidik/nondikotomis" bagi umat manusia, semoga!

b. Dengan 3 R: Mengatasi Permasalahan Bangsa

1). Rumah Transisi

Presiden terpilih Jokowi dan Wapres terpilih Jusuf Kalla tidak lama setelah pilpres mendirikan rumah transisi. Rumah transisi berakhir setelah presiden terpilih dan wakil presiden terpilih dilantik sebagai presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2014. Rumah transisi berkaitan sekali dengan ide besar Jokowi saat kampanye tentang pentingnya revolusi mental bagi bangsa Indonesia. Ide/gagasan Jokowi revolusi mental, ditindaklanjuti dengan mendirikan rumah transisi, hingga Jokowi banyak bersilaturrahim kepada para tokoh nasional menjelang pelantikan presiden. Hal ini merupakan salah satu wujud konkret Jokowi sesuai apa yang sering disampaikan ketika dipertanyakan insan pers, apakah bapak Jokowi tetap blusukan setelah menjadi presiden. Jokowi selalu menjawab, "Jokowi tetap Jokowi" sambil berkelakar, "ya tetap blusukan toh."

2). Rumah Pikir

Bagian esensi/inti bangunan rumah adalah fondasi dan kerangka rumah, sedangan substansi bangunan rumah berupa isi, material, bahan, dan interior-eksterior rumah. Tentunya bangunan rumah pada umumnya berbeda dengan bangunan rumah pikir. Pondasi bangunan rumah pikir *(mindset-mindmap)* bagian inti (esensi) adalah agama dan sunnatullah (hukum alam), sedangkan kerangka/pilar sebagai pengikat rumah pikir adalah IMAN-TAKWA. Agama esensinya adalah taat (ketaatan/ketundukan), dan taslim adalah penyerahan secara totalitas kepada Allah SWT dengan goal keselamatan. Sunnatullah (ketentuan/kepastian) Allah yang dikenal dengan hukum alam yang pembuktian dengan sains nondikotomis. Dengan perkataan lain, Sunnatullah esensinya adalah Sains. Substansi Agama dan Sains Nondikotomik adalah segala apa yang terkait dengan *'Ulum ad-Din, Natural Science* dan *Technology, Social Science* dan *Humanities.*

3). Revolusi Mental

Setiap diri manusia telah mendapatkan anugerah dan kurnia Allah SWT berupa jasmani dan rohani. Peran, tugas, dan fungsi

manusia yang Allah SWT amanatkan kepada hamba-hamba-Nya sudah jelas dan tegas, misalnya disebutkan di dalam al-Quran Surat Adz-Zariat ayat 56: manusia sebagai hamba Allah yang menyembah hanya kepada-Nya, dan disebutkan dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 30: manusia sebagai khalifah (wakil) Allah di muka bumi. Untuk menunaikan peran, tugas, dan fungsi tersebut, di dalam setiap diri manusia telah diberikan Allah SWT fitrah yang memiliki sifat *hanief* kepada kebaikan dan kebenaran. Sebagai filter kebaikan dan kebenaran manusia telah diberi akal pikiran dan sistem saraf otak yang dahsyat dan menakjubkan.

Agar manusia di dalam menjalankan peran, tugas, dan fungsinya tidak terjadi kesesatan, kedhaliman, dan kesengsaraan, Allah SWT telah memilih dan memberikan pedoman abadi yang mutlak kebenaran dan kebaikannya berupa al-Qur'an. Sebagai pembawa risalah al-Qur'an Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menunjukkan, menjelaskan, memberikan contoh teladan di dalam memahami al-Qur'an kepada para umatnya. Segala apa yang diucapkan, dilakukan, dan direncanakan Nabi Muhammad SAW disebutnya hadis/sunnah Nabi. Hadis atau sunnah Nabi dijadikan sebagai dasar dan pedoman yang kedua setelah al-Quran bagi umat Nabi di dalam menjalankan peran, tugas, dan fungsinya. Dengan berpedoman al-Qur'an dan Hadis Shahihah Nabi Muhammad SAW umat manusia akan terhindar dari kesesatan, kezhaliman, dan kesengsaraan.

4). Rumah Transisi, Rumah Pikir dan Revolusi Mental

Secara esensial dan substansial 3 R (rumah transisi, rumah pikir, dan revolusi mental) merupakan hubungan fungsional, nondikotomis, utuh, dan komprehensif dalam upaya wujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam priambul UUD 1945 dan Pancasila.

Rumah transisi sebagai upaya persiapan dan kesiapan presiden dan wakil presiden terpilih dalam mengemban amanat bangsa Indonesia yang esensinya adalah amanat Tuhan melalui para hamba-Nya sebagai wakil-wakil Tuhan di muka bumi melalui PILPRES

dengan memilih para pemimpinnya. Untuk mempertahankan, memperjuangkan dan mengamalkan rumusan-rumusan program nasional diperkuat dengan *mindset* (pola pikir) yang diperkuat ke dalam rumah pikir. Rumah pikir pondasinya agama dan sunnatullah (hukum alam) dan pengikatnya adalah iman dan takwa. Revolusi mental akan berjalan lancar jika rumah pikir umat manusia bangunan dan pilar kuat, bermartabat, dan fungsional. Oleh karena pada hakikatnya revolusi mental tidak bisa lepas dari rumah pikir yang diawali rumah transisi yang diciptakan oleh Jokowi-Jk. Ke-3 R tersebut dapat dijadikan suatu model atau pendekatan dalam mengatasi permasalahan umat manusia dalam berbangsa dan bernegara.

Dilihat dari segi urgensi kepentingan dan keberpihakan terhadap umat manusia, agama dan sains tidak ada bedanya. Keduanya berperan dan mempunyai tujuan mulia, yakni memajukan dan membimbing umat manusia, baik secara jasmani maupun rohani ke arah peradaban baru. Hal yang membedakan antara sains dan agama adalah terletak pada prinsip dasar, dalam sains tidak mengenal halal dan haram, tidak mengenal istilah tabu, tidak mengenal batasan-batasan, sehingga jika segala sesuatu bisa dibuktikan secara logika (rasio) dan didasarkan pada metode empiris serta ilmiah, hukumnya menjadi sah. Sementara dalam agama, dibatasi oleh halal dan haram, pantas dan tidak pantas, boleh dan tidak boleh, baik dan buruk. Oleh karena itu, pada hakikatnya sains tidak bebas nilai karena apapun hasil temuan pemikiran, penelitian saintifik di dalamnya sarat bermuatan nilai. Hal ini dapat dijelaskan melalui kajian metafisika. Untuk memperjelas agama dan sains nondikotomik dengan metafisika, yaitu ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan hal-hal yang nonfisik atau tidak tampak. Bahwa semua yang bersifat fisik di dalamnya tersembunyi nilai-nilai. Hal ini sesuai dengan pendapat Max Scheler bahwa semua fakta empiris di dalamnya tersembunyi nilai. Fakta empiris meliputi data, fakta, benda, peristiwa, kejadian, suatu hal, dan norma di dalamnya tersembunyi nilai-nilai. Hal-hal yang nonfisik atau tidak tampak secara

riil adalah nonfisik. Berdasarkan logika bahwa setiap adanya fisik yang riil/konkret, maka ada yang nonfisik (tidak tampak). Langkah-langkah ini disebutnya dengan dalil-dalil *aqly* (menurut akal pikiran). Adapun hal-hal yang nonfisik jika tidak mungkin sama dengan yang fisik, maka ditingkatkan satu tingkat lagi dengan dalil *naqly* (sumbernya firman/wahyu Allah SWT). Di dalamnya hal-hal nonfisik sarat muatan nilai. Oleh karena itu, baik yang fisik maupun yang nonfisik pada hakikatnya sarat muatan nilai.

c. *Alternatif dan Solusi Perbedaan Penentuan Awal Bulan Qamariyah*

1). Ketentuan Allah SWT

Tafsir Ilmi (Kemenag RI, 2010:6) menyebutkan bahwa ketentuan Allah terbagi dua: *pertama,* disebut *sunnatullâh,* yaitu hukum dan ketentuan Allah yang berlaku pada seluruh alam dan makhluk-Nya sering disebut juga dengan hukum alam. Semua makhluk, baik manusia, binatang, tumbuhan, dan benda anorganik, tunduk dan patuh pada hukum alam yang telah ditetapkan-Nya. *Kedua*, agama, yaitu hukum dan ketentuan Allah bagi manusia yang mengharapkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jika pada hukum alam atau *sunnatullâh* semua makhluk tidak ada pilihan kecuali harus tunduk dan patuh, maka pada agama yang hanya diperuntukkan bagi manusia, manusia dapat memilih untuk taat atau tidak. Mereka yang taat akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, dan yang tidak, akan mendapatkan akibat di dunia dan akhirat. Agama dan sains dalam kajian teoretis dan praktik hendaknya memenuhi delapan esensi, yaitu: manfaat, sumber, objek, materi, sistem, tujuan, pendekatan, dan metode. Untuk mewujudkan mindset nondikotomis agama dan sains tentunya memenuhi delapan unsur dan masing-masing unsur memenuhi (tiga karakteristik ilmiah), yaitu: muatan rasional, empiris, dan sistematis. Metodologi kajian *Ulum ad-Din* memenuhi metodologi: teologis-dogmatis-filosofis-metodologis atau *MIN AN-NASH ILA AL-WAQI'*, sedangkan metodologi kajian sains: filosofis-metodologis-teologis-dogmatis atau *MIN AL-WAQI' ILA AN-NASH*

Dalam seluruh aspek realitas dan fakta hidup dan sistem kehidupan manusia tidak ada yang luput dari dua ketentuan agama dan sunnatullah/sains. Contoh konkret manusia dalam hidup seorang diri dan apalagi hidup bermasyarakat mulai dari ide/gagasan/konsep yang ada pada diri manusia tidak ada satu pun yang lepas dari agama dan sains, lebih-lebih ketika ide/gagasan/konsep diwujudkan dalam realitas dan fakta riil berupa tingkah laku perbuatan, interaksi, komunikasi, berhubungan satu dengan yang lain. Kesemua itu sarat berkaitan dengan agama dan sains. Dengan demikian segala apa yang tersirat dan tersurat dalam diri manusia secara utuh nondikotomis saling berkaitan dan menjadi satu keutuhan. Demikian pula ketika umat Islam akan menentukan awal bulan qamariyah yang berkaitan dengan ibadah puasa, haji, salat, dan zakat berkaitan dengan waktu memerlukan pembuktian dengan peredaran bulan sabit. Oleh karena itu, penentuan awal bulan qamariyah yang hingga kini dilakukan umat Islam dengan metode hisab dan rukyah perlu dilakukan secara utuh nondikotomis.

2). Metodologi Penentuan Awal Bulan Qamariyah

Pada umumnya di Indonesia dalam menentukan awal bulan qamariyah terutama 1 Ramadlan, 1 Syawwal, dan "1 Dzulhijjah" ditetapkan oleh pemerintah cq. Kementerian Agama melalui sidang itsbat badan hisab dan rukyah Kementerian Agama RI dan dihadiri oleh pemerintah (Kementerian Agama), MUI, para ahli antariksa dari LAPAN, BOSA, Penoropong Bintang, para ulama dari berbagai ormas Islam, para duta besar dari perwakilan negara sahabat dan para tokoh agama. Badan hisab dan rukyah melakukan pemantaun bulan sabit pada akhir bulan untuk mengetahui pergantian bulan, dan bahkan tim rukyah hilal dilakukan oleh Kementrian Agama di tingkat provinsi seluruh Indonesia dengan menugasi badan hisab dan rukyah masing-masing. Dengan hisab sudah bisa dihitung kapan permulaan tanggal pada setiap bulan kapan pun, sekarang, kemudian, dan bahkan bisa ditentukan melalui perhitungan (hisab) sepanjang masa. Hisab dilakukan berdasarkan pemahaman firman Allah SWT dalam al-Qur'an, sedangkan rukyah adalah suatu metode

melihat bulan *bil-fi'li* atau mengamati, mengobservasi tampak atau tidak bulan sabit secara riil/konkret. Metode hisab dipedomani oleh semua ORMAS ISLAM. Namun ada perbedaan di dalam menempatkan metode hisab tersebut. Misalnya, Muhammadiyah menentukan awal bulan dengan WUJUD AL-HILAL meskipun hisab ketinggian hilal 0 derajat, sedangkan ORMAS lain seperti NU hisab diperhitungkan ketika ketinggian hilal di atas 3 derajat dengan melakukan IMKAN AL-RUKYAH, dan tetap dilakukan rukyah al-hilal. Metode hisab jika dikaji secara ilmiah lebih mengunggulkan dasar ilmiah yang didasarkan ayat-ayat al-Qur'an tanpa mempertimbangkan dasar-dasar sunnah dan rukyah hilal, sedangkan metode rukyah lebih mengunggulkan hasil pengamatan hilal dengan tetap mempertimbangkan metode hisab yang didasarkan ayat al-Quran dan metode rukyah tidak mengabaikan metode hisab, dikuatkan sunnah Nabi Muhammad saw, antara lain: *berpuasalah karena melihat bulan dan berbukalah karena melihat bulan, dan jika bulan tidak terlihat karena awan, maka istikmal (sempurnakan bilangan bulan tiga puluh hari).*

3). Implikasi Mindset (Pola Pikir) Manusia Nondikotomis

Dalam mengatasi perbedaan yang belum kunjung usai dengan mencapai *kalimatun sawa* (titik temu) tentunya upaya untuk mencapai ITTIFAQ memerlukan perjuangan yang terus menerus tanpa bosan dan apalagi putus asa, karena secara esensial dan substansial dapat dipertemukan dengan *mindset* dan *mindmap* nondikotomis sebagai berikut.

Allah SWT telah mengajarkan dan memberikan petunjuk kepada hamba-Nya dengan lengkap, jelas, dan tegas. Ini dapat diilustrasikan:

1. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an yang secara garis besar berisi tiga hal, yaitu (a) tentang dogma (isi firman) atau ritual, (b) tentang kauniyah (isi firman alam semesta seisinya termasuk Bulan Sabit), dan (c) tentang nafsiyah/insaniyah (isi firman manusia seutuhnya).

2. Allah SWT tidak saja berfirman tentang kauniyah (isi firman alam semesta seisinya), dan tentang nafsiyah/insaniyah (isi firman manusia seutuhnya), akan tetapi Allah SWT menciptakan alam semesta seisinya: matahari, bumi, dan bulan, dan manusia seutuhnya.
3. Firman-firman Allah SWT dalam al-Quran dapat dikategorikan dan diklasifikasikan sebagai dasar pijakan secara ilmiah atau teoretis
4. Segala ciptaan Allah SWT yang riil atau konkret sebagai bukti autentik lebih menguatkan keyakinan bagi hamba-hamba-Nya yang beriman dan bertakwa.
5. Hubungan firman Allah SWT dalam al-Quran dengan segala Ciptaan-Nya tidak bertentangan, tidak berdiri sendiri akan tetapi menjadi satu keutuhan dan kebenaran mutlak.

Penjelasan singkat ini dapat dijadikan alternatif dan solusi tentang perbedaan penentuan awal bulan qamariyah. Pelajaran yang dapat diambil dari uraian di atas sebagai berikut.

1. Penentuan awal bulan berdasarkan hisab yang dilandasi ayat al-Quran masih bersifat teoretis/ilmiah yang masih memerlukan alat bukti riil/konkret tampak atau terlihat bulan sabit, dan dasar dari hadis Nabi Muhammad saw.
2. Penentuan awal bulan berdasarkan rukyah al-hilal (*rukyah bil-fi'li*) adalah pembuktian riil atau konkret secara yakin terlihatnya bulan sabit dengan validasi wujud hilal konkret.
3. Jika bulan sabit saat dilakukan rukyah tidak tampak dikarenakan terhalang awan, maka dihitung istikmal bilangan bulan 30 hari. Usia bulan qamariyah 29 atau 30 hari. Ketika sudah istikmal 30 hari, maka sudah otomatis setelah itu dihitung tanggal 1 bulan baru berikutnya.
4. Penentuan metode hisab masih bersifat teoretis/ilmiah karena baru mendasarkan hisab pada firman Allah SWT dalam al-Quran, sedangkan penentuan metode rukyah adalah mendasarkan pada hilal ciptaan Allah SWT yang tampak terlihat secara riil/konkret.

5. Hubungan metode hisab dan rukyah secara esensial dan substansial menjadi satu kesatuan utuh nondikotomis yakni hisab dan rukyah berdasarkan ayat al-Quran dan sunnah. Metode hisab mendasarkan pesan ayat al-Qur'an, dan rukyah hilal berdasarkan pesan ayat al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, berdasarkan penglihatan bulan secara riil/konkret. Oleh karena itu, hisab dan rukyah merupakan kebenaran yang tidak berdiri sendiri akan tetapi hubungan keduanya ibarat satu keping mata uang sehingga tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain.

E. Contoh Implementasi Berpikir Pendekatan Dialektik

Tema/subtema: Pendidikan Agama Islam

Langkah pertama: tahapan tesis

1. Pahami pengertian atau makna kata Pendidikan; Agama; dan Islam (lihat kamus)
2. Pahami pengertian atau makna konsep/definisi kata Pendidikan; Agama; dan Islam (lihat referensi)
3. Pahami pengertian atau makna sosial historis (sosial-politik-budaya-agama) Pendidikan; Agama; dan Islam (lihat referensi dan ensiklopedi)

Ketiga langkah di atas disebut tahapan memahami tesis (pendapat, ide, gagasan, konsep orang lain)

Langkah kedua: tahapan antitesis

1. Tulis masing-masing pengertian 1,2, dan 3 yang diambil dari sumber yang berbeda-beda.
2. Identifikasikan masing-masing dari ketiga pengertian sehingga diketahui unsur masing-masing. Lakukan klasifikasi atau penggolongan sistemis dari ketiga pengertian tersebut. Pada saat klasifikasi menunjukkan adanya kompleksitas dan adanya persamaan dan perbedaan sehingga memerlukan kajian komprehensif dan interdisipliner.
3. Pembahasan unsur-unsur yang sama dan yang berbeda dari ketiga pengertian tahapan tesis.

4. Mengapa ada unsur-unsur yang sama dan berbeda supaya dibahas secara tuntas.
5. Menemukan titik temu/benang merah/kalimat sawa dari ketiga pengertian tahap tesis. Rumuskan titik temu tersebut menjadi pendapat dan sikap penulis tentang Pendidikan Agama Islam.

Langkah ketiga: sintesis kreatif

1. Sintesis kreatif adalah sikap/pendapat penulis tentang Pendidikan Agama Islam
2. Pendapat penulis merupakan orisinalitas pemikiran penulis dan selanjutnya disebut sebagai tesis baru bagi penulis
3. Sintesis kreatif atau tesis baru penulis dipahami lagi sebagaimana pemahaman pendekatan dialektis.
4. Hasil pemahaman penulis berupa sintesis kreatif disusun menjadi bab/subsubbab, dan seterusnya.
5. Bab/subbab/subsubbab dipahami secara dialektis sehingga Pendidikan Agama Islam dinamis, inovatif, kritis, kreatif, kontekstual, dan produktif serta menyenangkan.

Berpikir pendekatan dialektik tentang Pendidikan Agama Islam senantiasa berpikir keutuhan dan menuju kesempurnaan, karena berpikir dialektik ini mencari akar filasafat Pendidikan Agama Islam; Teori-teori Pendidikan Agama Islam; Kurikulum Pendidikan Agama Islam; Kompetensi/tujuan Pendidikan Agama Islam, Pendekatan, Metode, Teknik, dan Evaluasi Pendidikan Agama Islam. Kerangka teoretik (filasafat Pendidikan Agama Islam; Teori-teori Pendidikan Agama Islam; Kurikulum; Kompetensi/tujuan Pendidikan Agama Islam, Pendekatan, Metode, Teknik, dan Evaluasi Pendidikan Agama Islam) dihubungkan dengan praktik di lapangan Pendidikan Agama Islam selama ini.

CONTOH BERPIKIR PENDEKATAN DIALEKTIS TENTANG KURIKULUM

Langkah 1 Tesis

1. Pengertian kurikulum secara etimologi

Pengertian etimologi kurikulum berasal dari bahasa Yunani *curir* yang artinya pelajari dan *curere* yang berarti tempat berpacu. Istilah kurikulum berasal dari dunia olah raga pada zaman Romawi Kuno di Yunani yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis finish (Hasan Langgulung, Manusia dan Pendidikan: Suatu analisis Psikologi Pendidikan (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1986), hal. 176. Kurikulum dalam bahasa Arab *manhaj* yang artinya jalan terang yang dilalui manusia di berbagai kehidupan. Kurikulum pendidikan *manhaj ad-dirasah* dalam kamus tarbiyah adalah seperangkat perencanaan dan media yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan (Ibid., hlm. 165)

Langkah 2 Antitesis

1. bahasa Yunani etimologi kurikulum berasal dari *curir* yang artinya pelajari dan *curere* yang berarti tempat berpacu. Istilah kurikulum berasal dari dunia olah raga pada zaman Romawi Kuno di Yunani yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis finish
2. bahasa Arab *manhaj* yang artinya jalan terang yang dilalui manusia di berbagai kehidupan. Kurikulum pendidikan *manhaj ad-dirasah* dalam kamus tarbiyah adalah seperangkat perencanaan dan media yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan

Identifikasi dan klasifikasi

point 1: unsur *curir* = pelajari; *curere* = tempat berpacu istilah kurikulum dari dunia olah raga; suatu jarak dari start hingga

finis yang harus ditempuh

point 2. Unsur manhaj = jalan terang dilalui manusia berbagai kehidupan; manhaj ad-dirasah = seperangkat perencanaan dan media yang dijadikan acuan lembaga pendidikan capai tujuan tertentu.

Langkah 3 Sintesis

Kurikulum adalah sesuatu jarak dan jalan yang harus dipelajari dan ditempuh oleh manusia yang direncanakan lembaga pendidikan sebagai media dan acuan untuk mencapai tujuan pendidikan.

2. Pengertian kurikulum secara terminologi

Langkah tesis

Kurikulum secara terminologi adalah rancangan pengajaran atau sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu program untuk memperoleh ijazah (Crow and Crow dalam Oemar Hamalik. Pembinaan Pengembangan Kurikulum (Bandung: Pustaka Martina, 1987), hlm. 2. Kurikulum meliputi empat kategori, yaitu: (1) *curriculum as product, (2) curriculum as a program, (3) curriculum as intended learnings, (4) curriculum as the experiences pf the leaner* (James A. Beane, dkk. Curriculum Palnning and Development (Boston: Allyn and Bacon, 1986), hlm 29. Definisi kurikulum sebagai rencana mengajar atau sesuatu yang direncanakan untuk dipelajari anak-anak (*a plan for learning*) (Hilda Taba, Curriculum Development: *Theory and Practice*) (New York: Harcourt, Brace and World, 1962), hlm. 12. Zakiah Daradjat, dkk. Kurikulum sebagai suatu program yang direncanakan dalam bidang pendidikan dan dilaksanakan untuk mencapai sejumlah tujuan tertentu (Zakiah Daradjat, dkk. Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 121. Menurut Al-Syaibani bahwa penetapan dasar pokok kurikulum didasarkan pada dasar agama, dasar falsafah, psikologis, dan sosiologis. Artinya, dalam menyusun kurikulum harus berdasarkan dan mempertimbangkan nilai-nilai keagamaan yang tercantum dalam al-Quran dan Sunah Rasulullah, nilai ini merupakan kebenaran yang universal, abadi,

dan bersifat futuristik (Al-Syaibani, Falsafah Pendidikan Islam (Bandung: Bulan Bintang, 2004), hlm. 56.

Langkah Antitesis

Identifikasi dan klasifikasi

1. rancangan pengajaran atau sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu program untuk memperoleh ijazah
2. merupakan kumpulan mata pelajaran yang harus disampaikan guru atau dipelajari oleh siswa. Pendapat ini sejak zaman Yunani Kuno dalam lingkungan atau hubungan tertentu pandangan ini dan masih dipakai sampai sekarang
3. empat kategori, yaitu: (1) *curriculum as product, (2) curriculum as a program, (3) curriculum as intended learnings, (4) curriculum as the experiences pf the leaner*
4. rencana mengajar atau sesuatu yang direncanakan untuk dipelajari anak-anak suatu program yang direncanakan dalam bidang pendidikan dan dilaksanakan untuk mencapai sejumlah tujuan tertentu, penetapan dasar pokok kurikulum didasarkan pada dasar agama, dasar falsafah, psikologis, dan sosiologis

Langkah Sintesis

Kurikulum adalah rancangan program pembelajaran yang direncanakan lembaga pendidikan yang mencakup sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematis, disampaikan guru dalam pembelajaran dan dipelajari oleh siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran dan menyelesaikan suatu program pendidikan untuk memperoleh ijazah.

3. Pengertian kurikulum menurut historis

Pengertian kurikulum menurut historis kurikulum merupakan kumpulan mata pelajaran yang harus disampaikan guru atau dipelajari oleh siswa. Pendapat ini sejak zaman Yunani Kuno dalam lingkungan atau hubungan tertentu pendangan ini dan masih dipakai sampai sekarang (Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembang-

an Kurikulum Teori dan Praktik, cet. Ke 7 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 4.

Untuk melakukan evaluasi berpikir pendekatan dialektik ini dapat dibantu dengan peta konsep berikut ini.

PETA KONSEP 3
ESENSI AGAMA DAN SAINS NONDIKOTOMIS/ INTEGRATIF-INTERKONEKTIF

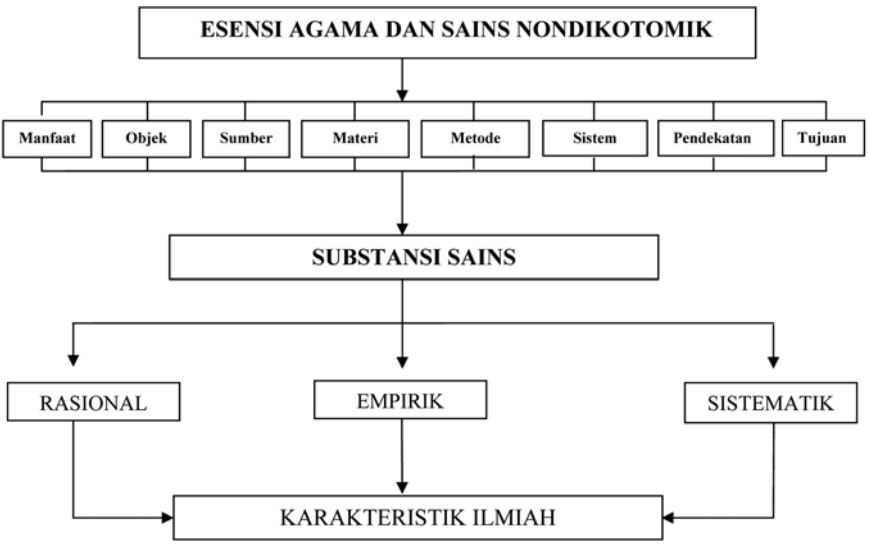

Peta konsep ini menjelaskan bahwa esensi agama dan sains nondikotomis harus memiliki paling tidak 8 (delapan) unsur, yaitu: (1) manfaat, (2) objek, (3) sumber, (4) materi, (5) metode, (6) sistem, (7) pendekatan, dan (8) tujuan. Kedelapan unsur saling berhubungan ke dalam sebuah sistem sehingga masing-masing unsur merupakan bagian dari sistem itu sendiri. Jika mengkaji dan mendalami esensi agama dan sains nondikotomis, maka kedelapan unsur harus eksplisit dan implisit ke dalam masing-masing unsur. Dengan demikian agama dan sains tidak terdapat pemilahan, pemisahan, perbedaan dan juga pertentangan. Oleh karena itu, pada hakikatnya agama dan sains menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan antar keduanya.

Kedelapan unsur esensi agama dan sains nondikotomis menjadi satu kesatuan pula sebagai unsur-unsur substansi agama dan sains nondikotomis. Dalam setiap mengkaji dan mendalami setiap unsur harus memenuhi kriteria karakteristik ilmiah. Karakteristik ilmiah secara umum adalah rasional, empiris, dan sistematik.

1. Rasional berarti kegiatan ilmiah dilakukan dengan cara-cara masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia.
2. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan.
3. Sistematik berarti proses yang digunakan dalam kegiatan ilmiah menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

Dilihat dari segi urgensi kepentingan dan keberpihakan terhadap umat manusia, agama dan sains tidak ada bedanya. Keduanya berperan dan mempunyai tujuan mulia, yakni memajukan dan membimbing umat manusia, baik secara jasmani maupun rohani ke arah peradaban baru. Hal yang membedakan antara sains dan agama adalah terletak pada prinsip dasar, dalam sains tidak mengenal halal dan haram, tidak mengenal istilah tabu, tidak mengenal batasan-batasan, sehingga jika segala sesuatu bisa dibuktikan secara logika (rasio) dan didasarkan pada metode empiris serta ilmiah, hukumnya menjadi sah. Sementara dalam agama, dibatasi oleh halal dan haram, pantas dan tidak pantas, boleh dan tidak boleh, baik dan buruk.

Oleh karena itu, pada hakikatnya sains tidak bebas nilai karena apapun hasil temuan pemikiran, penelitian saintifik di dalamnya sarat bermuatan nilai. Hal ini dapat dijelaskan melalui kajian metafisika. Untuk memperjelas agama dan sains nondikotomis dengan metafisika, yaitu ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan hal-hal yang nonfisik atau tidak kelihatan. Hal-hal fisik adalah riil/konkret dapat ditangkap melalui *hawasy* (panca indra). Yang fisik ini bisa ditangkap melalui ilham/insting manusia, bisa juga ditangkap melalui akal pikiran manusia. Bahwa semua yang bersifat fisik di dalamnya tersembunyi nilai-nilai. Hal ini sesuai dengan pendapat

Max Scheler bahwa semua fakta empiris di dalamnya tersembunyi nilai. Fakta empiris meliputi data, fakta, benda, peristiwa, kejadian, suatu hal, dan norma di dalamnya tersembunyi nilai-nilai.

Hal-hal yang nonfisik atau tidak kelihatan secara riil adalah nonfisik. Berdasarkan logika bahwa setiap adanya fisik yang riil/konkret, maka ada yang nonfisik (tidak tampak). Yang nonfisik riil faktanya nonfisik. Untuk menangkap hal-hal fisik masih dapat diperoleh melalui tahapan panca indra, insting, dan akal. Langkah-langkah ini disebutnya dengan dalil-dalil *aqly* (menurut akal fikiran). Adapun hal-hal yang nonfisik jika tidak mungkin sama dengan yang fisik, maka ditingkatkan satu tingkat lagi dengan dalil *naqly* (sumbernya firman/wahyu Allah swt). Di dalamnya hal-hal nonfisik sarat muatan nilai. Oleh karena itu, baik yang fisik maupun yang nonfisik pada hakikatnya sarat muatan nilai.

Di samping itu paling tidak ada sepuluh konsep islami yang secara bersama-sama membentuk kerangka nilai sains, yaitu: (i) *tauhid* (keesaan Allah), (ii*) khalifah* (kekhalifahan manusia), (iii) ibadah, (iv) ilmu (pengetahuan), (v) halal (diperbolehkan), (vi) haram (dilarang), (vii) *'adl* (keadilan), (viii) *zhulm* (kezaliman), (ix) *istishlah* (kemaslahatan umum), dan (x*) dhiya* (kecerobohan).[12]

Wawasan epistemologi Islam pada hakikatnya bercorak tauhid, dan tauhid dalam konsep Islam tidak hanya berkaitan dengan konsep teologi saja, tetapi juga dengan konsep antropologi dan epistemologi. Epistemologi Islam sesungguhnya tidak mengenal prinsip dikotomi keilmuan, seperti yang sekarang banyak dilakukan di kalangan umat Islam Indonesia, yang membagi ilmu agama dan ilmu umum, atau syariah dan nonsyariah… Dalam konsep Islam, ilmu bisa diperoleh melalui dua jalan yaitu jalan *kasbi* atau *khusuli* dan jalan *ladunni* atau *khudhuri.*[13]

Basis konseptualisasi dari realitas adalah bersifat spiritual. Inilah sunnah rasul dalam berpikir. Sunnah rasul inilah yang seharusnya dikembangkan menjadi suatu kerangka metodologi dari filsafat Islam, sehingga filsafat Islam basisnya bukan dan tidak lagi pada pemikiran Yunani yang rasionalistik, tetapi dibangun di atas landasan

sunnah Rasulullah dalam berpikir yang bercorak rasional transendental.[14]

CONTOH BERPIKIR DIALEKTIS
(TESIS – ANTITESIS — SINTESIS KREATIF)
KEYWORD (KATA KUNCI) ILMU PENGETAHUAN (SCIENTIFIC KNOWLEDGE)

I. PENGERTIAN/DEFINISI ILMU PENGETAHUAN

A. The Liang Gie

"Ilmu adalah rangkaian aktivitas manusia yang rasional dan kognitif dengan berbagai metode berupa aneka prosedur dan tata langkah sehingga menghasilkan kumpulan pengetahuan yang sistematis mengenai segala gejala kealaman, kemasyarakatan atau keorangan untuk tujuan mencapai kebenaran, memperoleh pemahaman, memberikan penjelasan ataupun melakukan penerapan" (Pengantar Filsafat Ilmu, hlm. 93)

Definisi ini mengandung unsur-unsur sebagai berikut.

1. Adanya aktivitas manusia yang terus menerus
2. Dilakukan secara rasional dan kognitif
3. Menggunakan metode ilmiah
4. Adanya produk (hasil) pengetahuan yang sistematis
5. Adanya pengetahuan tentang kejadian alam, kemasyarakatan atau perorangan
6. Adanya tujuan yang jelas, untuk mencapai kebenaran, memperoleh pemahaman, memberikan penjelasan ataupun melakukan penerangan. Dengan kata lain adanya tujuan akhir dan tujuan operasional.

B. Conny R. Semiawan, dkk.

"Ilmu merupakan salah satu dari sekian pengetahuan, dan kadang-kadang disebut juga dengan nama pengetahuan ilmiah (scientific knowledge), karena metode untuk memperoleh dilakukan melalui metode ilmiah" (Dimensi Kreatif Dalam Filsafat Ilmu, hlm. 45).

Definisi ini mengandung unsur-unsur sebagai berikut.

1. Ilmu merupakan salah satu bagian dari pengetahuan
2. Ilmu disebut juga pengetahuan ilmiah (scientific knowledge)
3. Ilmu menggunakan metode ilmiah.

C. Mohr (1977)

"Sains secara operasional sebagai suatu usaha akal manusia yang teratur dan taat azaz menuju penemuan keterangan tentang pengetahuan yang benar" (Pengantar ke Filsafat Sains Karangan Andi Hakim Nasution (1989, hlm. 27).

Definisi ini mengandung unsur-unsur sebagai berikut.

1. Adanya usaha akal manusia
2. Dilakukan secara teratur dan taat
3. Azas dan tujuan menemukan pengetahuan yang benar.

D. Jujun S. Suriasumantri

"Ilmu sebagai disiplin adalah pengetahuan yang mengembangkan dan melaksanakan aturan-aturan mainnya dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhannya" (Filsafat Ilmu, 1994, hlm. 35).

Definisi ini mengandung unsur-unsur sebagai berikut.

1. Pengetahuan yang mengembangkan dan melaksanakan aturan
2. Penuh tanggung jawab
3. Adanya kesungguhan.

E. Beerling, Kwee, Mooij, Van Peursen

"Ilmu timbul berdasarkan atas hasil penyaringan, pengaturan, kuantifikasi dan objektifikasi" (Pengantar Filsafat Ilmu, penerjemah Soejono Soemargono, 1990, hlm. 14-15).

Defini ini mengandung unsur-unsur sebagai berikut.

1. Ilmu merupakan hasil penyaringan
2. Adanya pengaturan
3. Adanya kuantifikasi
4. Adanya objektifikasi.

II. IDENTIFIKASI DAN KLASIFIKASI DEFINISI

Kelima definisi ilmu pengetahuan tersebut di atas dapat diidentifikasi dan diklasifikasikan sebagai berikut.

A. Definisi pertama lebih lengkap apabila dikomparasikan dengan definisi kedua, ketiga, keempat, dan kelima, karena definisi pertama secara garis besar sudah mencakup definisi dari keempat yang lain. Definisi pertama meliputi:
   1. Proses ilmiah (aktivitas akal manusia dan metode ilmiah)
   2. Produk (hasil) dari proses ilmiah
   3. Tujuan akhir dan aplikatif (mendapatkan kebenaran dan sebagai penjelas penerapan) ilmu pengetahuan.

B. Definisi kedua menitikberatkan pada:
   1. Pembagian dan pengelompokkan ilmu pengetahuan sebagai bagian pengetahuan itu sendiri
   2. Ilmu pengetahuan disebut juga scientific knowledge
   3. Menggunakan metode ilmiah

C. Definisi ketiga membatasi pada:
   1. Proses ilmu pengetahuan (aktivitas akal manusia terus menerus dan taat aturannya)
   2. Sasaran (tujuan) pengetahuan yang benar

D. Defini keempat memfokuskan pada:
   1. Fungsi ilmu pengetahuan
   2. Pelaksanaan pengetahuan dengan penuh tanggung jawab dan bersungguh-sungguh.

E. Definisi kelima menitikberatkan pada:
   1. Produk penyeringan pengetahuan
   2. Kuantifikasi dan objektifikasi.

Kelima definisi ilmu pengetahuan dapat diklasifikasikan bahwa masing-masing definisi berfungsi saling melengkapi satu dengan yang lain, sehingga memerlukan kajian interdisipliner dari aspek filsafat, teori-teori ilmu pengetahuan, pendekatan, dan praktik/ implementasinya.

III. SINTESIS KREATIF/SIKAP PENULIS

"Ilmu pengetahuan adalah suatu aktivitas akal manusia terhadap suatu objek yang dilakukan secara sistematis, berdasarkan metode ilmiah untuk mendapatkan suatu ilmu pengetahuan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya baik secara intelektual, moral, spiritual, maupun operasional, sehingga ilmu pengetahuan itu, memberikan manfaat bagi kehidupan manusia da n pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri".

IV. SINTESIS KREATIFADALAHTESIS BARU BAGI PENULIS

"Ilmu pengetahuan adalah suatu aktivitas akal manusia terhadap suatu objek yang dilakukan secara sistematis, berdasarkan metode ilmiah untuk mendapatkan suatu ilmu pengetahuan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya baik secara intelektual, moral, spiritual, maupun operasional, sehingga ilmu pengetahuan itu, memberikan manfaat bagi kehidupan manusia da n pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri".

Definisi penulis mengandung unsur-unsur sebagai berikut.

1. Adanya aktivitas akal manusia
2. Adanya objek dan sumber
3. Adanya metode ilmiah yang digunakan
4. Adanya tujuan dan pendekatan
5. Adanya produk (hasil) yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran intelektual, moral, spiritual, dan operasional
6. Adanya manfaat bagi manusia
7. Adanya manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

V. DISUSUN MENJADI BAB, SUB BAB, SUBSUB BAB

BAB I AKAL DAN AKTIVITAS
BAB II OBJEK DAN SUMBER ILMU PENGETAHUAN

BAB III STRATEGI ILMU PENGETAHUAN
BAB IV KEBERMAKNAAN ILMU PENGETAHUAN
BAB V PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN

CATATAN

[1]A.M.W. Pranarka, *Epistemologi Dasar Suatu Pengantar* (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1987), hlm.3.
[2]Diknas, KBI, (Jakarta: Diknas, 2000), hlm. 741.
[3]Muhbib Abdul Wahab, *Epistemologi & Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab,* (Jakarta: Lemlit UIN Syarif Hidayatullah, 2008), hlm. 27.
[4]R. Paryana Suryadipura, ***Manusia dengan Atomnya: Dalam Keadaan Sehat dan Sakit***, (Jakarta: Bumi Aksara: 1994), hlm. 235.
[5]Maksudin, *Desain Pengembangan Berpikir Integratif Interkonektif, Ibid.,*95-96.
[6]*Ibid.*, 97.
[7]Zuhairini, *Metodik Khusus Pendidikan Agama* (Surabaya: Usaha Nasional, 1983), hlm. 27.
[8]Chabib Toha, dkk., *Metodologi Pengajaran Agama* (Semarang: Fak. Tarbiyah IAIN Walisongo, 1999), hlm. 5.
[9]H. Endang Saifuddin Anshari, *Ilmu, Filsafat dan Agama,* (Surabaya: Bina Ilmu, 1979), hlm. 113
[10]*Ibid.,* 116.
[11]*Ibid.,* 109-110.
[12]Nasim Butt, *Sains dan Masyarakat Islam*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996), p. 67.
[13]Musa Asy'arie, *Filsafat Islam: Sunnah Nabi dalam Berfikir,* (Yogyakarta: LeSFI, 2002), hlm. 67 dan 72.
[14]*Ibid.,* 18.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M. Amin, "Dimensi Epistimologis-Metodologis Pendidikan Islam", dalam *Jurnal Filsafat*, Universitas Gadjah Mada, seri 21, Mei 1995.

Abdullah, M. Amin, "Relevansi Studi Agama-agama dalam Milenium Ketiga: Mempertimbangkan Kembali Metodologi dan Filsafat Keilmuan Agama dalam Upaya memecahkan Persoalan Keagamaan Kontemporer" dalam *Jurnal Ulumul Qur'an No. 5/VII/97,* Jakarta, Cipta Prima Budaya, 1997.

Achmadi, *Islam sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan*, Yogyakarta, Aditya Media, 1992.

Ahmad, Khurshid, *Islam Prinsip Dasar dan Karakteristiknya,* Bandung, Pustaka,1981.

Ahmad, Muhammad Abdul Qodir, *Metodologi Pengajaran Pendidikan Agama Islam,* Jakarta, Binbaga Depag Islam, 1985.

Al-Qardhawi, Yusuf, *Karakteristik Islam Kajian Analitik*, Surabaya, Risalah Gusti, 1995.

Anshari, H. Endang Saifuddin, *Ilmu, Filsafat dan Agama,* Surabaya: Bina Ilmu, 1979.

Arifin, M., *Ilmu Pendidikan Islam: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, Jakarta, Bumi Aksara, 1993.

Arifin, Muzayin, *Pendidikan Islam dalam Arus Dinamika Masyarakat: Suatu Pendekatan Filosofis, Pedagogis, Psikososial, dan Kultural,* Jakarta, Golden Terayon Press, 1988.

Arifin, Muzayyin, "Beberapa Masalah yang Perlu Dipikirkan tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Agama di Sekolah Umum", Bahan Seminar Pengembangan Pendidikan Agama, Jakarta, Depag RI, 1976.

Arikunto, Suharsimi, "Prinsip Dasar Pelaksanaan Evaluasi dalam Proses Belajar-Mengajar", Makalah Seminar Bulan Bahasa, FPBS IKIP Yogyakarta Tanggal 13 November 1997.

Arikunto, Suharsimi, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta, Bina Aksara, 1993.

Asy'arie, Musa. *Filsafat Islam: Sunnah Nabi dalam Berfikir,* Yogyakarta: LeSFI, 2002.

Atamadi, A. dan Y. Setyaningsih, *Transformasi Pendidikan: Memasuki Milenium Ketiga,* Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma, 2000.

Barnadib, Imam dan Sutari Imam Barnadib, *Beberapa Aspek Substansial Ilmu Pendidikan*, Yogyakarta, Andi Offset, 1996.

Barnadib, Imam, *Filsafat Pendidikan: Sistem dan Metode*, Yogyakarta, Andi Offset, 1994.

Beane, James A. dkk. *Curriculum Palnning and Development,* Boston: Allyn and Bacon, 1986.

Buchori, Muchtar, *Penelitian Pendidikan dan Pendidikan Islam di Indonesia,* Jakarta, IKIP Muhammadiyah Press, 1994.

Butt, Nasim. *Sains dan Masyarakat Islam*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1996.

Crow and Crow dalam Oemar Hamalik. *Pembinaan Pengembangan Kurikulum,* Bandung: Pustaka Martina, 1987.

Daradjat, Zakiah. dkk. *Ilmu Pendidikan Islam,* Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Darajat, Zakiah, dkk, *Ilmu Pendidikan Islam,* Jakarta, Bumi Aksara, 1972.

Depag RI, *Kurikulum/GBPP PAI SMU 1994*, Jakarta, Depag RI, 1994.

Depag RI, *Laporan Survey dan Seminar Pendidikan Agama pada Perguruan Umum,* Jakarta: Proyek Peningkatan Penelitian Keagamaan, 1969.

Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai,* Jakarta: LP3ES, 1994.

Diknas, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Diknas, 2000.

Diknas, *Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam SMU*, Jakarta, Diknas, 2002.

Djumhur, I. *Sejarah Pendidikan,* Bandung: C.V. Ilmu, 1976.
Driyarkara, *Driyarkara Tentang Pendidikan,* Yogyakarta, Kanisius, 1991.
Elmuhammadi, T.M. Usman, *Kuliah Iman dan Islam*, Jakarta, Pustaka Agus Salim, 1957.
Engkoswara, *Kecenderungan Kehidupan di Indonesia Menjelang Tahun 2000 dan Implikasinya terhadap Sistem Pendidikan,* Jakarta, Intermedia, 1986.
Feisal, Jusuf Amir, *Reorientasi Pendidikan Islam,* Jakarta, Gema Insani Press, 1995.
Gafur, Abdul, "Teknik Penyusunan Silabus Kurikulum Berbasis Kompetensi", Bahan Lokakarya Micro Teaching dan Praktek Pengalaman Lapangan bagi Dosen Pembimbing pada Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 28 Pebruari sd 1 Maret 2003
Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan,* Jakarta: LKIS, 1995.
Hasibuan, J.J. dan Moedjiono, *Proses Belajar Mengajar*, Bandung, Rosdakarya, 1992.
Hidayat, Komaruddin, *Dinamika Pemikiran Islam di Perguruan Tinggi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar,1999.
Husein, Machnun. *Pendidikan Islam dalam Lintasan Sejarah,* Yogyakarta: Nur Cahaya, 1981.
Irawan, Prasetya, *Teori Belajar Motivasi Dan Keterampilan Mengajar,* Jakarta, Dikti,1996.
Kardi, Soeparman dan Mohamad Nur, *Pengajaran Langsung*, Surabaya, Universitas Negeri Surabaya University Press, 2000.
Kartodirdjo, Sartono. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah,* Jakarta: Gramedia, 1992.
Langgulung, Hasan. *Manusia dan Pendidikan: Suatu analisa Psikologi Pendidikan,* Jakarta: Pustaka al-Husna, 1986.
Ludjito, Ahmad, *Pendekatan Integralistik Pendidikan Agama pada Sekolah di Indonesia dalam Reformulasi Filsafat Pendidikan Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996.

Madjid, Nurcholis "Merumuskan Kembali Pendidikan Pesantren", dalam M. Dawam Rahardjo, *Pergulatan Dunia Pesantren: Membangun dari Bawah,* Jakarta: P3M, 1985.

Madjid, Nurcholis, "Orientasi Baru Pendidikan Agama", dalam *Amanah,* Edisi Khusus, Nomor 06, Tahun X, Mei 1996, Jakarta, Amanah, 1996.

Makmun, Abin Syamsuddin, *Psikologi Kependidikan: Perangkat Sistem Pengajaran Modul,* Bandung, PT Remaja Rosdakarya, l996.

Mardapi, Djemari, "Metodologi Pendidikan Agama Islam di PTU dalam Menghadapi Heterogenitas Nilai Sekularisasi", dalam Fuaduddin & Cik Hasan Bisri, *Dinamika Pemikiran Islam di Perguruan Tinggi,* Jakarta: Logos, 1999.

Mastuhu, "Metodik Pendidikan Agama pada Perguruan Umum", dalam *Pengembangan Hasil-hasil Penelitian Pendidikan Agama,* Jakarta, Depag RI, 1976.

Muhadjir, Noeng, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial Suatu Teori Pendidikan*, Yogyakarta, Rake Sarasin, 1987.

Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Rake Sarasin, 1996.

Muhaimin dan Abdul Mujib, *Pemikiran pendidikan Islam : Kajian Filosofik dan Kerangka Dasar Operasionalisasinya*, Bandung, Trigenda Karya, 1993.

Muhaimin, et.al, *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, Bandung, Rosdakarya , 2001.

Nasution, Harun, "Agama dan Ilmu Pengetahuan Serta Peranannya di Zaman Modern Sekarang", dalam Sutan Takdir Alisjahbana, *Dasar-dasar Kerisis Semesta dan Tanggung Jawab Kita*, Jakarta, Dian Rakyat, 1983.

Noer, Deliar. *Administrasi Islam di Indonesia,* Jakarta: C.V. Rajawali, 1983.

Nur, Mohammad, *Strategi-Strategi Belajar,* Surabaya, Universitas Negeri Surabaya Press, 2000.

Nursikin, Mukh. Model Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di MAN Yogyakarta 3 dan SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta,"*Ringkasan Disertasi"*,Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Pasaribu, I.L. dan B. Simandjuntak, *Proses Belajar Mengajar*, Bandung, Tarsito, 1983.

Penjelasan Undang-undang RI No. 2 Tahun 1989, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.

Permendiknas No 23 Tahun 2006 Tanggal 23 Mei 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL).

Permendiknas No. 23 tahun 2006 tentang SKL untuk SKPDM, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),

Poerbakawatja, Soegarda. *Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka,* Jakarta: Gunung Agung, 1970.

Popham, W. James dan Eva L. Baker, *Bagaimana Mengajar Secara Sistematis*, Yogyakarta, Kanisius, 1989.

PP No.29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah Pasal 2, Jakarta, Sinar Grafika, 1993.

Pranarka, A.M.W., *Epistemologi Dasar Sautu Pengantar,* Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1987.

Rakajoni, T., *Strategi Belajar Mengajar Suatu Tinjauan Pengantar*, Jakarta, Depdikbud, 1985.

Reksohadiprodjo, Moh. Said, *Laporan YTKI Seminar tentang Pendidikan Agama dan Sistem Pendidikan Bangsa*, Jakarta, YTKI, 1972.

Saefudddin, A.M. et.al., *Desekularisasi Pemikiran: Landasan Islamisasi*, Bandung, Mizan, t.t.

Said, M. *Pendidikan Abad Kedua puluh dengan Latar Belakang Kebudayaannya,* Jakarta: Mutiara, Ed. I.P. Simanjuntak, 1981.

Soedjatmoko, *Etika Pembebasan,* Jakarta: LP3ES, 1985.

Soekamto, Toeti, *Teori Belajar dan Model-Model Pembelajaran,* Jakarta, Dikti, 1996.

Sudijono, Anas, *Penilaian Hasil Belajar Ranah Afektif dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, Yogyakarta, Fak. Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga, 1997.

Sudjana, Nana, *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar,* Bandung, Sinar Baru, 1989.

Sukmadinata, Nana Syaodih. *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik, cet. Ke 7,* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.

Sumardi, Muljanto. *Sejarah Singkat Pendidikan Islam di Indonesia,* Jakarta: LPIAK, Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Depag, 1977.

Sumaryono, E, *Hermeneutik; Sebuah Metode Filsafat*, Yogyakarta, Kanisius, 1995.

Suryadipura, R. Paryana. *Manusia Dengan Atomnya: Dalam Keadaan Sehat dan Sakit (Antropologi Berdasarkan Atomfisika),* Jakarta: Bumi Aksara, 1994.

Suryabrata, Sumadi, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta, Rajawali, 1984.

Syaibani, Al- *Falsafah Pendidikan Islam,* Bandung: Bulan Bintang, 2004.

Taba, Hilda. *Curriculum Development: Theory and Practice,* New York: Harcourt, Brace and World, 1962.

Thaha, M. Chabib, *Kapita Selecta Pendidikan Islam,* Yogyakarta, Pustaka Pelajar Offset, 1988.

Toha, Chabib. dkk., *Metodologi Pengajaran Agama,* Semarang: Fak. Tarbiyah IAIN Walisongo, 1999.

Toynbee, Arnold J., *Menyelamatkan Hari Depan Umat Manusia,* Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1988.

Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, (Bandung : Gitra Umbara, 2014)

UU Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta: PT Armas Duta Jaya.

UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Bandung: Citra Umbara, 2014.

Wahab, Muhbib Abdul. *Epistemologi & Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab,* Jakarta: Lemlit UIN Syarif Hidayatullah, 2008.

Yunus, Mahmud. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia,* Jakarta: Mutiara, 1979.

Yusuf, Tayar dan Saiful Anwar, *Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab,* Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997.

Zamroni, "Penilaian Hasil Pendidikan Agama Islam Ranah Afektif: Beberapa Alternatif Pengembangan Instrumen", dalam *Jurnal Penelitian Agama* No. 3 Januari-April 1993, Yogyakarta, Balai Penelitian P3M IAIN Sunan Kalijaga, 1993.

Zamroni, "Pengembangan Kurikulum dan Silabi" *Makalah Lokakarya,* Yogyakarta, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga, tanggal 22 Februari 1993.

Zuhairini, dkk. *Metodologi Pendidikan Agama Islam*, Solo, Ramadhani, 1993.

Zuhri, Saifuddin dan Syamsuddin Yahya, *Metodologi Pengajaran Agama,*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999.

Dekan dan Seluruh Civitas Akademika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Mengucapkan

Selamat & Sukses

Prof. Dr. H. Maksudin, M.Ag

Atas Pengukuhan sebagai guru besar
Bidang Ilmu Pendidikan Akhlak
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Yogyakarta - Rabu, 29 Mei 2024

fitkuinsk http://tarbiyah.uin-suka.ac.id

BIODATA PENULIS

Dr. Maksudin, M.Ag lahir di Kebumen, pada 16 Juli 1960. Menamatkan pendidikan jenjang S1 di IAIN Sunan Kalijaga, Fakultas Tarbiyah, Jurusan/Prodi Pendidikan Bahasa Arab pada 1998, Pendidikan jenjang S2 di IAIN Sunan Kalijaga, Juruan/Prodi Pendidikan Islam pada 2003, dan pendidikan jenjang S3 di UIN Sunan Kalijaga, Jurusan/Prodi Studi Islam pada 2009. Di samping itu, juga pernah mengikuti berbagai pelatihan profesional di tingkat daerah maupun nasional dan aktif dalam berbagai penelitian.

Karya tulis yang pernah ditulis adalah:

A. Buku/Bab/Jurnal

1. Pendidikan Nilai Sistem Boarding School di SMP IT Abu Bakar Yogyakarta (UNY Press, 2010)
2. Pendidikan Islam Alternatif (UNY Press, 2009)
3. Pendidikan Karakter Nondikotomik (Pustaka Pelajar, 2013)
4. Desain Pengembangan Berpikir Integratif Interkonektif Pendekatan Dialektik (Pustaka Pelajar, 2015)
5. *Durus fi al-Nahwi Juz I* (Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, 2009)
6. *Durus fi al-Nahwi Juz II* (Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, 2010)
7. *Durus fi al-Sharf Juz I* (Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, 2011)
8. *Durus fi al-Sharf Juz II* (Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, 2012)

B. Artikel dan Penelitian

a. Artikel

Judul Artikel	Tahun
Pendidikan Islam dan Upaya Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)	1993
Kisah-kisah Edukatif dalam Al Qur'an sebagai Metode Pendidikan Islam	1994
Pendidikan Islam dan Pengentasan Kemiskinan	1994
Sejarah Pemikiran Teologis Abu Al Hasan Al Asy'ari	1995
Materi Pendidikan dan Latihan Da'i Mubaligh	1998
Pembinaan Kegiatan Masjid: Pendidikan dan Dakwah	2000
Strategi dan Pengembangan Potensi Desa Binaan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2001
Pendidikan Islam dalam Pemikiran Imam Abu Hanifah	2003
Pembinaan Kegiatan Pendidikan dan Dakwah serta Administrasi Masjid	2003
Pendidikan Nilai Moral dalam Perspektif Global	2005
Peran Lembaga Dakawah dalam Membentuk Mayarakat Muslim Inklusif di DIY	2012
Dakwah Aktual, Faktual, dan Kultural	2012
Nondichotomik Islamic Education Paradigm (Philosophy of Science Perspective) "Makalah" Proceedings Workshop on Quality of Education 2012, 1 March 2012 University of Malaya Malaysia	2012
Ijtihad Jama'I sebagai "Solusi" Permasalahan Sosial, "Makalah" Jurnal Asy-Syir'ah, Vol. 43. No. II.	2009

b. Penelitian

Judul	Tahun Selesai
Kitab Matnut Tashrif untuk Pengajaran Sharaf Tingkat Pemula (Skripsi)	1989
Efektivitas Pengajaran Bahasa Arab dalam Menunjang Prestasi Belajar Qur'an-Hadits di MTs Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta	1996
Fungsi Tukon di Kalangan Masyarakat Dusun Nayan, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta	1997
Pengembangan Pendidikan Agama Islam dalam Perspektif Pendidikan Nasional	1998
Aktivitas Takmir Masjid Al-Mujahidin dan Al-Wakaf dalam Meningkatkan Fungsi Masjid di Desa Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta	1999
Pengembangan Metodologi Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Dasar	1999
Sistem Pendidikan Islam dalam Pemikiran Abu Hanifah	2000
Strategi Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Umum di Kotamadya Yogyakarta: Sebuah Kajian Pembelajaran Afektif	2001

Penulis merupakan Dosen Tetap di Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dari tahun 1991 hingga sekarang, Dosen Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga sejak tahun 2009 hingga sekarang. Penulis tinggal di Onggomertan RT 06 RW 26 Nayan Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta, dan dapat dihubungi melalui;

HP: 081804323971

atau e-mail: mak_sudin@yahoo.com.

REKTOR BESERTA KELUARGA BESAR
UIN SUNAN KALIJAGA
MENGUCAPKAN
SELAMAT DAN SUKSES
ATAS DIRAIHNYA GELAR
GURU BESAR DALAM BIDANG ILMU PENDIDIKAN AKHLAK
Prof. Dr. H. Maksudin, M. Ag
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
Prof. Dr. Phil. H. Al Makin, S.Ag., M.A
Rektor UIN Sunan Kalijaga
uinsk
uin-suka.ac.id
UIN Sunan Kalijaga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUNAN KALIJOGO

YOGYAKARTA – INDONESIA

Upaya-upaya untuk mengatasi beberapa problem pendidikan agama Islam dalam jenjang pendidikan formal telah banyak dilakukan baik oleh pemerintah c.q. kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Nasional, melalui kajian/penelitian, seminar, FGD, workshop, pelatihan-pelatihan, pembenahan, penyempurnaan kurikulum maupun upaya yang lain. Di samping itu, para ahli pendidikan, para pemerhati pendidikan, serta para praktisi pendidikan agama Islam juga telah banyak menyumbangkan pemikiran guna meminimalisir permasalahan yang dialami dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Banyak buku yang membahas pendidikan agama Islam dengan judul "Metodologi Pendidikan Agama Islam", namun buku-buku tersebut masih dijumpai beberapa kekurangan dan kelemahan, terutama bila dikaitkan dengan perubahan dan penyempurnaan pendidikan agama Islam yang diberlakukan saat ini yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), dan Kurikulum 2013. Secara historis perjalanan kurikulum sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah banyak mengalami perubahan dan penyempurnaan, yaitu kurikulum tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan sekarang kurikulum 2013.

Buku yang ada dihadapan pembaca, menurut hemat penulis merupakan salah satu solusi alternatif dan *sharing* yang dapat dipergunakan untuk mengatasi permasalahan pembelajaran pendidikan agama Islam dengan judul *"Pengembangan Metodologi Pendidikan Agama Islam Pendekatan Dialektik"*. Buku ini dimaksudkan dapat dipergunakan untuk pendidikan agama Islam semua jenjang pendidikan sekolah/madrasah dari SD/MI/SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK/MAK. Oleh karena itu, buku ini diperuntukkan kepada para guru/pendidik, para mahasiswa, pemerhati pendidikan, dan pengambil kebijakan pendidikan agama, para peneliti, serta praktisi pendidikan.

9 786022 294917

PUSTAKA PELAJAR
Penerbit Pustaka Pelajar
Celeban Timur UH III/548 Yogyakarta 55167
Telp. (0274) 381542, Faks. (0274) 383083
e-mail:pustakapelajar@yahoo.com
website:pustakapelajar.co.id